



ANCARA
LOGISTICS
INDONESIA



PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095
email: corsec@ancaralogistics.com

www.ancaralogistics.co.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK TAHUN 2024

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	31 Januari 2024
• Masa Penawaran Umum	:	1 – 5 Februari 2024
• Tanggal Penjatahan	:	5 Februari 2024
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	6 Februari 2024
• Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	7 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).



ANCARA
LOGISTICS
INDONESIA

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pengangkutan Laut dan *Transshipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095

Kantor Cabang

Grand Tamansari, Cluster Ruko E2/9
Jl. H. A. M. Rifaddin, Perumahan Loa Janan IIR,
Samarinda, Kalimantan Timur, 75131, Indonesia

website: www.ancaralogistics.co.id

email: corsec@ancaralogistics.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024, Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia



PT Samuel Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KEADAAN DAN PERUBAHAN INDUSTRI BATU BARA NASIONAL, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 0207/ALI-LGL/XI/23 tanggal 8 November 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM dan UUPPSK.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. S-00096/BEI.PP1/01-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	64
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	64
1. Riwayat Singkat Perseroan	64
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	67
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	70
4. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	73
5. Struktur Organisasi Perseroan	80
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	80
7. Sumber Daya Manusia	91
8. Skema Kepemilikan Perseroan	95
9. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak	95
10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak	96
11. Asuransi	100
12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	102
13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	130
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	148
15. Hak atas Kekayaan Intelektual, Waralaba, dan Konsesi	148
16. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak	148
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	149
1. Umum	149
2. Kegiatan Usaha	150
3. Keunggulan Kompetitif	159
4. Pengendalian Mutu	161
5. Pendapatan dan Pemasaran	161
6. Pemasok dan Pengadaan	162
7. Strategi Usaha	162
8. Persaingan Usaha	163
9. Prospek Usaha	164
10. Riset dan Pengembangan	167
11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak	167
12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i> ("CSR"))	168
13. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus	170
14. Pesanan yang Sedang Menumpuk dan Perkembangan dari Pesanan Tersebut dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir	170

IX.	EKUITAS	171
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	173
XI.	PERPAJAKAN	174
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	176
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	178
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	180
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	190
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	198
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	199
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	225

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUPPSK, yaitu sebagai berikut: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Asas Cabotage	Berarti kegiatan angkutan dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BPJS	Berarti Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Bursa Efek (“BEI”)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (“DPS”)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPPSK yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau - 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
EUR	Berarti Euro, mata uang negara anggota Uni Eropa.
<i>Floating Transhipper Unit</i> (“FTU”)	Berarti unit kapal terapung yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

<i>Intermediate Stockpile ("ISP")</i>	Berarti lokasi di mana muatan pelanggan dipindahkan antara dua atau lebih moda transportasi yang berbeda yang berfungsi sebagai hub (<i>intermediary</i>) untuk penumpukkan dan pengelolaan muatan, sehingga memungkinkan terjadinya konsolidasi dan distribusi muatan pelanggan berjalan lebih efektif dan efisien.
<i>Life of Mine ("LoM")</i>	Berarti waktu yang dihitung dari jumlah cadangan dibagi dengan produksi tambang per tahun.
KBLI	Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan perubahan terbaru sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO, yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK (" UU OJK ") yang fungsi, tugas, dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum Perdana	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 3/2021	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 9/2018	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 yang berlaku tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 16 April 2016 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2015	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 22 Desember 2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-130/SHM/KSEI/1023 tanggal 29 November 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 18 tanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 60 tanggal 30 November 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 13 tanggal 8 Januari 2024, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 60 tanggal 25 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 17 tanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 59 tanggal 30 November 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 12 tanggal 8 Januari 2023, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 59 tanggal 25 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perpres No. 10/2021	Berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 No. 61) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 No. 128).
Perseroan	Berarti PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu MCT.
<i>Per Weather Working Day</i> (PWWD)	Berarti Hari Kerja dimana dimungkinkan untuk memuat atau membongkar muatan tanpa gangguan cuaca.
PP No. 5/2021	Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Usaha Berbasis Risiko.
Program <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program ESA	Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Program Alokasi Saham Karyawan (<i>Employee Stock Allocation</i> atau “ESA”) No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.

Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEDJPL No. 25/2023	Berarti Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 25 Tahun 2023 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Kapal dan Perizinan Berusaha Angkutan Laut.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SGD	Berarti Dolar Singapura.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti Sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") yang merupakan sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 5 Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
<i>Transshipment</i>	Berarti proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dapat dilakukan di tengah laut.
Ton Metrik (MT)	Berarti satuan massa yang sama dengan 1.000 kilogram.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPPSK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
UUPPSK	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

GAN	Berarti PT Graha Adika Niaga
SC	Berarti Solomed Capital Pte. Ltd.
BLI	Berarti PT Borneo Logistik Indonesia

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

MCT	Berarti PT Mahakam Coal Terminal

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Ancara Logistics Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 437 tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037867.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. AHU-0127898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 1 November 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0136566 tanggal 2 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219764.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 November 2023 ("**Akta Perseroan No. 5/2023**"), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

1. menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 3.165.160.000 saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal per saham sebesar Rp5, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh serta seluruh saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana pada BEI termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka IPO sesuai dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, termasuk menandatangani setiap dokumen penawaran, perjanjian, dan/atau dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana. Para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.
2. memberikan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 29.860.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu) saham dari Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku.
3. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000.

Perseroan didirikan pada bulan Juli tahun 2019. Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* untuk tambang batu bara. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Perseroan mengakuisisi saham mayoritas MCT sebesar 70% pada bulan September 2019. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai ISP yang beroperasi di Desa Embalut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. ISP Perusahaan Anak berfungsi sebagai titik perpindahan, pengelolaan, dan penumpukan muatan dari tongkang sungai ke *stockpile* serta dari *stockpile* ke tongkang laut.

Perseroan berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132).

Kegiatan usaha penunjang

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131); dan
- b. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229).

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah jasa pengangkutan laut dan *transshipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak.

PROSPEK USAHA

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile*, dan dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Letak geografis Indonesia juga sangat strategis dimana Indonesia diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan keadaan geografis yang strategis, transportasi laut khususnya kapal sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam mengakomodasi keberlangsungan kegiatan ekonomi di Indonesia. Transportasi laut memiliki berbagai peran penting dalam aspek ekonomi dan sosial. Kapal-kapal memfasilitasi perdagangan dan perjalanan, serta dapat berkontribusi pada pertahanan dan keamanan, mendukung penelitian dan inovasi, dan juga memengaruhi berbagai sektor industri.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

3. Harga Penawaran : Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.165.160.000	15.825.800.000	20,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.157.158.000	15.785.790.000	19,95
Peserta ESA	-	-	-	8.002.000	40.010.000	0,05
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.
2. Sekitar 21,44% (dua puluh satu koma empat empat persen) akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai.
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812
Total Liabilitas	1.240.851.005	1.056.976.077	1.020.148.427	970.802.343
Total Ekuitas	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923
Laba (rugi) bruto	294.865.041	145.915.815	301.216.389	302.954.115	(5.253.481)
Laba (rugi) neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)
Laba (rugi) per saham dasar/ dilusian diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)

*tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	63.293.921	8.307.139	73.701.291	64.555.107	(32.249.634)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(210.008.808)	34.516.608	2.583.945	(17.468.622)	(670.095.742)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	116.190.149	(35.664.950)	(53.953.706)	(34.034.607)	702.801.444
Kenaikan (penurunan) neto kas	(30.524.738)	7.158.797	22.331.530	13.051.878	456.068
Kas awal tahun	36.428.128	14.096.598	14.096.598	1.044.720	588.652
Kas akhir tahun	5.903.390	21.255.395	36.428.128	14.096.598	1.044.720

*tidak diaudit

RASIO-RASIO

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)								
Pendapatan	73,96	6,76	650,87	*				
Beban Pokok Pendapatan	56,52	13,59	265,51	*				
Laba (Rugi) Bruto	102,08	(0,57)	(5.866,73)	*				
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan	154,50	(22,98)	(427,36)	*				
Total Aset	32,07	15,48	24,32	*				
Total Liabilitas	17,40	3,61	5,08	*				
Total Ekuitas	76,69	77,17	2.480,93	*				
Rasio-Rasio Keuangan (%)								
Total Liabilitas / Total Ekuitas	201,99	304,01	519,85	12.767,89				
Total Liabilitas / Total Aset	66,89	75,25	83,87	99,22				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	84,64	22,64	53,33	18,34				
Interest Coverage Ratio	2,25	1,47	1,85	(0,13)				
Debt Service Coverage Ratio	1,01	0,24	0,66	(0,13)				
Rasio-Rasio Usaha (%)								
Laba (Rugi) Bruto / Pendapatan	44,48	44,95	48,26	(6,28)				
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan / Pendapatan	26,70	21,97	30,45	(69,84)				
Laba (Rugi) Neto / Pendapatan	25,06	22,66	30,05	(64,24)				
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	15,89	21,44	24,91	(0,54)				
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan / Total Aset	9,54	10,48	15,71	(5,97)				
Laba (Rugi) Neto / Total Aset	8,95	10,81	15,51	(5,49)				
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	48,00	86,64	154,38	(69,09)				
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	28,81	42,34	97,39	(767,86)				
Laba (Rugi) Neto / Total Ekuitas	27,04	43,67	96,13	(706,31)				

Keterangan:

*tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2019

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- Risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama
- Risiko persaingan usaha
- Risiko fluktuasi dan perubahan Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)
- Risiko kondisi cuaca dan bencana alam
- Risiko volatilitas harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya
- Risiko kecelakaan maritim
- Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal

- Risiko akses pendanaan melalui kreditur karena adanya pembatasan pemberian pinjaman untuk industri yang mendukung industri pertambangan berbahan baku fosil
- Risiko investasi atau aksi korporasi
- Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko kelangkaan sumber daya manusia

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko fluktuasi tingkat suku bunga
- Risiko fluktuasi nilai mata uang asing
- Risiko kebijakan pemerintah serta perubahan-perubahannya
- Risiko tuntutan hukum dari mitra kerja dan masyarakat sekitar daerah operasional Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko perubahan kondisi sosial, politik, dan keamanan di Indonesia yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan *
1	PT Mahakam Coal Terminal	Jasa bongkar muat batu bara	70,00	2007	2019	2020	23,72%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan

mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 80% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024 serta penyisihan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan kebutuhan modal kerja (*Operational Expenditure*). Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024, Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pengangkutan Laut dan *Transshipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Bakrie Tower Lantai 15,
Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095

Kantor Cabang

Grand Tamansari, Cluster Ruko E2/9
Jl. H. A. M. Rifaddin, Perumahan Loa Janan Ilir,
Samarinda, Kalimantan Timur, 75131, Indonesia

website: www.ancaralogistics.co.id

email: corsec@ancaralogistics.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KEADAAN DAN PERUBAHAN INDUSTRI BATU BARA NASIONAL, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.165.160.000	15.825.800.000	20,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

Program ESA

Berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 dan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024, para pemegang saham telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA dialokasikan sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Tujuan Program ESA adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Memaksimalkan kesuksesan jangka panjang Perseroan;
- Meningkatkan nilai Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai;
- Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan dan meningkatkan nilai perusahaan (*shareholder value*);

- d. Menjadi salah satu imbalan kepada karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan;
- e. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan dan anak perusahaan Perseroan; dan
- f. Meningkatkan kerjasama tim dan iklim kerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjatahan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 0,94% (nol koma sembilan empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Syarat dan Ketentuan Program ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam Program ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut ("**Partisipan Program ESA**"):
 - a. Karyawan peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan;
 - b. Karyawan Perseroan dalam status aktif bekerja selama 2 (dua) bulan penuh saat dilakukannya Penawaran Umum; atau
 - c. Karyawan Perseroan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.
2. Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti yang mana masing-masing Partisipan Program ESA akan menerima sejumlah saham tertentu dengan periode *lock-up* meliputi (i) periode *lock-up* 1 (satu) tahun dan (ii) periode *lock-up* 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Perseroan ("**Periode Lock-Up**").
3. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan Program ESA adalah besaran gaji dan/atau peringkat jabatan dan/atau masa kerja karyawan dan/atau kinerja dari karyawan.
4. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali ke masyarakat.
5. Jumlah Partisipan Program ESA adalah 27 (dua puluh tujuh) karyawan sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Perseroan.
6. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan

1. Bentuk saham untuk Program ESA ini adalah seluruhnya berupa saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**"). Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh karyawan Partisipan Program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing Partisipan Program ESA.
2. Partisipan Program ESA tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh Partisipan Program ESA. Khusus untuk pajak penghasilan dari pembelian saham Program ESA pertama kali, menjadi beban Perseroan. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai harga penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
3. Setelah Periode *Lock-Up* berakhir dan Partisipan Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek, maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Partisipan Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan
 - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Partisipan Program ESA dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
4. Partisipan Program ESA yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:
 - a. Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham Program ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
 - b. Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Program ESA melalui Divisi Sumber Daya Manusia masing-masing unit kerja.

5. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah Divisi Sumber Daya Manusia.
6. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada periode penawaran umum.
7. Apabila Partisipan Program ESA meninggal dunia setelah yang bersangkutan menerima saham Program ESA, maka:
 - a. Ahli waris yang sah tetap mempunyai hak saham yang telah diterima; dan
 - b. Ahli waris yang sah dapat melaksanakan opsi dimaksud pada butir 3 di atas setelah Periode *Lock-Up* berakhir.
8. Apabila Partisipan Program ESA mengalami cacat tetap/total sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dimana yang bersangkutan telah menerima saham pada Program ESA, maka saham tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah Periode *Lock-Up* berakhir.
9. Apabila Partisipan Program ESA memasuki masa pensiun setelah yang bersangkutan menerima saham dari Program ESA, maka saham tersebut tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah Periode *Lock-Up* berakhir.
10. Apabila Partisipan Program ESA mengundurkan diri atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ("**PHK**") karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA sebelum *lock-up period* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA akan menjadi hangus.
11. Apabila Partisipan Program ESA mengundurkan diri atau mengalami PHK karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA setelah Periode *Lock-Up* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA tetap berlaku.
12. Apabila Partisipan Program ESA mendapatkan sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai Peraturan Perseroan dan/atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA namun sebelum Periode *Lock-Up* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA menjadi hangus.
13. Apabila Partisipan Program ESA mendapatkan sanksi atau terlibat suatu perkara karena alasan apapun, sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai peraturan Perseroan dan/atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA dan setelah Periode *Lock-Up* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA masih tetap berlaku.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

1. Partisipan Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan yaitu persetujuan penunjukan dan pembuatan rekening efek Partisipan Program ESA.
2. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Partisipan Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
3. Bagi Partisipan Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh Saham Penghargaan dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, untuk menerima pembayaran pemesanan Saham Penghargaan melalui rekening bank Partisipan Program ESA dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing Partisipan Program ESA maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.
4. Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Partisipan Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Partisipan Program ESA karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan.
5. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan besaran gaji dan/atau peringkat jabatan dan/atau masa kerja karyawan dan/atau kinerja dari karyawan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.157.158.000	15.785.790.000	19,95
Peserta ESA	-	-	-	8.002.000	40.010.000	0,05
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.660.640.000 (dua belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu) saham atau mewakili sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 15.825.800.000 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. S-00096/BEI.PP1/01-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan tidak memiliki saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Sehubungan dengan Penawaran Umum, tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tertanggal 29 Agustus 2023, dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051500.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169500.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta Perseroan No. 32/2023**"), terdapat penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp8.720.000.000 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) yang berasal dari hak tagih sejumlah Rp100.499.744.000 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang dimiliki oleh BLI kepada Perseroan, yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023, Perseroan menerbitkan sejumlah 716.640.000 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu) saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5 (lima Rupiah), dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000 yang diambil bagian oleh (i) Nalinkant Amratlal Rathod, sejumlah 333.347.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu) saham dan (ii) Aninditha Anestya Bakrie, sejumlah 383.293.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) saham.

Atas transaksi tersebut, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023 dari BLI, Nalinkant Amratlal Rathod dan Aninditha Anestya Bakrie, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, BLI, Nalinkant Amratlal Rathod, dan Aninditha Anestya Bakrie tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 25/2017.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023, Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod selaku pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit USD62.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal tanggal 14 Juni 2023 (" Perjanjian Fasilitas OCP ").
Para Pihak	1. MCT sebagai penerima pinjaman. 2. Perusahaan-perusahaan sebagai berikut, Ancara Resources Limited, Perseroan, Rwood Resources DMCC secara bersama-sama sebagai para penjamin awal. 3. Lembaga keuangan sebagai berikut, OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited, OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal. 4. The Bank Of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas. 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri. 6. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri. 7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank dimana rekening bank dalam negeri dibuka. 8. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai bank dimana rekening bank luar negeri dibuka.
Jumlah Fasilitas	USD62.000.000 (" Fasilitas ").
Jumlah Pokok Utang	USD61.000.000 pada tanggal 31 Oktober 2023.
Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan	Sebanyak-banyaknya hasil konversi dari Rupiah ke USD atas jumlah fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada MCT berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024.
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian atau Pelunasan Pokok Utang	Paling sedikit USD0.
Tingkat Bunga	20,00% per tahun.
Jatuh Tempo	19 November 2025.

Rincian	Keterangan
Tujuan Penggunaan Pinjaman	- Pembayaran kembali atau pembayaran di muka (sebagaimana berlaku) fasilitas MCT yang ada hingga jumlah maksimum USD49.500.000 berdasarkan Perjanjian Kredit USD49.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal antara: (i) MCT sebagai penerima pinjaman (ii) Ancara Resources Limited, Perseroan, Rwood Resources DMCC, secara bersama-sama sebagai penjamin awal (iii) OL Master (Singapore Fund 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal ("Pemberi Pinjaman") (iv) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas (v) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri (vi) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri (vii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai rekening bank dalam negeri (viii) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai rekening bank luar negeri tanggal 18 Mei 2020 ("Perjanjian Fasilitas OCP Lama"). - Memfasilitasi pelunasan penuh pinjaman Perseroan kepada Vikasa Global Fund PCC ("Vikasa") hingga jumlah maksimum USD12.200.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan USD11.500.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka antara Perseroan sebagai penerima pinjaman, Rwood Resources DMCC sebagai penjamin dan Vikasa Global Fund PCC sebagai pemberi pinjaman 11 April 2023 ("Perjanjian Vikasa"). Dana yang diterima MCT berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP, diberikan MCT kepada Perseroan melalui <i>Loan Agreement</i> tanggal 14 Juni 2023 antara MCT sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman ("Perjanjian Pinjaman ALI-MCT"), untuk kemudian Perseroan melakukan pelunasan atas Perjanjian Vikasa. Perjanjian Pinjaman ALI-MCT telah dilunasi oleh Perseroan kepada MCT pada tanggal 19 Juni 2023. - Pembayaran biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas.
Jaminan yang Dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Jaminan dalam Negeri	- Hipotek atas 46 kapal milik Perseroan; - Gadai atas 70% saham di MCT oleh Perseroan; - Gadai atas 10% saham di MCT oleh PT Guruh Putra Bersama; - Gadai atas 10% saham di MCT oleh PT Ade Putra Tanrajeng; - Gadai atas seluruh kepemilikan saham Perseroan oleh GAN; - Gadai atas seluruh kepemilikan saham Perseroan oleh SC; - Gadai atas 16% saham di PT Leap Coal Indonesia oleh Leap Forward Resources Limited; - Gadai atas 16% saham di PT Bara Milenia Energi oleh PT Leap Coal Indonesia; - Gadai atas 16% saham di PT Kutai Bara Nusantara oleh PT Bara Milenia Energi; - Gadai atas 16% saham di PT Tribara Daya Global oleh PT Kutai Bara Nusantara; - Gadai atas 16% saham di PT Guruh Putra Bersama oleh PT Kutai Bara Nusantara; - Gadai atas 16% saham di PT Ade Putra Tanrajeng oleh PT Tribara Daya Global; - Gadai rekening oleh Perseroan;

Rincian	Keterangan
	14. Gadai rekening oleh MCT; 15. Fidusia atas hasil asuransi oleh Perseroan; 16. Fidusia atas pendapatan oleh Perseroan; 17. Fidusia atas peralatan berat dan infrastruktur jetty oleh MCT; dan 18. Fidusia atas pendapatan oleh MCT.
Status Benda Jaminan Setelah Pembayaran Sebagian atau Pelunasan Pokok Utang	Atas pembayaran sebagian pokok utang dari Perjanjian Fasilitas OCP, status benda jaminan untuk Perjanjian Fasilitas OCP, masih diikat sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP, namun dalam hal akan dilunasi seluruh pokok utang dan sudah tidak terdapat kewajiban terutang dari MCT atas Perjanjian Fasilitas OCP, maka status jaminan dari seluruh benda yang dijaminkan untuk Perjanjian Fasilitas OCP akan dilepaskan, sehingga benda jaminan tersebut tidak lagi dibebani sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP.
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Lebih Awal Sukarela	MCT memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tidak kurang dari 3 hari kerja kepada The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura selaku agen fasilitas.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.

Dana hasil Penawaran Umum untuk angka 1 akan disalurkan ke MCT dalam bentuk pinjaman dalam mata uang Rupiah, kemudian akan dikonversi oleh MCT menjadi mata uang USD sesuai kurs yang berlaku pada saat pembayaran utang.

Berikut adalah perincian terkait perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan MCT:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024.
Para Pihak	1. Perseroan selaku pemberi pinjaman; 2. MCT selaku penerima pinjaman.
Jumlah Fasilitas*	Sebesar Rp635.370.000.000 (" Pinjaman MCT ").
Tingkat Bunga	10,5% per tahun.
Jatuh Tempo	Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman MCT.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP.
Sifat Hubungan Afiliasi	MCT merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MCT kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain untuk pembelian tongkang laut.

2. Sekitar 21,44% (dua puluh satu koma empat empat persen) akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 46,60% (empat puluh enam koma enam nol persen) akan digunakan untuk pelunasan seluruh angsuran atas pembelian 8 buah tongkang sungai dan biaya pengiriman atau penarikan (*towing*) tongkang sungai tersebut.

Berikut merupakan rincian perjanjian pembelian 8 buah tongkang sungai tersebut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal untuk konstruksi 8 Unit 180'x60'x12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 31 Agustus 2023.
Pihak Penjual	PT Bandar Abadi.
Jumlah	8 tongkang sungai.
Nilai Perjanjian	USD6.584.000
Sisa Nilai Perjanjian yang Belum Dibayarkan	USD4.938.000
Waktu Penerimaan Tongkang oleh Perseroan	<i>Batch 1</i>: 4 buah tongkang sungai akan diterima 6 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama. <i>Batch 2</i>: 4 buah tongkang sungai akan diterima 8 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama. Angsuran pertama telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2023 sebesar USD 1.646.000. Sumber dana angsuran pertama yang telah dibayarkan Perseroan pada tanggal 1 November 2023 berasal dari dana kas internal Perseroan. Pembayaran untuk angsuran selanjutnya dilakukan untuk tahapan pencapaian sebagai berikut: 1. Angsuran Kedua: pada tahap peletakan lunas kapal; 2. Angsuran Ketiga: pada tahap ereksi sekat kapal; dan 3. Angsuran Keempat: pada tahap pengiriman di galangan kapal, yang akan dilunasi oleh Perseroan secara mengangsur sesuai dengan tahapan pencapaian di atas, dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum.
Spesifikasi	Panjang: 180 kaki Dimensi (P x L x D): 54,9 meter x 18,29 meter x 3,66 meter <i>Gross Tonnage</i> (GT): 918 Ton Kapasitas: 2.363 MT
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.

* Asumsi Konversi Nilai Kurs USD terhadap Rupiah setara dengan Rp15.767 berdasarkan kurs JISDOR pada tanggal 25 Januari 2024. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pelunasan angsuran.

Dalam hal terjadi penguatan nilai kurs Rupiah terhadap USD yang menyebabkan adanya kelebihan atas dana yang Perseroan miliki untuk pelunasan angsuran, maka sisa penggunaan dana akan dialokasikan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) Perseroan.

Adapun, dalam hal terjadi pelemahan nilai kurs Rupiah terhadap USD yang menyebabkan adanya kekurangan atas dana yang Perseroan miliki untuk pelunasan angsuran, maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut, antara lain melalui kas internal Perseroan.

- b. Sekitar 53,40% (lima puluh tiga koma empat nol persen) akan digunakan untuk pembayaran atas seluruh nilai pembelian 7 buah tongkang sungai yang akan dibeli dari pihak ketiga dan biaya pengiriman atau penarikan (*towing*) tongkang sungai tersebut, yang ditargetkan akan diterima oleh Perseroan pada semester 2 tahun 2024 dengan spesifikasi sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Spesifikasi	Panjang: 180 kaki Dimensi (P x L x D): 54,9 meter x 18,29 meter x 3,66 meter <i>Gross Tonnage</i> (GT): 918 Ton Kapasitas: 2.363 MT

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam tahap negosiasi dengan beberapa calon penjual pihak ketiga dan belum menandatangani kontrak dengan penjual.

Apabila dana hasil Penawaran Umum untuk angka 2 huruf b tidak mencukupi nilai pembayaran atas pembelian 7 buah tongkang sungai tersebut, maka Perseroan akan menggunakan porsi dana hasil Penawaran Umum pada angka 3 untuk menutupi kekurangan tersebut.

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana di atas, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Rencana penggunaan dana pada angka 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020. Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 1 juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum.

Rencana penggunaan dana pada angka 2 huruf a bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 2 huruf a merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum.

Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 2 huruf b dan angka 3 di atas merupakan suatu transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum (sebagaimana berlaku).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,60404% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,9970%, dengan rincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,75697%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,12000%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,12000%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,30918% yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,16697%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,12609%
 - c. Notaris sebesar 0,01612%
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,01547% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 0,28242% yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan prospektus, dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792) dengan opini wajar tanpa modifikasi, liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 seluruhnya berjumlah Rp1.240.851.005 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	44.365.021
Pihak berelasi	30.687.832
Beban akrual	4.779.011
Utang pajak	48.664.349
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	2.000.636
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	174.107.263
Liabilitas sewa	7.740.804
Total Liabilitas Jangka Pendek	312.344.916
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	82.429.828
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	811.111.989
Liabilitas sewa	33.067.938
Liabilitas imbalan pascakerja	1.896.334
Total Liabilitas Jangka Panjang	928.506.089
TOTAL LIABILITAS	1.240.851.005

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Utang usaha Perseroan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp75.052.853 ribu. Utang usaha Perseroan terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing adalah sebesar Rp44.365.021 ribu dan Rp30.687.832 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Citra Belayan	9.945.487
Allen & Overy LLP	7.944.075
PT Bandar Abadi	6.483.393
Mishcon de Reya LLP	5.206.018
PT Seratah Borneo Abadi	3.106.655
PT Mitra Seratah Abadi	1.991.359
CV Sevia	1.810.915
PT Karya Bersama Abadi jaya	1.256.000
The Bank of New York Mellon Corporation	1.203.881
PT Buana Laksa Abadi	987.287
PT Swakarya Kencana Services	388.146
Gimbal Pte Ltd	120.022
PT Pelayaran Segara Niaga Utama	8.478
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.913.305
Subtotal	44.365.021

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Borneo Logistik Indonesia	20.101.104
PT Borneo Petrol Servis	10.253.061
PT Cakrawala Langit Sejahtera	333.667
Subtotal	30.687.832
Total	75.052.853

Seluruh utang usaha tidak dikenakan bunga.

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Belum jatuh tempo	46.173.229
1 bulan – 3 bulan	12.207.163
3 bulan – 6 bulan	1.404.801
6 bulan – 1 tahun	118.858
Lebih dari 1 tahun	15.148.802
Total	75.052.853

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Rupiah Indonesia	59.900.839
Dolar AS	15.152.014
Total	75.052.853

Pada tanggal 31 Agustus 2023, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atas utang usaha.

Beban akrual

Beban akrual Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp4.779.011 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Operasional	1.638.232
Jasa bongkar muat	1.335.139
Biaya pengiriman	1.084.399
Jasa profesional	721.241
Total	4.779.011

Utang pajak

Utang pajak Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp48.664.349 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	119.275
Pasal 23	79.569
Pasal 15	1.469.940
Pasal 4 (2)	816
Pasal 29	2.558.818
Pajak Pertambahan Nilai	1.000

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Perusahaan Anak	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	109.506
Pasal 23	80.023
Pasal 26	40.430.862
Pasal 4(2)	35.119
Pajak Pertambahan Nilai	3.779.421
Total	48.664.349

Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.000.636 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
Kas Negara	1.926.057
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	74.579
Total	2.000.636

Utang lain-lain merupakan utang atas pinjaman, sewa kantor, Surat Tagihan Pajak (STP) dan uang muka dari pelanggan.

Kas negara adalah utang pajak atas STP yang diterima oleh Perseroan.

Seluruh utang lain-lain tidak dikenakan bunga.

Tidak terdapat utang lain-lain dari lembaga keuangan konvensional.

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp174.107.263 ribu.

Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp7.740.804 ribu.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi

Utang pihak berelasi Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp82.429.828 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Ancara Transshipment Services	37.201.534
E-Harbour Ventures Limited	29.496.989
PT Graha Adika Niaga	9.262.300
Solomed Capital Pte. Ltd.	6.469.005
Total	82.429.828

PT Ancara Transshipment Services

Berdasarkan Akta Novasi tanggal 7 April 2023, terkait Nota Perjanjian (“MOA”) dan Adendum No. 1 atas MOA terkait Kapal “PLB 1”, Perseroan menyetujui untuk mengambil alih hak dan kewajiban dari PT Ancara Transshipment Services (“ATS”) terkait kapal PLB 1 yang dibeli dari PT Pasifik Lestari Bersaudara. Atas transaksi tersebut Perseroan memiliki utang kepada ATS sebesar Rp37,20 miliar.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada ATS, sebesar Rp37,20 miliar.

E-Harbour Ventures Limited

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman (“Perjanjian”) No. 011/ALI-LEG/X/19 tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana telah diubah berdasarkan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/ALI-LGL/1/2020 tanggal 16 Januari 2020, Perseroan memperoleh pinjaman dari E-Harbour Ventures Limited (“EVL”) sebagai sumber pembiayaan keperluan umum perusahaan dengan jumlah sebesar USD1,5 juta dengan tingkat bunga tahunan sebesar 7,5% (secara kolektif disebut sebagai “Pinjaman”), dan tenor pinjaman selama enam puluh (60) bulan (“Periode Pinjaman”) terhitung sejak tanggal Perjanjian. Pembayaran kembali Pinjaman harus dilakukan secara penuh kepada EVL pada akhir Periode Pinjaman atau dengan cara mencicil dibayar kepada pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh EVL. Periode Pinjaman dapat diperpanjang atau diperbarui.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada EVL, sebesar Rp29,50 miliar.

PT Graha Adika Niaga dan Solomed Capital Pte. Ltd.

Utang kepada PT Graha Adika Niaga (GAN) berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Perseroan dan GAN pada tanggal 12 Desember 2020, utang tersebut dikhususkan untuk modal kerja Perseroan sebesar Rp9,26 miliar. Berdasarkan perjanjian ini, pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Jumlah pokok pinjaman akan dibayarkan secara penuh pada tahun ke lima (5) sejak tanggal efektif perjanjian.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada GAN sebesar Rp9,26 miliar.

Utang kepada Solomed Capital Pte. Ltd. (SC) berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Solomed pada tanggal 28 Desember 2020, utang tersebut dikhususkan untuk modal kerja Perseroan sebesar SGD574,25 ribu. Berdasarkan perjanjian ini, pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Jumlah pokok pinjaman akan dibayarkan secara penuh pada tahun ke lima (5) sejak tanggal efektif perjanjian.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada SC, sebesar Rp6,47 miliar.

Pinjaman jangka panjang

Pinjaman jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp811.111.989 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
OCP Asia (Singapore) Pte. Limited	935.302.589
Indonesia Eximbank	30.623.549
Liebherr - Export AG	17.778.052
PT Multicrane Perkasa	1.515.062
Total	985.219.252
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(174.107.263)
Bagian Jangka Panjang	811.111.989

Rincian pinjaman jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Dolar AS	935.302.589
Rupiah Indonesia	30.623.549
Euro Eropa	19.293.114
Total	985.219.252

OCP Asia (Singapore) Pte. Limited

Pada tanggal 14 Juni 2023, MCT memiliki fasilitas kredit dari OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited sebesar USD30,38 juta dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebesar USD31,62 juta dengan total keseluruhan sebesar USD62,00 juta. Fasilitas ini dijamin dengan aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan, surat kuasa memasang hipotek atas kapal-kapal milik Perseroan, surat kuasa memasang hipotek atas *transhipper* milik Perseroan, gadai saham (Ancara Resources Limited, Perseroan, PT Leap Forward Resources Ltd, PT Leap Coal Indonesia, PT Bara Milenia Energi, PT Kutai Bara Nusantara, PT Tribara Daya Global, PT Guruh Putra Bersama, PT Ade Putra Tanrajeng), gadai rekening bank, jaminan fidusia atas piutang Perseroan dan tanah serta jaminan korporasi dari Ancara Resources Limited dan RWood Resources DMCC.

Klausul ikrar negatif dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap perubahan saham (penerbitan, pembelian kembali, pembayaran kembali, pembatalan, penukaran dan penerbitan hak suara), subordinasi atas saham, pembayaran dividen, hipotek atas kapal-kapal dan kepemilikan saham atas GAN and SC.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari OCP sebesar Rp935,30 miliar.

Indonesia Eximbank

Berdasarkan Akta Pembaharuan Utang (Novasi) No. 17 tanggal 9 Februari 2023 ("Akta Novasi 17/23"), diatur bahwa adanya pergantian debitur dari PT Palaran Jasa Utama sebagai Debitur Lama (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Novasi 17/23), menjadi Perseroan sebagai Debitur Baru (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Novasi 17/23). Akta Novasi 17/23 ini ditandatangani oleh Perseroan berkaitan dengan transaksi Perseroan dengan Hoenardy Boentario.

Sebagai kelanjutan dari Akta Novasi 17/23, Perseroan masuk dan menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Aplofend No. 18 tanggal 9 Februari 2023, yang mengatur perjanjian dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Aplofend tanpa pencairan dana sebesar Rp34,67 miliar yang berlaku selama enam puluh (60) bulan dengan tingkat bunga 7% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, dermaga dan alat berat serta jaminan perusahaan dan perseorangan dari PT Harapan Borneo International dan Honardy Boentario.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang dijaminkan kepada Indonesia Eximbank atau dibiayai oleh Indonesia Eximbank kepada pihak lain dan membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari Eximbank sebesar Rp30,62 miliar.

Liebherr - Export AG

Berdasarkan *Offer Letter* No. PR734-708173/20 tanggal 4 April 2020, No. LH60-748102/20 tanggal 4 April 2020, No. R920-806656/20 tanggal 20 November 2020 dan No. R930-806635/20 tanggal 20 November 2020, MCT, Perusahaan Anak, memiliki pinjaman untuk pembelian alat berat.

Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran per kuartal selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 4,5%.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari Liebherr - Export AG sebesar Rp17,78 miliar.

PT Multicrane Perkasa

Berdasarkan *Offer Letter* No. 047/MCP-KP/MKT/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, No. 048/MCP-KP/MKT/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan No. 051/MCP-KP/MKT/IV/2020 tanggal 4 April 2020, Perusahaan Anak, memiliki pinjaman untuk pembelian alat berat.

Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran per kuartal selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 4,5%.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari PT Multicrane Perkasa sebesar Rp1,52 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Liabilitas sewa jangka panjang

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa peralatan untuk digunakan di *site*. Perjanjian sewa memiliki periode tetap 2-3 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan yang disetujui oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tahun 2023, Perusahaan Anak menandatangani perjanjian sewa tanah dengan durasi 20 tahun.

Liabilitas sewa jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp33.067.938 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Kurang dari satu tahun	8.978.008
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	18.555.740
Lebih dari lima tahun	55.744.444
Subtotal	83.278.192
Dikurangi bagian bunga	(42.469.450)
Jumlah tercatat	40.808.742
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)
Bagian Jangka Panjang	33.067.938

Rekonsiliasi atas liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Total liabilitas sewa pada awal periode	11.049.186
Bunga liabilitas sewa	2.283.731
Pembayaran	(5.845.669)
Penambahan aset hak-guna	33.321.494
Subtotal	40.808.742
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)
Bagian Jangka Panjang	33.067.938

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas sewa kepada:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
Saidi	28.494.561
Hasipah	4.559.129
Subtotal	33.053.690
Pihak berelasi	
PT Cakrawala Langit Sejahtera	7.755.052
Total	40.808.742
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)
Bagian Jangka Panjang	33.067.938

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Bunga atas liabilitas sewa	2.283.731
Beban penyusutan aset hak-guna	4.596.702
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek dan bernilai rendah	236.472

Liabilitas imbalan pascakerja

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki program pensiun imbalan pasti yang tidak didanai mencakup seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Agustus 2023 dihitung oleh aktuaris independen KKA Indra Catarya Situmeang.

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Agustus 2023
Tingkat diskonto	6,70%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Tingkat kematian	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV Tahun 2019
Usia pensiun normal	55 tahun
Tingkat cacat	5% dari Tabel Mortalitas
Tingkat pengunduran dipercepat	7% (sampai dengan usia 40 tahun) dan menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Liabilitas imbalan kerja Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.896.334 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	1.896.334
Nilai wajar atas aset program	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.896.334

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	1.161.800
Beban yang diakui ke laba rugi:	
Biaya jasa lalu	253.800
Biaya jasa kini	459.874
Biaya bunga	29.308
Subtotal	742.982
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:	
Asumsi keuangan	-
Penyesuaian asumsi	(8.448)
Subtotal	(8.448)
Saldo akhir	1.896.334

Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi sejumlah risiko signifikan terkait program imbalan pasti, sebagai berikut:

- Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- Tingkat kenaikan gaji
Kewajiban imbalan pasti berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dimana semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Analisis sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Asumsi Keuangan	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(47.343)	55.516
Tingkat kenaikan gaji	1%	54.252	(47.236)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan kerja tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	506.412
1 sampai 2 tahun	120.297
2 sampai 5 tahun	-
Lebih dari 5 tahun	1.269.625
Total	1.896.334

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian Penjualan

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani sejumlah Perjanjian Penjualan dengan beberapa pelanggan untuk melaksanakan jasa tongkang batu bara, muatan apung dan bongkar muat.

Pelanggan	Tipe Aset	Tanggal Perjanjian	Akhir Periode Perjanjian
<u>Perseroan</u>			
PT Ade Putra Tanrajeng	Kapal tongkang 180 kaki	1 Juli 2020	Berakhirnya izin usaha pertambangan masing-masing Penyewa dan sampai dengan izin usaha masing-masing Penyewa diperbaharui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir
	Kapal tongkang 300 kaki	1 Agustus 2020	
	Kapal terapung	12 Juni 2023	
PT Guruh Putra Bersama	Kapal tongkang 180 kaki	1 Juli 2020	
	Kapal tongkang 300 kaki	1 Agustus 2020	
	Kapal terapung	12 Juni 2023	
<u>Perusahaan Anak</u>			
PT Ade Putra Tanrajeng	Bongkar muat	1 Mei 2020	
PT Guruh Putra Bersama	Bongkar muat	1 Mei 2020	

b. Perjanjian Pembelian Aset Tetap

Vikasa Global Fund PCC

Pada tanggal 11 April 2023, Perseroan memiliki perjanjian fasilitas dari Vikasa Global Fund PCC berupa fasilitas pinjaman sebesar USD11,5 juta. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa gadai saham sebesar 70% dari kepemilikan saham Perseroan di MCT, hipotek atas 16 kapal tunda dan 20 kapal tongkang, gadai rekening bank BRI, jaminan fidusia atas piutang Perseroan serta jaminan perusahaan dari Rwood Resources DMCC. Pada tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah melunasi kewajibannya.

c. Perjanjian Liabilitas Sewa

Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan perjanjian No. 027/MCT-SAIDI/LANDLEASE/II/2023, MCT, Perusahaan Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan Saidi (pihak yang menyewakan) atas tanah seluas 19.947 meter persegi terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan Surat Hibah. Nilai sewa lahan yang disepakati adalah sebesar Rp250,00 juta per bulan dan jangka waktu perjanjian sewa ini adalah selama dua puluh (20) tahun.

Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan perjanjian No. 028/MCT-HASIPAH/LANDLEASE/II/2023, MCT, Perusahaan Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan Hasipah (pihak yang menyewakan) atas tanah seluas 3.317 meter persegi terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan SKPT No. 702/64.02.16/593.82/SKPT/XI/2020 atas nama Hasipah disahkan oleh Camat Tenggarong Seberang Sugiarto, S.H., M.Si. Nilai sewa lahan yang disepakati adalah sebesar Rp40,00 juta per bulan dan jangka waktu perjanjian sewa ini adalah selama dua puluh (20) tahun.

KEWAJIBAN YANG SUDAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI

Perseroan memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Kewajiban ini merupakan kewajiban utang usaha yang sudah jatuh tempo kepada pihak ketiga. Alasan Perseroan belum melunasi kewajiban utang usaha yang telah jatuh tempo kepada pihak ketiga dikarenakan masih membutuhkan rekonsiliasi perhitungan atas utang usaha antara pihak ketiga sehingga baru akan dilunasi ketika rekonsiliasi perhitungan sudah sesuai. Perseroan sudah membayar beberapa tagihan jatuh tempo yang telah disepakati oleh pihak ketiga dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan rekonsiliasi perhitungan utang usaha kepada pihak ketiga.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Total Aset Lancar	264.374.029	221.993.093	167.582.040	28.425.143
Total Aset Tidak Lancar	1.590.783.611	1.182.657.083	1.048.806.915	949.980.669
TOTAL ASET	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	312.344.916	980.698.396	314.206.899	155.005.495
Total Liabilitas Jangka Panjang	928.506.089	76.277.681	705.941.528	815.796.848
TOTAL LIABILITAS	1.240.851.005	1.056.976.077	1.020.148.427	970.802.343
TOTAL EKUITAS	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923
Beban pokok pendapatan	(368.015.696)	(235.128.083)	(368.903.994)	(324.762.816)	(88.852.404)
Laba (rugi) bruto	294.865.041	145.915.815	301.216.389	302.954.115	(5.253.481)
Beban usaha	(50.329.312)	(21.400.877)	(37.390.193)	(26.589.153)	(20.398.087)
Laba (rugi) usaha	244.535.729	124.514.938	263.826.196	276.364.962	(25.651.568)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penghasilan (beban) lain-lain					
Penghasilan bunga	81.938.988	91.506.105	136.307.706	106.436.938	66.641.897
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	8.095.668	(9.757.470)	(40.178.408)	1.167.972	4.583.558
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	(940.938)	(3.158.381)	(4.295.162)	(1.671.402)	(4.583.110)
Pajak final	(5.722.391)	(3.477.596)	(6.063.889)	(5.350.402)	(429.200)
Beban pajak	(21.256.151)	(11.720.283)	(24.430.942)	(15.693.590)	(2.187.252)
Beban keuangan	(126.318.429)	(116.944.791)	(178.491.631)	(169.084.886)	(94.762.126)
Lain-lain - neto	(3.345.994)	(1.420.622)	525.000	(1.042.929)	(1.996.462)
Beban lain-lain - neto	(67.549.247)	(54.973.038)	(116.627.326)	(85.238.299)	(32.732.695)
Laba (rugi) sebelum taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan	176.986.482	69.541.900	147.198.870	191.126.663	(58.384.263)
Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(3.503.976)	-	-	-	-
Tangguhan	(7.360.897)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438
Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(10.864.873)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438
Laba (rugi) neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain					
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja pascakerja	8.448	(293.606)	(440.409)	(14.227)	-
Pajak penghasilan terkait	2.735	38.662	57.992	3.041	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak	11.183	(254.944)	(382.417)	(11.186)	-
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	163.729.190	79.511.977	163.579.205	189.109.229	(48.072.919)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)
Neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)
Total penghasilan (rugi) komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	163.740.373	79.257.033	163.196.788	189.098.043	(48.072.919)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)
Neto	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusi diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)

*tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	63.293.921	8.307.139	73.701.291	64.555.107	(32.249.634)
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(210.008.808)	34.516.608	2.583.945	(17.468.622)	(670.095.742)
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	116.190.149	(35.664.950)	(53.953.706)	(34.034.607)	702.801.444
Kenaikan (penurunan) netto kas	(30.524.738)	7.158.797	22.331.530	13.051.878	456.068
Kas awal tahun	36.428.128	14.096.598	14.096.598	1.044.720	588.652
Kas akhir tahun	5.903.390	21.255.395	36.428.128	14.096.598	1.044.720

*tidak diaudit

RASIO-RASIO

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	73,96	6,76	650,87		*
Beban Pokok Pendapatan	56,52	13,59	265,51		*
Laba (Rugi) Bruto	102,08	(0,57)	(5.866,73)		*
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan	154,50	(22,98)	(427,36)		*
Total Aset	32,07	15,48	24,32		*
Total Liabilitas	17,40	3,61	5,08		*
Total Ekuitas	76,69	77,17	2.480,93		*
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	201,99	304,01	519,85	12.767,89	
Total Liabilitas / Total Aset	66,89	75,25	83,87	99,22	
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	84,64	22,64	53,33	18,34	
Interest Coverage Ratio	2,25	1,47	1,85	(0,13)	
Debt Service Coverage Ratio	1,01	0,24	0,66	(0,13)	
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) Bruto / Pendapatan	44,48	44,95	48,26	(6,28)	
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan / Pendapatan	26,70	21,97	30,45	(69,84)	
Laba (Rugi) Neto / Pendapatan	25,06	22,66	30,05	(64,24)	
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	15,89	21,44	24,91	(0,54)	
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan / Total Aset	9,54	10,48	15,71	(5,97)	
Laba (Rugi) Neto / Total Aset	8,95	10,81	15,51	(5,49)	
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	48,00	86,64	154,38	(69,09)	
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	28,81	42,34	97,39	(767,86)	
Laba (Rugi) Neto / Total Ekuitas	27,04	43,67	96,13	(706,31)	

Keterangan:

*tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2019

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 437 tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0037867.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019 serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120111261563 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2019.

Perseroan mengakuisisi saham mayoritas MCT sebesar 70% pada bulan September 2019. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai ISP yang beroperasi di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. ISP Perusahaan Anak berfungsi sebagai titik perpindahan, pengelolaan, dan penumpukan muatan dari tongkang sungai ke tongkang laut.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Perubahan Cuaca dan Iklim di Wilayah Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Letak geografis ISP Perusahaan Anak yang terletak di Kalimantan Timur beriklim tropis, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kondisi cuaca (curah hujan dan debit air di jalur perairan) sangat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (perlindungan jalan akses *hauling* dan transportasi

air). Perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah operasi Perseroan dan Perusahaan Anak akan memiliki dampak yang kontra-siklus dimana pada musim kemarau/ kering akan memberikan sisi negatif terhadap kinerja pelayaran dan bongkar muat batu bara karena jam kerja yang rendah disebabkan oleh terbatasnya waktu berlayar tongkang saat kondisi sungai surut. Hal tersebut berlaku sebaliknya saat musim hujan, pengangkutan air memiliki ketersediaan jam kerja yang tinggi karena kondisi sungai pasang. Perencanaan yang matang dan terintegrasi diperlukan untuk mendapatkan optimasi terhadap kondisi kontra-siklus alur kegiatan pelayaran dan pengangkutan milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan faktor penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan dengan bahan bakar minyak bumi di sepanjang rantai pasok. Kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya Perseroan dan Perusahaan Anak karena kenaikan tersebut akan: (i) meningkatkan biaya bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan bongkar muat batu bara, dan (ii) meningkatkan biaya BBM transportasi air (*barging*). Biaya BBM dari Perseroan pada umumnya mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Di samping itu, biaya BBM Perseroan juga meningkat seiring dengan peningkatan produksi.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Hal ini disebabkan karena industri Perseroan bersinggungan penuh terhadap kebijakan dari pemerintah, antara lain peraturan di bidang pelayaran nasional, pelabuhan, dan jasa-jasa pendukungnya. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terutama terkait dengan pelayaran, pengangkutan, dan pelabuhan yang merupakan fokus utama dari Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memengaruhi kinerja dan strategi Perseroan.

Fluktuasi Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)

Harga batu bara acuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional maupun dalam negeri, dimana fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh dua faktor turunan yaitu suplai dan permintaan produk batu bara. Suplai batu bara dapat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca, teknis tambang, infrastruktur serta kebijakan negara pemasok dan pembeli batu bara. Sedangkan, permintaan batu bara dapat dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang berkorelasi dengan industri batu bara, kebijakan impor suatu negara, dan kompetisi dengan komoditas energi lain yang dapat menjadi substitusi, seperti hidro dan nuklir. Oleh karenanya, fluktuasi harga batu bara acuan tersebut dapat berdampak pada turun atau naiknya permintaan pasar terhadap produk batu bara yang secara otomatis akan memengaruhi permintaan kegiatan pemuatan batu bara yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, perubahan harga batu bara acuan Indonesia akan berdampak langsung kepada pendapatan Perseroan karena harga batu bara acuan Indonesia memiliki dampak pada tarif pengangkutan batu bara yang ditentukan oleh Perseroan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan; dan
- Amendemen PSAK No. 73, “Sewa” terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi” tentang; dan
- Amendemen PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi” tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif

Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan untuk periode dan tahun berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2023		2022*		2022		2021		2020	
Pihak ketiga										
Tongkang batu bara	67.093.651	10,12%	46.679.061	12,25%	73.368.109	10,95%	77.051.619	12,27%	1.858.444	2,22%
Muatan apung	3.469.807	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	70.563.458	10,64%	46.679.061	12,25%	73.368.109	10,95%	77.051.619	12,27%	1.858.444	2,22%
Pihak berelasi										
Tongkang batu bara	410.237.223	61,89%	244.105.587	64,06%	433.456.009	64,68%	389.523.052	62,05%	33.908.221	40,56%
Bongkar muat	157.256.105	23,72%	90.259.250	23,69%	163.296.265	24,37%	161.142.260	25,67%	47.832.258	57,22%
Muatan apung	24.823.951	3,74%	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	592.317.279	89,36%	334.364.837	87,75%	596.752.274	89,05%	550.665.312	87,73%	81.740.479	97,78%
Total	662.880.737	100,00%	381.043.898	100,00%	670.120.383	100,00%	627.716.931	100,00%	83.598.923	100,00%

*tidak diaudit

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapatan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk periode berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2023		2022*		2022		2021		2020	
Biaya pengiriman	161.431.675	43,87%	87.713.165	37,30%	139.611.634	37,84%	186.382.005	57,39%	37.600.604	42,32%
Sewa	82.689.335	22,47%	41.612.506	17,70%	63.441.662	17,20%	35.366.200	10,89%	3.450.700	3,88%
Bahan bakar	60.445.923	16,42%	46.788.687	19,90%	79.459.014	21,54%	32.111.277	9,89%	13.753.631	15,48%
Penyusutan	28.216.825	7,67%	26.258.212	11,17%	38.093.653	10,33%	33.348.404	10,27%	16.009.442	18,02%
Jasa bongkar muat	19.185.897	5,21%	16.161.296	6,87%	25.526.022	6,92%	22.957.504	7,07%	16.518.165	18,59%
Pemeliharaan peralatan	14.174.229	3,85%	16.447.127	6,99%	22.103.343	5,99%	12.420.147	3,82%	1.519.862	1,71%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.871.812	0,51%	147.090	0,07%	668.666	0,18%	2.177.279	0,67%	-	-
Total	368.015.696	100,00%	235.128.083	100,0%	368.903.994	100,00%	324.762.816	100,00%	88.852.404	100,0%

*tidak diaudit

Beban Usaha

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha dan sebagai persentase dari Beban Usaha untuk periode berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2023		2022*		2022		2021		2020	
Jasa profesional	20.129.815	40,00%	1.266.882	5,92%	2.755.943	7,37%	1.821.307	6,85%	6.944.431	34,04%
Gaji dan tunjangan lainnya	15.141.479	30,08%	9.113.248	42,58%	14.682.864	39,27%	6.743.603	25,36%	3.065.248	15,03%
Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi	3.786.234	7,52%	3.272.447	15,29%	5.451.466	14,58%	4.697.282	17,67%	1.452.555	7,12%
Asuransi	3.177.066	6,31%	2.050.805	9,58%	4.636.187	12,40%	3.628.095	13,65%	751.266	3,68%
Sewa dan utilitas	2.538.682	5,04%	1.468.445	6,86%	3.183.291	8,51%	630.678	2,37%	387.492	1,90%
Listrik, air dan komunikasi	1.787.540	3,55%	1.813.582	8,47%	3.280.359	8,77%	1.481.435	5,57%	192.721	0,94%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.768.496	7,49%	2.415.468	11,29%	3.400.083	9,09%	7.586.753	28,53%	7.604.374	37,28%
Total	50.329.312	100,00%	21.400.877	100,00%	37.390.193	100,00%	26.589.153	100,00%	20.398.087	100,0%

*tidak diaudit

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
PENDAPATAN	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923	73,96	6,76	650,87
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(368.015.696)	(235.128.083)	(368.903.994)	(324.762.816)	(88.852.404)	56,52	13,59	265,51
LABA BRUTO	294.865.041	145.915.815	301.216.389	302.954.115	(5.253.481)	102,08	(0,57)	(5.866,73)
BEBAN USAHA	(50.329.312)	(21.400.877)	(37.390.193)	(26.589.153)	(20.398.087)	135,17	40,62	30,35
LABA (RUGI) USAHA	244.535.729	124.514.938	263.826.196	276.364.962	(25.651.568)	96,39	(4,54)	(1.177,38)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN								
Penghasilan bunga	81.938.988	91.506.105	136.307.706	106.436.938	66.641.897	(10,46)	28,06	59,71
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	8.095.668	(9.757.470)	(40.178.408)	1.167.972	4.583.558	(182,97)	(3.540,01)	(74,52)
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	(940.938)	(3.158.381)	(4.295.162)	(1.671.402)	(4.583.110)	(70,21)	156,98	(63,53)
Pajak final	(5.722.391)	(3.477.596)	(6.063.889)	(5.350.402)	(429.200)	64,55	13,34	1.146,60
Beban pajak	(21.256.151)	(11.720.283)	(24.430.942)	(15.693.590)	(2.187.252)	81,36	55,67	617,50
Beban keuangan	(126.318.429)	(116.944.791)	(178.491.631)	(169.084.886)	(94.762.126)	8,02	5,56	78,43
Lain-lain - neto	(3.345.994)	(1.420.622)	525.000	(1.042.929)	(1.996.462)	135,53	(150,34)	(47,76)
Beban Lain-Lain - Neto	(67.549.247)	(54.973.038)	(116.627.326)	(85.238.299)	(32.732.695)	22,88	36,83	160,41
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	176.986.482	69.541.900	147.198.870	191.126.663	(58.384.263)	154,50	(22,98)	(427,36)
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN								
Kini	(3.503.976)	-	-	-	-	(100,00)	-	-
Tanguhan	(7.360.897)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	(318,98)	(286,29)	(152,95)
Taksiran Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(10.864.873)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	(423,23)	(286,29)	(152,95)
LABA (RUGI) NETO	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)	127,87	(19,52)	(451,28)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN								
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:								
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja pascakerja	8.448	(293.606)	(440.409)	(14.227)	-	(102,88)	2.995,59	(100,00)
Pajak penghasilan terkait	2.735	38.662	57.992	3.041	-	(92,93)	1.807,00	100,00
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Neto – Setelah Dikurangi Pajak	11.183	(254.944)	(382.417)	(11.186)	-	(104,39)	3318,71	(100,00)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)	128,68	(19,72)	(451,25)
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	163.729.190	79.511.977	163.579.205	189.109.229	(48.072.919)	105,92	(13,50)	(493,38)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)	(136,20)	2451,76	(91,81)
Neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)	(127,87)	(19,52)	(451,28)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	163.740.373	79.257.033	163.196.788	189.098.043	(48.072.919)	106,59	(13,70)	(493,36)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)	(136,20)	2451,76	(91,81)
TOTAL	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)	128,68	(19,72)	(451,25)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEDAPA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)	102,95	(13,50)	(493,38)

*tidak diaudit

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp662.880.737 ribu, meningkat Rp281.836.839 ribu atau 73,96% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp381.043.898 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki sebanyak 789.301 MT, volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 300 kaki sebanyak 453.976 MT, dan volume bongkar muat (*loading unloading*) di ISP milik MCT sebanyak 837.707 MT yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi batu bara pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak, serta meningkatnya volume muatan apung (*floating loading*) sebanyak 606.824 MT yang disebabkan oleh akuisisi aset kapal terapung (*floating crane*). Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas perubahan harga yang menyebabkan kenaikan atau penurunan atas pendapatan pada periode berjalan.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp368.015.696 ribu, meningkat Rp132.887.613 ribu atau 56,52% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp235.128.083 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pengiriman yang disebabkan oleh meningkatnya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki dan tongkang dengan panjang 300 kaki, serta meningkatnya biaya operasional untuk *floating crane* baru milik Perusahaan Anak.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp50.329.312 ribu, meningkat Rp28.928.435 ribu atau 135,17% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp21.400.877 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya jasa profesional terkait restrukturisasi utang jangka panjang kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Laba usaha. Laba usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp244.535.729 ribu, meningkat Rp120.020.791 ribu atau 96,39% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp124.514.938 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto. Keuntungan selisih kurs - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp8.095.668 ribu, meningkat Rp17.853.138 ribu atau 182,97% dibandingkan dengan kerugian selisih kurs - neto periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp9.757.470 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh apresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022 yang menyebabkan tercatatnya keuntungan selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD, sedangkan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 yang menyebabkan tercatatnya kerugian selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD.

Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto. Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp940.938 ribu, menurun Rp2.217.443 ribu atau 70,21% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.158.381 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha pada periode berjalan lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga perhitungan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai menurun.

Pajak final. Pajak final Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp5.722.391 ribu, meningkat Rp2.244.795 ribu atau 64,55% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.477.596 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena meningkatnya pendapatan tongkang batu bara.

Beban pajak. Beban pajak Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp21.256.151 ribu, meningkat Rp9.535.868 ribu atau 81,36% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp11.720.283 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri.

Lain-lain - neto. Lain-lain - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.345.994 ribu, meningkat Rp1.925.372 ribu atau 135,53% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp1.420.622 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran penalti atas pinjaman jangka panjang karena percepatan pelunasan pinjaman.

Laba sebelum taksiran manfaat pajak penghasilan. Laba sebelum taksiran manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp176.986.482 ribu, meningkat Rp107.444.582 ribu atau 154,50% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp69.541.900 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto. Taksiran beban pajak penghasilan - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp10.864.873 ribu, menurun Rp14.226.246 ribu atau 423,23% dibandingkan dengan taksiran manfaat pajak penghasilan - neto periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.361.373 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perusahaan Anak yang telah membukukan laba pada periode berjalan dan adanya beban pajak kini terkait pendapatan atas muatan apung (*floating loading*) pada Perseroan.

Laba neto. Laba neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp166.121.609 ribu, meningkat Rp93.218.336 ribu atau 127,87% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp72.903.273 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak. Penghasilan komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp11.183 ribu, meningkat Rp266.127 ribu atau 104,39% dibandingkan dengan rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp254.944 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial, yaitu penurunan tingkat diskonto dan peningkatan tingkat kenaikan gaji.

Penghasilan komprehensif lain - neto. Penghasilan komprehensif lain - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp166.132.792 ribu, meningkat Rp93.484.463 ribu atau 128,68% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp72.648.329 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp670.120.383 ribu, meningkat Rp42.403.452 ribu atau 6,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp627.716.931 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga rata-rata atas jasa pengangkutan menggunakan tongkang sungai dengan panjang 180 kaki dari sebesar Rp139.400 / MT pada tahun 2021 menjadi Rp175.000 / MT pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, terdapat peningkatan rata-rata *IC/4 Coal Index* dari USD63,15 / MT pada tahun 2021 menjadi USD83,64 / MT pada tahun 2022. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas perubahan volume penjualan yang menyebabkan kenaikan atau penurunan atas pendapatan pada tahun berjalan.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp368.903.994 ribu, meningkat Rp44.141.178 ribu atau 13,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp324.762.816 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya sewa tongkang, bahan bakar, dan pemeliharaan peralatan.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.390.193 ribu, meningkat Rp10.801.040 ribu atau 40,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.589.153 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan lainnya yang disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan kenaikan biaya operasional lainnya.

Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto. Kerugian selisih kurs - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.178.408 ribu, menurun Rp41.346.380 ribu atau 3.540,01% dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs - neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.167.972 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami depresiasi dari Rp14.278 pada 31 Desember 2021 menjadi Rp15.592 pada 31 Desember 2022 yang menyebabkan tercatatnya kerugian selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD.

Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto. Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.295.162 ribu, meningkat Rp2.623.760 ribu atau 156,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.671.402 ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha secara signifikan, sehingga perhitungan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai lebih tinggi.

Beban pajak. Beban pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.430.942 ribu, meningkat Rp8.737.352 ribu atau 55,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.693.590 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri.

Lain-lain - neto. Lain-lain - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp525.000 ribu, meningkat Rp1.567.929 ribu atau 150,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 rugi sebesar Rp1.042.929 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena penerimaan atas klaim asuransi pada tahun 2022.

Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto. Taksiran manfaat pajak penghasilan - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.617.118 ribu, meningkat Rp7.095.536 ribu atau 286,29% dibandingkan dengan taksiran beban pajak penghasilan – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.478.418 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena MCT mengalami kerugian pada tahun 2022 yang menyebabkan kenaikan atas akumulasi rugi fiskal dari Perusahaan Anak.

Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak. Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp382.417 ribu, meningkat Rp371.231 ribu atau 3.318,71% dibandingkan dengan manfaat pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.186 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan yang mengakibatkan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja mengalami kerugian tambahan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp627.716.931 ribu, meningkat Rp544.118.008 ribu atau 650,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp83.598.923 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki sebanyak 1.547.282 MT dan meningkatnya pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 300 kaki sebanyak 1.564.009 MT yang dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas produksi batu bara pelanggan Perseroan, serta meningkatnya volume bongkar muat (*loading unloading*) di ISP milik MCT sebanyak 1.279.471 MT pada tahun 2021 terkait pengembangan fasilitas ISP yang dilakukan Perseroan telah selesai pada akhir tahun 2020. Peningkatan tersebut juga didorong oleh meningkatnya harga rata-rata atas jasa pengangkutan menggunakan tongkang sungai dengan panjang 180 kaki dari sebesar Rp66.000 / MT pada tahun 2020 menjadi Rp139.400 / MT pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2021, Perseroan mengenakan tarif pengangkutan yang mengacu pada *ICI 4 Coal Index*, sedangkan pada tahun 2020 menggunakan tarif seragam (*flat fare*).

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp324.762.816 ribu, meningkat Rp235.910.412 ribu atau 265,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp88.852.404 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki dan tongkang dengan panjang 300 kaki, serta meningkatnya volume bongkar muat (*loading unloading*) di ISP milik MCT yang menyebabkan biaya pengiriman, sewa, bahan bakar, penyusutan dan pemeliharaan peralatan meningkat secara signifikan.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.589.153 ribu, meningkat Rp6.191.066 ribu atau 30,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.398.087 ribu. Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan biaya gaji sehubungan dengan meningkatnya jumlah karyawan dan kenaikan biaya asuransi.

Laba (rugi) usaha. Laba (rugi) usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah laba sebesar Rp276.364.962 ribu, meningkat Rp302.016.530 ribu atau 1.177,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp25.651.568 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Penghasilan bunga. Penghasilan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp106.436.938 ribu, meningkat Rp39.795.041 ribu atau 59,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.641.897 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan bunga yang dihasilkan dari pinjaman pihak berelasi yang baru diberikan pada bulan Mei 2020.

Keuntungan selisih kurs - neto. Keuntungan selisih kurs - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.167.972 ribu, menurun Rp3.415.586 ribu atau 74,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.583.558 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami depresiasi dari Rp14.105 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp14.278 pada 31 Desember 2021 yang menyebabkan menurunnya keuntungan selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD.

Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto. Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.671.402 ribu, menurun Rp2.911.708 ribu atau 63,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.583.110 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi di tahun 2021 sehingga perhitungan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai di tahun 2021 menjadi lebih kecil apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

Pajak final. Pajak final Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.350.402 ribu, meningkat Rp4.921.202 ribu atau 1.146,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp429.200 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan tongkang batu bara di tahun 2021.

Beban pajak. Beban pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.693.590 ribu, meningkat Rp13.506.338 ribu atau 617,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.187.252 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan beban PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri di tahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2020.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp169.084.886 ribu, meningkat Rp74.322.760 ribu atau 78,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp94.762.126 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bunga pinjaman yang dihasilkan dari pinjaman pihak ketiga yang baru diperoleh pada bulan Mei 2020.

Lain-lain - neto. Lain-lain - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.042.929 ribu, menurun Rp953.533 ribu atau 47,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.996.462 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya biaya yang muncul atas fasilitas pinjaman dari OCP Asia Pte. Limited pada tahun 2020.

Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto. Taksiran manfaat pajak penghasilan - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.478.418 ribu, menurun Rp7.158.856 ribu atau 152,95% dibandingkan dengan taksiran beban pajak penghasilan - neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.680.438 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena MCT mengalami kerugian pada tahun 2020 yang menyebabkan kenaikan atas akumulasi rugi fiskal dari Perusahaan Anak.

Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak. Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.186 ribu, meningkat Rp11.186 ribu atau 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja di tahun 2021.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto. Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah penghasilan sebesar Rp188.637.059 ribu, meningkat Rp242.340.884 ribu atau 451,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp53.703.825 ribu. Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan pendapatan.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21	
ASET								
ASET LANCAR								
Kas	5.903.390	36.428.128	14.096.598	1.044.720	(83,79)	158,42	1.249,32	
Piutang usaha - neto								
Pihak ketiga	34.266.142	27.961.076	29.619.743	-	22,55	(5,60)	100,00	
Pihak berelasi	199.099.234	140.899.691	112.089.007	11.767.968	41,31	25,70	852,49	
Piutang lain-lain - neto								
Pihak ketiga	35.609	39.958	-	-	(10,88)	100,00	-	
Persediaan	1.797.478	4.621.196	-	-	(61,10)	100,00	-	
Pajak dibayar dimuka	11.019.225	1.459.093	12.073	2.795.429	655,21	11.985,59	(99,57)	
Uang muka	2.162.930	9.463.853	10.047.722	12.590.076	(77,15)	(5,81)	(20,19)	
Beban dibayar dimuka	3.586.537	1.120.098	1.716.897	226.950	220,20	(34,76)	656,51	
Dana yang dibatasi penggunaannya	6.503.484	-	-	-	100,00	-	-	
TOTAL ASET LANCAR	264.374.029	221.993.093	167.582.040	28.425.143	19,09	32,47	489,56	
ASET TIDAK LANCAR								
Piutang lain-lain - neto								
Pihak berelasi	78.147	716.545	-	-	(89,09)	100,00	-	
Piutang pihak berelasi - neto	808.770.448	752.872.142	649.133.827	575.294.684	7,42	15,98	12,84	
Aset pajak tangguhan	2.765.665	10.123.827	5.448.717	7.924.094	(72,68)	85,80	(31,24)	
Aset hak-guna - neto	38.569.465	9.844.673	18.716.129	9.677.873	291,78	(47,40)	93,39	
Aset tetap - neto	659.296.656	381.475.356	362.202.043	334.624.358	72,83	5,32	8,24	
Uang muka pembelian aset tetap	73.596.890	19.918.200	5.599.859	14.753.320	269,50	255,69	(62,04)	
Goodwill	7.706.340	7.706.340	7.706.340	7.706.340	-	-	-	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.590.783.611	1.182.657.083	1.048.806.915	949.980.669	34,51	12,76	10,40	
TOTAL ASET	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812	32,07	15,48	24,32	

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 31 Desember 2022

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.855.157.640 ribu, meningkat sebesar Rp450.507.464 ribu atau 32,07% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.404.650.176 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh karena peningkatan aset lancar sebesar Rp42.380.936 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp408.126.528 ribu.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp264.374.029 ribu, meningkat sebesar Rp42.380.936 ribu atau 19,09% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp221.993.093 ribu. Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan pada piutang usaha - neto sebesar Rp64.504.609 ribu.

Kas. Kas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp5.903.390 ribu, menurun sebesar Rp30.524.738 ribu atau 83,79% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp36.428.128 ribu. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka panjang kepada OCP Asia Pte. Limited pada bulan Januari 2023.

Piutang usaha - neto - Pihak berelasi. Piutang usaha - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp199.099.234 ribu, meningkat sebesar Rp58.199.543 ribu atau 41,31% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp140.899.691 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.797.478 ribu, menurun sebesar Rp2.823.718 ribu atau 61,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.621.196 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh konsumsi bahan bakar yang tinggi di tahun 2023 dikarenakan meningkatnya jumlah kapal yang beroperasi seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp11.019.225 ribu, meningkat sebesar Rp9.560.132 ribu atau 655,21% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.459.093 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh PPN masukan yang lebih tinggi atas akumulasi pembelian aset tetap.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.162.930 ribu, menurun sebesar Rp7.300.923 ribu atau 77,15% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.463.853 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan metode pembayaran dari pemasok terkait pembelian bahan bakar yang tidak lagi mewajibkan pembayaran uang muka.

Beban dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.586.537 ribu, meningkat sebesar Rp2.466.439 ribu atau 220,20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.120.098 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban dibayar dimuka untuk asuransi dan *security agent* atas pinjaman jangka panjang.

Dana yang dibatasi penggunaannya. Dana yang dibatasi penggunaannya Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp6.503.484 ribu, meningkat sebesar Rp6.503.484 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penempatan kas yang digunakan sebagai penerimaan pinjaman dan penggunaan pinjaman sesuai prioritas penggunaannya dalam perjanjian dan jaminan atas pinjaman OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.590.783.611 ribu, meningkat sebesar Rp408.126.528 ribu atau 34,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.182.657.083 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap - neto sebesar Rp277.821.300 ribu.

Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi. Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp78.147 ribu, menurun sebesar Rp638.398 ribu atau 89,09% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp716.545 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran piutang lain-lain dari pihak berelasi.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.765.665 ribu, menurun sebesar Rp7.358.162 ribu atau 72,68% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.123.827 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh akumulasi rugi fiskal Perusahaan Anak yang dikompensasi pada periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2023 atas laba tahun berjalan.

Aset hak-guna - neto. Aset hak-guna - neto Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp38.569.465 ribu, meningkat sebesar Rp28.724.792 ribu atau 291,78% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.844.673 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun untuk lokasi penimbunan batu bara (*stockpile*).

Aset tetap - neto. Aset tetap - neto Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp659.296.656 ribu, meningkat sebesar Rp277.821.300 ribu atau 72,83% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp381.475.356 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian kapal terapung (*floating crane*) dan 12 tongkang sungai.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp73.596.890 ribu, meningkat sebesar Rp53.678.690 ribu atau 269,50% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19.918.200 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran untuk pembuatan 8 tongkang sungai baru.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.404.650.176 ribu, meningkat sebesar Rp188.261.221 ribu atau 15,48% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.216.388.955 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp54.411.053 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp133.850.168 ribu.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp221.993.093 ribu, meningkat sebesar Rp54.411.053 ribu atau 32,47% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp167.582.040 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas sebesar Rp22.331.530 ribu dan piutang usaha - neto sebesar Rp27.152.017 ribu.

Kas. Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.428.128 ribu, meningkat sebesar Rp22.331.530 ribu atau 158,42% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.096.598 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan, yang akan digunakan Perseroan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang kepada OCP Asia Pte. Limited yang dilakukan pada bulan Januari 2023.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.621.196 ribu, meningkat sebesar Rp4.621.196 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian bahan bakar yang dilakukan Perseroan untuk operasional di tahun 2022.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.459.093 ribu, meningkat sebesar Rp1.447.020 ribu atau 11.985,59% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.073 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPN masukan seiring dengan peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha.

Beban dibayar dimuka. Beban dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.120.098 ribu, menurun sebesar Rp596.799 ribu atau 34,76% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.716.897 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban dibayar dimuka atas asuransi karena perubahan atas periode polis asuransi.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.182.657.083 ribu, meningkat sebesar Rp133.850.168 ribu atau 12,76% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.048.806.915 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap - neto sebesar Rp19.273.313 ribu dan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp14.318.341 ribu.

Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi. Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp716.545 ribu, meningkat sebesar Rp716.545 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh piutang yang muncul atas penggantian kerusakan aset Perusahaan Anak yang digunakan oleh pihak berelasi.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.123.827 ribu, meningkat sebesar Rp4.675.110 ribu atau 85,80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.448.717 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi fiskal atas rugi neto Perusahaan Anak di tahun berjalan.

Aset hak-guna - neto. Aset hak-guna - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.844.673 ribu, menurun sebesar Rp8.871.456 ribu atau 47,40% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.716.129 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi atas aset hak-guna pada tahun berjalan.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.918.200 ribu, meningkat sebesar Rp14.318.341 ribu atau 255,69% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.599.859 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran untuk pembelian 20 kapal tunda dan 2 tongkang sungai.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.216.388.955 ribu, meningkat sebesar Rp237.983.143 ribu atau 24,32% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp978.405.812 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp139.156.897 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp98.826.246 ribu.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp167.582.040 ribu, meningkat sebesar Rp139.156.897 ribu atau 489,56% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.425.143 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha - neto sebesar Rp129.940.782 ribu.

Kas. Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.096.598 ribu, meningkat sebesar Rp13.051.878 ribu atau 1.249,32% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.044.720 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang usaha - neto - Pihak ketiga. Piutang usaha - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.619.743 ribu, meningkat sebesar Rp29.619.743 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan di tahun 2021.

Piutang usaha - neto - Pihak berelasi. Piutang usaha - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp112.089.007 ribu, meningkat sebesar Rp100.321.039 ribu atau 852,49% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.767.968 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.073 ribu, menurun sebesar Rp2.783.356 ribu atau 99,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.795.429 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan pendapatan yang mengakibatkan PPN keluaran menjadi lebih besar.

Beban dibayar dimuka. Beban dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.716.897 ribu, meningkat sebesar Rp1.489.947 ribu atau 656,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp226.950 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran beban dimuka atas asuransi.

Aset tidak lancar. Aset tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.048.806.915 ribu, meningkat sebesar Rp98.826.246 ribu atau 10,40% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp949.980.669 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap - neto sebesar Rp27.577.685 ribu.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.448.717 ribu, menurun sebesar Rp2.475.377 ribu atau 31,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.924.094 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh akumulasi rugi fiskal Perusahaan Anak yang dikompensasi atas laba tahun berjalan.

Aset hak-guna - neto. Aset hak-guna - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.716.129 ribu, meningkat sebesar Rp9.038.256 ribu atau 93,39% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.677.873 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa beberapa alat berat yang memiliki masa sewa selama tiga tahun.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.599.859 ribu, menurun sebesar Rp9.153.461 ribu atau 62,04% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.753.320 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke aset atas pembelian aset yang dibayar pada tahun 2020.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21	
LIABILITAS								
LIABILITAS JANGKA PENDEK								
Utang usaha								
Pihak ketiga	44.365.021	22.104.102	16.462.547	23.187.189	100,71	34,27	(29,00)	
Pihak berelasi	30.687.832	5.114.162	4.851.577	1.178.560	500,06	5,41	311,65	
Beban akrual	4.779.011	8.911.426	7.069.728	10.086.817	(46,37)	26,05	(29,91)	
Utang pajak	48.664.349	32.674.382	20.797.784	2.596.096	48,94	57,11	701,12	
Utang lain-lain								
Pihak ketiga	2.000.636	3.362.557	2.981.649	66.712	(40,50)	12,78	4.369,43	
Pihak berelasi	-	20.745	80.574	7.303.810	(100,00)	(74,25)	(98,90)	
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:								
Pinjaman jangka panjang	174.107.263	902.140.545	248.039.768	104.142.433	(80,70)	263,71	138,17	
Liabilitas sewa	7.740.804	6.370.477	13.923.272	6.443.878	21,51	(54,25)	116,07	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	312.344.916	980.698.396	314.206.899	155.005.495	(68,15)	212,12	102,71	

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21	
LIABILITAS JANGKA PANJANG								
Utang pihak berelasi	82.429.828	61.086.000	79.485.812	92.961.365	34,94	(23,15)	(14,50)	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:								
Pinjaman jangka panjang	811.111.989	9.351.172	619.222.879	719.363.993	8.573,91	(98,49)	(13,92)	
Liabilitas sewa	33.067.938	4.678.709	6.905.111	3.471.490	606,77	(32,24)	98,91	
Liabilitas imbalan pascakerja	1.896.334	1.161.800	327.726	-	63,22	254,50	100,00	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	928.506.089	76.277.681	705.941.528	815.796.848	1.117,27	(89,19)	(13,47)	
TOTAL LIABILITAS	1.240.851.005	1.056.976.077	1.020.148.427	970.802.343	17,40	3,61	5,08	

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 31 Desember 2022

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.240.851.005 ribu, meningkat sebesar Rp183.874.928 ribu atau 17,40% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.056.976.077 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp852.228.408 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp668.353.480 ribu.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp312.344.916 ribu, menurun sebesar Rp668.353.480 ribu atau 68,15% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp980.698.396 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp726.662.955 ribu.

Utang usaha - Pihak ketiga. Utang usaha - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp44.365.021 ribu, meningkat sebesar Rp22.260.919 ribu atau 100,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.104.102 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan, muatan apung dan bongkar muat yang menyebabkan meningkatnya beban pokok pendapatan yang secara langsung meningkatkan utang usaha.

Utang usaha - Pihak berelasi. Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp30.687.832 ribu, meningkat sebesar Rp25.573.670 ribu atau 500,06% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.114.162 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan, muatan apung dan bongkar muat yang menyebabkan meningkatnya beban pokok pendapatan yang secara langsung meningkatkan utang usaha.

Beban akrual. Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp4.779.011 ribu, menurun sebesar Rp4.132.415 ribu atau 46,37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.911.426 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas beban akrual yang lebih cepat pada tahun berjalan.

Utang Pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp48.664.349 ribu, meningkat sebesar Rp15.989.967 ribu atau 48,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.674.382 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri dan peningkatan PPN keluaran seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Utang lain-lain - Pihak ketiga. Utang lain-lain - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.000.636 ribu, menurun sebesar Rp1.361.921 ribu atau 40,50% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.362.557 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada Rwood Resources DMCC pada tahun berjalan.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp174.107.263 ribu, menurun sebesar Rp728.033.282 ribu atau 80,70% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp902.140.545 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan atas utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp928.506.089 ribu, meningkat sebesar Rp852.228.408 ribu atau 1.117,27% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp76.277.681 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang jangka panjang sebesar Rp830.150.046 ribu dan kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp21.343.828 ribu di tahun 2023.

Utang pihak berelasi. Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp82.429.828 ribu, meningkat sebesar Rp21.343.828 ribu atau 34,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp61.086.000 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman dari ATS untuk pembelian kapal terapung (*floating crane*).

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp811.111.989 ribu, meningkat sebesar Rp801.760.817 ribu atau 8.573,91% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.351.172 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang jangka panjang baru ke OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp33.067.938 ribu, meningkat sebesar Rp28.389.229 ribu atau 606,77% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.678.709 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun.

Liabilitas imbalan pascakerja. Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.896.334 ribu, meningkat sebesar Rp734.534 ribu atau 63,22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.161.800 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring dengan peningkatan jumlah karyawan.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.056.976.077 ribu, meningkat sebesar Rp36.827.650 ribu atau 3,61% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.020.148.427 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp666.491.497 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp629.663.847 ribu.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp980.698.396 ribu, meningkat sebesar Rp666.491.497 ribu atau 212,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp314.206.899 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp646.547.982 ribu.

Utang usaha - Pihak ketiga. Utang usaha - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.104.102 ribu, meningkat sebesar Rp5.641.555 ribu atau 34,27% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.462.547 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan dan beban usaha.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.674.382 ribu, meningkat sebesar Rp11.876.598 ribu atau 57,11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.797.784 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri.

Utang lain-lain - Pihak berelasi. Utang lain-lain - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.745 ribu, menurun sebesar Rp59.829 ribu atau 74,25% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp80.574 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pihak berelasi di tahun berjalan.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp902.140.545 ribu, meningkat sebesar Rp654.100.777 ribu atau 263,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp248.039.768 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited yang jatuh tempo pada bulan Mei 2023.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.370.477 ribu, menurun sebesar Rp7.552.795 ribu atau 54,25% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.923.272 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran atas liabilitas sewa di tahun berjalan.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp76.277.681 ribu, menurun sebesar Rp629.663.847 ribu atau 89,19% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp705.941.528 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang sebesar Rp612.098.109 ribu.

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.351.172 ribu, menurun sebesar Rp609.871.707 ribu atau 98,49% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp619.222.879 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang jangka Panjang OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sesuai jatuh tempo pembayaran.

Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.678.709 ribu, menurun sebesar Rp2.226.402 ribu atau 32,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.905.111 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa di tahun berjalan.

Liabilitas imbalan pascakerja. Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.161.800 ribu, meningkat sebesar Rp834.074 ribu atau 254,50% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp327.726 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring dengan peningkatan jumlah karyawan.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.020.148.427 ribu, meningkat sebesar Rp49.346.084 ribu atau 5,08% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp970.802.343 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp159.201.404 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp109.855.320 ribu.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp314.206.899 ribu, meningkat sebesar Rp159.201.404 ribu atau 102,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp155.005.495 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp151.376.729 ribu.

Utang usaha - Pihak berelasi. Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.851.577 ribu, meningkat sebesar Rp3.673.017 ribu atau 311,65% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.178.560 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan dan bongkar muat yang meningkatkan beban pokok pendapatan yang secara langsung akan meningkatkan utang usaha.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.797.784 ribu, meningkat sebesar Rp18.201.688 ribu atau 701,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.596.096 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri dan peningkatan PPN keluaran seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Utang lain-lain - Pihak ketiga. Utang lain-lain - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.981.649 ribu, meningkat sebesar Rp2.914.937 ribu atau 4.369,43% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.712 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh uang muka penjualan yang dibayarkan oleh pihak ketiga.

Utang lain-lain - Pihak berelasi. Utang lain-lain - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp80.574 ribu, menurun sebesar Rp7.223.236 ribu atau 98,90% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.303.810 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pihak berelasi di tahun berjalan.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp248.039.768 ribu, meningkat sebesar Rp143.897.335 ribu atau 138,17% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp104.142.433 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang jangka panjang OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sesuai jatuh tempo pembayaran.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.923.272 ribu, meningkat sebesar Rp7.479.394 ribu atau 116,07% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.443.878 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa beberapa alat berat yang memiliki masa sewa selama tiga tahun.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp705.941.528 ribu, menurun sebesar Rp109.855.320 ribu atau 13,47% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp815.796.848 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang sebesar Rp100.141.114 ribu.

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.905.111 ribu, meningkat sebesar Rp3.433.621 ribu atau 98,91% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.471.490 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa beberapa alat berat yang memiliki masa sewa selama tiga tahun.

Liabilitas imbalan pascakerja. Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp327.726 ribu, meningkat sebesar Rp327.726 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama karena pada tahun 2021, Perseroan mulai menerapkan program liabilitas imbalan pasca kerja.

Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21	
EKUITAS								
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk								
Modal saham								
Modal dasar - 238.880 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020								
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 59.720 saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 51.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	59.720.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	17,10	-	-	
Tambahan modal disetor - neto	91.779.744	-	-	-	100,00	-	-	
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	(382.420)	(393.603)	(11.186)	-	(2,84)	3.418,71	100,00	
Saldo laba (defisit)	457.970.945	294.241.755	130.662.550	(58.446.679)	55,64	125,19	(323,56)	
Subtotal	609.088.269	344.848.152	181.651.364	(7.446.679)	76,63	89,84	(2.539,36)	
Kepentingan nonpengendali	5.218.366	2.825.947	14.589.164	15.050.148	84,66	(80,63)	(3,06)	
TOTAL EKUITAS	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469	76,69	77,17	2.480,93	

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp614.306.635 ribu, meningkat sebesar Rp266.632.536 ribu atau 76,69% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp347.674.099 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru kepada BLI dan peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp347.674.099 ribu, meningkat sebesar Rp151.433.571 ribu atau 77,17% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp196.240.528 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp196.240.528 ribu, meningkat sebesar Rp188.637.059 ribu atau 2.480,93% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.603.469 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Agustus	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	0,85	0,23	0,53	0,18

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 0,85x. Rasio lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,23x; 0,53x; dan 0,18x.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Agustus	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total liabilitas / Total ekuitas	2,02	3,04	5,20	127,68
Total liabilitas / Total aset	0,67	0,75	0,84	0,99

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Total liabilitas dibagi dengan total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 2,02x. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,04x; 5,20x; dan 127,68x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 0,67x. Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,75x; 0,84x; dan 0,99x.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Agustus	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ROA (%)	8,95	10,81	15,51	(5,49)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 8,95%. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 10,81%; 15,51%; dan negatif 5,49%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Uraian	31 Agustus	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ROE (%)	27,04	43,67	96,13	(706,31)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 27,04%. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 43,67%; 96,13%; dan negatif 706,31%.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI								
Penerimaan kas dari pelanggan	597.966.630	349.399.047	642.664.953	496.675.836	71.721.571	71,14	29,39	592,51
Pembayaran kas kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(299.043.229)	(164.204.813)	(287.222.316)	(291.437.618)	(94.044.665)	82,12	(1,45)	(209,89)
Pembayaran kas kepada karyawan	(13.052.737)	(8.443.818)	(12.052.978)	(4.710.923)	(2.696.609)	54,58	155,85	74,70
Kas neto yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	285.870.664	176.750.416	343.389.659	200.527.295	(25.019.703)	61,74	71,24	(901,48)
Penerimaan bunga bank	210.838	314.083	468.318	153.639	158.165	(32,87)	204,82	(2,86)
Pembayaran bunga liabilitas sewa	(2.283.731)	(1.050.897)	(1.438.736)	(1.124.022)	(585.287)	117,31	28,00	92,05
Pembayaran pajak	(47.547.996)	(48.782.549)	(71.947.156)	(45.573.013)	(2.361.868)	(2,53)	57,87	1.829,53
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(172.955.854)	(118.923.914)	(196.770.794)	(89.428.792)	(4.440.941)	45,43	120,03	1.913,74
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	63.293.921	8.307.139	73.701.291	64.555.107	(32.249.634)	661,92	14,17	(300,17)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI								
Kenaikan neto piutang pihak berelasi	(3.700.000)	-	-	-	(520.966.766)	(100,00)	-	(100,00)
Kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya	(6.503.484)	-	-	-	-	(100,00)	-	-
Perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(199.805.324)	(31.996.922)	(62.997.376)	(17.468.622)	(149.128.976)	524,45	260,63	(88,29)
Penurunan neto piutang pihak berelasi	-	66.513.530	65.581.321	-	-	(100,00)	100,00	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(210.008.808)	34.516.608	2.583.945	(17.468.622)	(670.095.742)	(708,43)	(114,79)	(97,39)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN								
Penerimaan pinjaman jangka panjang	1.094.274.533	-	-	-	711.841.654	100,00	-	(100,00)
Pembayaran liabilitas sewa	(3.561.938)	(8.966.641)	(9.779.197)	(6.023.479)	(2.988.463)	(60,28)	62,35	101,56
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(974.522.446)	(15.598.309)	(20.710.259)	(12.861.128)	-	6.147,62	61,03	(100,00)
Penurunan neto utang pihak berelasi	-	(11.100.000)	(23.464.250)	(15.150.000)	(6.051.747)	(100,00)	54,88	150,34
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	116.190.149	(35.664.950)	(53.953.706)	(34.034.607)	702.801.444	(425,78)	58,53	(104,84)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS								
	(30.524.738)	7.158.797	22.331.530	13.051.878	456.068	(526,39)	71,10	2.761,83
KAS AWAL TAHUN	36.428.128	14.096.598	14.096.598	1.044.720	588.652	158,42	1.249,32	77,48
KAS AKHIR TAHUN	5.903.390	21.255.395	36.428.128	14.096.598	1.044.720	(72,23)	158,42	1.249,32

*tidak diaudit

Penerimaan dari pelanggan dan penerimaan pinjaman jangka panjang telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang, serta perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp63.293.921 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp597.966.630 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp299.043.229 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp8.307.139 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp349.399.047 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp164.204.813 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.701.291 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp642.664.953 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp287.222.316 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp64.555.107 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp496.675.836 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp291.437.618 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.249.634 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp94.044.665 ribu. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp71.721.571 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk dari aktivitas investasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp210.008.808 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp199.805.324 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp34.516.608 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penurunan neto piutang pihak berelasi sebesar Rp66.513.530 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp31.996.922 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.583.945 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penurunan neto piutang pihak berelasi sebesar Rp65.581.321 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp62.997.376 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.468.622 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut berasal dari perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp17.468.622 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp670.095.742 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari kenaikan neto piutang pihak berelasi sebesar Rp520.966.766 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp116.190.149 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.094.274.533 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp974.522.446 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp35.664.950 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp15.598.309 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.953.706 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penurunan neto utang pihak berelasi sebesar Rp23.464.250 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.034.607 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penurunan neto utang pihak berelasi sebesar Rp15.150.000 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp702.801.444 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp711.841.654 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penurunan neto utang pihak berelasi sebesar Rp6.051.747 ribu.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk kebutuhan pendanaan belanja modal dan modal kerja. Untuk periode delapan bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui kas internal dan pinjaman dari pihak ketiga.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk arus kas dari aktivitas operasi dan penerimaan bersih dari Penawaran Umum. Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan memiliki kas sebesar Rp5.903.390 ribu.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan dan Perusahaan Anak memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dapat menjadi terbatas apabila kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurun secara signifikan terutama akibat faktor eksternal. Perseroan akan tetap mengandalkan arus kas dari kegiatan operasional untuk mendanai kegiatan operasional dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang akan terus meningkat dapat meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp301.630.396 ribu. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp48.679.035 ribu, Rp53.109.883 ribu, dan Rp199.253.149 ribu.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari operasional dan pinjaman dari pihak afiliasi dan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan memiliki komitmen pembelian 20 unit tongkang sebesar USD15.860.000. Komitmen pembelian barang modal tersebut seluruhnya terkait dengan pembelian tongkang dari PT Bandar Abadi, yang akan digunakan oleh Perseroan yang terletak di Desa Embalut, Tenggara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seluruh nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Perseroan tidak melakukan tindakan khusus untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing. Komitmen tersebut akan direalisasikan pada tahun 2023 atau mulai dibangun pada tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, realisasi atas kontrak pembelian barang modal yang ada pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar USD6.736.250. Tidak terdapat sanksi apabila Perseroan tidak memenuhi komitmen pembelian tongkang tersebut. Dengan pembelian tongkang tersebut, Perseroan berharap akan terjadi peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal.

Perseroan telah melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup, antara lain pembangunan kolam pengendapan (*settling ponds*) dan pembelian truk air (*water truck*) untuk mendaur ulang air limbah, serta peralatan untuk menghindari polusi yang disebabkan oleh debu dari batu bara.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023			
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	505.624.632	157.256.105	-	662.880.737
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	76,28%	23,72%	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	171.377.846	7.974.727	(13.230.964)	166.121.609
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	103,16%	4,80%	(7,96%)	100,00%

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022*				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	290.784.648	90.259.250	-	-	381.043.898
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	76,31%	23,69%	-	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	79.660.284	(22.029.013)	-	15.272.002	72.903.273
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	109,27%	(30,22%)	-	20,95%	100,00%

*tidak diaudit

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	506.824.118	163.296.265	-	-	670.120.383
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	75,63%	24,37%	-	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	163.934.962	(39.210.721)	(66.273)	27.158.020	151.815.988
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	107,98%	(25,83%)	(0,04%)	17,89%	100,00%

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	466.574.672	161.142.259	-	-	627.716.931
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	74,33%	25,67%	-	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	190.230.189	(1.536.611)	(30.647)	(14.684)	188.648.245
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	100,84%	(0,81%)	(0,02%)	(0,01%)	100,00%

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	35.766.665	47.832.258	-	-	83.598.923
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	42,78%	57,22%	-	-	100,00%
Rugi Neto	(48.130.099)	(18.769.681)	(65.155)	13.261.110	(53.703.825)
Kontribusi Rugi Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	89,62%	34,95%	0,12%	(24,69%)	100,00%

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba netto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 76,28% dan 103,16%.

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba netto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 76,31% dan 109,27%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba netto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 75,63% dan 107,98%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba netto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 74,33% dan 100,84%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, bongkar muat memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan yaitu sebesar 57,22%. Tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap rugi netto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebesar 89,62%.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan atas tarif pajak untuk pendapatan tongkang batu bara Perseroan dari sebelumnya dikenakan pajak penghasilan badan (PPH Badan) sebesar 25% menjadi PPH final sebesar 1,2% dapat memengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM dapat memengaruhi biaya operasional Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki pinjaman dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Agustus 2023, total pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak dari pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp985.219.252 ribu dan Rp82.429.828 ribu. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan berkisar antara 4,5% dan 20% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual			
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun	
Pihak Ketiga					
OCP Asia (Singapore) Pte. Limited	935.302.589	148.414.017	786.888.572	-	
Indonesia Eximbank	30.623.549	6.937.859	23.685.690	-	
Liebherr - Export AG	17.778.052	17.240.325	537.727	-	
PT Multicrane Perkasa	1.515.062	1.515.062	-	-	
Total Pihak Ketiga	985.219.252	174.107.263	811.111.989	-	
Pihak Berelasi					
PT Ancara Transshipment Services	37.201.534	-	37.201.534	-	
E-Harbour Ventures Limited	29.496.989	-	29.496.989	-	
PT Graha Adika Niaga	9.262.300	-	9.262.300	-	
Solomed Capital Pte. Ltd.	6.469.005	-	6.469.005	-	
Total Pihak Berelasi	82.429.828	-	82.429.828	-	

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan dan MCT memberikan jaminan berdasarkan:

- a. Akta No. 18 tanggal 9 Februari 2023 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Aplofend yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.A.P., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Indonesia Eximbank, berupa:
 1. Hak tanggungan peringkat 1 atas aset tanah SHGB 3/Embalut, Kutai Kartanegara atas nama MCT;
 2. Hak tanggungan peringkat 1 atas aset tanah SHGB 4/Embalut, Kutai Kartanegara atas nama MCT;
 3. Hak tanggungan peringkat 1 atas aset tanah SHGB 5/Embalut, Kutai Kartanegara atas nama MCT;
 4. Fidusia atas seluruh perlengkapan dan peralatan *heavy equipment* (*wheel loader* dan *excavator*) milik MCT;
 5. Fidusia atas seluruh perlengkapan dan peralatan *jetty* (4 *coal loading jetty* rumpun tipe A terdiri dari *bracing* dan *fender*) milik MCT; dan
 6. Fidusia atas seluruh perlengkapan dan peralatan *crushing plant* dan *loading*.
- b. Perjanjian Fasilitas OCP, berupa:
 1. Hipotek atas kapal-kapal Perseroan;
 2. Gadai saham sebesar 70% kepemilikan Perseroan pada MCT;
 3. Fidusia atas pendapatan asuransi Perseroan;
 4. Fidusia atas pendapatan Perseroan atas kontrak material;
 5. Fidusia atas benda bergerak MCT;
 6. Fidusia atas pendapatan MCT atas kontrak material;
 7. Gadai atas rekening milik Perseroan; dan
 8. Gadai atas rekening milik MCT.

Sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang.

Terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dari OCP dengan urutan penggunaannya sebagai berikut:

1. Pembayaran kembali atau pembayaran di muka (sebagaimana berlaku) fasilitas MCT yang ada hingga jumlah maksimum USD49.500.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP Lama;
2. Memfasilitasi pelunasan penuh pinjaman Perseroan kepada Vikasa Global Fund PCC hingga jumlah maksimum USD12.200.000 berdasarkan Perjanjian Vikasa;
3. Pembayaran biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK DARI ADANYA PEMBATASAN TESEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Fluktuasi kurs mata uang asing dapat berdampak terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak karena beberapa aset tetap Perseroan seperti tongkang sungai dibeli dalam mata uang USD. Pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD akan berdampak pada peningkatan harga beli aset tetap dan dapat mengakibatkan peningkatan beban depresiasi. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga dalam mata uang asing, yaitu USD dan SGD. Apabila mata uang USD dan SGD menguat terhadap Rupiah pada saat jadwal pembayaran bunga atau pokok utang, maka hal ini dapat memengaruhi arus kas dan beban bunga Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan antisipasi dengan secara teratur memantau transaksi dalam mata uang selain Rupiah dan pergerakan nilai mata uang Rupiah terhadap USD dan SGD.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi.

13. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA USAHA PERSEROAN

Sampai bulan Desember 2020, tarif yang dikenakan oleh Perseroan kepada pelanggan atas jasa pengangkutan adalah tarif seragam (*flat fare*). Sejak tahun 2021, kontrak kerja yang dimiliki Perseroan dengan pelanggannya merupakan kontrak dengan menggunakan tarif sesuai *ICI 4 Coal Index* atas harga jasa pengangkutan menggunakan tongkang sungai dengan panjang 180 kaki. Peningkatan tarif jasa pengangkutan meningkat dari sebesar Rp66.000 / MT pada tahun 2020 menjadi Rp139.400 / MT pada tahun 2021 dan Rp175.000 / MT pada tahun 2022. Perubahan harga tersebut menyebabkan pendapatan dan laba usaha Perseroan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Untuk tahun 2022, perubahan harga tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan Perseroan, namun laba usaha mengalami penurunan karena meningkatnya beban pokok pendapatan, beban usaha, dan beban lain-lain Perseroan dibandingkan dengan tahun 2021.

Dengan besaran tarif yang disesuaikan dengan *ICI 4 Coal Index* tersebut, pendapatan dan laba usaha Perseroan dapat berfluktuasi mengikuti harga batu bara. Adapun fluktuasi harga batu bara berpengaruh terbatas terhadap ketersediaan jasa pengangkutan barang komoditas secara umum sehingga berpengaruh terhadap persaingan harga. Selain itu, fluktuasi harga batu bara terhadap volume pengangkutan tidak berpengaruh signifikan karena Perseroan memiliki kontrak LoM dengan 2 pelanggan utama sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan hal ini, Perseroan dapat memitigasi fluktuasi (khususnya penurunan) pendapatan serta laba operasi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* untuk komoditas batu bara. Hal ini membuat Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional.

Harga batu bara memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan bergerak secara fluktuatif berdasarkan permintaan dan pasokan. Industri pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, baja, dan industri lainnya yang berkaitan dengan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama turut berkontribusi pada pergerakan harga batu bara secara global dan domestik. Faktor penentu utama dari harga batu bara adalah keseimbangan pasokan dan permintaan, serta ketersediaan energi alternatif. Permintaan atas energi alternatif terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat atas emisi yang dihasilkan dari penggunaan batu bara.

Kesadaran untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”) menuntut berbagai industri untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi energi baru terbarukan (*renewable energy*). Perkembangan teknologi ke energi baru terbarukan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar utama akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan oleh teknologi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka pergeseran penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan akan menurunkan permintaan atas batu bara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kegiatan usaha, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan usaha pengangkutan pada komoditas batu bara sebesar 100%. Dengan terkonsentrasinya kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dengan komoditas batu bara, maka Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki risiko yang tidak terdiversifikasi. Apabila terdapat kondisi yang kurang baik terhadap industri batu bara dan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mengangkut komoditas lain, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

• **Risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan terhadap 2 (dua) pelanggan utama yaitu, PT Ade Putra Tanrajeng (“APT”) dan PT Guruh Putra Bersama (“GPB”) (yang merupakan pihak afiliasi), karena pelanggan tersebut berkontribusi sekitar 89% pada pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

Walaupun Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak LoM dengan APT dan GPB, di kemudian hari dapat terjadi faktor tertentu yang berdampak buruk pada pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain tidak diperpanjangnya Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) pelanggan utama tersebut. Pelanggaran atas persyaratan perizinan dapat mengakibatkan dibekukannya IUP pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat menyebabkan terhentinya kegiatan usaha pelanggan utama tersebut baik secara sementara maupun permanen.

Selain itu, pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak dalam industri batu bara, dimana keberlangsungan usaha pertambangan harus didukung dengan kemampuan pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengakuisisi lahan tambang serta kemampuan mengeksploitasi cadangan batu bara. Dalam hal pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mengakuisisi lahan baru atau cadangan batu baranya habis, maka hal ini akan berdampak pada kelangsungan usaha pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi persaingan yang ketat dengan banyak perusahaan pelayaran dan ISP yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis dengan Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam persaingan di industri pelayaran, terdapat beberapa hal yang dapat menentukan keunggulan bersaing, diantaranya jumlah armada kapal dan tongkang yang besar, umur armada kapal dan tongkang yang relatif muda, lokasi *transshipment* yang strategis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, teknologi perkapalan yang dimiliki serta reputasi perusahaan dalam industri. Dalam persaingan di industri ISP, lokasi strategis, kapasitas, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, teknologi yang dimiliki serta reputasi perusahaan dalam industri menjadi faktor yang penting. Di tengah kondisi persaingan yang ketat, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif dimana Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*. Namun, apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki armada kapal, tongkang serta kapasitas *coal processing* dan *handling* yang cukup untuk memenuhi permintaan pengangkutan batu bara milik 2 (dua) pelanggan utama Perseroan saat terjadi peningkatan produksi batu bara dari tambang pelanggan utama Perseroan tersebut, maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak karena masuknya pesaing yang dapat memenuhi permintaan pelanggan utama Perseroan tersebut.

Dalam hal Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya serta tidak memiliki tarif harga yang kompetitif dibandingkan dengan kompetitornya, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi dan perubahan Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)**

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan pengangkutan komoditas batu bara dapat terdampak oleh fluktuasi harga batu bara, dimana batu bara sebagai barang komoditas, cenderung memiliki harga yang berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan suplai dari seluruh dunia. Fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berada diluar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk faktor iklim dan cuaca, infrastruktur dan kebijakan negara pemasok batu bara, serta komoditas energi lain yang dapat menjadi substitusi batu bara. Dalam melakukan transaksi penjualan, Perseroan dan Perusahaan Anak mengikuti Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*). Apabila harga batu bara turun secara drastis, hal ini akan mendorong pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menurunkan produksi dan pengiriman batu bara, yang akan berdampak pada menurunnya permintaan jasa pengangkutan dan ISP yang disediakan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, dikarenakan

harga jual yang dikenakan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggan mengikuti Harga Batu Bara Acuan Indonesia, maka turunnya harga batu bara juga akan berdampak pada menurunnya harga jual yang dapat dikenakan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggannya. Apabila harga jual batu bara belum pulih, maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kinerja keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kondisi cuaca dan bencana alam**

Kegiatan jasa angkutan batu bara sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan bencana alam. Pada kondisi ekstrem, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari kondisi cuaca dan/atau bencana alam. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak melibatkan transportasi muatan melewati jalur air, maka ketinggian air menjadi faktor penting dalam proses pelayaran. Siklus pasang/surut, tinggi gelombang dan perubahan iklim dan debit air dapat menyebabkan kapal tidak dapat berlayar dikarenakan dibutuhkan ketinggian air yang memadai di jalur pengiriman untuk dapat dilalui oleh kapal tongkang bertonase tertentu yang dimiliki dan dioperasikan Perseroan sesuai dengan rancangan dan rencana usaha Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kondisi cuaca yang buruk dan musim kemarau/ kering dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan rendahnya volume muatan batu bara yang diangkut oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak memenuhi ketepatan jadwal dan jumlah muatan dapat memengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak karena rendahnya muatan batu bara yang dapat diangkut oleh Perseroan dan kegiatan ISP pada Perusahaan Anak. Selain itu, bencana alam juga dapat berdampak pada rusaknya peralatan atau infrastruktur utama yang dapat memengaruhi secara material serta menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko volatilitas harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya**

Bahan bakar adalah komponen yang sangat penting dalam Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile*. Volatilitas dari harga bahan bakar memiliki efek yang signifikan dan material terhadap biaya operasional yang perlu ditanggung oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Harga bahan bakar dapat berubah sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan di pasar dan tidak berada dalam kendali Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila terjadi peningkatan permintaan yang tidak disertai dengan peningkatan produksi bahan bakar di pasar dunia, maka harga bahan bakar dapat mengalami peningkatan yang signifikan dimana harga bahan bakar yang tinggi akan mendorong peningkatan biaya operasional, dimana hal ini dapat memengaruhi biaya jasa yang akan dikenakan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggannya dan karenanya dapat menurunkan daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, terdapat biaya operasional lainnya seperti biaya perbaikan, perawatan kapal, dan alat penunjang usaha yang dapat berfluktuasi sesuai dengan umur serta kondisi kapal, tongkang, serta alat penunjang usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Kenaikan yang signifikan terhadap harga bahan bakar dan biaya operasional lainnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kecelakaan maritim**

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha tidak terlepas dari risiko kerugian atau kecelakaan maritim yang disebabkan berbagai hal, antara lain bencana alam, cuaca buruk, gelombang tinggi, tabrakan/benturan, kapal terdampar, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, tumpahan muatan dan faktor lainnya. Secara umum, kecelakaan berat dalam bentuk apapun dapat mengakibatkan penangguhan proyek penambangan dan dapat berakibat pada pembayaran kompensasi dalam jumlah besar. Kecelakaan juga dapat terjadi sehubungan dengan kegiatan pengangkutan, pemuatan ke dalam tongkang dan bongkar muatan dari tongkang ke lokasi *stockpile*. Kecelakaan-kecelakaan tersebut membawa dampak buruk secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal**

Kapal dan alat-alat penunjang usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak diproduksi oleh galangan kapal dan pabrik, dimana proses pembuatan atau perbaikan dan pengiriman membutuhkan waktu. Penyelesaian pembangunan atau perbaikan kapal atau alat penunjang usaha dapat terhambat karena berbagai faktor seperti tidak tersedianya atau keterlambatan suku cadang yang diperlukan, modal kerja galangan kapal dan pabrik, fasilitas pinjaman/pendanaan galangan kapal dan pabrik, kinerja galangan kapal dan pabrik (termasuk kinerja teknis dan kinerja keuangan), adanya *force majeure*, serta kejadian-kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan dan/atau perusahaan galangan kapal dan pabrik. Selain itu, pengiriman kapal atau alat penunjang usaha yang telah selesai dibuat atau diperbaiki juga membutuhkan rencana yang matang menimbang adanya hambatan cuaca, rute yang dilalui dan dokumentasi yang diperlukan.

Apabila terjadi keterlambatan pengiriman baik kapal atau alat penunjang usaha baru maupun kapal atau alat penunjang usaha lama yang diperbaiki, aktivitas usaha dapat terganggu dan/atau terhambat. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko akses pendanaan melalui kreditur karena adanya pembatasan pemberian pinjaman untuk industri yang mendukung industri pertambangan berbahan baku fosil**

Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dan dunia menjadi perhatian bagi seluruh dunia untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Sebagai langkah konkrit, 196 negara telah menyepakati "Perjanjian Paris" 2015 pada Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCC) di Paris Perancis pada tanggal 12 Desember 2015. Indonesia yang turut serta dalam Perjanjian Paris menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim). Mengacu pada Perjanjian Paris yang dicapai pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim ke-21 pada tahun 2015, sejumlah negara berkomitmen untuk menjaminkan "kontribusi yang ditentukan secara nasional" untuk mengendalikan dan mengurangi emisi GRK. Selain itu, pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2021, sejumlah negara (termasuk Indonesia) berkomitmen untuk menerapkan target penurunan emisi tertentu pada tahun 2030.

Ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman oleh penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi dari energi berbasis fosil ke EBT yang digerakkan oleh negara maju berdampak pada semakin sulitnya mendapat pendanaan untuk proyek di industri pertambangan berbahan baku fosil. Sektor perbankan turut berkontribusi dan menyatakan komitmen dalam langkah pemerintah menurunkan emisi GRK dengan melakukan pembatasan pembiayaan atau menghentikan pendanaan ke sektor batu bara dan energi fosil. Apabila hal ini terjadi, maka akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko investasi atau aksi korporasi**

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, seperti ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak akan berhasil sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan berbagai macam izin dan persetujuan untuk menjalankan kegiatan operasional. Izin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari pemerintah dan peraturan dari pemerintah daerah diperlukan oleh Perseroan untuk kegiatan pelayaran antara lain Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk memperbarui izin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin yang masih berlaku yakni SIUPAL dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya juga telah memiliki izin yang masih berlaku yakni persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri. Namun, berdasarkan Pasal 14 PP No. 5/2021, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi diperlukan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar yang terverifikasi. Berdasarkan KBLI yang dijalankan Perseroan yakni Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132), kegiatan usaha yang dilakukan adalah kegiatan usaha yang tergolong menengah tinggi, sehingga kegiatan usaha tersebut memerlukan dokumen perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi.

Dengan diterbitkannya SEDJPL No. 25/2023 pada tanggal 4 September 2023, Perseroan sebagai perusahaan angkutan laut dalam menjalankan kegiatan usahanya juga tunduk kepada ketentuan SEDJPL No. 25/2023.

Berdasarkan Poin Nomor 5 huruf b SEDJPL No. 25/2023, pemilik kapal dalam bentuk badan hukum Indonesia yang melakukan penanaman modal asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dimaksud agar:

1. Melakukan penyesuaian susunan pemegang saham dalam akta perusahaan guna memenuhi ketentuan pendaftaran kapal bahwa pihak penanam modal dalam negeri dalam usaha patungan (*joint venture*) dimaksud berbentuk:
 - a. Perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk kegiatan niaga; dan/atau
 - b. Badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk kegiatan non-niaga antara lain kegiatan sosial, pariwisata, olahraga.
2. Bagi pemilik kapal yaitu perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan penanaman modal asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*), yang telah mendapatkan legalitas perizinan berusaha angkutan laut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap dapat menjalankan kegiatan usaha dan mengoperasikan kapal milik, serta harus melakukan penyesuaian susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan melaporkan pada saat *endorsement* 2 (dua) tahunan perizinan berusaha angkutan laut.

Berdasarkan Pasal 439 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di sektor transportasi (dalam hal ini termasuk Perseroan yang merupakan pemegang SIUPAL) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. pembekuan Perizinan Berusaha;
3. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
4. denda administratif (yang dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)).

MCT yang saat ini melakukan kegiatan usaha untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri, berdasarkan Pasal 88 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Danau dijelaskan bahwa izin untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri dapat dicabut apabila:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; atau
2. Menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum tanpa penetapan atau izin.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCT masih memiliki izin yang berlaku untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri dan akan melakukan perpanjangan atau penyesuaian sebelum masa berlaku izin tersebut selesai.

Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperbarui semua perizinan dan persetujuan ketika masa berlakunya berakhir, serta mendapatkan perizinan dan persetujuan yang baru apabila diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mampu memperpanjang atau mendapatkan izin yang diperlukan yang belum diperoleh dan saat ini sedang dalam proses atau izin-izin lainnya yang mungkin diperlukan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menerima sanksi yang timbul dari kegagalan memperpanjang atau memperoleh perizinan yang diperlukan. Dikenakannya sanksi hukum secara material dapat memengaruhi kondisi keuangan dan jalannya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui perizinan atau persetujuan yang disyaratkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menjalankan usaha, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan teknologi**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan teknologi yang selalu berkembang. Penerapan digitalisasi dalam proses operasional serta penggunaan sistem teknologi yang modern dapat menentukan efisiensi serta efektivitas proses kegiatan pengangkutan batu bara yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak. Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengadaptasi perkembangan teknologi dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Selanjutnya, apabila para kompetitor menggunakan mesin atau teknologi yang lebih baik dari Perseroan, maka hal tersebut akan membuat pesaing lebih mampu untuk menjalankan kegiatan pengangkutan batu bara dengan kualitas yang lebih efisien dan lebih efektif, dimana hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kelangkaan sumber daya manusia**

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa sumber daya manusia menjadi aset penting untuk mendukung keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak. Oleh karena itu, hubungan kerja dan kualitas sumber daya manusia perlu dijaga untuk menunjang kegiatan bisnis dan rencana jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak. Kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, sebagian besar produk batu bara pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak di ekspor ke negara

Cina dan India sehingga kondisi ekonomi kedua negara tersebut akan memengaruhi permintaan produk batu bara pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak yang selanjutnya akan berdampak pada kinerja, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi tingkat suku bunga**

Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh fasilitas pendanaan dari perbankan maupun pihak lainnya. Dalam hal terjadi kenaikan atas tingkat suku bunga, maka hal ini akan mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Fluktuasi atas tingkat suku bunga di masa yang akan datang juga akan berdampak pada bunga pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi nilai mata uang asing**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman kepada pihak ketiga dimana transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, yaitu USD dan SGD. Pengembalian beban bunga dan pokok utang akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Apabila mata uang USD dan SGD menguat terhadap Rupiah pada saat jadwal pembayaran bunga dan pokok utang, maka hal ini dapat memengaruhi arus kas dan keuntungan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembelian tongkang sungai dengan USD, sedangkan pendapatan diterima dalam Rupiah. Pelemahan mata uang rupiah akan berdampak pada margin keuntungan Perseroan dan Perusahaan Anak dan dapat mengakibatkan penurunan laba bersih, yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja serta kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kebijakan pemerintah serta perubahan-perubahannya**

Sebagai tanggapan atas penegasan hak otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, pemerintah menyerahkan otonomi kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak pemerintah daerah dan biaya lainnya untuk kegiatan usaha di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan masyarakat lokal berpartisipasi dan berinvestasi dalam bisnis tersebut. Keberadaan otonomi daerah dapat menambah regulasi yang berlaku pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, yang dapat meningkatkan biaya operasional, meningkatkan biaya pajak dan biaya usaha lainnya. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko tuntutan hukum dari mitra kerja dan masyarakat sekitar daerah operasional Perseroan dan Perusahaan Anak**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga maupun pihak afiliasi. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kelalaian atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, maka Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Selain itu, terdapat risiko pengajuan tuntutan hukum dari masyarakat yang berada di sekitar daerah operasional Perseroan dan Perusahaan Anak apabila terdapat indikasi bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengganggu kegiatan masyarakat atau mencemari lingkungan sekitar daerah dimana masyarakat bertempat tinggal. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap reputasi, prospek, dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan kondisi sosial, politik, dan keamanan di Indonesia yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak**

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada kondisi sosial, politik, dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Semua kegiatan usaha dan aset Perseroan dan Perusahaan Anak berada di Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan lain di bidang politik, atau peraturan di Indonesia atau perkembangan di dunia internasional yang memengaruhi Indonesia, seluruhnya berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika risiko tersebut terjadi, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya. Seluruh pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara historis diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan Perseroan dan Perusahaan Anak mengantisipasi akan terus memperoleh pendapatannya dalam jumlah yang substansial dari Indonesia.

Perseroan dan Perusahaan Anak seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan, oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak, dan nilai investasi dapat turun secara signifikan, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pelanggan yang memiliki perjanjian untuk pengiriman batu bara ke mancanegara. Oleh sebab itu, Perseroan dan Perusahaan Anak harus mematuhi ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada negara tersebut dan peraturan internasional. Dalam hal Perseroan dan Perusahaan Anak gagal memenuhi peraturan yang berlaku, hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

D. Risiko Bagi Investor

- **Risiko likuiditas saham**

Sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum, saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan terdapat kemungkinan bahwa perdagangan saham Perseroan secara publik setelah Penawaran Umum tidak dapat berkembang atau dipertahankan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan saham tersebut akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak terdapat jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik dapat diperdagangkan secara aktif dan akan berkembang, atau jika berkembang dapat dipertahankan, atau bahwa harga perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Apabila saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik tidak dapat diperdagangkan secara aktif dan perdagangan tersebut tidak dapat berkembang atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan ditentukan setelah dilakukannya proses Penawaran Awal berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mencerminkan harga di mana saham akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum. Terdapat kemungkinan bahwa investor tidak dapat menjual kembali saham Perseroan dengan harga yang menarik.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak bisa membagi dividen-dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan para pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembagian dividen-dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan yang sudah ada atau di masa depan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dividen hanya setelah periode waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dengan para pemberi pinjaman. Perseroan juga mungkin membuat perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya-biaya atau menimbulkan tanggung jawab yang akan mengurangi atau menghabiskan uang yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham-saham, investor mungkin tidak akan menerima pengembalian (*return*) apa pun atas investasi yang telah dilakukan di dalam saham-saham kecuali investor menjual saham-saham pada harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

- **Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Ancara Logistics Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 437 tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037867. AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. AHU-0127898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- Angkutan Laut;
- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus;
- Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus;
- Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
- Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus;
- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI;
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
- Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
- Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; dan
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	6.375	6.375.000.000	51,00
PT Solomed Property	6.125	6.125.000.000	49,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan material yaitu:

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 15 tertanggal 9 Desember 2021, dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000423.AH.01.02. TAHUN 2022 tertanggal 4 Januari 2022 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0003922 tertanggal 4 Januari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0001199.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 4 Januari 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) perubahan alamat lengkap perseroan dan (ii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tertanggal 25 Agustus 2023, dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110148 tertanggal 28 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0167126.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 28 Agustus 2023 ("**Akta Perseroan No. 17/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tertanggal 29 Agustus 2023, dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051500.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169500.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta Perseroan No. 32/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) penerbitan saham baru dan (ii) peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066247.AH.01.2.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0135073 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217063.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 ("**Akta Perseroan No. 66/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
 1. melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham atau dengan rasio 1:200.000.
 2. perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Ancara Logistics Indonesia menjadi PT Ancara Logistics Indonesia Tbk.
 3. perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
 4. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan.
 5. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) Peraturan OJK No. 15/2020, (iii) Peraturan OJK No. 32/2015, (iv) Peraturan OJK No. 16/2020, dan (v) Peraturan OJK No. 33/2014, dan perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar.
- e. Akta Perseroan No. 5/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
 1. menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 3.165.160.000 saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal per saham sebesar Rp5, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh serta seluruh saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana pada BEI termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka IPO sesuai dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar

modal Indonesia, setiap dokumen penawaran, perjanjian, dan/atau dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana. Para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.

2. memberikan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 29.860.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu) saham dari Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku.
3. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000.

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023.

Para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod sebagai pengendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/2021 melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 28 tertanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132).

Kegiatan usaha penunjang

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131); dan
- b. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229).

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah jasa pengangkutan laut dan *transshipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	9120111261563	16 Desember 2019	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	S-3606/KT/KPP.040103/2023	15 November 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Setiabudi Satu

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
3.	SKT (Samarinda, Kantor Cabang Perseroan)	S-8094KT/WPJ.14/KP.1003/2021	1 Oktober 2021	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Samarinda Ulu
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	S-501/KPK/KPP.040103/2023	15 November 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Setiabudi Satu
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak	92.423.757.1-018.000	2 Agustus 2019	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (Samarinda, Kantor Cabang Perseroan)	92.423.757.1-741.001	2 Agustus 2019	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu
7.	Sertifikat Standar Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132)	91201112615630002	27 November 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
8.	SPPL Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132)	-	12 September 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132)	18012210213174423	18 Januari 2022	18 Januari 2025	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
10.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	AL.010/109/DA-2022	5 Februari 2022	5 Februari 2024*	Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
11.	Surat Tanda Registrasi Perusahaan (Izin sebagai agensi <i>shipping</i>)	ALI.001/5/17.KSOP.SMD-2023	30 Oktober 2023	30 Oktober 2024	Kementerian Perhubungan c.q. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda

*Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, surat izin usaha perusahaan angkutan laut milik Perseroan sedang dalam proses perpanjangan.

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2020 telah mengalami perubahan sejak Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 11 tertanggal 6 November 2019, dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0094480.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 November 2019 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0359993 tertanggal 15 November 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0219563.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 November 2019 ("**Akta Perseroan No. 11/2019**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham milik PT Solomed Property kepada Solomed Capital Pte. Ltd. Sebanyak 6.125 lembar saham dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	51,00
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	49,00
Total Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.000	51.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	49.000	49.000.000.000	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 11/2019 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	51,00
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	49,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.000	51.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	49.000	49.000.000.000	

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 11/2019 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	51,00
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	49,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.000	51.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	49.000	49.000.000.000	

Tahun 2023 (29 Agustus 2023): Kompensasi Tagihan, Peningkatan Modal dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp8.720.000.000 berasal dari hak tagih sejumlah Rp100.499.744.000 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang dimiliki oleh BLI kepada Perseroan, yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 32/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi Rp238.880.000.000;
- modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp51.000.000.000 menjadi Rp59.720.000.000,

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 32/2023 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	238.880	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	43,55
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	41,85
PT Borneo Logistik Indonesia	8.720	8.720.000.000	14,60
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.720	59.720.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	179.160	179.160.000.000	

Sebagai informasi tambahan, penerbitan saham Perseroan sebanyak 8.720 saham, yang mana saham tersebut diperuntukkan bagi BLI sebagai pembayaran utang Perseroan kepada BLI sehubungan dengan Perseroan telah membeli 15 kapal sebesar Rp100.499.744.000 berdasarkan Perjanjian Induk Jual Beli Kapal antara BLI dan Perseroan tanggal 28 Agustus 2023. Namun, Perseroan belum melakukan pembayaran dan BLI memiliki tagihan sejumlah tersebut. Sehubungan dengan utang Perseroan tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2023, GAN dan SC selaku pemegang saham Perseroan pada saat itu menyetujui penerbitan saham baru sebanyak 8.720 lembar saham kepada BLI sebagai bentuk pembayaran kewajiban Perseroan kepada BLI.

Selisih antara utang Perseroan atas Pembelian Kapal BLI sejumlah Rp100.499.744.000 dengan modal ditempatkan dan disetor atas penerbitan saham baru sejumlah Rp8.720.000.000 sebagaimana dimaksud di atas, dicatatkan sebagai tambahan modal disetor sejumlah Rp91.780.000.000.

Tahun 2023 (Oktober 2023): Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*)

Berdasarkan Akta Perseroan No. 66/2023 tanggal 24 Oktober 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham atau dengan rasio 1:200.000, sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	43,55
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	41,85
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	14,60
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.944.000.000	59.720.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.832.000.000	179.160.000.000	

Tahun 2023 (November 2023): Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 tanggal 1 November 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp63.303.200.000 terbagi menjadi 12.660.640.000 lembar saham dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000 yang diambil bagian oleh (i) Nalinkant Amratlal Rathod, sejumlah 333.347.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu) saham dan (ii) Aninditha Anestya Bakrie, sejumlah 383.293.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) saham, sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000	

Penyetoran modal oleh Nalinkant Amratlal Rathod dan Aninditha Anestya Bakrie kepada Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 dilakukan masing-masing dalam bentuk uang secara tunai oleh Nalinkant Amratlal Rathod dengan total nilai sejumlah Rp1.666.735.000 dan oleh Aninditha Anestya Bakrie dengan total nilai sejumlah Rp1.916.465.000, yang keduanya direalisasikan pada tanggal 2 November 2023.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

a. PT Graha Adika Niaga ("GAN")

Riwayat Singkat

GAN didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal 28 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Erika Nurul Jauhary, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-07392.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011973.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 11 Februari 2011 ("**Akta Pendirian GAN**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar GAN**").

Anggaran Dasar GAN telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 100 tanggal 15 November 2023, yang dibuat di hadapan Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070599.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0185473 tanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230314.AH.01.11.Tahun 2023 ("**Akta GAN No. 100/2023**").

GAN berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan alamat terdaftar di Bakrie Tower, Lantai 39, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GAN, maksud dan tujuan GAN adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, keuangan, asuransi, dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, GAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132);
- Aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200); dan
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GAN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 11 tertanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024964.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 23 Desember 2016 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111518 tertanggal 23 Desember 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154403.AH.01.11.TAHUN 2016 tertanggal 23 Desember 2016, struktur permodalan dan susunan GAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Ir. Aburizal Bakrie	34.793	34.793.000.000	99,90
Anindya Novyan Bakrie	34	34.000.000	0,10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.827	34.827.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	65.173	65.173.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor 13 tertanggal 8 November 2021 yang dibuat dihadapan Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Perubahan data perseroan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0470665 tanggal 8 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195291.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 sebagaimana telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta GAN No. 100/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GAN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Aburizal Bakrie
 Komisaris : Tatty Murnitriati Bakrie

Direksi

Direktur Utama : Sigit Widyanto
 Direktur : Muhammad Sahid Mahudie

b. Solomed Capital Pte. Ltd. ("SC")

Riwayat Singkat

SC didirikan pada tahun 1998 berdasarkan *Certificate of Incorporation of Private Company* tanggal 11 Juli 1998.

SC berkantor pusat di 9 Raffles Place #35-02 Republic Plaza Singapura 048619.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority Business Profile (Company)* atas nama Solemed Capital Pte. Ltd yang dimohonkan pada tanggal 5 September 2023, kegiatan usaha SC adalah:

- Wholesale Trade of A Variety of Goods Without A Dominant Product*
- General Wholesale Trading & Logistics (Including General Importers & Exporters)*
- Other Holding Companies*
- Investment Holding Company*

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority Business Profile (Company)* atas nama Solemed Capital Pte. Ltd yang dimohonkan pada tanggal 5 September 2023, struktur permodalan dari SC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal SGD1 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)	%
Modal Ditempatkan			
Pemegang Saham			
Nalinkant Amratlal Rathod	14.990.000	14.990.000	74,95
Asia Pacific Investment Holdings Limited	5.000.000	5.000.000	25,00
Rahul Nalin Rathod	10.000	10.000	0,05
Total Modal Ditempatkan	20.000.000	20.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority Business Profile (Company)* tanggal 5 September 2023, susunan Direksi SC adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Rahul Nalin Rathod
Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod

c. PT Borneo Logistik Indonesia ("BLI")

Riwayat Singkat

BLI didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pendirian No. 70 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024964.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 16 April 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069174.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 16 April 2020 ("**Akta Pendirian BLI**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BLI**").

BLI berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan alamat terdaftar di Bakrie Tower, Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BLI, maksud dan tujuan BLI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BLI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131); dan
- b. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBI 50132).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLI berdasarkan Akta No. 48 tertanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0156272 tertanggal 28 Agustus 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167339.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 28 Agustus 2023 (“**Akta BLI No. 48/2023**”), struktur permodalan dan susunan BLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Sang Mitra Solusindo	1.485	1.485.000.000	99,00
Felicia Seri Ulina Tarigan	15	15.000.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	4.500	4.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta BLI No. 48/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BLI adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

Komisaris : Felicia Seri Ulina Tarigan

Direksi

Direktur Utama : Amith Baxi

Direktur : Kristina Sitinjak

4. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Mahakam Coal Terminal	Jasa bongkar muat batu bara	70,00	2007	2019	2020	23,72%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023

PT Mahakam Coal Terminal ("MCT")

a. Riwayat Singkat

MCT, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia. MCT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MCT No. 21, tertanggal 8 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 10 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W7-03867 HT.01.01-TH.2007 tanggal 10 April 2007, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan nomor pendaftaran No. 818/BH 09 03/IV/2007 dan TDP No. 0903/5252264, yang keduanya tertanggal 20 April 2007 ("**Akta Pendirian MCT**"), yang mana tidak terdapat dokumen pengumuman dalam TBNRI atas Akta Pendirian MCT. Mengacu kepada Pasal 85 ayat (2) Jo. Pasal 85 ayat (1) UUPT 1995 yang mana peraturan yang berlaku pada saat pendirian MCT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Akta Pendirian MCT telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham MCT No. 16 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0110145 tanggal 28 Agustus 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0156161 tanggal 28 Agustus 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167103.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCT dan (ii) perubahan Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi) MCT ("**Akta MCT No. 16/2023**").

Kepemilikan saham Perseroan pada MCT termuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 7 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Firdhonal S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341449 tanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186711.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, yang mana telah terjadi pengambilalihan saham yang dimiliki PT Fajar Bumi Shipping oleh Perseroan. Meskipun bukti pengumuman koran dan karyawan atas transaksi pengambilalihan saham oleh Perseroan sebagaimana di atas tidak dapat diketemukan, PT Fajar Bumi Shipping telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa tidak ada karyawan dan kreditur yang mengajukan keberatan mengenai proses pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan atas MCT.

MCT berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang beralamat terdaftar di Bakrie Tower, Lantai 15, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MCT, maksud dan tujuan MCT adalah untuk melakukan usaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, dan pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MCT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
 1. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100);
 2. perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk YBDI (KBLI 46610).

- b. menjalankan usaha di bidang pengangkutan yang meliputi:
 1. aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut (KBLI 52221);
 2. aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau (KBLI 52222);
 3. aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyebrangan (KBLI 52223).
- c. menjalankan usaha di bidang pertambangan yang meliputi:
 1. pertambangan batu bara (KBLI 05100);
 2. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MCT yang telah berjalan adalah bongkar (*unloading*) muatan batu bara dari tongkang sungai ke lokasi penimbunan batu bara (*stockpile*), pemuatan (*loading*) muatan batu bara dari lokasi *stockpile* ke tongkang laut, dan kegiatan penimbunan batu bara pada lokasi *stockpile*.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MCT mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 19 September 2019, dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341449 tanggal 4 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186711.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 ("**Akta MCT No. 7/2019**"), para pemegang saham MCT telah menyetujui pengalihan saham milik PT Fajar Bumi Shipping kepada Perseroan sebanyak 17.500 lembar saham.

Modal dasar MCT berjumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 50.000 saham atau senilai Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	35.000	3.500.000.000	70,00
Honardy Boentario	5.000	500.000.000	10,00
PT Ade Putra Tanrajeng	5.000	500.000.000	10,00
PT Guruh Putra Bersama	5.000	500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	-	-	

d. Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MCT telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Keterangan Terdaftar	S-111OKT/WPJ.04/KP.0103/2022	25 April 2022	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Satu
2.	Nomor Induk Berusaha	8120010210223	13 Desember 2021	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	21.004.059.6-013.000	21 Maret 2007	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
4.	SPPKP	S-151PKP/WPJ.04/KP.0103/2022	31 Desember 2019	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Satu
5.	PKKPR Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (KBLI 52222)	131221102164020	13 Desember 2021	13 Desember 2024	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Persetujuan Perpanjangan Kedua Penggunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Mahakam Coal Terminal Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum	A.56/AL.308/DJPL	10 Januari 2024	10 Januari 2026	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perpanjangan Pengoperasian TUKS	812001021022300010001	10 Mei 2023	9 Mei 2028	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
8.	Izin Usaha Jasa Pertambangan	81200102102230002	10 Mei 2023	10 Mei 2028	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
9.	PKKPR Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)	01042310216402001	31 Maret 2023	31 Maret 2026	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
10.	SPPL Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)	-	12 September 2023	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

e. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCT sebagaimana dinyatakan dalam Akta MCT No. 16/2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nalinkant Amratlal Rathod
 Komisaris : Meliani Bunawan
 Komisaris : Faisal Mohamad Nur
 Komisaris : Aninditha Anestya Bakrie

Direksi

Direktur Utama : Munawir
 Direktur : Rahul Nalin Rathod
 Direktur : Honardy Boentario
 Direktur : Vishal Manharlal Parekh

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	1.068.273.668	991.434.260	919.387.338	859.470.738
Total Liabilitas	1.090.209.654	1.021.335.278	909.872.025	848.408.032
Total Ekuitas	(21.935.986)	(29.901.018)	9.515.313	11.062.706

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	157.256.105	90.259.250	163.296.265	161.142.260	47.832.258
Beban pokok pendapatan	(61.861.562)	(54.975.948)	(82.514.985)	(69.134.550)	(30.903.693)
Laba (rugi) neto	7.974.727	(22.029.013)	(39.210.721)	(1.536.612)	(18.769.681)
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	7.965.032	(22.166.086)	(39.416.331)	(1.547.393)	(18.769.681)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Total Aset MCT pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.068.273.668 ribu, meningkat sebesar Rp76.839.408 ribu atau 7,75% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp991.434.260 ribu. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang pihak berelasi - neto perusahaan sebesar Rp67.735.100 ribu dikarenakan peningkatan pendapatan, meningkatnya aset hak-guna dikarenakan adanya penambahan sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun untuk lokasi penimbunan batu bara (*stockpile*).

Total Liabilitas MCT pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.090.209.654 ribu, meningkat sebesar Rp68.874.376 ribu atau 6,74% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.021.335.278 ribu. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa dikarenakan adanya sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun dan meningkatnya utang jangka panjang karena adanya penambahan utang kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Total Ekuitas MCT pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah defisit sebesar Rp21.935.986 ribu, menurun sebesar Rp7.965.032 ribu atau 26,64% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp29.901.018 ribu. Penurunan defisit atas Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Aset MCT pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp991.434.260 ribu, meningkat sebesar Rp72.046.922 ribu atau 7,84% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp919.387.338 ribu. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak berelasi - neto sebesar Rp68.723.073 ribu dikarenakan pendapatan bunga atas piutang tersebut dan penambahan aset tetap di tahun berjalan.

Total Liabilitas MCT pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.021.335.278 ribu, meningkat sebesar Rp111.463.253 ribu atau 12,25% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp909.872.025 ribu. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang dikarenakan adanya penambahan bunga tahun berjalan.

Total Ekuitas MCT pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp29.901.018 ribu, menurun sebesar Rp39.416.331 ribu atau 414,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 surplus sebesar Rp9.515.313 ribu. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian pada tahun berjalan Rp39.210.721 ribu.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset MCT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp919.387.338 ribu, meningkat sebesar Rp59.916.600 ribu atau 6,97% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp859.470.738 ribu. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar dikarenakan meningkatnya piutang usaha - neto - pihak berelasi perusahaan sebesar Rp11.741.144 ribu karena adanya kenaikan pendapatan dari pihak berelasi dan peningkatan aset tetap - neto sebesar Rp26.856.175 ribu.

Total Liabilitas MCT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp909.872.025 ribu, meningkat sebesar Rp61.463.993 ribu atau 7,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp848.408.032 ribu. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang dikarenakan adanya penambahan bunga tahun berjalan.

Total Ekuitas MCT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.515.313 ribu, menurun sebesar Rp1.547.393 ribu atau 13,99% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.062.706 ribu. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan karena rugi neto tahun berjalan sebesar Rp1.536.612 ribu.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Pendapatan MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp157.256.105 ribu, meningkat sebesar Rp66.996.855 ribu atau 74,23% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp90.259.250 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 837.707 MT.

Beban pokok pendapatan MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp61.861.562 ribu, meningkat sebesar Rp6.885.614 ribu atau 12,52% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp54.975.948 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional dikarenakan meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 837.707 MT.

Laba neto MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp7.974.727 ribu, meningkat sebesar Rp30.003.740 ribu atau 136,20% jika dibandingkan dengan rugi neto pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp22.029.013 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar serta meningkatnya efisiensi biaya operasional pada periode berjalan.

Penghasilan komprehensif neto MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp7.965.032, meningkat sebesar Rp30.131.118 ribu atau 135,93% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif neto pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp22.166.086 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan serta meningkatnya efisiensi biaya operasional.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp163.296.265 ribu, meningkat sebesar Rp2.154.005 ribu atau 1,34% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp161.142.260 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 35.193 MT.

Beban pokok pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.514.985 ribu, meningkat sebesar Rp13.380.435 ribu atau 19,35% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp69.134.550 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pemeliharaan dan kenaikan biaya depresiasi karena meningkatnya investasi aset tetap.

Rugi netto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.210.721 ribu, meningkat sebesar Rp37.674.109 ribu atau 2.451,76% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.536.612 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan dan kerugian selisih kurs netto dikarenakan nilai tukar yang rupiah yang terdepresiasi di tahun 2022.

Rugi komprehensif netto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.416.331 ribu, meningkat sebesar Rp37.868.938 ribu atau 2.447,27% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.547.393 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian selisih kurs netto dan beban pokok pendapatan secara signifikan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

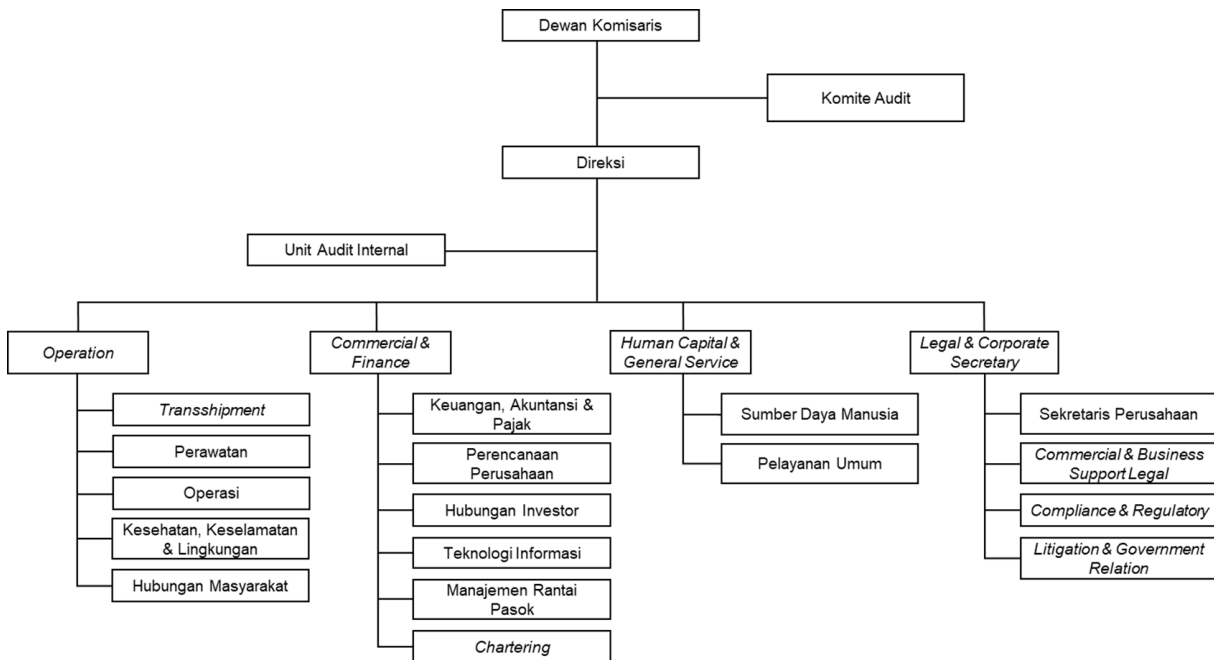
Pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp161.142.260 ribu, meningkat sebesar Rp113.310.002 ribu atau 236,89% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.832.258 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 1.279.471 MT.

Beban pokok pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.134.550 ribu, meningkat sebesar Rp38.230.857 ribu atau 123,71% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp30.903.693 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional yang dikarenakan meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 1.279.471 MT.

Rugi netto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.536.612 ribu, menurun sebesar Rp17.233.069 ribu atau 91,81% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.769.681 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan secara signifikan dan meningkatnya efisiensi biaya operasional.

Rugi komprehensif netto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.547.393 ribu, menurun sebesar Rp17.222.288 ribu atau 91,76% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.769.681 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan secara signifikan dan meningkatnya efisiensi biaya operasional.

5. Struktur Organisasi Perseroan



6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nalinkant Amratlal Rathod
Komisaris	: Aninditha Anestya Bakrie
Komisaris Independen	: Agus Suharyono

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diputuskan Direksi dan pengelolaan usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Membentuk Komite Audit.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2023, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 5 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi

Direktur Utama	: Faisal Mohamad Nur
Direktur	: Rahul Nalin Rathod
Direktur	: Vishal Manharlal Parekh
Direktur	: Munawir
Direktur	: Aulia

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2023, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 5 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Nalinkant Amratlal Rathod, Komisaris Utama

Warga Negara India, 73 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 1970 di Andhra University dan memiliki sertifikasi *Certified Public Accountant* (CPA) dari Institute of Chartered Accountant of India pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di Precision Products Limited sebagai *Accountant* (1970-1973), Visram Automotive Service sebagai *Junior Officer Production* (1974-1976), ICICI Limited sebagai *Junior Officer* (1976-1979), Ashok Leyland Limited sebagai *Assistant Manager Corporate Planning* (1979-1981), PT Texmaco Indonesia Jaya sebagai *Head of Treasury* (1981-1982), PT Tripatra Engineering sebagai *Head of Project Support and Control* (1982-1987), PT Pana Perma sebagai *General Manager* (1987-1991), Great Asian Holdings Pte Ltd sebagai *Managing Director* (1989-sekarang), Timeswitch Investments Ltd sebagai *Managing Director* (1991-1993), PT Bakrie Investindo sebagai *Vice President* (1991-1993), PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai *Managing Director* dan *Chief Operating Officer* (1993-2001), PT Bakrie Investindo sebagai *Direktur Utama* (2000-2001), Capital Managers Asia Pte Ltd sebagai *Managing Director* (2001-2012), PT CMA Indonesia sebagai *Direktur* (2002-2012), PT Cakrawala Andalas Televisi sebagai *Komisaris* (2002-2012), CMA Asset Management sebagai *Komisaris Utama* (2003-2004), PT Semesta Marga Raya sebagai *Komisaris Utama* (2004-2007), PT Bakrie Telecom Tbk sebagai *Komisaris* (2005-2012), PT Bumi Resources Tbk sebagai *Komisaris* (2005-2010), PT Bakrie Global Ventura sebagai *Direktur Utama* (2006-2012), PT Energi Mega Persada Tbk sebagai *Komisaris* (2007-2012), PT Arutmin Indonesia sebagai *Direktur Utama* (2007-2011), PT Kaltim Prima Coal sebagai *Direktur Utama* (2007-2011), PT Bakrie & Brother Tbk sebagai *Direktur Utama* (2008-2010), PT Bumi Resources Minerals Tbk sebagai *Komisaris* (2010-sekarang), PT Kaltim Prima Coal sebagai *Komisaris Utama* (2011-sekarang), PT Arutmin Indonesia sebagai *Komisaris Utama* (2010-sekarang), Bumi Plc., London sebagai *Chief Executive Officer* (2011-2012), PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai *Direktur Utama* (2012-2013), PT Bakrie Global Ventura sebagai *Komisaris* (2013-2016), Ancara Resources Pte Ltd. sebagai *Direktur* (2016-sekarang), PT Kutai Bara Nusantara sebagai *Komisaris* (2016-2021), Ancara Resources Limited sebagai *Direktur* (2016-sekarang), Leap Coal Indonesia sebagai *Komisaris* (2019-sekarang), PT Bara Milenia Energi sebagai *Komisaris* (2019-sekarang), PT Tribara Daya Global sebagai *Komisaris* (2019-sekarang), PT Guruh Putra Bersama sebagai *Komisaris* (2019-sekarang), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai *Komisaris* (2019-sekarang), PT Ancara Logistics Indonesia sebagai *Komisaris* (2019-2023), PT Mahakam Coal Terminal sebagai *Komisaris* (2019-2023), PT Darma Henwa Tbk sebagai *Komisaris* (2020-sekarang), PT Sekar Utama Perkasa sebagai *Komisaris* (2020-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai *Komisaris Utama* (2020-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai *Komisaris Utama* (2023-sekarang).



Aninditha Anestya Bakrie, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science in French and Sociology* pada tahun 1999 dan gelar *Master of Science in Communications, Culture and Technology* di Georgetown University pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT Andalas Cakrawala Televisi (ANTV) sebagai *Marketing Executive* (2002-2003), *Deputy of GM Marketing, Sales & Programming* (2003-2005) dan *Deputy Director of Programming & Production* (2005-2006), PT Asia Global Media sebagai *Deputy of Chief Executive Officer* (2006-2010), PT Bakrie Swasakti Utama sebagai *Director of Commercial Leasing* (2007-2011) dan *Deputy of Managing Director* (2011-2015), PT Bakrie Pesona Rasuna sebagai Direktur (2013-2016), PT Bakrie Global Ventura sebagai Komisaris Utama (2013-sekarang), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Guruh Putra Bersama sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Kutai Bara Nusantara sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Tribara Daya Global sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Bara Milenia Energi sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Sekar Utama Perkasa sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Leap Coal Indonesia (2020-sekarang), Bakrie Untuk Negeri sebagai Eksekutif Direktur (2022-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Komisaris (2023-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Komisaris (2023-sekarang).



Agus Suharyono, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Agricultural Science* di Universitas Brawijaya pada tahun 1988 dan gelar *Master in Agricultural Economic* di University of Maine pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebagai Direktur Keuangan (2010-2013), PT Pelindo 3 (Persero) sebagai Komisaris (2013-2014), PT Pelindo 2 (Persero) sebagai Komisaris (2014-2016), PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai Komisaris (2016-2020), PT Perkebunan Nusantara V sebagai Komisaris (2020-2022), PT Telkom Akses, Perusahaan Anak PT Telkom (Persero) sebagai Direktur Keuangan (2022-2023), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Ketua Komite Audit (2023-sekarang) dan sebagai Komisaris Independen (2023-sekarang).

Direksi



Faisal Mohamad Nur, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti pada tahun 1993, *Master of Commerce in Finance* di University of New South Wales pada tahun 2000, *Master in Management* di Swiss German University pada tahun 2010 dan *Master of Business Administration* di The Hochschule Konstanz – *University of Applied Sciences* pada tahun 2010. Memiliki sertifikasi *Certified Professional Management Accountant* dari The Indonesian Institute of Management Accountants pada tahun 2019 dan *ASEAN Chartered Professional Accountant* dari ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC) pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT M-Web Indonesia (Grup Perusahaan MIH) sebagai *Financial Controller* (2001-2003), PT Reime Indonesia (Grup Reime NIS AS) sebagai Direktur Keuangan (2003-2005), PT Holcim Indonesia Tbk sebagai Asisten Eksekutif Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer* (2005-2012), PT Banyu Kahuripan Indonesia (Grup MAKIN) sebagai Direktur Keuangan (2012-2013), PT Baruna Raya Logistics sebagai Direktur Keuangan (2014-2016) dan *Managing Director* (2016-2017), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai Direktur Keuangan (2017-2020), PT Prasetya Mulya ELI sebagai *Resident Consultant* (2020-2023), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Komisaris (2023-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Direktur Utama (2023-sekarang).



Rahul Nalin Rathod, Direktur

Warga Negara India, 38 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science Degree in Finance* dari Kelley School of Business, Indiana University Bloomington pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Menjabat di Credit Suisse Singapore sebagai *Analyst* (2007-2008), Cove Capital (Singapore) Pte Ltd sebagai *Senior Associate* (2008-2017), PT Bara Milenia Energi sebagai Direktur (2016-2021), PT Tribara Daya Global sebagai Direktur (2016-2021), PT Kutai Bara Nusantara sebagai Direktur (2016-2021), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai Direktur (2016-2021), Smart Alliance Limited sebagai Direktur (2016-sekarang), Leap Forward Resources Limited sebagai Direktur (2016-sekarang), PT Leap Coal Indonesia sebagai Direktur (2017-2022), PT Guruh Putra Bersama sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Sekar Utama Perkasa sebagai Direktur (2020-sekarang), Gimbal Capital (Singapore) Pte Ltd sebagai Direktur (2008-sekarang), Solomed Capital Pte Ltd sebagai *Managing Director* (2008-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Direktur (2019-sekarang) dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Direktur (2019-sekarang).



Vishal Manharlal Parekh, Direktur

Warga Negara India, 41 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce (Honors)* di Narsee Monjee (NM) College (Mumbai University) pada tahun 2003 dan memiliki sertifikat *Chartered Accountant (CA)* dari Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Menjabat di Tata Power Trading Co. Ltd sebagai *Finance & Accounting Manager* (2008-2012), Coastal Gujarat Power sebagai *Finance, Treasury & Forex Management Manager* (2012-2014), Tata Power Co. Ltd. Sebagai *Group Head, Corporate Treasury & Investor Relation* (2014-2016), PT Baramulti Suksessarana Tbk dan PT Antang Gunung Meratus sebagai *Deputy CFO* (2016-2020), PT Bara Milenia Energi sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Tribara Daya Global sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Guruh Putra Bersama sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Kutai Bara Nusantara sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Leap Coal Indonesia sebagai Direktur (2020-sekarang) dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Direktur (2020-sekarang).



Munawir, Direktur

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh ijazah Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang pada tahun 1982, Ahli Nautika Tingkat II (ANT-II) di PIP Semarang pada tahun 1987, Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I) di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di Pacific International Lines (PIL), Pacific Ocean Line Singapore (POL) dan Malaysian Shipping Corporation (MSC) sebagai *Seafarer, 3rd Officer, 2nd Officer, Chief Officer, Master Ocean Going Vessel with various Vessel Type, Bulk Carrier, Container, Tanker* (1982-1999), PT Indonesia Bulk Terminal sebagai *Operation Manager* (2000-2005), PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk sebagai *Onshore Manager* (2005-2011), PT Transcoal Pacific Tbk sebagai *General Manager Transshipment* (2011-2015), PT Ship Transport Services sebagai *Chief Operating Officer dan Fuel Handling* (2015-2017), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang sebagai Dosen (2017-2018), PT Melco Jaya Bahari sebagai *Ship Master Bulk Carrier 48.000 ton* (2018-2019), PT Mahakam Coal Terminal sebagai *Chief Operating Officer* (2019-2023) dan Direktur Utama (2023-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai *Chief Operating Officer* (2019-2023) dan Direktur (2023-sekarang).



Aulia, Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan memiliki izin Advokat sejak tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di beberapa *law firm* dan korporasi sebagai *Associate* dan *Officer* (2001-2004), DNC Advocate at Work sebagai *Associate* (2004-2006), PT ATPK Resources Tbk sebagai *Legal Advisor* (2006-2008), PT Bayan Resources Tbk sebagai *Head of Legal Department* (2008-2011), PT Equator Sumber Energi (*Member* dari Grup Barito) sebagai *Corporate Secretary* dan *Legal Manager* (2011-2012), PT Solusi Karya Prima sebagai *Chief of Corporate Affair* (2012-2013), Dyah Ersita & Partners sebagai *Senior Associate* (2013-2017), PT Baramulti Suksessarana Tbk sebagai *Head of Legal & Compliance* (2017-2019), Thamrin & Rekan (TR & Co) Law Firm sebagai *Of Counsel* (2019-2022), PT Kutai Bara Nusantara sebagai *Chief Legal Officer* (2022-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai *Chief Legal Officer* (2022-sekarang) dan Direktur (2023-sekarang).

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Rahul Nalin Rathod	Direktur	Anak dari Nalinkant Amratlal Rathod selaku Komisaris Utama dan pengendali Perseroan
2.	Aninditha Anestya Bakrie	Komisaris	Anak dari Aburizal Bakrie selaku pengendali Perseroan

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp745.585 ribu untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, namun fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Sedangkan, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. 0194/ALI-LGL/X/23 tanggal 1 November 2023, Perseroan mengangkat Aulia sebagai Sekretaris Perusahaan. Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Aulia telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 6 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk**

Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095
Email: corsec@ancaralogistics.com

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/2015. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit No. 0190/ALI-LGL/X/23 tanggal 30 Oktober 2023, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Agus Suharyono
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Agus Suharyono telah diungkapkan pada Bab X sub bab 6 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Mardianus Pramudya
Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Brawijaya pada tahun 1993 dan gelar *Master of Technology Management* di Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai *Senior Manager Business Development* (2008), sebagai *General Manager Finance* (2016), sebagai *General Manager Logistic* (2018) dan Direktur *Finance* dan *Human Resource* (2018), PT Inka Multi Solusi sebagai Komisaris (2015), PT Arkana Trade Capital sebagai Direktur (2020-sekarang), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai anggota Komite Audit (2022-sekarang).

Mengikut *ECA Finance Training* di Hong Kong (2018) serta memiliki sertifikasi *Certified Professional Management Accountant*.

Anggota : Pradeep Kilpady
Warga Negara India, 68 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di Madras University pada tahun 1975.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT Bank Susila Bhakti sebagai *Advisor Board of Directors* (1989-1991), PT Pentasena Arthasentosa Securities sebagai *Senior Vice President Investment Banking* (1994-1999), PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai *Managing Director Investment Banking* (1999-2004), PT Kilpady Consultants Indonesia sebagai Presiden Direktur (2004-sekarang), Erudite Advisors Pte. Ltd. Sebagai Direktur (2010-sekarang), PT Baramulti Suksessarana Tbk sebagai anggota Komite Audit (2013-sekarang), PT Murni Sadar Tbk sebagai anggota Komite Audit (2021-sekarang), dan PT Cemindo Gemilang Tbk sebagai anggota Komite Audit (2021-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak yang berwenang lainnya, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari 1 (satu) akuntan publik;
- e. menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- f. menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- g. apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite Audit sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan;
- i. membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
 1. mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan Perseroan;
- j. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- k. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2023, belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 30 Oktober 2023.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 November 2023. Perseroan telah menunjuk Abid Hafizh Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Ancara Logistics Indonesia Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal No. 0200/ALI-LGL/XI/23 tanggal 1 November 2023 dan ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 0193/ALI-LGL/X/23 tanggal 1 November 2023.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada seluruh tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- i. Melaksanakan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- **Risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional**

Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa memonitor pergerakan harga batu bara acuan berdasarkan *Indonesia Coal Price Index* (ICI) dan perkembangan penawaran dan permintaan batu bara baik secara domestik maupun secara global. Di samping itu, Perseroan berpandangan bahwa industri batu bara nasional dan global masih cukup menjanjikan dari sisi harga, penawaran serta permintaan, sehingga Perseroan melihat belum perlu melakukan ekspansi atau strategi perubahan bisnis untuk komoditas yang diangkut.

- **Risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama**

Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap 2 (dua) pelanggan utama, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa akan secara aktif menambah pelanggan baru sehingga dapat mendiversifikasi dan menambah portofolio pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan strategi pemasaran dan penjualan, kualitas sumber daya serta kualitas pelayanan untuk pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan baru di masa yang akan datang. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, Perseroan telah menambah 1 (satu) pelanggan pihak ketiga. Kontribusi pendapatan dari pelanggan pihak ketiga akan terus ditingkatkan dalam upaya Perseroan melakukan diversifikasi terhadap pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan usaha**

Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan daya saing sehingga secara berkesinambungan dapat terus bersaing pada industri pelayaran dan ISP dengan memberikan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas jasa perkapalan dengan melakukan investasi untuk teknologi dan digitalisasi pada sistem operasional serta meningkatkan jumlah tongkang, kapal dan alat penunjang usaha untuk mengakomodir tumbuhnya permintaan pelanggan.

- **Risiko fluktuasi dan perubahan Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)**

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari kondisi pasar dan fluktuasi harga batu bara secara domestik maupun global. Namun, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat meminimalisir pengaruh atas fluktuasi tersebut dengan perencanaan yang baik, pemantauan pasar dan harga secara berkala serta mempertimbangkan dan memproyeksikan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

- **Risiko kondisi cuaca dan bencana alam**

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari perubahan kondisi cuaca dan kemungkinan terjadinya bencana alam. Namun, untuk meminimalisir efek dari risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memanfaatkan dan mengacu data cuaca dan bencana alam pada masa lampau dan pada masa kini serta melakukan prediksi untuk data cuaca di masa yang akan datang. Dengan data tersebut, Perseroan dapat melakukan perencanaan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak serta membuat sistem pengawasan dan penanganan jika perubahan cuaca dan bencana alam terjadi.

- **Risiko volatilitas harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya**

Untuk memitigasi risiko volatilitas bahan bakar, Perseroan memiliki jaminan pasokan bahan bakar dari PT Borneo Petrol Servis ("**BPS**"). Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dan eksklusif dengan BPS sehingga Perseroan memiliki jaminan pasokan bahan bakar dan harga yang kompetitif. Dengan adanya jaminan tersebut, Perseroan dapat meminimalisir efek dari fluktuasi harga dan melakukan efisiensi biaya operasional. Selain itu, lokasi ISP Perusahaan Anak memiliki lokasi yang strategis untuk proses *transshipment* dimana pengangkutan dapat dilakukan ke lokasi yang berdekatan sehingga dapat melakukan efisiensi biaya bahan bakar. Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara berkala melakukan pemeliharaan terhadap kapal, tongkang serta alat penunjang usaha yang dimilikinya untuk meminimalisir biaya operasional.

- **Risiko kecelakaan maritim**

Untuk memitigasi risiko kecelakaan maritim, Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan selalu melakukan pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku dalam kegiatan usahanya. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara berkala melakukan pemeliharaan atas armada dan peralatan lain yang dimilikinya dimana sebagian besar tongkang yang dimiliki Perseroan relatif muda. Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah mengasuransikan sebagian besar kapal yang dimilikinya termasuk *Hull & Machinery (Marine Hull War Risk & Hull, Machinery, Materials, Equipment)* serta *Shipowners' P&I* dengan pertanggungan yang cukup untuk menutup kerugian jika terjadi kerusakan pada kapal Perseroan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan cuaca dan melarang pengoperasian kapal saat kondisi cuaca sedang buruk.

- **Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal**

Untuk memitigasi risiko keterlambatan, Perseroan menunjuk pihak ketiga sebagai *owner surveyor* yang bertugas untuk memastikan pembangunan kapal dan tongkang sungai baru sesuai dengan spesifikasi yang disepakati serta tidak ada penundaan pengiriman kapal dan tongkang sungai baru tersebut. Dalam hal ini, Perseroan telah menunjuk Blossom International Shipping & Offshore Pte Ltd, sebuah perusahaan jasa *surveyor* dari Singapura yang terafiliasi dengan Blossom Enterprises, Inc., USA. *Owner surveyor* setiap minggu bertugas untuk mengirimkan laporan progres pembangunan kapal tunda dan tongkang sungai kepada Perseroan.

Dalam hal perbaikan dan pemeliharaan (*docking*) kapal tunda dan tongkang sungai, *docking* dilakukan sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perhubungan laut yaitu *Intermediate Survey* yang dilakukan setiap 2,5 tahun dan *Special Survey* yang dilakukan setiap 5 tahun. Dengan adanya jadwal *docking* tersebut, Perseroan dapat melakukan pemesanan *dock space* dan melakukan koordinasi dengan pihak *dockyard* satu tahun sebelumnya untuk memastikan ketersediaan *dock space*, jadwal, kualitas, biaya dan jarak *dockyard* dapat dikelola dengan baik sehingga *docking* dapat dilakukan dengan tepat waktu dan lebih efisien. Selanjutnya, Perseroan juga melakukan *monitoring* atas proses *docking* sejak naik *dock* sampai kapal tunda dan tongkang sungai berlayar kembali ke Perseroan. *Monitoring* dilakukan oleh karyawan Perseroan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di industri *docking*.

- **Risiko akses pendanaan melalui kreditur karena adanya pembatasan pemberian pinjaman untuk industri yang mendukung industri pertambangan berbahan baku fosil**

Untuk menghadapi risiko akses pendanaan melalui kreditur, Perseroan dan Perusahaan Anak terus menjaga hubungan baik dengan para kreditur perbankan baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan pencarian sumber pembiayaan dan pinjaman dari pihak lain selain bank yang melakukan pembatasan pemberian pinjaman untuk sektor industri tertentu, termasuk namun tidak terbatas melalui pihak afiliasi untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko investasi atau aksi korporasi**

Untuk memitigasi risiko investasi, Perseroan dan Perusahaan Anak akan melakukan penelaahan dan perencanaan secara teliti, bijaksana dan hati-hati dalam membuat setiap keputusan investasi dan aksi korporasi yang akan dilakukan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga turut serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang cukup handal di bidangnya untuk dapat membantu Perseroan dan Perusahaan Anak dalam membuat keputusan.

- **Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha**

Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membentuk divisi *Legal & Corporate Secretary* yang profesional dan memiliki kompetensi pada bidangnya sebagai upaya untuk dapat mengantisipasi dan melaksanakan kegiatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perseroan dan Perusahaan Anak juga akan senantiasa mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang terjadi di industri yang dijalankan Perseroan, seperti dengan aktif berpartisipasi dalam sosialisasi peraturan yang diadakan oleh pemerintah untuk selanjutnya diberlakukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan teknologi**

Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan melakukan pembaruan teknologi yang digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mempertahankan daya saingnya terhadap para pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kelangkaan sumber daya manusia**

Untuk menghadapi risiko kelangkaan sumber daya manusia, Perseroan senantiasa merekrut sumber daya manusia yang berkualitas serta memberikan pelatihan kepada setiap karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (“SDM”) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk Direksi, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2023			2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Manajer	4	3	7	3	3	6	1	3	4	1	2	3
Supervisor	8	10	18	6	7	13	4	4	8	2	2	4
Staf lainnya	13	7	20	19	5	24	7	6	13	1	5	6
Jumlah	25	20	45	28	15	43	12	13	25	4	9	13

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2023			2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	4	1	5	4	1	5	1	0	1	1	0	1
Sarjana	12	12	24	9	7	16	6	7	13	2	6	8
Sarjana Muda/ Diploma	9	3	12	8	3	11	5	3	8	1	1	2
SLTA, SLTP dan lainnya	0	4	4	7	4	11	0	3	3	0	2	2
Jumlah	25	20	45	28	17	43	12	13	25	4	9	13

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2023			2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 25 tahun	5	0	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0
26 s/d 45 tahun	19	16	35	21	12	33	10	11	21	2	7	9
46 s/d 55 tahun	1	4	5	2	3	5	1	2	3	1	2	3
> 55 tahun	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
Jumlah	25	20	45	28	15	43	12	13	25	4	9	13

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sejumlah 68, 31, 18, dan 5.

Terdapat perubahan yang signifikan pada jumlah karyawan tetap Perseroan dari tahun 2021 ke 2022 karena adanya penerimaan karyawan baru di departemen operasional, keuangan, akuntansi dan pajak serta legal seiring dengan berkembangnya bisnis Perseroan.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 113 karyawan, yang tersebar di dua lokasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Kantor Pusat Jakarta	16 orang
2.	Kantor Cabang Samarinda	97 orang

Berikut adalah rincian karyawan berdasarkan aktivitas utama pada tanggal 31 Agustus 2023:

No.	Aktivitas	Jumlah
1.	Operation	96 orang
2.	Commercial & Finance	10 orang
3.	Human Capital & General Service	2 orang
4.	Legal	5 orang

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan dengan keahlian khusus, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Jabatan	Perizinan
1.	Teghar Dwiky Borneowan	32 Tahun	8 Tahun	Menerapkan sistem manajemen keselamatan pengoperasian kapal berdasarkan <i>International Safety Management (ISM) Code</i>	DPA (<i>Designated Person Ashore</i>)	Sertifikat Pelatihan Sesuai Persyaratan <i>Chapter 4 ISM Code</i> dan <i>International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) – MEPC.7/Circ.6</i>
2.	Eko Yuliyanto	48 Tahun	23 Tahun	Menerapkan dan memastikan aturan yang berlaku di fasilitas pelabuhan sudah dijalankan sesuai regulasi <i>International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code</i>	PFSO (<i>Port Facility Security Officer</i>)	Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I, Sertifikat Manajemen Operator Terminal dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Sertifikat Pelatihan Sesuai <i>IMO Model Course 3.21</i> , Sertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabebaran
3.	Ari Mandala Putra	28 Tahun	5 Tahun	Menerapkan dan memastikan perusahaan dan semua armada yang dioperasikan sesuai dengan regulasi pemerintah dan <i>ISPS Code</i>	CSO (<i>Company Security Officer</i>)	Sertifikat Pelatihan Sesuai <i>IMO Model Course 3.20</i>
4.	Irwansyah	41 Tahun	15 Tahun	Memastikan dijalankannya internal audit dalam penerapan Sistem <i>ISPS Code</i> di Pelabuhan	IA (<i>Internal Audit</i>)	Sertifikat Pelatihan Sesuai <i>ISPS Code</i>

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, selain Program ESA.

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan dan Perusahaan Anak

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("TKA")	Masa Berlaku
1.	Nalinkant Amratlal Rathod	India	Komisaris Utama	2C21JE2359AX	13 November 2024	Perseroan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61010/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023 MCT Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61012/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023	20 November 2023 – 31 Januari 2025 20 November 2023 – 31 Januari 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("TKA")	Masa Berlaku
2.	Vishal Manharlal Parekh	India	Direktur	2C21JE2958AX	7 November 2024	Perseroan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61010/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023 MCT Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61012/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023	20 November 2023 – 31 Januari 2025 20 November 2023 – 31 Januari 2025

Tidak terdapat tenaga kerja asing yang menduduki jabatan yang dilarang oleh tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Edukasi diberikan kepada *Site Representative Officer*, *Crew Floating Crane* dan *Crew Tugboat* dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

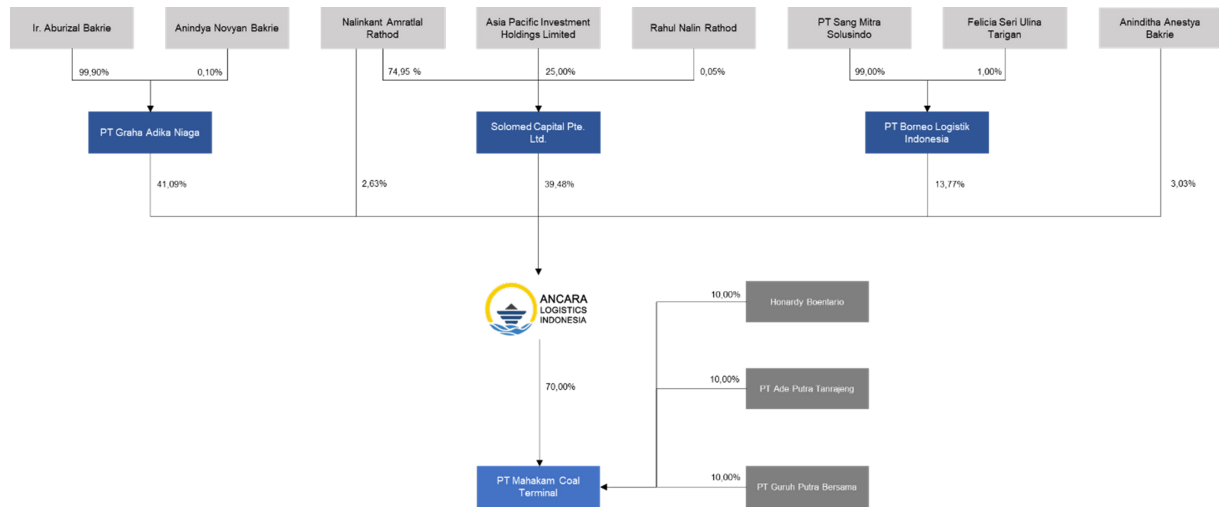
- Pelatihan keterampilan teknis (*technical skill*), seperti pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kepelabuhanan untuk *Site Representative Officer*.
- Pelatihan keterampilan teknis (*technical skill*), seperti pelatihan *International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code* dan *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) Code* untuk meningkatkan kompetensi pelayanan dalam bidang pengangkutan muatan curah padat dengan kapal laut secara aman.
- Pelatihan keterampilan teknis (*technical skill*), seperti pelatihan *Ship Security Officer (SSO) Crew Kapal* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keselamatan kerja.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- dan lain-lain.

8. Skema Kepemilikan Perseroan



Pihak pengendali dari Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod yang mana Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod tergabung dalam kelompok terorganisasi yang membuat rencana, kesepakatan atau keputusan untuk berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 9/2018 dimana (i) Aburizal Bakrie melalui PT Graha Adika Niaga dan (ii) Nalinkant Amratlal Rathod melalui Solomed Capital Pte. Ltd.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat akhir dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (**"Perpres No. 13/2018"**) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 31 Oktober 2023. Pemilik manfaat akhir yang telah ditetapkan dan dilaporkan tersebut, keduanya adalah pihak yang menerima manfaat dari perseroan terbatas sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

9. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham			Perusahaan Anak
		GAN	SC	BLI	MCT
Nalinkant Amratlal Rathod	KU	-	D	-	KU
Aninditha Anestya Bakrie	K	-	-	-	K
Agus Suharyono	KI	-	-	-	-
Faisal Mohamad Nur	DU	-	-	-	K
Rahul Nalin Rathod	D	-	D	-	D
Vishal Manharlal Parekh	D	-	-	-	D
Munawir	D	-	-	-	DU
Aulia	D	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Agustus 2023, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp659.296.656 ribu. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023:

(dalam ribuan Rupiah)

Jenis Aset	Nilai Aset Perseroan	Nilai Aset Perusahaan Anak	Eliminasi	Total Nilai Aset
Pemilikan langsung				
Tanah	11.500.000	7.458.376	27.134.021	46.092.397
Bangunan	-	2.320.825	-	2.320.825
Jalan <i>hauling</i>	-	2.834.513	-	2.834.513
Dermaga dan penyimpanan	-	53.911.967	9.433.916	63.345.883
Alat berat	-	119.814.691	(302.574)	119.512.117
Kapal tongkang	221.226.996	-	-	221.226.996
Kapal tunda	15.831.245	-	-	15.831.245
Kapal derek	179.636.871	-	-	179.636.871
Kendaraan	28.186	-	-	28.186
Perlengkapan dan peralatan	269.212	713.640	-	982.852
Subtotal	428.492.510	187.054.012	36.265.363	651.811.885
Aset dalam pelaksanaan				
Alat berat dan dermaga	-	7.484.771	-	7.484.771
Jumlah	428.492.510	194.538.783	36.265.363	659.296.656

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan benda berupa tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Hak atas Tanah	No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Wilayah (m ²)	Hak Tanggungan
1.	Hak Pakai	3	20 Agustus 2010	2 Agustus 2030	17.946	Sertifikat Hak Tanggungan No. 844/2013 tertanggal 12 Agustus 2013
2.	Hak Pakai	4	20 Agustus 2010	2 Agustus 2030	10.133	Sertifikat Hak Tanggungan No. 844/2013
3.	Hak Pakai	5	20 Agustus 2010	2 Agustus 2030	2.962	Sertifikat Hak Tanggungan No. 845/2013 tertanggal 12 Agustus 2013

Aset Kendaraan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Sepeda Motor Merek Kawasaki – LX150G	1

[illegible]

No.	Nama Kapal	Dokumen Kepemilikan
44.	Gunung Sari A003	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 36 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Gunung Sari A003 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
45.	Gunung Sari A004	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 37 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Gunung Sari A004 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
46.	Gunung Sari A005	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 38 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Gunung Sari A005 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
47.	Nur Dahlia Jaya	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 30 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Nur Dahlia Jaya milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
48.	Nur Rizky	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 31 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Nur Rizky milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
49.	Mutiara Perkasa 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 29 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Mutiara Perkasa 01 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
50.	ALI 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 33 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama ALI 01 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
51.	KSA Citra	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 9618 tanggal 2 Maret 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama KSA Citra milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Samarinda.
52.	ALI 1	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1642 tanggal 22 Juni 2023 mengenai kapal <i>floating</i> bernama ALI 1 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta
53.	BLI 1811	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1582 tanggal 17 Mei 2023 mengenai kapal <i>barge</i> bernama BLI 1811 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta
54.	BLI 1812	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1583 tanggal 17 Mei 2023 mengenai kapal <i>barge</i> bernama BLI 1812 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta
55.	BLI 1814	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1806 tanggal 10 November 2023 mengenai kapal <i>barge</i> bernama BLI 1814 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.
56.	BLI 01	Sedang dalam proses balik nama kapal.
57.	BLI 1801	Sedang dalam proses balik nama kapal.
58.	BLI 1802	Sedang dalam proses balik nama kapal.
59.	BLI 1803	Sedang dalam proses balik nama kapal.
60.	BLI 1804	Sedang dalam proses balik nama kapal.
61.	BLI 1805	Sedang dalam proses balik nama kapal.
62.	BLI 1806	Sedang dalam proses balik nama kapal.
63.	BLI 1807	Sedang dalam proses balik nama kapal.
64.	BLI 1808	Sedang dalam proses balik nama kapal.
65.	BLI 1809	Sedang dalam proses balik nama kapal.
66.	BLI 1810	Sedang dalam proses balik nama kapal.
67.	BLI 1813	Sedang dalam proses balik nama kapal.

Peralatan Berat

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	<i>Floating Crane</i> CCLD ALI 1	1
2.	<i>Crawler Tractor</i> Liebherr PR 734	3
3.	<i>Crawler Tractor</i> Liebherr PR 734	4
4.	<i>Hydraulic Excavator</i> Liebherr LH 60 C	1
5.	<i>Crawler Excavator</i> Liebherr R 920	4
6.	<i>Wheel Loader</i> Liebherr L 550 IIIA LMD	4
7.	<i>Crawler Excavator</i> Liebherr R922 G5.0-D	1
8.	<i>Crawler Excavator</i> Liebherr R930	2
9.	<i>Crawler Excavator</i> Liebherr R920	2
10.	<i>Skid Steer Loader</i> Liugong 385B CAB AC Builtup	2
11.	<i>Water Truck</i> Mitsubishi FE74HD K (4X2) M/T Tangki	1

11. Asuransi

Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan sebagian besar aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

Perseroan

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
1.	130.1.01.0501.23.020143.00.000	PT Talisman Insurance Brokers	<i>Hull & Machinery (Marine Hull War Risk & Hull, Machinery, Materials, Equipment)</i>	Kapal Barge (BLI 1801-BLI 1810)	8 Januari 2024 - 8 Januari 2025	SGD6.700.000
2.	130.1.01.0505.22.030033.00.000	PT Talisman Insurance Brokers	<i>Hull & Machinery (Marine Hull War Risk & Hull, Machinery, Materials, Equipment)</i>	Kapal Barge (BLI 1811 dan BLI 1812)	1 Juli 2023 - 1 Juli 2024	USD1.550.000
3.	1004010623000081	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	<i>Marine Hull</i>	Kapal Barge (Alliance 1801 – 1820)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	SGD13.400.000
4.	SO000329-0001/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1801)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
5.	SO000329-0002/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1802)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
6.	SO000329-0003/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1803)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
7.	SO000329-0004/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1804)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
8.	SO000329-0005/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1805)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
9.	SO000329-0006/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1806)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
10.	SO000329-0007/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1807)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
11.	SO000329-0008/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1808)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
12.	SO000329-0009/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1809)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
13.	SO000329-0010/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1810)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
14.	SO000329-0011/2023	EF Marine Pte. Ltd.	<i>Shipowners' P&I</i>	Kapal (Alliance 1811)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
15.	SO000329-0012/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1812)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
16.	SO000329-0013/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1813)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
17.	SO000329-0014/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1814)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
18.	SO000329-0015/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1815)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
19.	SO000329-0016/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1816)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
20.	SO000329-0017/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1817)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
21.	SO000329-0018/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1818)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
22.	SO000329-0019/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1819)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
23.	SO000329-0020/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1820)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
24.	SO001068-0001/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (KSA Citra)	9 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD5.000.000
25.	SO001069	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (ALI 1)	9 Juni 2023 - 9 Juni 2024	USD25.000.000

MCT

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
1.	1001220523000121	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi Gempa Bumi	Mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp13.130.000.000
2.	1001220523000120	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi Gempa Bumi	Kantor, mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp54.593.665.523
3.	1001100523000028	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi Industrial All Risk	Mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp13.130.000.000
4.	1001100523000027	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi Industrial All Risk	Kantor, mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp54.593.665.523

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Material

No. Perihal	Uraian
1. Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut Sea Transport Agreement No. 015/LC-CO/VIII/20 tanggal 1 Agustus 2020
Para Pihak	- Perseroan (sebagai pengguna jasa); dan - PT Permata Lintas Abadi ("PLA").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menunjuk PLA dan PLA sepakat untuk menyediakan sejumlah kapal untuk pengapalan dan melaksanakan jasa pelayaran untuk mengangkut batu bara.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah 31 Juli 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: - Menanggung asuransi barang; - Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan - Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai. Hak dan Kewajiban PLA: - PLA tidak berhak dan tidak dibenarkan memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Perseroan dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut (<i>sea worthy</i>); - Menyediakan anak buah kapal yang terlatih dan handal dalam jumlah yang cukup untuk mengoperasikan <i>tugboat</i>; dan - Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat</i>/tongkang tidak dapat beroperasi, maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat</i>/tongkang tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Nama Perjanjian	Perjanjian Pembangunan 31 Unit Kapal Kayu No. 185/ALI-LGL/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pembangunan No. 291/ALI-SBA/OPR/CWV/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan - PT Seratah Borneo Abadi ("SBA").
Ruang Lingkup Perjanjian	SBA selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan kapal kayu bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan 31 kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang dibutuhkan oleh Perseroan.

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berakhir pada saat penyerahan kapal-kapal kayu tahap ketiga yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: 1. Membayar sesuai dengan jumlah dan dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian; dan 2. Menetapkan rencana anggaran biaya yang meliputi ketentuan gambar pra rencana dan spesifikasi bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pembangunan kapal untuk dikerjakan oleh SBA. Hak dan Kewajiban SBA 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar pra rencana dan spesifikasi bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pembangunan kapal sesuai dengan rencana anggaran biaya yang disetujui oleh Perseroan; 2. Membangun kapal dan menyerahkan kapal pada waktu yang ditentukan; dan 3. Menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam perjanjian.
Pengalihan	Tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang lain.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perjanjian dapat diakhiri oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis 14 hari kalender sebelum pengakhiran tersebut apabila: 1. Pelanggaran SBA terhadap pernyataan, jaminan atau janji yang diberikan di dalam perjanjian; 2. Pelanggaran terhadap atau tidak dilaksanakannya segala dan setiap kewajiban SBA berdasarkan perjanjian; 3. SBA gagal melakukan penyerahan keseluruhan kapal-kapal kayu pada setiap tahapan penyerahan; 4. SBA gagal menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian atas kapal kayu terhadap kerusakan yang diketahui oleh Perseroan selama masa garansi; atau 5. Pelanggaran SBA terhadap setiap dan segala ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 096/ALI-DLS/OPR/TC/V/2023 tanggal 5 Mei 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Dharmalancar Sejahtera ("DS").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa dengan cara carter menurut waktu terhadap kapal milik DS guna keperluan operasional Perseroan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku 1 tahun sejak ditandatanganinya <i>on-hire delivery certificate</i> (<i>on-hire delivery certificate</i> ditandatanganinya tanggal 6 Mei 2023).

No. Perihal	Uraian
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan - Bertanggung jawab terhadap pemuatan (<i>loading</i>) muatan/<i>cargo</i> di atas kapal sesuai dengan kapasitas kapal; - Mengasuransikan barang muatan/<i>cargo</i> kapal sepenuhnya; dan - Apabila terjadi kerusakan kapal yang disebabkan karena tidak layaknnya dermaga/ pelabuhan, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Perseroan. Hak dan kewajiban DS - Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku; - Mengasuransikan kapal; dan - Menyediakan nakhoda dan awak buah kapal.
Pengalihan	Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan atas pertimbangannya sendiri berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila: - DS tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya; - Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan DS terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuan yang diberikan dalam perjanjian; atau - Berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 085/ALI-DLSC/OPR-TC-V-2023 tanggal 2 Mei 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan DS.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa dengan cara carter menurut waktu terhadap kapal milik DS guna keperluan operasional Perseroan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku 1 tahun sejak ditandatanganinya <i>on-hire delivery certificate</i> (<i>on-hire delivery certificate</i> ditandatangani tanggal 2 Mei 2023).
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan - Bertanggung jawab terhadap pemuatan (<i>loading</i>) muatan/<i>cargo</i> di atas kapal sesuai dengan kapasitas kapal; - Mengasuransikan barang muatan/<i>cargo</i> kapal sepenuhnya; dan - Apabila terjadi kerusakan kapal yang disebabkan karena tidak layaknnya dermaga/ pelabuhan, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Perseroan.

No. Perihal	Uraian
	Hak dan kewajiban DS
	1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Mengasuransikan kapal; dan 3. Menyediakan nakhoda dan awak buah kapal.
Pengalihan	Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan atas pertimbangannya sendiri berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila: 1. DS tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya; 2. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan DS terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuan yang diberikan dalam perjanjian; atau 3. Berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli 2 Unit Kapal No. 062ALI-LGL/I/2022
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. SBA.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menunjuk SBA untuk melakukan penjualan 2 (dua) unit kapal kayu, dengan nama: - TB Gunung Sari K014; dan - TB Gunung Sari K015. Adapun SBA menyetujui penjualan kapal kayu tersebut kepada Perseroan termasuk dengan semua dokumen kepemilikan atau legalitas yang masih berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan SBA telah terpenuhi.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Perseroan wajib membayar harga jual beli kapal kayu kepada SBA sesuai dengan harga yang disepakati Perseroan dan SBA; 2. Perseroan berhak untuk melakukan inspeksi dan pengecekan untuk memastikan kelayakan kapal kayu yang dilakukan oleh SBA. Hak dan Kewajiban SBA 1. Seluruh biaya atas pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris atas nama Perseroan ditanggung sepenuhnya oleh SBA; 2. SBA berkewajiban untuk mengurus dan menanggung segala biaya yang timbul dari segala kepengurusan dokumen kapal yaitu penggantian surat-surat dan legalitas Kapal, sertifikat Kapal di Kantor BPTD untuk didaftarkan atas nama Perseroan; 3. SBA berkewajiban menyiapkan peralatan kunci-kunci di kamar mesin, peralatan navigasi, dan akomodasi crew sesuai standar yang berlaku.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan dan SBA mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata mengenai jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6. Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal untuk konstruksi 8 Unit 180'x60'x12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 31 Agustus 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bandar Abadi ("BA").
Ruang Lingkup Perjanjian	Bahwa BA telah setuju untuk membuat dan Perseroan telah setuju untuk membeli dari BA sebanyak 8 unit Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Spoon Shape Deck Cargo Barges</i>).
Jangka Waktu dan Perpanjangan	<i>Batch 1</i>: 4 buah tongkang sungai akan diterima 6 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama, yang telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2023. <i>Batch 2</i>: 4 buah tongkang sungai akan diterima 8 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama, yang telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2023.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: 1. Bebas meminta perubahan, penghapusan atau penambahan yang dilakukan pada kapal atau mesinnya dengan ketentuan Perseroan meminta secara tertulis serta perpanjangan waktu jika diperlukan yang disepakati oleh para pihak; 2. Jika ditemukan kesalahan pembayaran oleh Perseroan, Perseroan wajib membayar bunga keterlambatan kepada BA sebesar 1,0 sen per bulan pada angsuran yang belum dibayar; dan 3. Mendapatkan penyerahan kapal sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Hak dan Kewajiban BA: 1. Mengirimkan kapal kepada Perseroan sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian; dan 2. Menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam perjanjian.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i>
7. Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal Untuk Konstruksi 2 Unit 180' x 60' x 12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Kontrak Pembuatan Kapal No. 293/BA-ALI/OPR/SC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BA.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk membeli dari BA, 2 unit Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Spoon Shape Deck Cargo Barges</i>) dengan Nomor Lambung Kapal 447 dan 448 (" Kapal ").

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai tanggal pengiriman dengan mana 2 unit Kapal harus dikirimkan dalam 1 kali tahap yang harus dikirimkan paling lambat tanggal 31 Januari 2024 yang dianggap sebagai tanggal penyelesaian, yakni 7 hari sejak tanggal saat Sertifikat Kelas Interim diterima dari Lembaga Klasifikasi.
Hak dan Kewajiban	<u>Catatan:</u> Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima Sertifikat Kelas Interim dari Lembaga Klasifikasi. Maka, perjanjian dinyatakan masih berlaku.
	Hak dan Kewajiban Perseroan: 1. Bertanggung jawab atas biaya: a. Bea dan biaya yang dikenakan saat dan setelah pengiriman kapal, atau bea lain yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia setelah pengiriman Kapal; b. Pendaftaran kapal dengan status bendera dan pelabuhan registrasi; c. Permohonan kepada pihak yang berwenang untuk pembebasan pajak dan bea adalah tanggung jawab dari Perseroan; dan d. Permohonan untuk perizinan dan lisensi operasi Kapal di perairan Indonesia; 2. Perseroan dapat meminta BA dengan pemberitahuan yang sewajarnya dan, sebelum pengiriman, untuk menyusun dokumen di bawah ini untuk diaktakan sepenuhnya dan, jika perlu, disahkan dengan biaya dan pengeluaran Perseroan: a. Sertifikat Kelas Interim dan, jika tersedia, Sertifikat Kelas akhir; b. Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dan, jika tersedia, Sertifikat Garis Muat Internasional yang final; c. Surat Survei Tonase; d. Sertifikat Pembangun Kapal; e. Laporan Stabilitas; f. Rencana dan rancangan yang berkaitan dengan Kapal serta buku petunjuk instruksi yang diperlukan (jika berlaku); dan g. Dokumen lain manapun yang sewajarnya diperlukan Perseroan. 3. Perseroan harus, pada setiap pengiriman dari masing-masing Kapal, dengan risiko, biaya dan pengeluarannya sendiri: a. Bekerja sama dengan pejabat pemerintahan terkait semua masalah hukum mengenai pengambilalihan, registrasi, ekspor dan impor, perizinan dan lisensi, bea cukai dan pajak; b. Bertanggung jawab untuk asuransi Kapal terhadap risiko Lambung Kapal dan Mesin; dan c. Memindahkan Kapal dari lapangan BA dalam waktu 7 hari.
Hak dan Kewajiban BA:	
Pengalihan	1. BA harus menyediakan semua bahan, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk proses konstruksi Kapal; 2. Memberitahu Perseroan mengenai penyelesaian masing-masing tahapan melalui penerbitan surat tagihan; 3. Menerima pembayaran atas pembelian 2 unit tongkang dan menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan dan bukti pembayaran Bea Masuk <i>Anti-Dumping</i> ke Perseroan.
	Tidak diatur.
	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
Pengakhiran Sepihak	- BA berhak untuk mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan jika pembayaran angsuran bunga keterlambatan ditunda selama lebih dari 120 hari; - Perseroan tidak berhak untuk mengakhiri kontrak karena Kejadian Kepailitan selama: - Proses konstruksi Kapal dapat dilaksanakan; dan - Bahan dan perlengkapan yang merupakan pokok permasalahan kontrak tidak akan tunduk pada litigasi, proses kepailitan, pengawasan kurator, pengawasan administratif kurator dan pengelolaan resmi.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .
8. Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal Untuk Konstruksi 2 Unit 180' x 60' x 12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Kontrak Pembuatan Kapal No. 292/BA-ALI/OPR/SC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan - BA.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk membeli dari BA, 2 unit Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Spoon Shape Deck Cargo Barges</i>) dengan Nomor Lambung Kapal 445 dan 446 (" Kapal ").
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 29 November 2023 sampai tanggal pengiriman dengan mana 2 unit Kapal harus dikirimkan dalam 1 kali tahap yang harus dikirimkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023 yang dianggap sebagai tanggal penyelesaian, yakni 7 hari sejak tanggal saat Sertifikat Kelas Interim diterima dari Lembaga Klasifikasi. <u>Catatan:</u> Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima Sertifikat Kelas Interim dari Lembaga Klasifikasi. Maka, perjanjian dinyatakan masih berlaku.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: - Bertanggung jawab atas biaya: - Bea dan biaya yang dikenakan saat dan setelah pengiriman Kapal, atau bea lain yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia setelah pengiriman Kapal; - Pendaftaran Kapal dengan status bendera dan pelabuhan registrasi; - Permohonan kepada pihak yang berwenang untuk pembebasan pajak dan bea adalah tanggung jawab dari Perseroan; dan - Permohonan untuk perizinan dan lisensi operasi Kapal di perairan Indonesia; - Perseroan dapat meminta BA dengan pemberitahuan yang sewajarnya dan, sebelum pengiriman, untuk menyusun dokumen di bawah ini untuk diaktakan sepenuhnya dan, jika perlu, disahkan dengan biaya dan pengeluaran Perseroan: - Sertifikat Kelas Interim dan, jika tersedia, Sertifikat Kelas akhir; - Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dan, jika tersedia, Sertifikat Garis Muat Internasional yang final; - Surat Survei Tonase; - Sertifikat Pembangun Kapal; - Laporan Stabilitas; - Rencana dan rancangan yang berkaitan dengan Kapal serta buku petunjuk instruksi yang diperlukan (jika berlaku); dan - Dokumen lain manapun yang sewajarnya diperlukan Perseroan.

No. Perihal	Uraian
	3. Perseroan harus, pada setiap pengiriman dari masing-masing Kapal, dengan risiko, biaya dan pengeluarannya sendiri: a. Bekerja sama dengan pejabat pemerintahan terkait semua masalah hukum mengenai pengambilalihan, registrasi, ekspor dan impor, perizinan dan lisensi, bea cukai dan pajak; b. Bertanggung jawab untuk asuransi Kapal terhadap risiko Lambung Kapal dan Mesin; dan c. Memindahkan Kapal dari lapangan BA dalam waktu 7 hari. Hak dan Kewajiban BA: 1. BA harus menyediakan semua bahan, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk proses konstruksi Kapal; 2. Memberitahu Perseroan mengenai penyelesaian masing-masing tahapan melalui penerbitan surat tagihan; 3. Menerima pembayaran atas pembelian 2 unit tongkang dan menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan dan bukti pembayaran Bea Masuk <i>Anti-Dumping</i> ke Perseroan.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	1. BA berhak untuk mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan jika pembayaran angsuran bunga keterlambatan ditunda selama lebih dari 120 hari; 2. Perseroan tidak berhak untuk mengakhiri kontrak karena Kejadian Kepailitan selama: a. Proses konstruksi Kapal dapat dilaksanakan; dan b. Bahan dan perlengkapan yang merupakan pokok permasalahan kontrak tidak akan tunduk pada litigasi, proses kepailitan, pengawasan kurator, pengawasan administratif kurator dan pengelolaan resmi.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .
9. Nama Perjanjian	Perjanjian Pembangunan 5 Kapal No. 006/ALI-LGL/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Perjanjian Pembangunan 5 Kapal No. 282/ALI-HA/OPR/TBS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. H. Asmuran ("Asmuran").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menunjuk Asmuran untuk melaksanakan pembangunan kapal kayu untuk kepentingan Perseroan ("Kapal").
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan jangka waktu pekerjaan pembangunan 5 unit kapal dan pengurusan semua dokumen sehubungan dengan kapal sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, hanya terdapat 3 kapal yang telah selesai dibangun.

No. Perihal	Uraian
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan - Perseroan berhak menolak bahan-bahan dan peralatan kerja yang disediakan oleh Asmuran jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan; - Menerima pengiriman Kapal yang diselesaikan dalam kondisi bersih, termasuk dokumen-dokumen berikut: - Sertifikat Kelas Interim dan, jika tersedia Sertifikat Kelas Akhir; - Surat Survei Tonnase; - Sertifikat Pembangunan Kapal; - Laporan Stabilitas; - Rencana dan rancangan yang berkaitan dengan Kapal dengan semua buku petunjuk instruksi yang diperlukan; - Dokumen Kepemilikan atas nama Perseroan dan dokumen lain yang sewajarnya diperlukan oleh Perseroan; - Menunjuk tim yang akan menilai kemajuan dan perkembangan pekerjaan di lapangan sebagai dasar untuk keperluan pelaksanaan pembayaran bertahap. Hak dan Kewajiban Asmuran - Menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati dalam perjanjian; - Menyediakan bahan-bahan, peralatan kerja dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan; - Memastikan pekerjaan tepat waktu, dan memastikan pembangunan Kapal berjalan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati serta memastikan semua kelengkapan dipasang dan disiapkan di Kapal; - Bertanggung jawab atas keamanan tempat dan tenaga kerja selama pekerjaan berlangsung, penyediaan sarana untuk menjaga keselamatan tenaga kerjanya, dan memberikan pertolongan kepada korban di mana segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan Asmuran.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan dan Asmuran mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata terkait dengan pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
10. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu No. 015F/ALI-LGL/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 283/SIM-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan - PT Surya Inti Mahakam ("SIM").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (<i>carter</i>) 1 set kapal dan tongkang TB GRACE 01 (2x829HP) dan BG SIM 3001 (300 kaki) dari SIM menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025.

No. Perihal	Uraian
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan - Bertanggung jawab atas biaya: - Bahan Bakar Minyak ("BBM") untuk kapal; - Air tawar; - Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; - Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; - Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; - Insentif Anak Buah Kapal ("ABK"). - Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; - Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>redelivery</i> atas kapal kepada SIM saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan Kewajiban SIM - Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; - Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; - Bertanggung jawab atas: - Gaji Nakhoda dan ABK; - Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; - Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; - Asuransi kapal dan awaknya; <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; <i>Maintenance</i> kapal; - Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama periode sewa, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perjanjian dapat diakhiri lebih dahulu sebelum Periode Sewa perjanjian berakhir dengan ketentuan Perseroan dan SIM bersama-sama sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang dituangkan secara tertulis. Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika: - SIM tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; - Terjadi pelanggaran oleh SIM terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; - Terjadi kegagalan SIM dalam memenuhi Target Kinerja; - Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. Adapun Perseroan dan SIM mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No. Perihal	Uraian
11. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 015A/ALI-LGL/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 289/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bunga Teratai ("BT").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (<i>carter</i>) 1 set kapal TB SYUKUR 36 (2X1000 HP) dan BG SYUKUR 37 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Bertanggung jawab atas biaya: a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan Kewajiban BT 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; 3. Bertanggung jawab atas: a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
Pengakhiran Sepihak	Perjanjian dapat diakhiri lebih dahulu sebelum Periode Sewa perjanjian berakhir dengan ketentuan Para Pihak bersama-sama sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang dituangkan secara tertulis. Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika: 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi Target Kinerja; 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. Adapun Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian. Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	
12. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 015B/ALI-LGL/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 290/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 03 (2X1100 HP) dan BG SYUKUR 03 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Bertanggung jawab atas biaya: a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan Kewajiban BT 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa;

No. Perihal	Uraian
	3. Bertanggung jawab atas: - Gaji Nakhoda dan ABK; - Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; - Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; - Asuransi kapal dan awaknya; <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; <i>Maintenance</i> kapal; - Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama periode sewa, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan berhak atas pertimbangannya sendiri mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila: - BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian; - Terjadi setiap dan segala pelanggaran yang dilakukan oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; - Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; atau - Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diberikan oleh perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
13. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 015C/ALI-LGL/II/2023 tanggal 21 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 288/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan - BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (<i>carter</i>) 1 set kapal TB SYUKUR 52 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 53 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan - Bertanggung jawab atas biaya: - BBM untuk kapal; - Air tawar; - Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; - Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; - Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan - Insentif ABK.

No. Perihal	Uraian
	2. Menginstruksikan pengoperasian Kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan kewajiban BT 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; dan 3. Bertanggung jawab atas: a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; dan g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama periode sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika: 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
14. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 018/ALI-LGL/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 287/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (<i>carter</i>) 1 set kapal TB SYUKUR 30 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 07 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan - Bertanggung jawab atas biaya: - BBM untuk Kapal; - Air tawar; - Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; - Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; - Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian Kapal; dan - Insentif ABK. - Menginstruksikan pengoperasian Kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan - Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan Kewajiban BT - Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; - Mengasuransikan Kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; - Bertanggung jawab atas: - Gaji Nakhoda dan ABK; - Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; - Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; - Asuransi kapal dan awaknya; - Sparepart dan stoknya di atas kapal; <i>Maintenance</i> kapal; dan - Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika: - BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; - Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; - Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan - Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. Perihal	Uraian
15. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 015D/ALI-LGL/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 285/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (<i>carter</i>) 1 set kapal TB SYUKUR 56 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 55 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Bertanggung jawab atas biaya: a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan Kewajiban BT 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; 3. Bertanggung jawab atas: a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; dan g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
Pengakhiran Sepihak	Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika: - BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; - Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; - Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan - Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
16. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 015E/ALI-LGL/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 286/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan - BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (<i>carter</i>) 1 set kapal TB SYUKUR 23 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 06 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan - Bertanggung jawab atas biaya: - BBM untuk kapal; - Air tawar; - Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; - Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; - Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan - Insentif ABK. - Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan - Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas Kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan Kewajiban BT - Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; - Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; - Bertanggung jawab atas: - Gaji Nakhoda dan ABK; - Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; - Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; - Asuransi kapal dan awaknya; <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; <i>Maintenance</i> kapal; dan - Uang makan ABK.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika: 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
17. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 008/ALI-LGL/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 284/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (<i>carter</i>) 1 set kapal TB SYUKUR 11 (2X1100 HP) dan BG SYUKUR 115 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Bertanggung jawab atas biaya: a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. Hak dan Kewajiban BT 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa;

No. Perihal	Uraian
	3. Bertanggung jawab atas: - Gaji Nakhoda dan ABK; - Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; - Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; - Asuransi kapal dan awaknya; <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; <i>Maintenance</i> kapal; dan - Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika: - BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; - Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; - Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan - Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
18. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal <i>Tug Assist</i> No. 123/ALI-LGL/IX/2021, sebagaimana terakhir diubah oleh Adendum 6 Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kapal “<i>Tug Assist</i>” No. 240G/ALI-MKAL/OPR/TA/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan - PT Multi Karya Abdillah Lines (“Multi Karya”).
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa Kapal DC 1678 (“ Tugboat ”) dengan <i>On Hire</i> di Samarinda dan <i>Off Hire</i> di Gunung Sari – Tabang.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sampai tanggal 6 Mei 2024 sejak terbitnya sertifikat “ <i>on hire</i> ” dan dapat diperpanjang dengan melakukan pemberitahuan 2 minggu sebelum berakhirnya perjanjian.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan - Memiliki dokumen dan legalitas dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut; - Menjamin pengisian BBM untuk <i>Tugboat</i> dilakukan secara legal; - Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar <i>Tugboat</i> yang sesuai kondisi <i>Tugboat</i> (<i>draft</i>/kedalaman). Hak dan Kewajiban Multi Karya - Bertanggung jawab atas gaji dan uang makan Anak Buah Kapal (“ABK”) dan oli mesin <i>Tugboat</i> serta premi dan kebutuhan air tawar ABK <i>Tugboat</i>; - Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standard dan legalitas <i>Tugboat</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Menyediakan dan selalu menjamin kelengkapan <i>Tugboat</i> sesuai standar dan layak pakai yang ditetapkan Perseroan.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan dan Multi Karya mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata untuk pengakhiran atas perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
19. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal "Time Charter" No. 031/ALI-LGL/III/2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kapal "Time Charter" No. 106/ALI-SIM/OPR/TC/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. SIM.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal dengan spesifikasi 1 set kapal dan tongkang 300 kaki dengan nama <i>Tugboat</i> Bluefin II dan <i>Barge</i> Marine Power 3023 milik SIM untuk keperluan operasional Perseroan (" Kapal ").
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sampai tanggal 25 Maret 2024.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Perseroan bertanggung jawab atas biaya: a. Insentif Awak Kapal/ABK; b. BBM/Solar; c. Air tawar; d. Asuransi muatan/kargo di atas Kapal; e. Agen termasuk biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan Kapal, <i>mooring</i>, dan lainnya untuk operasional Kapal; f. Komisi-komisi dan biaya lain yang berhubungan dengan pengoperasian Kapal. 2. Menjamin legalitas pengadaan BBM Kapal; 3. Bertanggung jawab sampai dengan pengembalian Kapal kepada SIM jika pengisian BBM yang dilakukan oleh Perseroan menyebabkan Kapal ditahan oleh pihak yang berwenang dikarenakan BBM ilegal. Hak dan Kewajiban SIM 1. Menyerahkan salinan dari perizinan dan legalitas Kapal yang akan disewakan kepada Perseroan; 2. Bertanggung jawab atas asuransi Kapal yang meliputi asuransi <i>Hull & machinery</i> dan juga <i>Protection & Indemnity Insurance</i> dan atau asuransi lain yang diwajibkan; 3. Bertanggung jawab atas biaya: a. Gaji Nakhoda dan para ABK beserta akomodasinya; b. <i>Lubricating oil</i> (minyak pelumas mesin); c. Perizinan dan legalitas Kapal yang habis masa berlakunya; d. Asuransi Kapal dan ABK; e. <i>Spareparts</i> dan stoknya di atas Kapal; f. <i>Maintenance</i> Kapal.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Selama Periode Sewa, Perseroan dan SIM tidak dapat mengalihkan perjanjian baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	- Perjanjian dapat diakhiri lebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, dengan ketentuan Perseroan dan SIM sepakat untuk mengakhiri perjanjian terlebih dahulu yang dituangkan dalam suatu pengakhiran perjanjian; - Perseroan dan SIM mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu Perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
20. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Charter</i>) Kapal Menurut Waktu (<i>Time Charter</i>) No. 089/ALI-MKAL/OPR-TC/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Kedua No. 279/MKAL-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023
Para Pihak	- Perseroan; dan - PT Multi Karya Abdillah Lines ("Multi Karya").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan penyewaan (<i>carter</i>) sebuah kapal <i>tugboat</i> TB. NSS IX (" Kapal ") milik Multi Karya untuk kegiatan jasa pengangkutan laut Perseroan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal <i>on-hire delivery certificate</i> (<i>on-hire delivery certificate</i> ditandatangani tanggal 6 Mei 2023).
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan - Menanggung biaya premi asuransi atas nakhoda dan anak buah kapal; - Apabila Kapal ditahan oleh pihak yang berwenang karena pelanggaran ketentuan tertentu, wajib untuk membayar biaya harga sewa selama waktu masa penahanan kapal kecuali pelanggaran terjadi atas kesalahan Multi Karya; dan - Membeli, menyediakan dan mengisi bahan bakar minyak untuk Kapal sesuai dengan standar spesifikasi Kapal. Hak dan kewajiban Multi Karya - Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku; - Mengasuransikan kapal; dan - Menyediakan nakhoda dan awak buah kapal.
Pengalihan	Selama masa sewa tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila: - Multi Karya tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian; - Terjadi setiap dan segala pelanggaran terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan oleh perjanjian; atau - Alasan-alasan lain yang diberikan oleh perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No. Perihal	Uraian
21. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 027/MCT-SAIDI/LAND-LEASE/II/2023 tanggal 15 Februari 2023
Para Pihak	1. MCT; dan 2. Saidi.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa sebidang tanah seluas 19.947 m2 yang terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sejak tanggal 15 Februari 2023 dan berlaku selama 20 tahun.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Memperoleh kenikmatan yang tentram untuk mendiami, menggunakan, memanfaatkan dan menguasai lahan sewa atau atas hal-hal apapun yang seharusnya dan sepatutnya dimiliki oleh MCT; 2. Membayarkan harga sewa sesuai yang diatur dalam perjanjian; dan 3. Memperhatikan dan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MCT di atas lahan sewa. Hak dan Kewajiban Saidi 1. Menerima pembayaran atas sewa terhadap lahan sewa; dan 2. Menyerahkan lahan sewa kepada MCT.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Samarinda.
22. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 028/MCT-HASIPAH/LAND-LEASE/II/2023 tanggal 15 Februari 2023
Para Pihak	1. MCT; dan 2. Hasipah.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa sebidang tanah seluas 3.317 m2 yang terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sejak tanggal 15 Februari 2023 dan berlaku selama 20 tahun.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Memperoleh kenikmatan yang tentram untuk mendiami, menggunakan, memanfaatkan dan menguasai lahan sewa atau atas hal-hal apapun yang seharusnya dan sepatutnya dimiliki oleh MCT; 2. Membayarkan harga sewa sesuai yang diatur dalam perjanjian; dan 3. Memperhatikan dan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MCT di atas lahan sewa. Hak dan Kewajiban Hasipah 1. Menerima pembayaran atas sewa terhadap lahan sewa; dan 2. Menyerahkan lahan sewa kepada MCT.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Samarinda.
23. Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dengan PT. Mahakam Coal Terminal tentang Penggunaan Sementara Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Samarinda untuk Melayani Kepentingan Umum Pertambangan Batu Bara di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Nomor AL.302/I/18/KSOP.SMD-2023 dan Nomor 098/KSOP-MCT/OPR/TUKS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023
Para Pihak	1. MCT; dan 2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda ("KSOP").
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk memberikan pelayanan jasa pelabuhanan di Terminal Khusus (Tersus) Perseroan di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk Melayani Kepentingan Umum Sementara.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama terhitung sejak tanggal terbitnya surat keputusan persetujuan penggunaan sementara terminal untuk kepentingan sendiri MCT di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Samarinda untuk melayani kepentingan umum pertambangan batu bara dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan MCT dan KSOP dan persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Menerima pembayaran atas jasa kepelabuhanan MCT untuk melayani umum; 2. Penyediaan fasilitas pengoperasian jasa kepelabuhanan di MCT; 3. Melakukan pengoperasian jasa pelayanan kapal dan jasa penanganan bongkar/muat barang MCT milik MCT berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hak dan Kewajiban KSOP 1. Menerima Jasa Kepelabuhanan yang disediakan oleh MCT; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional MCT.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
24. Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) No. 017/LC-CO/II/2021 tanggal 15 Februari 2021
Para Pihak	1. MCT; dan 2. KSOP.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk melakukan penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan MCT.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 31 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Menggunakan perairan sesuai dengan peruntukan seperti yang telah diatur dalam perjanjian dan sesuai dengan izin yang telah diperoleh dari Kementerian Perhubungan; 2. Memberikan konfirmasi tanggal pembayaran penggunaan perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; 3. Melakukan pembayaran penggunaan perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri MCT sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian; 4. Menjalankan petunjuk dari KSOP sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan kegiatan pelayaran secara umum. Hak dan Kewajiban KSOP 1. Menerima pembayaran penggunaan perairan di wilayah terminal khusus dari MCT; 2. Melakukan pengawasan terhadap perairan terminal khusus MCT; dan 3. Menyampaikan nota tagihan penggunaan perairan terkait perjanjian selambat-lambatnya 60 hari sebelum berakhirnya periode tahun berjalan.
Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala keseluruhan atau sebagian dari Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	1. KSOP berhak untuk memutuskan secara sepihak perjanjian, apabila: a. Salah satu Pihak telah melanggar ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada pasal 6 perjanjian, dan tidak terdapat perbaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak adanya peristiwa kelalaian tersebut; b. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas isi perjanjian. 2. Para Pihak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
25. Nama Perjanjian	Offer Letter No. PR734-708173/20 tanggal 4 April 2020.
Para Pihak	1. MCT; dan 2. Liebherr Expor AG ("Liebherr").
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud membeli <i>Crawler Tractor</i> PR 734-4 ("Traktor") dari Liebherr.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2024).

No. Perihal	Uraian
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Traktor sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. Hak dan Kewajiban Liebherr 1. Menyerahkan kepada MCT Traktor sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
26. Nama Perjanjian	Offer Letter No. LH60-748102/20 tanggal 4 April 2020.
Para Pihak	1. MCT; dan 2. Liebherr.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk membeli <i>Hydraulic Excavator</i> LH 60 C Port G6.0-D (" Ekskavator ") dari Liebherr.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2024).
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Ekskavator sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. Hak dan Kewajiban Liebherr 1. Menyerahkan kepada MCT Ekskavator sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
27. Nama Perjanjian	Offer Letter No. R920-806656/20 tanggal 20 November 2020.
Para Pihak	1. MCT; dan 2. Liebherr.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk membeli <i>Crawler Excavator</i> R 920 G5.0-D (" Ekskavator ") dari Liebherr.

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 September 2024).
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Ekskavator sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. Hak dan Kewajiban Liebherr 1. Menyerahkan kepada MCT Ekskavator sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
28. Nama Perjanjian	Offer Letter No. R930-806635/20 tanggal 20 November 2020
Para Pihak	1. MCT; dan 2. Liebherr.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk membeli <i>Crawler Excavator R 930 G7.0-D LMD</i> ("Ekskavator") dari Liebherr.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 September 2024).
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Ekskavator sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. Hak dan Kewajiban Liebherr 1. Menyerahkan kepada MCT Ekskavator sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

b. Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta No. 18 tanggal 9 Februari 2023 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Aplofend yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.A.P., Notaris di Jakarta
	Para Pihak	1. Perseroan; 2. Indonesia Eximbank ("Eximbank").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Eximbank sepakat untuk memberikan kredit kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp34.670.634.662,04.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp30.623.549.662 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	Bunga atas kredit yang diberikan adalah 7% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi Eximbank, tanpa pemberitahuan dahulu kepada Perseroan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Kredit diberikan oleh Eximbank kepada Perseroan untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal efektif yaitu sejak tanggal 9 Februari 2023 (berakhir pada 9 Februari 2028).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: 1. Menerima kredit dari Eximbank; 2. Mengembalikan kredit sesuai dengan mata uang transaksi yang diterima Perseroan saat menerima pencairan dana; dan 3. Menjaga dan memelihara <i>debt service coverage ratio</i> minimal 1 kali, yang tercermin pada laporan keuangan <i>audited</i> Perseroan. Hak dan Kewajiban Eximbank: 1. Melakukan tindakan-tindakan tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada mensyaratkan dilakukannya perubahan atas sifat dan/atau struktur kredit dan/atau perubahan mata uang kredit); dan 2. Menerima pembayaran kembali kredit sesuai dengan jangka waktu.
	Pengalihan	Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan perjanjian dan setiap usaha pengalihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal.
	Pembatasan dan Pembebanan	1. Dalam hal terjadi perubahan struktur dan aset perusahaan, Perseroan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dilaksanakannya rapat umum pemegang saham Perseroan; 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak dilakukannya hal-hal sebagai berikut: a. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perseroan; b. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan; dan c. Mengubah komposisi pemegang saham Perseroan dan pengurusnya (direksi dan/atau anggota dewan komisaris). Tidak ada pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum.

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Fasilitas OCP
	Para Pihak	1. MCT sebagai penerima pinjaman ("Penerima Pinjaman"). 2. perusahaan-perusahaan sebagai berikut, Ancara Resources Limited, Perseroan, RWood Resources DMCC secara bersama-sama sebagai para penjamin awal. 3. lembaga keuangan sebagai berikut, OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited, OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal ("Pemberi Pinjaman"). 4. The Bank Of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas. 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri. 6. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri. 7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank dimana rekening bank dalam negeri dibuka. 8. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai bank dimana rekening bank luar negeri dibuka.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, Pemberi Pinjaman menyediakan fasilitas pinjaman dalam USD kepada MCT.
	Nilai Perjanjian	USD62.000.000.
	Nilai <i>Outstanding</i>	USD61.375.588 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	Bunga dari fasilitas pinjaman adalah sebesar 20% p.a.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	19 November 2025
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT: 1. Membayarkan kembali pinjaman kepada Pemberi Pinjaman; 2. Menggunakan fasilitas pinjaman dengan urutan prioritas penggunaan sebagai berikut: a. Pembayaran kembali atau pembayaran di muka (sebagaimana berlaku) fasilitas MCT yang ada hingga jumlah maksimum USD49.500.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP Lama; b. Memfasilitasi pelunasan penuh pinjaman Perseroan kepada Vikasa hingga jumlah maksimum USD12.200.000 berdasarkan Perjanjian Vikasa; dan c. Pembayaran biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman: 1. Memberikan pinjaman sesuai dengan nilai sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas OCP.
	Pengalihan	Peminjam tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas tanpa persetujuan dari semua Pemberi Pinjaman.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Peminjam tidak diperbolehkan untuk: - menerbitkan saham atau mengubah hak-hak yang melekat pada saham yang diterbitkannya pada tanggal Perjanjian Fasilitas; - menyatakan, membuat atau membayar, atau membayar bunga atas jumlah yang belum dibayar, setiap dividen, biaya, ongkos atau distribusi lainnya (baik secara tunai maupun dalam bentuk barang) atas atau sehubungan dengan saham atau modal sahamnya (atau setiap kelas modal sahamnya), kecuali untuk pernyataan, pembuatan atau pembayaran, atau pembayaran bunga atas jumlah yang belum dibayar, setiap dividen, biaya, ongkos atau distribusi lainnya (baik secara tunai maupun dalam bentuk barang) atas atau sehubungan dengan saham Ancara yang dimiliki oleh Energy Success Pte. Ltd. (dengan ketentuan bahwa dividen, biaya, ongkos atau distribusi lain tersebut tidak akan melebihi 10 persen dari Arus Kas Berlebih LFR). Atas pembatasan di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan dan pengesampingan berdasarkan Surat Agen Fasilitas tertanggal 26 Oktober 2023.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .

13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Kontrak Jasa Perpindahan Muatan di Perairan (<i>Transshipment</i>) No. 122/ALI-APT-GPB/OPR/TS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana telah diamandemen terakhir kali berdasarkan Amendemen Terhadap Kontrak Jasa Perpindahan Muatan di Perairan (<i>Transshipment</i>) No. 219B/ALI-APT-GPB/OPR/TS/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	- Perseroan; - PT Ade Putra Tanrajeng ("Penyewa Pertama"); dan - PT Guruh Putra Bersama ("Penyewa Kedua"). (Penyewa Pertama dan Penyewa Kedua bersama-sama disebut sebagai "Penyewa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Penyewa menginginkan jasa perpindahan muatan di perairan (<i>transshipment</i>) batu bara oleh Perseroan dan Perseroan bersedia untuk memberikan jasa tersebut kepada Penyewa.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Kontrak berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan masing-masing Penyewa dan sampai dengan izin usaha masing-masing Penyewa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan: - Menerima pembayaran atas jasa penangkutan <i>transshipment</i>; - Memastikan ketersediaan fasilitas pemuatan terapung (termasuk operatornya) sesuai jadwal pemuatan kapal induk yang disepakati; - Melakukan pembongkaran batu bara dari tongkang sesuai urutan kedatangan tongkang; dan - Dengan segera memberitahu Penyewa dalam hal terjadi keadaan darurat atau batu bara terbakar di atas tongkang yang ditambatkan di samping fasilitas pemuatan terapung.

No.	Perihal	Uraian
		Hak dan kewajiban Penyewa
		- Berusaha untuk memasok sebanyak 7.500 MT untuk kapal kargo per hari dalam cuaca baik untuk diumpankan ke fasilitas pemuatan terapung; - Mengkoordinasikan tongkang dan waktu kedatangan kapal induk untuk memungkinkan perpindahan batu bara di perairan; dan - Ukuran setiap tongkang yang ditambatkan di samping fasilitas pemuatan terapung memiliki panjang minimal 230 kaki hingga 330 kaki dan ukuran maksimal tongkang yang aman untuk dilakukan pencampuran adalah sepanjang 300/300 jumbo kaki.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan Dengan Kewajiban Membeli No. 106/CLS-LGL/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan dengan Kewajiban Membeli No. 062/CLS-LGL/V/2021 dan No. 247/CLS-ALI/OPR/LV/XI/2023 tanggal 6 November 2023
	Para Pihak	- Perseroan (sebagai penyewa); dan - PT Cakrawala Langit Sejahtera ("Pemberi Sewa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan unit kendaraan ringan atau <i>light vehicle</i> (" LV ") kepada Perseroan untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasionalnya di Kalimantan Timur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Masa sewa untuk LV adalah selama 36 bulan (berakhir pada 5 Agustus 2024).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan: - Berhak untuk menggunakan LV untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasinya tanpa gangguan dari Pemberi Sewa maupun pihak ketiga manapun; - Memelihara dan menjaga LV dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan; - Berhak setiap saat untuk memeriksa dan meminta salinan dari segala izin-izin terkait LV dari Pemberi Sewa; - Segara setelah Perseroan membeli LV berhak untuk membalik nama atas kepemilikan LV menjadi atas nama Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan kepada otoritas pemerintah yang berwenang. Hak dan kewajiban Pemberi Sewa: - Berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dan harga pembelian; - Menyerahkan penguasaan dan kendali atas LV kepada Perseroan serta bebas dari segala bentuk pembebanan. - Mengasuransikan LV untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>) dan risiko lainnya sebagaimana diminta oleh Perseroan.
	Pengalihan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para pihak berhak secara sepihak dan langsung, tanpa perlu penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk mengakhiri perjanjian jika pihak lainnya melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang melanggar.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan susunan direksi atau komisaris.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut <i>Sea Transport Agreement</i> No. 127/ALI-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Kedua Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Barging</i> 180ft) No. 219/APT-ALI/OPR/STA/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Ade Putra Tanrajeng (" Pengguna Jasa ").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Bahwa Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk menyediakan layanan pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar dengan kapasitas 2000 MT per <i>barge</i> sesuai dengan kemampuan sandar atau <i>max draft</i> di pelabuhan bongkar.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: - Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; - Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; - Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat</i>/tongkang tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat</i>/tongkang tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan - Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa: - Menanggung asuransi barang; - Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan - Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.

No.	Perihal	Uraian
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Transshipment</i>) Sea Transport Agreement No. 143/ALI/LGL/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Adendum Ketiga Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Transshipment</i>) No. 218/APT-ALI/OPR/TS/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	- Perseroan; dan - PT Ade Putra Tanrajeng ("Pengguna Jasa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Bahwa Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk menyediakan layanan pengangkutan batu bara kepada Pengguna Jasa dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar dengan kapasitas 5.000 MT – 8.000 MT per <i>vessel</i> sesuai dengan kemampuan sandar atau <i>max draft</i> di pelabuhan bongkar.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbaharui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: - Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; - Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; - Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat</i>/tongkang tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat</i>/tongkang tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan - Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa: - Menanggung asuransi barang; - Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan - Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut Sea Transport Agreement No. 128/ALI-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum Kedua Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Barging 180ft</i>) No. 217/GPB-ALI/OPR/STA/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	- Perseroan; dan - PT Guruh Putra Bersama ("Pengguna Jasa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk memberikan jasa pengangkutan batu bara kepada Pengguna Jasa dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar dengan kapasitas 2000 MT per <i>barge</i> sesuai dengan kemampuan sandar atau <i>max draft</i> di pelabuhan bongkar.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: 1. Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; 2. Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; 3. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat</i>/tongkang tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat</i>/tongkang tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan 4. Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa: 1. Menanggung asuransi barang; 2. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan 3. Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Transshipment</i>) <i>Sea Transport Agreement</i> No. 144ALI/LGL/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Ketiga Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut <i>Transshipment</i> No. 219/GPB-ALI/OPR/TS/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Guruh Putra Bersama ("Pengguna Jasa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk memberikan jasa pengangkutan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan: 1. Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; 2. Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; 3. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat</i>/tongkang tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat</i>/tongkang tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan 4. Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang.

No.	Perihal	Uraian
		Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa:
		1. Menanggung asuransi barang;
		2. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan
		3. Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 122/BPS-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diubah berdasarkan Adendum Terhadap Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 187/BPS-ALI/OPR/BBM/IX/2023 tanggal 25 September 2023
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Borneo Petrol Servis (" BPS ").
	Ruang Lingkup Perjanjian	BPS akan menjual dan menyerahkan Bahan Bakar Minyak Solar dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Volume minimum: 160.000 lt/bulan; 2. Produk: Solar B30; dan 3. <i>Supply point</i> : Desa Embalut, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai " BBM ") yang dipesan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu perjanjian akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan perjanjian perihal kerja sama pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak non subsidi serta perjanjian agen bahan bakar minyak <i>single region</i> antara BPS dengan PT Pertamina Patra Niaga serta izin usaha BPS berakhir atau berakhir setelah diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Perseroan akan memiliki hak dan risiko atas BBM pada saat BBM melewati <i>flowmeter</i> yang terkalibrasi milik BPS; 2. Melakukan pembayaran atas BBM yang dipesan kepada BPS sesuai dengan ketentuan yang ada pada saat jangka waktu yang diatur dalam perjanjian. Hak dan Kewajiban BPS 1. Menyerahkan BBM kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian; dan 2. Menerima pembayaran dari Perseroan sesuai dengan BBM yang dipesan oleh Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Suatu pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Setiap pihak berhak secara sepihak memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan perjanjian berlaku efektif.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan susunan direksi atau komisaris.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan dengan Kewajiban Membeli No. 033/CLS-LGL/V/2021 tanggal 9 Maret 2021
	Para Pihak	1. MCT; dan 2. PT Cakrawala Langit Sejahtera ("CLS").
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa kendaraan ringan (<i>light vehicles</i> atau "LV") dengan kewajiban membeli pada akhir Masa Sewa.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Masa Sewa berlaku selama 36 bulan terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom "<i>Charge Start From</i>", pada Lampiran 1 perjanjian, yakni sebagai berikut: a. Mitsubishi Triton <i>Double Cabin Police</i> Number DA 8554 ZN: 5 Agustus 2021; b. Mitsubishi Triton <i>Double Cabin Police</i> Number DA 8094 ZP: 29 Desember 2021; c. Mitsubishi Triton <i>Single Cabin Police</i> Number DA 8218 ZN: 9 Maret 2021; d. Mitsubishi Triton <i>Single Cabin Police</i> Number DA 8217 ZN: 9 Maret 2021.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Berhak untuk menggunakan LV untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasinya tanpa gangguan apapun dari CLS; 2. Memelihara dan menjaga LV dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan selama Masa Sewa; 3. Menggunakan LV dengan kehati-hatian, sesuai dengan standar keamanan, menggunakan <i>sparepart</i> asli (OEM) dan selalu menjaga LV dalam keadaan bersih dan baik sampai berakhirnya Masa Sewa; 4. Menggunakan sopir yang memiliki perizinan yang berlaku dan sah untuk mengoperasikan LV dan bertanggung jawab penuh atas kelalaian Perseroan. Hak dan Kewajiban CLS 1. Menerima pembayaran Harga Sewa, dan Harga Pembelian ketika Perseroan melaksanakan kewajibannya; 2. Menyerahkan penguasaan dan kendali atas LV kepada Perseroan; 3. Mengasuransikan LV untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>) perlindungan atas risiko tambahan lainnya.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Masing-masing pihak berhak secara sepihak dan langsung untuk mengakhiri perjanjian jika pihak lainnya melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dalam 14 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang melanggar ketentuan perjanjian.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan Susunan Direksi atau Komisaris.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan – Dengan Hak Opsi <i>Dump Truck</i> No. 098/CLS-LGL/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2021
	Para Pihak	1. MCT; dan 2. CLS.
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa <i>dump truck</i> dari CLS, yang mana berdasarkan perjanjian MCT memiliki opsi beli.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku efektif untuk periode 4 tahun untuk setiap masing-masing <i>dump truck</i> sebagaimana terlampir dalam perjanjian (berdasarkan lampiran semua <i>dump truck</i> mulai disewa sejak bulan September dan November tahun 2021).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Memelihara dan menjaga <i>dump truck</i> dalam kondisi yang baik dan siap digunakan selama masa sewa; 2. Memeriksa dan menerima salinan izin <i>dump truck</i> dari CLS; dan 3. Membayar kepada CLS sebagaimana diatur dalam perjanjian. Hak dan Kewajiban CLS 1. Menerima pembayaran harga sewa atau harga pembelian apabila MCT melaksanakan opsi beli sebagaimana diatur dalam perjanjian; 2. Selama jangka waktu perjanjian wajib mengasuransikan <i>dump truck</i> untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>); dan 3. Memperbaiki <i>dump truck</i> apabila kerusakan tidak dapat di klaim ke asuransi.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan Susunan Direksi atau komisaris.
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 123/BPS-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diubah dengan Adendum terhadap Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 188/BPS-MCT/OPR/BBM/IX/2023 tanggal 25 September 2023
	Para Pihak	1. MCT; dan 2. PT Borneo Petrol Servis (“BPS”).

No.	Perihal	Uraian
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk membeli BBM dari BPS dengan ketentuan: 1. Volume Minimum: 160,000 liter/bulan; 2. Produk: Solar B30; dan 3. <i>Supply Point</i>: Desa Embalut Tenggarong Sebrang Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sampai dengan perjanjian perihal kerja sama pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak non subsidi serta perjanjian agen bahan bakar minyak <i>single region</i> antara BPS dengan PT Pertamina Patra Niaga serta izin usaha BPS berakhir setelah diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT 1. Menerima BBM sesuai ketentuan dalam perjanjian dari BPS; 2. Melakukan pembayaran atas pembelian BBM sesuai ketentuan perjanjian kepada BPS. Hak dan Kewajiban BPS 1. Menerima pembayaran atas penjualan BBM kepada MCT; 2. Menjamin kualitas produk yang diserahkan pada <i>Supply Point</i> wajib sesuai standar spesifikasi pada pasal 2 perjanjian; 3. Menjamin tersedianya BBM yang dipesan oleh MCT selama jangka waktu perjanjian.
	Pengalihan	Suatu pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari pihak lain.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	1. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian; 2. Setiap pihak berhak secara sepihak memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan 30 hari kalender sebelum pemutusan perjanjian berlaku efektif; 3. Sebelum melakukan pemutusan perjanjian, terlebih dahulu pihak yang memutuskan akan memberikan 1 kali surat peringatan tertulis kepada pihak lainnya.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan susunan direksi atau komisaris.
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Infrastruktur & Dermaga No. 010/LC-LCO/V/20 tanggal 1 Mei 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Terhadap Perjanjian Jasa Infrastruktur & Dermaga No. 190/GPB-APT-MCT/OPR/IJS/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	1. MCT; 2. GPB; dan 3. APT.
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyediakan jasa-jasa termasuk sehubungan dengan dermaga ISP kepada GPB dan APT (" Para Pemegang Konsesi ").

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	MCT harus memberi atau menyediakan jasa dan Para Pemegang Konsesi harus melaksanakan jasa, serta MCT dan Para Pemegang Konsesi harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian sejak 1 Mei 2020 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan masing-masing Para Pemegang Konsesi dan sampai izin usaha pertambangan masing-masing Para Pemegang Konsesi diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Menerima pembayaran atas biaya-biaya jasa; 2. Membongkar batu bara dari tongkang-tongkang 180 kaki ke dermaga ISP pada suatu hitungan jam kumulatif sesuai dengan ketentuan perjanjian; 3. Menyampaikan kepada perwakilan Para Pemegang Konsesi dalam 10 hari kerja di akhir setiap bulan kalender suatu klaim bulanan untuk bulan kalender sebelumnya. Hak dan Kewajiban Para Pemegang Konsesi 1. Mendapatkan akses di setiap saat dan dari waktu ke waktu (tunduk pada pemberitahuan yang wajar) ke seluruh fasilitas operasional MCT yang dipergunakan dalam pemberian jasa untuk tujuan pemantauan; 2. Membayar MCT atas biaya-biaya jasa; 3. Memberitahu MCT dari waktu ke waktu mengenai perkiraan dari jumlah dan jadwal yang direncanakan untuk penyerahan batu bara di dermaga ISP.
	Pengalihan	Setiap pihak tidak boleh mengalihkan semua atau setiap bagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para Pemegang Konsesi dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Perseroan jika suatu peristiwa cidera janji sehubungan dengan Perseroan telah terjadi atau suatu wanprestasi jasa telah terjadi.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan dengan Kewajiban Membeli No. 016/CLS-MCT/OPR/LV//2024 tanggal 15 Januari 2024
	Para Pihak	1. MCT (sebagai penyewa); dan 2. CLS ("Pemberi Sewa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan unit kendaraan ringan atau <i>light vehicle</i> (" LV ") kepada MCT untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasionalnya di Kalimantan Timur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Masa sewa untuk LV adalah selama 36 bulan dengan periode sewa untuk tiap unit LV sebagai berikut: 1. Mitsubishi Pajero Dakkar: Desember 2021 – Desember 2024 3. Hyundai Palisade: Juli 2021 – Juli 2024

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT: - Berhak untuk menggunakan LV untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasinya tanpa gangguan dari Pemberi Sewa maupun pihak ketiga manapun; - Memelihara dan menjaga LV dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan; - Berhak setiap saat untuk memeriksa dan meminta salinan dari segala izin-izin terkait LV dari Pemberi Sewa; dan - Segera setelah MCT membeli LV berhak untuk membalik nama atas kepemilikan LV menjadi atas nama MCT atau pihak lain yang ditunjuk oleh MCT kepada otoritas pemerintah yang berwenang. Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa: - Berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dan harga pembelian; - Menyerahkan penguasaan dan kendali atas LV kepada MCT serta bebas dari segala bentuk pembebanan; dan Mengasuransikan LV untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>) dan risiko lainnya sebagaimana diminta oleh MCT.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para pihak berhak secara sepihak dan langsung, tanpa perlu penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk mengakhiri perjanjian jika pihak lainnya melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang melanggar.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan Susunan Direksi atau komisaris.

b. Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	<i>Loan Agreement</i> tanggal 12 Desember 2020
	Para Pihak	- Perseroan; dan - GAN.
	Ruang Lingkup Perjanjian	GAN sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp9.262.300.000.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp9.262.300.000 per 31 Agustus 2023.
	Bunga	Pinjaman tidak akan dikenakan bunga. Setiap bunga yang dianggap berlaku akan menjadi milik ALI dan tidak ada pengurangan dari jumlah pinjaman.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 60 bulan sejak tanggal perjanjian (berakhir pada 12 Desember 2025).

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah membayar kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian. Hak dan kewajiban GAN adalah menerima pembayaran kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.
	Pengalihan	Perseroan tidak dapat mengalihkan segala hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari GAN.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang saham.
2.	Nama Perjanjian	<i>Loan Agreement</i> tanggal 28 Desember 2020
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. SC.
	Ruang Lingkup Perjanjian	SC sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
	Nilai Perjanjian	SGD574.246.
	Nilai <i>Outstanding</i>	SGD574.246 per 31 Agustus 2023.
	Bunga	Pinjaman tidak akan dikenakan bunga. Setiap bunga yang dianggap berlaku akan menjadi milik ALI dan tidak ada pengurangan dari jumlah pinjaman.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 60 bulan sejak tanggal perjanjian (berakhir pada 28 Desember 2025).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah membayar kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian. Hak dan kewajiban SC adalah menerima pembayaran kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.
	Pengalihan	Perseroan tidak dapat mengalihkan segala hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari SC.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang saham.
3.	Nama Perjanjian	<i>Loan Agreement No. 011/ALI-LEG/X/19</i> tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/ALI-LGL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020
	Para Pihak	1. Perseroan; 2. E-Harbour Ventures Limited (" EVL ").
	Ruang Lingkup Perjanjian	EVL sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian	USD1.500.000.
	Nilai <i>Outstanding</i>	USD1.935.625 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	Bunga dari pinjaman adalah sebesar 7,5% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 60 bulan sejak perjanjian ditandatangani (berakhir pada 16 Januari 2025).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan adalah membayar segala biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pengikatan perjanjian dan/atau perjanjian lain yang merupakan pelengkap atau tambahan dari perjanjian jika ada serta membayar kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian. Hak dan kewajiban EVL adalah menerima pembayaran kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
4.	Nama Perjanjian	Loan Agreement tanggal 1 Maret 2022
	Para Pihak	1. MCT; dan 2. Perseroan.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pembiayaan modal kerja MCT oleh Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp172.205.607.065.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp25.911.273.780 per 31 Agustus 2023.
	Bunga	Tidak ada bunga yang timbul untuk fasilitas yang diberikan dalam perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal jatuh tempo: 60 bulan sejak tanggal 1 Maret 2022 (jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2027).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah mendapatkan pembayaran kembali dari MCT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Hak dan kewajiban MCT 1. MCT wajib untuk menggunakan kredit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian; dan 2. MCT wajib untuk melunasi kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal jatuh tempo.
	Pengalihan	MCT tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan dari Perseroan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak.

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Loan Agreement tanggal 18 Mei 2020
	Para Pihak	1. MCT; dan 2. Ancara Resources Limited.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pemberian fasilitas secara langsung kepada Ancara Resources Limited.
	Nilai Perjanjian	USD36.537.344,56.
	Nilai <i>Outstanding</i>	USD39.388.876 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	20% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	60 bulan sejak tanggal penarikan pertama yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Senilai Perjanjian Fasilitas Kredit Berjangka (<i>Term Loan Facility</i>) senilai USD49.000.000,00 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dengan, antara lain, MCT (sebagai penerima pinjaman) dan OL Master (Singapore Fund 1) Pte. Limited (sebagai pemberi pinjaman).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban MCT adalah menyediakan fasilitas secara langsung kepada Ancara Resources Limited. Hak dan kewajiban Ancara Resources Limited adalah melunasi kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian.
	Pengalihan	Ancara Resources Limited tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan dari MCT.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan <i>English Court</i> .
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
6.	Nama Perjanjian	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Novasi tanggal 3 November 2023
	Riwayat Perjanjian	<i>Loan Agreement</i> tanggal 18 Mei 2020 antara MCT dan Ancara Resources Limited.
	Para Pihak	1. MCT; 2. PT Kutai Bara Nusantara (" KBN "); dan 3. Ancara Resources Limited.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Para pihak menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali Perjanjian Novasi Utang No. 172/LC-CO/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 (" Perjanjian Novasi Awal ") yang berlaku efektif sejak tanggal Perjanjian Novasi Awal dimana KBN mengambil alih kewajiban Ancara Resources Limited kepada MCT, sehingga KBN akan memenuhi kewajiban Ancara Resources Limited yang diambil alih oleh KBN kepada MCT, serta yang mana sebelumnya KBN memiliki kewajiban terutang dengan Ancara Resources Limited, dan oleh karenanya kewajiban KBN terhadap Ancara Resources Limited menjadi selesai.
	Nilai Perjanjian	Rp154.642.847.744.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp212.900.221.586 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	21% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	60 bulan yakni 19 Mei 2025 sejak tanggal penarikan pertama yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas OCP Lama yakni sejak 19 Mei 2020.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban MCT adalah menerima pembayaran utang kepada Ancara Resources Limited. Hak dan kewajiban Ancara Resources Limited adalah untuk lepas dari kewajiban pembayaran kepada MCT. Hak dan kewajiban KBN adalah untuk membayar utang kepada MCT.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali dan susunan direksi atau komisaris.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. MCT.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk memberikan pinjaman kepada MCT untuk kemudian MCT melakukan pembayaran sebagian atau pelunasan dari kewajiban Perjanjian Fasilitas OCP.
	Nilai Perjanjian	Sebesar Rp635.370.000.000
	Nilai <i>Outstanding</i>	Nihil per 31 Agustus 2023 karena pemberian pinjaman dari Perseroan kepada MCT tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana Penawaran Umum dan akan direalisasikan setelah selesainya Penawaran Umum.
	Bunga	Pinjaman akan dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman MCT.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Perseroan wajib untuk memberikan fasilitas kepada MCT sesuai dengan jumlah pinjaman yang dimintakan untuk dicairkan; dan 2. Perseroan berhak menerima pembayaran kembali atas pinjaman yang diberikan dari MCT sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian. Hak dan Kewajiban MCT 1. MCT wajib untuk menggunakan pinjaman untuk melakukan pembayaran sebagian atau pelunasan dari kewajiban Perjanjian Fasilitas OCP; dan 2. MCT wajib untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.
	Pengalihan	MCT tidak diperbolehkan untuk mengalihkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya dalam perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Perseroan berhak untuk mengalihkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya dalam perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari MCT.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak.

Pinjaman dari pihak afiliasi memiliki jangka waktu 60 bulan, sesuai dengan kebijakan Perseroan. Apabila Perseroan belum memiliki kesanggupan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, maka akan dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset, liabilitas, pendapatan, dan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Pendapatan (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020	2023	2022*	2022	2021	2020
PT Ade Putra Tanrajeng	430.802.117	209.414.811	369.343.877	361.538.414	63.483.849	64,99	54,96	55,12	57,60	75,94
PT Guruh Putra Bersama	161.515.162	124.950.026	227.408.397	189.126.898	18.256.630	24,37	32,79	33,94	30,13	21,84
Total	592.317.279	334.364.837	596.752.274	550.665.312	81.740.479	89,36	87,75	89,05	87,73	97,78

*tidak diaudit

Beban pokok pendapatan

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Pendapatan (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020	2023	2022*	2022	2021	2020
PT Borneo Petrol Servis	58.779.265	46.788.687	79.459.014	32.111.277	13.753.631	8,87	12,28	11,86	5,12	16,45
PT Borneo Logistik Indonesia	20.400.000	20.400.000	30.600.000	36.791.907	-	3,08	5,35	4,57	5,86	-
Total	79.179.265	67.188.687	110.059.014	68.903.184	13.753.631	11,94	17,63	16,42	10,98	16,45

*tidak diaudit

Piutang usaha

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Aset (%)			
						31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020		2023	2022	2021	2020
PT Ade Putra Tanrajeng	102.934.930	63.520.163	46.263.492	11.684.211		5,55	4,52	3,80	1,19
PT Guruh Putra Bersama	97.945.404	78.777.499	66.872.221	193.141		5,28	5,61	5,50	0,02
Subtotal	200.880.334	142.297.662	113.135.713	11.877.352		10,83	10,13	9,30	1,21
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.781.100)	(1.397.971)	(1.046.706)	(109.384)		(0,10)	(0,10)	(0,09)	(0,01)
Total	199.099.234	140.899.691	112.089.007	11.767.968		10,73	10,03	9,21	1,20

Piutang lain-lain

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Aset (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Cakrawala Langit Sejahtera	72.793	722.988	-	-	0,00	0,05	-	-
PT Bara Milenia Energi	5.999	-	-	-	0,00	-	-	-
Subtotal	78.792	722.988	-	-	0,00	0,05	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(645)	(6.443)	-	-	0,00	0,00	-	-
Total	78.147	716.545	-	-	0,00	0,05	-	-

Piutang pihak berelasi

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Aset (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Ancara Resources Limited	600.247.083	557.097.665	420.129.473	579.768.410	32,36	39,66	34,54	59,26
PT Kutai Bara Nusantara	212.900.222	190.979.598	154.642.848	-	11,48	13,60	12,71	-
Honardy Boentario	5.600.000	1.900.000	-	-	0,30	0,14	-	-
PT Ancara Transshipment Services	-	11.925.000	-	-	-	0,85	-	-
PT Guruh Putra Bersama	-	-	79.406.321	-	-	-	6,53	-
Subtotal	818.747.305	761.902.263	654.178.642	579.768.410	44,13	54,24	53,78	59,26
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(9.976.857)	(9.030.121)	(5.044.815)	(4.473.726)	(0,54)	(0,64)	(0,41)	(0,46)
Total	808.770.448	752.872.142	649.133.827	575.294.684	43,60	53,60	53,37	58,80

Utang usaha

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Borneo Logistik Indonesia	20.101.104	5.079.537	4.593.034	-	1,62	0,48	0,45	-
PT Borneo Petrol Servis	10.253.061	-	258.543	1.178.560	0,83	-	0,03	0,12
PT Cakrawala Langit Sejahtera	333.667	34.625	-	-	0,03	0,00	-	-
Total	30.687.832	5.114.162	4.851.577	1.178.560	2,47	0,48	0,48	0,12

Utang lain-lain

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Cakrawala Langit Sejahtera	-	20.745	80.574	93.982	-	0,00	0,01	0,01
PT Guruh Putra Bersama	-	-	-	7.209.828	-	-	-	0,74
Total	-	20.745	80.574	7.303.810	-	0,00	0,01	0,75

Utang pihak berelasi

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Ancara Transshipment Services	37.201.534	-	-	-	3,00	-	-	-
E-Harbour Ventures Limited	29.496.989	29.269.492	24.959.729	23.070.491	2,38	2,77	2,45	2,38
PT Graha Adika Niaga	9.262.300	9.262.300	9.262.300	9.262.300	0,75	0,88	0,91	0,95
Solomed Capital Pte Ltd.	6.469.005	6.695.180	5.940.505	6.155.296	0,52	0,63	0,58	0,63
Honardy Boentario	-	15.859.028	39.323.278	54.473.278	-	1,50	3,85	5,61
Total	82.429.828	61.086.000	79.485.812	92.961.365	6,64	5,78	7,79	9,58

Uang muka

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Aset (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Borneo Petrol Servis	-	8.517.714	3.657.232	3.930.666	-	0,61	0,30	0,40
PT Borneo Logistik Indonesia	-	-	-	6.887.000	-	-	-	0,70
Total	-	8.517.714	3.657.232	10.817.666	-	0,61	0,30	1,11

Liabilitas sewa

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Cakrawala Langit Sejahtera	7.755.052	11.049.186	17.349.632	-	0,62	1,05	1,70	-

Rincian sifat hubungan dengan pihak-pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Graha Adika Niaga	Pemegang saham	Utang pihak berelasi
Solomed Capital Pte. Ltd.	Pemegang saham	Utang pihak berelasi
PT Borneo Logistik Indonesia	Pemegang saham	Beban pokok pendapatan Uang muka Utang usaha
PT Ade Putra Tanrajeng	Afiliasi	Pendapatan Piutang usaha
PT Guruh Putra Bersama	Afiliasi	Pendapatan Piutang usaha Piutang pihak berelasi Utang lain-lain
PT Cakrawala Langit Sejahtera	Afiliasi	Piutang lain-lain Utang usaha Utang lain-lain Liabilitas sewa
PT Kutai Bara Nusantara	Afiliasi	Piutang pihak berelasi
PT Bara Milenia Energi	Afiliasi	Piutang lain-lain
PT Borneo Petrol Servis	Afiliasi	Beban pokok pendapatan Uang muka Utang usaha

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Ancara Transshipment Services	Afiliasi	Piutang pihak berelasi Utang pihak berelasi
Ancara Resources Limited	Afiliasi	Piutang pihak berelasi
E-Harbour Ventures Limited	Afiliasi	Utang pihak berelasi
Honardy Boentario	Afiliasi	Piutang pihak berelasi Utang pihak berelasi

14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan, yakni KBLI No. 50132, merupakan kegiatan usaha dengan risiko parameter lingkungan menengah tinggi dan tidak wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”) dan karenanya hanya membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”). Dalam hal ini, berdasarkan peraturan yang berlaku, NIB Perseroan juga berlaku sebagai SPPL.

Oleh karena itu, selain SPPL yang terintegrasi dengan NIB Perseroan, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perizinan lingkungan hidup lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCT telah memiliki perizinan lingkungan hidup untuk menjalankan kegiatan usahanya (KBLI 09900 dan KBLI 52222) antara lain sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS untuk rencana kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan, Penimbunan Pemuatan dan Pengangkutan Hasil Pertambangan Batu Bara;
 - b. Hasil Tambang Batu Bara dan Pertambangan Umum Lainnya; dan
 - c. Perdagangan Besar Batu Bara
2. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batu Bara tanggal 21 Maret 2019 yang telah menerima rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Rekomendasi No. 012/REKOM/DPLH/DLHK/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) batu bara.
3. SPPL yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2023 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS untuk KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya).

15. Hak atas Kekayaan Intelektual, Waralaba, dan Konsesi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual, waralaba, dan konsesi.

16. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat memengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik

Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada bulan Juli tahun 2019. Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* untuk tambang batu bara. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Perseroan mengakuisisi saham mayoritas MCT sebesar 70% pada bulan September 2019. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai *Intermediate Stockpile* ("ISP") yang beroperasi di Desa Embalut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. ISP Perusahaan Anak berfungsi sebagai titik perpindahan, pengelolaan, dan penumpukan muatan dari tongkang sungai ke *stockpile* serta dari *stockpile* ke tongkang laut.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi yaitu: Menjadi penyedia layanan terdepan dari awal hingga akhir untuk logistik dan jasa pertambangan yang mencakup transportasi, *transshipment*, dan jasa lainnya mulai dari eksplorasi dan produksi hingga ke konsumen akhir, memberikan solusi yang aman, efisien, andal kepada pelanggan, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut: Menyediakan jasa logistik dan solusi pertambangan yang unggul kepada pelanggan termasuk transportasi, *transshipment* dan jasa pertambangan, dengan tetap menjaga komitmen terhadap keselamatan, perlindungan lingkungan hidup, dan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan sebagai berikut:

- **Safety** : Berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan kontraktor Perseroan.
- **Efficiency** : Berusaha untuk mengangkut komoditas dan menyediakan layanan pertambangan lainnya seefisien mungkin, berbiaya rendah dan dampak minimum terhadap lingkungan.
- **Reliability** : Memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi komitmen Perseroan.
- **Sustainability** : Berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan, dampak minimum terhadap lingkungan, dan mendukung pengembangan komunitas sekitar operasional Perseroan.
- **Integrity and Trust** : Menjalankan bisnis dengan cara yang adil dan jujur, dan berkomitmen untuk selalu berperilaku etis dengan menerapkan standar Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- **Empowerment** : Mendorong karyawan untuk berusaha mencapai hasil terbaik.

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
2019	- Perseroan didirikan pada bulan Juli 2019. - Perseroan mengakuisisi 70% saham MCT pada bulan September 2019.
2020	- Perseroan menambah 6 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 10 unit. - Perseroan menambah 14 unit tongkang sungai sehingga total tongkang sungai berjumlah 20 unit. - Perseroan menandatangani kontrak jangka panjang untuk pengangkutan batu bara dengan APT dan GPB.
2021	Perseroan menambah 15 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 25 unit.
2022	Perseroan menambah 1 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 26 unit.
2023	- Perseroan membeli <i>Floating Transshipment Unit</i> ("FTU") dengan kapasitas 20.000 <i>Per Weather Working Day</i> ("PWWD"). - Perseroan menambah 14 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 40 unit. - Perseroan menambah 16 unit tongkang sungai sehingga total tongkang sungai berjumlah 36 unit. - Perseroan menandatangani kontrak LoM untuk pengangkutan batu bara dengan APT dan GPB. - Perseroan membeli 2 unit <i>assist tugs</i>.

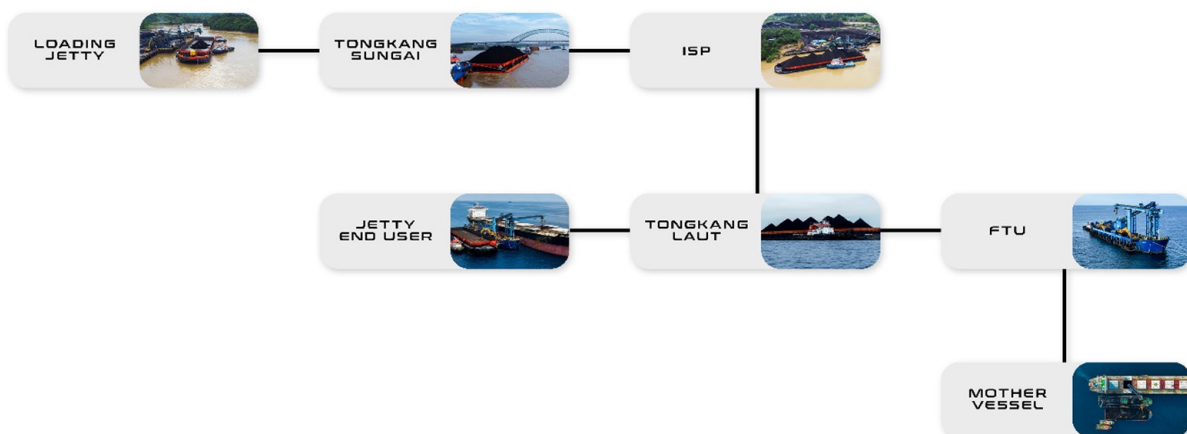
2. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile*, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak LoM dengan APT dan GPB untuk pengangkutan dan pengiriman batu bara. Dengan adanya kontrak LoM tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan, sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki APT dan GPB habis. Berdasarkan data cadangan batu bara per 30 September 2023, dibutuhkan lebih dari 20 tahun LoM sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki APT dan GPB habis. Selanjutnya, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 36 tongkang sungai dan melakukan *freight charter* atas 15 set tongkang sungai dan kapal tunda, memiliki 40 kapal tunda dan melakukan *time charter* atas 12 set tongkang laut dan kapal tunda, memiliki 2 *assist tugs* dan melakukan *time charter* atas 2 *assist tugs*, serta memiliki 1 unit FTU dengan kapasitas sebesar 20.000 MT PWWD.

Perseroan dan Perusahaan Anak dikelola oleh tim yang profesional dan berpengalaman di industri pelayaran dan pengangkutan. Selain itu, Perseroan memiliki izin SIUPAL, dimana Perseroan dapat menikmati keuntungan dari sektor perpajakan dengan pajak yang lebih rendah yaitu 1,20% atas pendapatan tongkang batu bara Perseroan.

Operasi dan Proses Pengangkutan dan Logistik Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan menggunakan transportasi air melalui sungai dan laut sebagai metode pengiriman dan distribusi batu bara. Perseroan menggunakan kapal dan rute perjalanan khusus yang telah diatur dinas perhubungan untuk menghindari kesalahan teknis ketika berlayar. Berikut adalah proses pengiriman batu bara yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada umumnya:



a. Proses pemuatan (*loading*) batu bara ke tongkang sungai

Dari *loading jetty* yang digunakan oleh pelanggan utama yaitu APT dan GPB, batu bara akan dimuat ke tongkang sungai Perseroan di Sungai Belayan menggunakan konveyor. Panjang tongkang sungai yang dapat berlabuh pada *loading jetty* adalah maksimal 180 kaki. Jumlah muatan batu bara akan disesuaikan dengan kontrak dan standar muatan yang ditentukan sebelumnya dengan kapasitas rata-rata sebesar 1.850 MT per tongkang. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 3 jam per tongkang.

b. Pengangkutan batu bara dengan tongkang sungai dan bongkar muat batu bara di *Intermediate Stockpile*

Selanjutnya, tongkang sungai yang memuat batu bara akan ditarik menggunakan kapal tunda melewati Sungai Belayan menuju lokasi pengapalan ISP di Sungai Mahakam yang merupakan terminal untuk kepentingan sendiri yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, MCT. Batu bara yang telah dimuat ke tongkang sungai akan di bongkar di lokasi ISP. Kegiatan ini dapat memakan waktu sekitar 4 jam per tongkang. ISP umumnya bertindak sebagai titik persimpangan antara beberapa rute pelayaran jarak jauh dimana kapal dapat berlabuh untuk melakukan bongkar muat batu bara. Beberapa kontrak dengan pelanggan utama Perseroan memiliki tujuan akhir bongkar muat batu bara pada lokasi ISP.

c. Proses pemuatan (*loading*) batu bara ke tongkang laut

Pada ISP milik MCT, batu bara selanjutnya dimuat ke tongkang laut dengan panjang 300 kaki untuk dapat diangkut ke pelabuhan tujuan. Pengangkutan dilakukan menggunakan tongkang laut dengan kapasitas rata-rata sekitar 7.500 MT per tongkang. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 6 jam per tongkang.

d. 1. Pengangkutan dari tongkang laut ke FTU kemudian ke *mother vessel*

Untuk pengiriman batu bara dengan tujuan akhir ke manca negara (ekspor), batu bara diangkut dengan menggunakan tongkang laut menuju tempat kapal berlabuh di Muara Berau atau Muara Jawa (*anchorage point in high sea*). Untuk proses pemindahan muatan batu bara, FTU disandarkan ke sisi kanan *mother vessel* kemudian tongkang laut akan bersandar pada sisi kanan FTU. Setelah *mother vessel*, FTU, dan tongkang laut bersandar, proses pemindahan muatan batu bara dari tongkang laut ke *mother vessel* baru dilakukan. *Mother vessel* adalah jenis kapal induk/ kapal kargo dengan kapasitas besar yang berfungsi untuk mengangkut kontainer dari pelabuhan transit menuju pelabuhan tujuan. Perseroan membutuhkan waktu sekitar 5-6 hari untuk perjalanan dari ISP milik MCT ke FTU dan untuk proses bongkar muat batu bara.

2. Pengangkutan dari tongkang laut ke *jetty* milik *end user*

Untuk pengiriman batu bara dengan tujuan akhir ke beberapa pelanggan domestik, dari ISP batu bara langsung diangkut dengan menggunakan tongkang laut menuju *jetty* yang dimiliki oleh *end user*.

Perseroan memiliki 3 segmen bisnis yaitu sebagai berikut:

2.1 Tongkang Batu Bara

Dalam segmen bisnis ini, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengangkutan batu bara menggunakan tongkang sungai, kapal tunda, dan tongkang laut. Berikut adalah spesifikasi tongkang sungai, kapal tunda, dan tongkang laut yang digunakan oleh Perseroan.

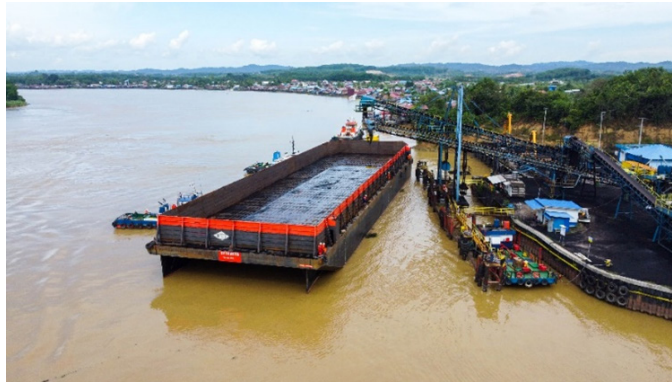
a. Tongkang Sungai dan Kapal Tunda

Pada umumnya, tongkang digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti batu bara, kayu, nikel, pasir, dan lain-lain serta tidak memiliki awak kapal. Tongkang memiliki lambung datar dan tidak memiliki sistem pendorong seperti kapal pada umumnya. Tongkang sungai dengan panjang 180 kaki digunakan Perseroan untuk mengangkut batu bara milik APT dan GPB melalui Sungai Belayan ke *intermediate stockpile* yang berlokasi di Sungai Mahakam. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 36 tongkang sungai dan melakukan *freight charter* untuk 15 set tongkang sungai dan kapal tunda.

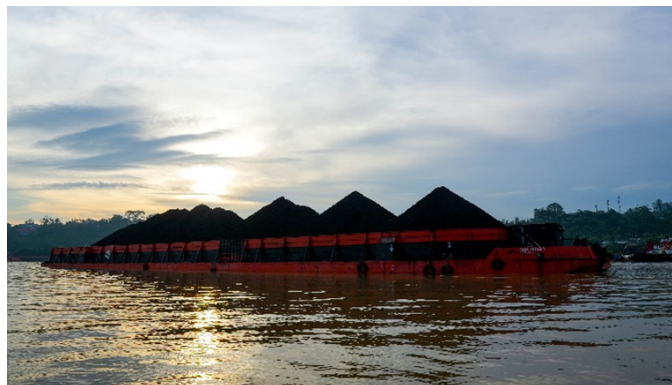
Berikut adalah spesifikasi tongkang sungai yang dimiliki oleh Perseroan dengan panjang 180 kaki:

No.	Nama Tongkang Sungai	Dimensi			GT	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
1.	Alliance 1801	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	80
2.	Alliance 1802	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	77
3.	Alliance 1803	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	82
4.	Alliance 1804	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	83
5.	Alliance 1805	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	45
6.	Alliance 1806	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	60
7.	Alliance 1807	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	70
8.	Alliance 1808	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	48
9.	Alliance 1809	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	57
10.	Alliance 1810	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	53
11.	Alliance 1811	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	80
12.	Alliance 1812	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	75
13.	Alliance 1813	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	78
14.	Alliance 1814	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	80
15.	Alliance 1815	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	70
16.	Alliance 1816	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	58
17.	Alliance 1817	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	57
18.	Alliance 1818	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	57
19.	Alliance 1819	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	63
20.	Alliance 1820	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	55
21.	Alliance 1821	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	18
22.	Alliance 1822	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	18
23.	Alliance 1823	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Mahakam	3
24.	BLI 1801	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	77
25.	BLI 1802	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	77
26.	BLI 1803	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	53
27.	BLI 1804	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	65
28.	BLI 1805	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	53
29.	BLI 1806	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	68
30.	BLI 1807	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	50
31.	BLI 1808	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	48
32.	BLI 1809	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	63
33.	BLI 1810	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	63
34.	BLI 1811	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	10
35.	BLI 1812	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	17
36.	BLI 1814	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Mahakam	3

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Tongkang sandar untuk pemuatan batu bara



Proses pengangkutan batu bara setelah pemuatan

Selain itu, Perseroan juga memiliki 40 kapal tunda. Kapal tunda adalah kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang. Kapal tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal tunda Perseroan saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin kapal tunda yang dimiliki Perseroan berkekuatan rata-rata sebesar antara 350 - 380 tenaga kuda.

Berikut adalah spesifikasi kapal tunda yang dimiliki oleh Perseroan:

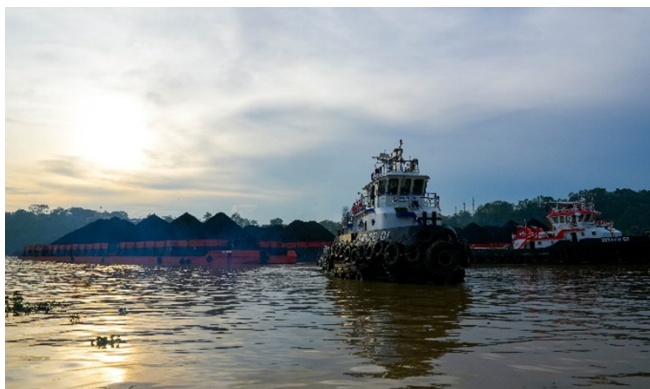
No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
1.	Gunung Sari S001	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	97
2.	Gunung Sari S002	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	99
3.	Gunung Sari S003	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	89
4.	Gunung Sari S004	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	94
5.	Gunung Sari S005	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	98
6.	Gunung Sari S006	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	93
7.	Gunung Sari S007	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	99
8.	Gunung Sari S008	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	99
9.	Gunung Sari S009	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	96
10.	Gunung Sari S010	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	98
11.	Gunung Sari A001	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	96
12.	Gunung Sari A002	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	94
13.	Gunung Sari A003	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	97
14.	Gunung Sari A004	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	97
15.	Gunung Sari A005	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	91
16.	Gunung Sari A006	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	95
17.	Gunung Sari K001	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
18.	Gunung Sari K002	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
19.	Gunung Sari K003	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
20.	Gunung Sari K004	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
21.	Gunung Sari K005	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99

No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
22.	Gunung Sari K006	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
23.	Gunung Sari K007	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
24.	Gunung Sari K008	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
25.	Gunung Sari K009	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
26.	Gunung Sari K010	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
27.	Gunung Sari K011	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
28.	Gunung Sari K012	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
29.	Gunung Sari K013	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
30.	Gunung Sari K014	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
31.	Gunung Sari K015	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
32.	Gunung Sari K016	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
33.	Gunung Sari K017	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
34.	Gunung Sari K018	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
35.	Gunung Sari K019	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
36.	Gunung Sari K020	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
37.	Nur Dahlia Jaya	16,5	4,6	2,3	39	350	Sungai Belayan	99
38.	Mutiara Perkasa 01	16,5	4,6	2,3	39	350	Sungai Belayan	99
39.	ALI 01	16,5	4,6	2,1	32	350	Sungai Belayan	100
40.	Nur Rizky	16,5	4,6	2,3	41	420	Sungai Belayan	100

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Kapal tunda Perseroan



Kapal tunda menarik tongkang yang memuat batu bara

Selain memiliki sendiri kapal tunda dan tongkang sungai, Perseroan juga melakukan *freight charter*. Kontrak tersebut dilakukan dengan skema sewa jangka pendek yang pemesanannya disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan muatan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga lebih fleksibel. Dalam kontrak *freight charter*, Perseroan menyewa tongkang sungai beserta kapalnya.

Berikut adalah spesifikasi tongkang sungai beserta kapal tunda dengan kontrak *freight charter* yang digunakan oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal Tunda	Nama Tongkang Sungai	Dimensi						GT	Kapasitas		Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
			Kapal Tunda			Tongkang Sungai				Kapal Tunda	Tongkang Sungai		
			P	L	D	P	L	D					
1.	TB. Gunung Sari K010 & TB. Gunung Sari K013	YS 01	16,5	4,6	2,3	54,8	17,2	3,66	838	838	2.091 MT	Sungai Belayan	50
2.	TB. Malindo Gold X	GSL Fayola	22,05	6,5	3,1	52,67	18,29	3,66	876	876	2.093 MT	Sungai Belayan	52
3.	TB. Malindo Gold II & TB. Malindo Gold IX	Baiduri B	18,08	5,35	2	52,67	17,07	3,66	889	889	2.216 MT	Sungai Belayan	62
4.	TB. Nur Riski & TB. Gunung Sari K007	Golden North Star I	16,5	4,6	2,3	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	48
5.	TB. Laksamana M. Zain 9	Golden North Star II	16,5	5	1,92	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	53
6.	TB. Salsabilla A & TB. Salsabila B	Golden North Star III	18,08	5,35	2	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	57
7.	TB. Malindo Gold VIII & TB. Gunung Sari K006	Golden North Star IV	16,5	4,6	2,3	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	47
8.	TB. Wahyuni 03 & TB. Suma Lestari XI	Gemilang 1898	16,5	4,5	2,2	52,67	18,29	4,27	1050	1050	2.738 MT	Sungai Belayan	30
9.	TB. Wahyuni 05 & TB. Belayan Prima Mandiri 05	Santan 183	16,5	4,5	2,1	52,67	18,29	4,28	1035	1035	2.667 MT	Sungai Belayan	35
10.	TB. Tuana Indah II & TB. Tuana Indah III	Salindo Putera Indah	15,38	4,5	1,5	52,67	17,07	3,66	836	836	2.600 MT	Sungai Belayan	17
11.	TB. Tuana Indah XIII & TB. Usaha Baru	Salindo Putera Indah II	14,9	4	1,4	52,67	17,07	3,66	836	836	2.600 MT	Sungai Belayan	50
12.	TB. Nissan Prima 01 & TB. Suma 8	Berkat Belayan 01	16,5	4,5	2	52,67	15,24	3,66	736	736	1.854 MT	Sungai Belayan	12
13.	TB. Mitra Etam 01 & TB. Wahyuni 02	Mitra Elam 01	16,5	4,5	1,9	52,67	15,24	3,66	736	736	1.770 MT	Sungai Belayan	38
14.	TB. Belayan Indah 01 & TB. Belayan Indah 02	Mitra Elam 03	16,5	4,5	2	52,67	15,24	3,66	736	736	1.833 MT	Sungai Belayan	33
15.	TB. Kawan Etam 03 & TB. Nur Dahlia Jaya	WKA 5	16,5	4,6	2,3	52,67	17,07	3,66	844	844	2.380 MT	Sungai Belayan	42

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Tongkang Laut dan Kapal Tunda

Kapal yang tidak dapat mencapai pelabuhan karena ukuran atau air yang dangkal menggunakan tongkang laut untuk membantu mengangkut kargo langsung ke darat. Tongkang laut dirancang untuk bertahan dari segala jenis kondisi alam dan lebih berat dari jenis tongkang lainnya dan memiliki panjang 300 kaki. Tongkang laut digunakan untuk mengangkut batu bara dari *intermediate stockpile* ke *jetty* milik *end user* (untuk beberapa pelanggan domestik) dan ke *mother vessel* (untuk tujuan akhir ke manca negara atau ekspor). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan *time charter* untuk 12 set tongkang laut dan kapal tunda.

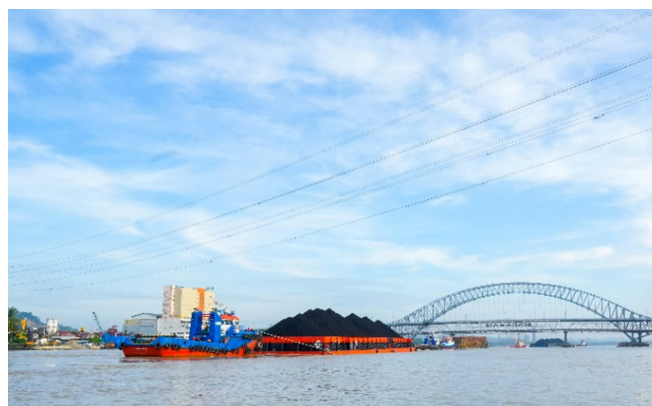
Berikut adalah spesifikasi tongkang laut dan kapal tunda dengan kontrak *time charter* yang digunakan oleh Perseroan:

No	Nama Kapal Tunda	Nama Tongkang Laut	Dimensi						Kapasitas		Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
			Kapal Tunda			Tongkang Laut			Kapal Tunda	Tongkang Laut		
			P	L	D	P	L	D	Kapasitas Mesin	Kapasitas Muatan		
1.	Grace 01	SIM 3001	27,90	8,10	3,60	87,78	24,38	5,49	800 HP X 2	7.570 MT	Muara Jawa	75
2.	Grace 02	MP 3016	26,56	8,10	3,60	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.500 MT	Muara Jawa	76
3.	Syukur 03	Syukur 61	26,67	8,50	3,80	91,44	24,38	5,49	1100 HP X 2	7.500 MT	Perjalanan ke Sungai Mahakam	65
4.	Syukur 11	Syukur 115	28,50	8,50	3,80	91,44	24,38	5,49	1100 HP X 2	7.500 MT	Muara Jawa	68
5.	Syukur 23	Syukur 06	27,13	8,10	3,60	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.500 MT	Perjalanan ke Sungai Mahakam	77
6.	Syukur 30	Syukur 07	25,44	7,75	3,60	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.550 MT	Perjalanan ke Muara Jawa	77
7.	Syukur 36	Syukur 37	29,90	8,60	3,80	87,78	24,38	5,49	1000 HP X 2	7.500 MT	Muara Jawa	71
8.	Syukur 45	Syukur 47	26,72	8,50	3,80	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.600 MT	Muara Jawa	70
9.	Syukur 52	Syukur 53	26,72	8,50	3,80	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.580 MT	Muara Jawa	84
10.	Syukur 56	Syukur 55	26,86	8,50	3,80	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.600 MT	Perjalanan ke Muara Jawa	81
11.	Atlantic	Indomarina 3002	28,00	8,00	3,30	87,78	24,38	5,49	1030 HP X 2	7.480 MT	Perjalanan ke Muara Jawa	63
12.	Belibis 1	HM 308	24,13	7,50	3,30	87,86	24,40	5,50	1100 HP X 2	7.550 MT	Sungai Mahakam	69

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Proses penarikan tongkang laut menuju FTU



Proses penarikan tongkang laut menuju FTU

Selain itu, Perseroan juga memiliki 2 *assist tugs* dan melakukan *time charter* atas 2 *assist tugs*. *Assist tugs* digunakan untuk membantu dan mendukung tongkang sungai dan tongkang laut saat proses penyardaran di pelabuhan atau dermaga.

Berikut adalah spesifikasi *assist tugs* yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas Mesin	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
1.	KSA Citra	19,70	6,40	3,05	99	400 PS x 2	Samarinda	99
2.	BLI 01	19,48	4,70	2,20	52	500 HP x 2	Samarinda	95

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



KSA Citra



BLI 01

Berikut adalah spesifikasi *assist tugs* dengan kontrak *time charter* yang digunakan oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas Mesin	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
1.	DC 1678	15,46	4,60	2,30	42	400 PS x 2	Gunung Sari	99
2.	TB. NSS IX	26,39	8,20	3,60	250	1030 PS x 2	Muara Jawa	99

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



DC 1678



TB. NSS IX

2.2 Bongkar Muat

a. Loading Jetty

Loading jetty yang berlokasi disisi Sungai Belayan digunakan oleh APT dan GPB untuk proses pemuatan batu bara ke tongkang sungai milik Perseroan.

b. *Intermediate Stockpile (ISP)*

Dimiliki oleh Perusahaan Anak yaitu MCT, ISP berlokasi di sisi Sungai Mahakam yang digunakan untuk memindahkan batu bara yang diangkut dari tongkang sungai ke tongkang laut. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang dipergunakan untuk proses muat batu bara dari tongkang ke *stockpile* maupun sebaliknya. ISP dilengkapi dengan 4 tempat berlabuh khusus untuk menurunkan batu bara dari tongkang sungai dan 1 tempat berlabuh untuk menaikkan batu bara ke tongkang laut. Perseroan juga memiliki 1 tambahan tempat berlabuh yang dapat digunakan baik untuk menurunkan atau menaikkan muatan batu bara ke tongkang. ISP dilengkapi dengan infrastruktur dan alat berat seperti *excavators*, *grab cranes*, *dozers*, *whell loaders*, *conveyor belt* dengan kapasitas 1.500 MT per jam, dan *stockpile* dengan kapasitas 230.000 MT serta fasilitas lainnya. Pada tahun 2022, MCT mampu mengolah batu bara sebesar 7 juta MT.

Berikut adalah keterangan terminal untuk kepentingan sendiri yang dimiliki oleh MCT:

Keterangan	Beroperasi Sejak
Kepemilikan Atas Nama	PT Mahakam Coal Terminal
Nama Operator	PT Swakarya Kencana Services dan PT Buana Laksa Abadi
Tahun Kerjasama dengan Operator	2019
Tahun berakhirnya Kerjasama dengan Operator	2023*
Keterangan Lebih Lengkap Terkait dengan Kerjasama/ Kontrak dengan Operator	PT Swakarya Kencana Servis sebagai operator alat-alat kerja dan PT Buana Laksa Abadi sebagai operator pengoperasian <i>conveyor</i>
Kapasitas <i>Stockpile</i> (ton)	230.000 MT
Kapasitas <i>Barge Loader</i>	1 unit

*Saat ini, MCT sedang dalam proses perpanjangan kerjasama dengan PT Swakarya Kencana Services dan PT Buana Laksa Abadi.



Aktivitas operasional di ISP

2.3 Muatan Apung

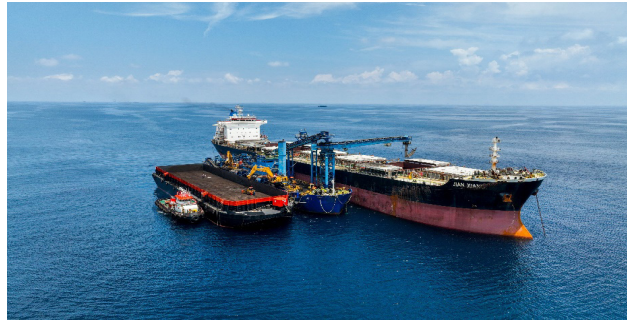
Perseroan memiliki 1 fasilitas muatan apung yaitu sebagai berikut:

Floating Transhipper Unit ("FTU")

FTU adalah alat bantu bongkar muat yang digunakan untuk memindahkan muatan seperti batu bara ke kapal pengangkut yang lebih besar kapasitasnya antara lain *Mother Vessel*. FTU tidak memiliki mesin induk dan digerakkan oleh kapal tunda. Perseroan memiliki FTU yang berlokasi di pelabuhan Muara Berau, Samarinda, Kalimantan Timur dengan kapasitas 20.000 MT PWWD dan mampu untuk memindahkan batu bara ke Supra-max *mother vessel* dalam 3 hari, Panamax *mother vessel* dalam 4 hari dan *Cap Size vessel* dalam 7 hari.



FTU Perseroan



Proses pemuatan ke *mother vessel* menggunakan FTU

Pemeliharaan Kapal

Dalam menjaga kualitas kapalnya dan memastikan kegiatan operasional berjalan lancar serta memastikan keselamatan kerja para awak kapal, Perseroan melakukan pemeliharaan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan armadanya, melakukan pemeliharaan terjadwal serta mendokumentasikan pemeliharaan secara lengkap agar dapat digunakan sebagai referensi dimasa depan.

Pemeliharaan kapal yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai standar prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan untuk memastikan kapal dalam keadaan layak dan baik untuk melaut sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan keselamatan awak kapal terjamin.
- b. Pemeliharaan rutin dan terjadwal yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi ketentuan klasifikasi kapal dan peraturan perhubungan laut yaitu *Intermediate Survey* yang dilakukan setiap 2,5 tahun dan *Special Survey* yang dilakukan setiap 5 tahun.

3. Keunggulan Kompetitif

a. Perseroan memiliki kontrak LoM jangka panjang dengan pelanggan utama

Dengan adanya kontrak LoM yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan APT dan GPB, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat lebih berfokus pada pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak berhasil mencapai target yang telah ditentukan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan Perseroan. Selain itu, terbatasnya jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* menggunakan tongkang sungai membuat jasa yang ditawarkan semakin dibutuhkan dan menjadi nilai tambah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

b. Perseroan memiliki kapal tunda tongkang dengan usia yang relatif muda

Kapal tongkang yang masih layak digunakan pada umumnya berumur maksimal 30 tahun dengan pemeliharaan kapal yang *high maintenance*. Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan memiliki rata-rata umur 2-3 tahun, sehingga masih tergolong kapal dengan usia yang muda. Kapal dengan usia yang relatif muda memiliki tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, biaya pemeliharaan kapal dan tongkang yang lebih murah, suku cadang yang mudah didapatkan, dan keselamatan kerja awak kapal yang lebih terjamin.

c. Perseroan memiliki jumlah armada kapal tunda dan tongkang yang besar dan terus bertambah

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 36 tongkang sungai dan 40 kapal tunda. Perseroan juga melakukan *freight charter* serta *time charter* untuk kapal tunda serta tongkang sungai dan tongkang laut guna memenuhi permintaan pelanggan. Tongkang dan kapal yang digunakan

Perseroan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menunjang volume pengangkutan batu bara dari pelanggan. Seiring dengan meningkatnya target produksi dan penjualan dari pelanggan Perseroan, Perseroan terus menambah armada untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan.

d. Lokasi ISP yang strategis untuk pengangkutan batu bara

ISP yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berlokasi di sisi Sungai Mahakam, Desa Embalut. Lokasi tersebut relatif dekat dengan lokasi dimana kapal tunda Perseroan dan Perusahaan Anak berlabuh yaitu di Muara Berau (*anchorage point in high sea*) yang dimana merupakan lokasi pemindahan muatan batu bara dari tongkang laut ke *mother vessel* yang merupakan tujuan akhir ke manca negara (ekspor). Dengan lokasi yang berdekatan, Perseroan dapat melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar untuk pengoperasian kapal tunda Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan berdampak pada efisiensi biaya operasional Perseroan secara keseluruhan.

e. Perseroan memiliki teknologi untuk melakukan pengecekan mengenai status kapal secara online (*vessel tracking system*)

Perseroan memiliki *vessel tracking system* pada setiap armadanya dimana dengan teknologi tersebut, Perseroan dapat melakukan pengecekan mengenai status kapal secara *online* serta mengumpulkan data tentang lokasi, kecepatan, dan haluan kapal, sehingga dapat memberikan informasi secara *real-time* dan menambah efisiensi dalam kegiatan operasional Perseroan. Perseroan selalu berinovasi untuk mengembangkan sistem operasional dengan berbagai solusi digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas secara keseluruhan.

f. Jaminan pasokan bahan bakar yang berkesinambungan dan sistem logistik yang terintegrasi

Bahan bakar yang merupakan komponen yang sangat penting dalam mengoperasikan armada Perseroan dan Perusahaan Anak, memiliki volatilitas harga sesuai dengan yang ditetapkan Pertamina. Guna meminimalisir efek dari volatilitas harga tersebut, Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan penyedia bahan bakar, yaitu PT Borneo Petrol Servis (pihak afiliasi). Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Perseroan dapat memastikan pasokan bahan bakar yang berkesinambungan dan harga yang kompetitif. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

g. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tim manajemen yang berpengalaman di industri pengangkutan laut

Tim manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pengalaman yang panjang pada industri pelayaran dan batu bara. Kapabilitas dan pengetahuan tim manajemen yang luas yang ditunjang oleh pengelolaan operasional serta bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak yang baik adalah komponen yang signifikan dalam mencapai target dalam mencapai praktek pengangkutan laut yang unggul. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki tim operasional yang didukung dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang panjang di industri pelayaran dan batu bara sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Tim operasional juga selalu menjaga validitas sertifikasi yang harus dimiliki dan disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini *International Safety Management ("ISM") Code* dan *International Ship and Port Facility Security ("ISPS") Code*.

h. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), lingkungan dan komunitas

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan komunitas. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa program *Corporate Social Responsibility ("CSR")* yaitu pengembangan masyarakat, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengayaan sosial budaya dan peningkatan lingkungan hidup diantaranya pemantauan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan karena aktivitas operasional terhadap tanah, udara, air dan lainnya.

4. Pengendalian Mutu

Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan untuk memastikan pengiriman batu bara dapat berjalan sesuai dengan *standard operating procedure* (“**SOP**”) yang telah ditetapkan. Perseroan menjaga kualitas kapal dengan melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan yang sesuai prosedur terhadap armada secara berkala. Perseroan juga melakukan sertifikasi terhadap SDM yang terlibat dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengembangan SDM dimulai dari penerapan sistem rekrutmen, pembinaan dan pengembangan SDM yang efektif. Untuk mengurangi risiko pengiriman, Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang kapal beroperasi pada saat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan.

Pengendalian mutu dan kuantitas batu bara yang dilakukan berupa pengukuran kualitas dan kuantitas batu bara selama di *stockpile*, melakukan *draft* survei terhadap bongkar muatan dari tongkang sungai, melakukan *draft* survei pemuatan ke tongkang laut untuk ekspor dan konsumsi dalam negeri termasuk melakukan pengukuran setiap akhir bulan (*stock opname*) batu bara, yang dilakukan oleh PT Asiatrust Technovima Qualiti.

5. Pendapatan dan Pemasaran

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen operasi:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
<u>Pihak ketiga</u>					
Tongkang batu bara	67.093.651	46.679.061	73.368.109	77.051.619	1.858.444
Muatan apung	3.469.807	-	-	-	-
Subtotal	70.563.458	46.679.061	73.368.109	77.051.619	1.858.444
<u>Pihak berelasi</u>					
Tongkang batu bara	410.237.223	244.105.587	433.456.009	389.523.052	33.908.221
Bongkar muat	157.256.105	90.259.250	163.296.265	161.142.260	47.832.258
Muatan apung	24.823.951	-	-	-	-
Subtotal	592.317.279	334.364.837	596.752.274	550.665.312	81.740.479
Total	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923

*tidak diaudit

Tabel berikut menyajikan informasi volume pengangkutan dan bongkar muat Perseroan:

(dalam ton)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Tongkang batu bara (180 kaki)	1.935.894	1.146.593	1.983.503	2.064.028	516.746
Tongkang batu bara (300 kaki)	1.381.938	927.963	1.702.017	1.768.564	317.601
Muatan apung	606.824	-	-	-	-
Bongkar muat	1.965.701	1.127.995	2.041.203	2.006.011	726.539
Jumlah	5.890.358	3.202.550	5.726.723	5.838.603	1.560.886

*tidak diaudit

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan 2 (dua) pelanggan utama yaitu GPB dan APT. Namun demikian, Perseroan berupaya untuk mendiversifikasi jumlah pelanggan untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap kontrak dengan dua pelanggan utama dengan senantiasa secara aktif menambah pelanggan baru sehingga dapat mendiversifikasi dan menambah portofolio pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan strategi pemasaran dan penjualan, kualitas sumber daya serta kualitas pelayanan untuk pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan baru di masa yang akan datang.

6. Pemasok dan Pengadaan

Tabel berikut ini menunjukkan pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PT Borneo Petrol Servis	58.779.265	46.788.687	79.459.014	32.111.277	13.753.631

*tidak diaudit

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok, termasuk PT Borneo Petrol Servis karena Perseroan dapat beralih kepada pemasok lainnya apabila pemasok lain memiliki harga yang kompetitif dan jaminan pasokan kepada Perseroan.

7. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Menjaga kelangsungan kontrak LoM dan memenuhi kebutuhan sesuai peningkatan volume produksi dari pelanggan

Saat ini, Perseroan memiliki kontrak LoM dengan 2 (dua) pelanggan utama, APT dan GPB, dimana dengan adanya kontrak LoM tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan, sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki pelanggan utama tersebut habis. Oleh sebab itu, untuk memastikan kelangsungan kontrak tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama tersebut dengan menjaga dan meningkatkan pelayanan yang profesional, tepat waktu serta memberikan harga yang kompetitif. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menambah investasi kapal tunda dan tongkang untuk memenuhi peningkatan volume produksi dan penjualan pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak.

b. Menambah kapasitas antara lain dengan membangun ISP dan menambah FTU seiring dengan peningkatan volume produksi dari pelanggan

Seiring dengan rencana bisnis dan produksi serta penjualan 2 (dua) pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak yang diproyeksikan meningkat, fasilitas ISP yang dimiliki oleh Perusahaan Anak diperkirakan tidak dapat memenuhi permintaan dari pelanggan tersebut. Oleh karena itu, Perseroan dan Perusahaan Anak akan menambah kapasitas dengan membangun ISP kedua yang akan berlokasi di sisi Sungai Mahakam untuk dapat memenuhi pengembangan bisnis dan peningkatan produksi serta penjualan pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk menambah kapasitas dengan membeli satu unit FTU yang akan digunakan untuk menunjang fasilitas ISP kedua yang akan dibangun oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Dengan dilakukannya pembangunan ISP kedua dan penambahan satu unit FTU ini, maka Perseroan dan Perusahaan Anak akan menghindari potensi hilangnya pendapatan yang signifikan dari pelanggan utama tersebut dan mempertahankan daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak dalam industri pelayaran.

c. Optimalisasi penggunaan seluruh kapal tunda dan tongkang serta peralatan lainnya yang dimiliki Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa melakukan pemantauan secara berkala (setiap minggu) untuk memastikan utilisasi aset Perseroan dan Perusahaan Anak berjalan optimal. Setiap hari, tim operasional Perseroan juga memantau kinerja operator kapal tunda dan tongkang Perseroan yang kemudian akan direviu oleh Direksi Perseroan setiap minggunya. Selain itu, investasi dalam teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis akan membantu Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memastikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan optimalisasi atas seluruh aset yang dimiliki dan digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Menambah investasi digitalisasi dalam proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan akan senantiasa menambah investasi sehubungan dengan digitalisasi dalam proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak terutama digitalisasi untuk pengecekan status kapal secara *online* (*vessel tracking system*) dan investasi alat untuk memonitor konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal Perseroan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan optimalisasi atas utilisasi aset Perseroan dan Perusahaan anak serta meningkatkan efektivitas dalam proses bisnis yang dijalankan Perseroan dan Perusahaan Anak.

e. Pengembangan dan peningkatan SDM

Perseroan menyadari bahwa kualitas seluruh sumber daya manusia Perseroan memiliki dampak bagi kinerja dan prospek usaha Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan secara berkesinambungan melakukan perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masing-masing fungsi yang dibutuhkan. Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja karyawan dan memberikan pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan keahlian (*hard skill* dan *soft skill*), meningkatkan produktivitas kinerja serta pengembangan karir karyawan sehingga proses perencanaan suksesi (*succession planning*) dapat berjalan dengan baik.

8. Persaingan Usaha

Perseroan menyadari terdapat persaingan usaha yang ketat dalam industri jasa pelayaran dan pengangkutan di Indonesia. Namun, Perseroan optimis dapat menggunakan pengalaman dan keahliannya untuk mempertahankan posisi yang kuat dan citra positif terhadap persaingan. Pencapaian perusahaan dalam mengelola kontrak jangka panjang dengan pelanggan, kualitas tenaga kerja perusahaan yang berkualitas serta manajemen yang berpengalaman dalam menangani berbagai proyek transportasi dapat mendukung kinerja perusahaan agar sukses bersaing di industri jasa pelayaran dan pengangkutan.

Adapun pesaing Perseroan saat ini dan/atau pesaing potensial di industri pelayaran dan pengangkutan yang telah tercatat di BEI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun Operasional Komersial	Jumlah Tongkang & Kapal Tunda yang dimiliki	Wilayah Operasi	Sumber	Pada Tanggal
1.	PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk	1994	54 tongkang 62 kapal tunda	Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022
2.	Perseroan	2019	36 tongkang 40 kapal tunda	Kalimantan Timur	Data Perseroan	10 Desember 2023
3.	PT IMC Pelita Logistik Tbk	2008	35 tongkang 38 kapal tunda	Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Benua Afrika, dan Teluk Persia	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022
4.	PT Trans Power Marine Tbk	2005	33 tongkang 38 kapal tunda	Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Tengah	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022

No.	Nama Perusahaan	Tahun Operasional Komersial	Jumlah Tongkang & Kapal Tunda yang dimiliki	Wilayah Operasi	Sumber	Pada Tanggal
5.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	2012	• 18 tongkang • 18 kapal tunda	Kalimantan Selatan	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022
6.	PT Hasnur Internasional Shipping Tbk	2019	• 11 tongkang • 11 kapal tunda	Kalimantan Selatan dan Tengah	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022

9. Prospek Usaha

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Letak geografis Indonesia juga sangat strategis dimana Indonesia diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan keadaan geografis yang strategis, transportasi laut khususnya kapal sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam mengakomodasi keberlangsungan kegiatan ekonomi di Indonesia. Transportasi laut memiliki berbagai peran penting dalam aspek ekonomi dan sosial. Kapal-kapal memfasilitasi perdagangan dan perjalanan, serta dapat berkontribusi pada pertahanan dan keamanan, mendukung penelitian dan inovasi, dan juga memengaruhi berbagai sektor industri.

a. Prospek Perekonomian Indonesia

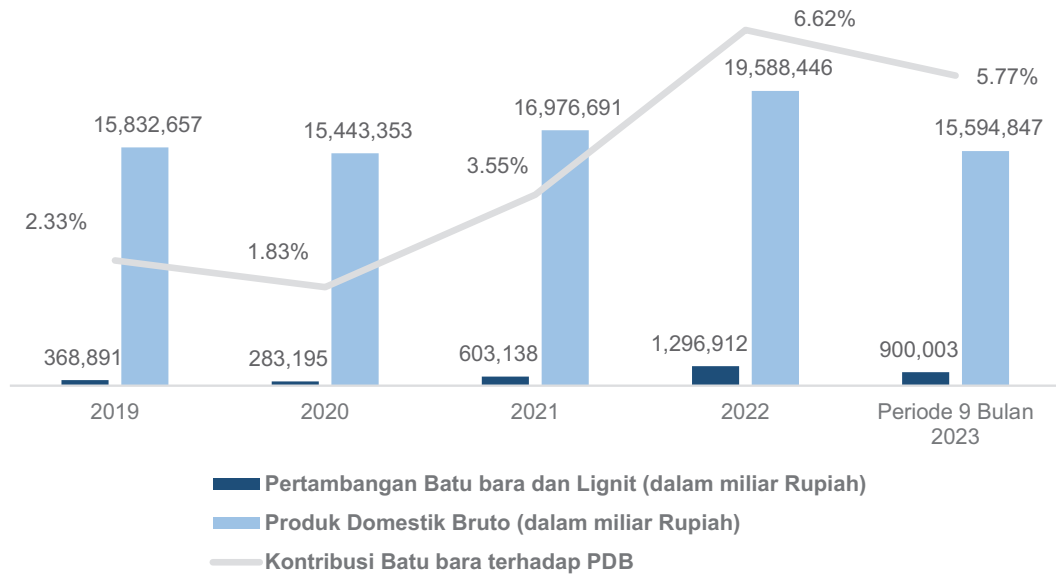
Kekayaan sumber daya alam Indonesia juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di sektor pertambangan yang menyumbang 10,82% dari total Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia pada triwulan III 2023. Sektor batu bara juga turut berkontribusi sebesar 5,77% dari total PDB di periode yang sama. Industri pertambangan terus bertumbuh untuk memenuhi permintaan kebutuhan ekspor maupun kebutuhan domestik seiring dengan bertumbuhnya ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ("BPS"), perekonomian Indonesia pada triwulan III 2023 berdasarkan PDB mencapai Rp5.296 triliun, dimana terdapat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan III 2023 sebesar 4,94% (y-o-y).

b. Peningkatan Produksi dan Permintaan Batu Bara Indonesia

Berdasarkan data dari *Institute for Energy Research*, batu bara merupakan sumber energi pembangkit listrik yang paling dominan di dunia dibandingkan dengan sumber energi lainnya, dengan kontribusi sebesar 35,4% pada tahun 2022. Berdasarkan DataIndonesia.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") mencatat bahwa mayoritas bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara dimana pada tahun 2022 mencapai sebesar 67,21% dari total bauran energi pembangkit listrik, meningkat dari porsi pada tahun 2021 yaitu sebesar 66,01%.

Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Menurut data Kementerian ESDM, cadangan batu bara Indonesia berjumlah 33,4 miliar ton pada tahun 2022. Sekitar 41% dari total cadangan tersebut berada di Kalimantan Timur, sedangkan 59% sisanya tersebar di 14 provinsi lain. Produksi batu bara diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (pembangkit listrik dan industri) dan permintaan luar negeri (ekspor).

Kontribusi Batu Bara terhadap PDB



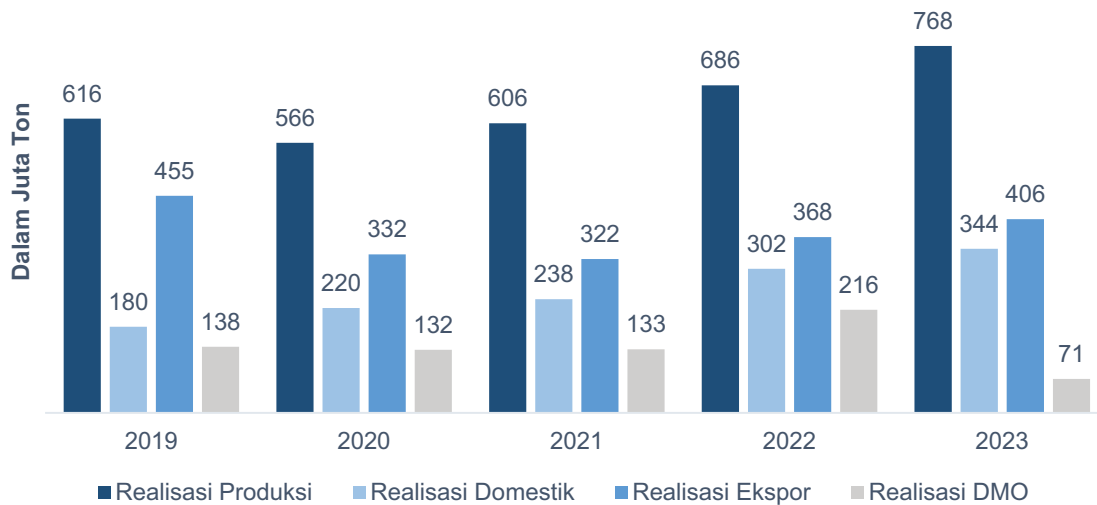
Sumber: Badan Pusat Statistik, Januari 2024

Berdasarkan data dari BPS, jumlah PDB dari lapangan usaha khusus pertambangan batu bara dan lignit mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dari sebesar Rp368.891 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.296.912 miliar pada tahun 2022. Kontribusi batu bara terhadap PDB juga meningkat secara signifikan dari 2,33% pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,62% pada tahun 2022.

Kebijakan penerapan *domestic market obligation* (“DMO”) batu bara tertuang pada Keputusan Presiden tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan bahwa pada tahun 2025 kontribusi batu bara sebesar 35% dalam bauran energi nasional. Selanjutnya berturut-turut tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu bara untuk Kepentingan Dalam Negeri serta Keputusan Menteri ESDM No.139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yaitu 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunannya untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemberlakuan DMO batu bara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batu bara serta menjamin pasokan batu bara untuk kepentingan energi dalam negeri secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya setiap perusahaan pertambangan batu bara nasional berkewajiban untuk menjual 25% produksinya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemakai batu bara dalam negeri. Pemberlakuan DMO ini terkait pada pemenuhan target 35.000 Mega Watt pengadaan listrik nasional. Dengan adanya peraturan terkait DMO ini akan menambah jumlah kapal tunda dan tongkang yang dibutuhkan secara signifikan untuk pengangkutan batu bara melalui laut dari wilayah sumber batu bara di Indonesia ke wilayah-wilayah yang membutuhkan pasokan batu bara yang umumnya diluar wilayah sumber batu bara.

Produksi Batu Bara Nasional, Domestik, Ekspor, dan DMO



Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI), Kementerian ESDM, Januari 2024

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi produksi batu bara nasional pada tahun 2023 mencapai sebesar 768 juta ton, meningkat dibandingkan jumlah pada tahun 2022 sebesar 686 juta ton. Lebih lanjut, realisasi ekspor juga meningkat secara signifikan dari 368 juta ton pada tahun 2022 menjadi 406 juta ton pada tahun 2023.

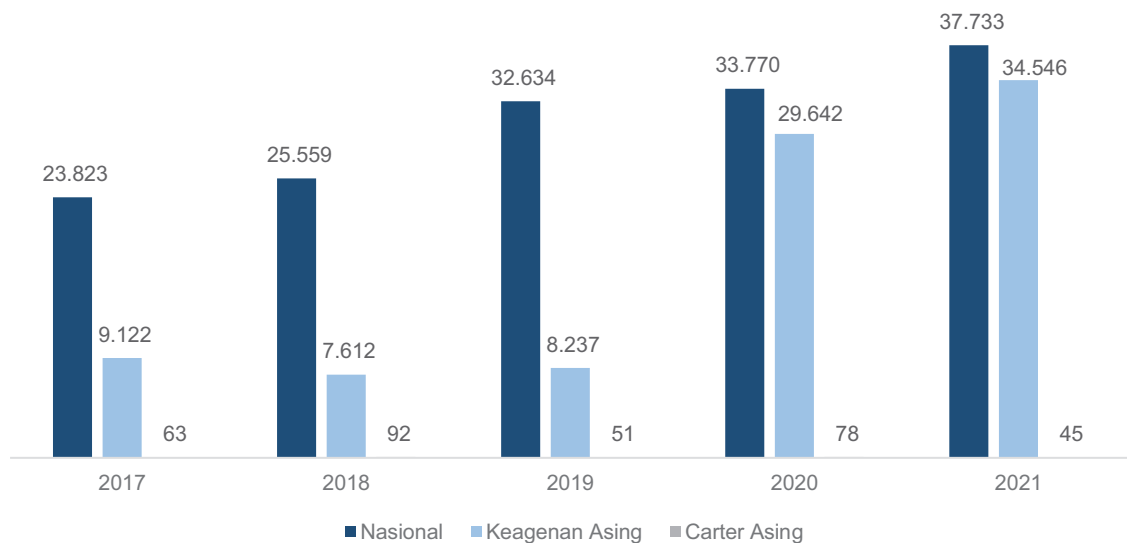
c. Peraturan Pemerintah Yang Mendorong Pertumbuhan Pelayaran Indonesia

Asas Cabotage

Pemerintah berkomitmen untuk memajukan pelayaran dalam negeri dan mendorong pemberdayaan industri pelayaran nasional. *Asas Cabotage* diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden ("Inpres") No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi guna memberdayakan industri pelayaran nasional. Selanjutnya, penerapannya dipertegas dengan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, serta kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat transportasi laut masih menjadi tumpuan untuk menghubungkan masyarakat antar daerah. Hal itu pun mendorong banyaknya kapal laut di dalam negeri, baik milik lokal maupun asing. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan ("Kemenhub") pada tahun 2021 jumlah armada kapal laut nasional sebanyak 37.733 unit, meningkat dibandingkan jumlah armada kapal laut pada tahun 2017 sebanyak 23.823 unit. Dengan berlakunya *Asas Cabotage*, jumlah armada angkutan laut nasional terus meningkat dan merangsang munculnya perusahaan-perusahaan baru di sektor pelayaran.

Jumlah Kapal Laut Nasional dan Asing di Indonesia



Sumber: Kementerian Perhubungan, November 2023

Kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 15

Guna memajukan industri pelayaran dalam negeri, pemerintah memberikan insentif fiskal melalui pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 15 bagi perusahaan pelayaran dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dikarenakan perusahaan pelayaran dalam negeri termasuk dalam Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus, maka penghitungan pajak penghasilan perusahaan pelayaran mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang menetapkan besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,20% (satu koma dua nol persen) dari peredaran bruto dan pajak bersifat final.

Kebijakan insentif fiskal tersebut merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan industri pelayaran mengingat kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan dimana kegiatan industri serta aktivitas yang berkaitan dengan transportasi antar kepulauan menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan.

10. Riset dan Pengembangan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki divisi riset dan pengembangan.

11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana pada saat musim kemarau/kering (yang umumnya jatuh pada bulan Juni, Juli dan Agustus), pengangkutan batu bara yang dilakukan Perseroan lebih rendah dikarenakan tingkat air sungai dan laut yang lebih rendah yang disebabkan oleh minimnya curah hujan pada musim tersebut. Sedangkan, pada saat musim hujan, volume pengangkutan batu bara yang dilakukan Perseroan dapat lebih tinggi dikarenakan curah hujan dan iklim yang mendukung proses pelayaran, sehingga pada musim tersebut Perseroan dapat menambah jumlah kapal tunda dan tongkang yang disewa dengan skema *freight charter* serta *time charter* untuk mendukung peningkatan permintaan jasa Perseroan.

12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* ("CSR"))

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan CSR antara lain:

- a. Pengembangan masyarakat berupa keikutsertaan dan peran aktif Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan acara peringatan hari besar keagamaan, proklamasi dan kegiatan kearifan lokal lainnya.



Penyerahan hewan kurban ke masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

- b. Pendidikan berupa program magang bagi komunitas dan masyarakat sekitar operasional Perseroan dan Perusahaan anak.



Program praktek kerja untuk siswa SMA/SMK di sekitar area kerja Perseroan dan Perusahaan Anak

- c. Ekonomi berupa keterlibatan pengusaha daerah dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang menjadi mitra kerja Perseroan dan Perusahaan Anak.



MCT mempekerjakan warga lokal sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar

- d. Kesehatan berupa peran aktif Perseroan dan Perusahaan Anak dalam Kesehatan Masyarakat terutama selama masa COVID-19 dengan pemberian masker, *hand sanitizer* dan kampanye yang melibatkan masyarakat terkait pandemik COVID-19.



Penyerahan oksigen ke kantor desa Embalut

- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup berupa peran aktif Perseroan dan Perusahaan Anak dalam pemantauan dampak lingkungan karena adanya aktivitas Perseroan dan Perusahaan Anak seperti monitor kualitas tanah, udara dan air termasuk kebisingan suara secara reguler.



Kegiatan pengambilan *sampling* air (*settling pond* dan Sungai Mahakam)



Kegiatan *water treatment settling pond* MCT 1 dan *settling pond* MCT 2



Kegiatan pengambilan *sampling* udara ambien, debu dan kebisingan

Jumlah biaya CSR dan donasi yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.786.234 ribu, Rp5.451.466 ribu, Rp4.697.282 ribu, dan Rp1.452.555 ribu.

13. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

14. Pesanan yang Sedang Menumpuk dan Perkembangan dari Pesanan Tersebut dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tidak terdapat pesanan yang sedang menumpuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember			
	2023	2022	2021	2020	
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham					
Modal dasar - 238.880 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 59.720 saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 51.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	59.720.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	
Tambahan modal disetor - neto	91.779.744	-	-	-	
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	(382.420)	(393.603)	(11.186)	-	
Saldo laba (defisit)	457.970.945	294.241.755	130.662.550	(58.446.679)	
Subtotal	609.088.269	344.848.152	181.651.364	(7.446.679)	
Kepentingan nonpengendali	5.218.366	2.825.947	14.589.164	15.050.148	
TOTAL EKUITAS	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469	

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali berdasarkan (i) Akta Perseroan No. 66/2023 dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham atau dengan rasio 1:200.000 dan (ii) Akta Perseroan No. 5/2023 dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp63.303.200.000 terbagi menjadi 12.660.640.000 saham dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000 yang diambil bagian oleh Nalinkant Amratlal Rathod, sejumlah 333.347.000 saham dan Aninditha Anestya Bakrie, sejumlah 383.293.000 saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor - neto	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	Saldo laba	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023	59.720.000	91.779.744	(382.420)	457.970.945	5.218.366	614.306.635
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
Pemecahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham	-	-	-	-	-	-
Penerbitan saham baru sebanyak 716.640.000 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) per saham	3.583.200	-	-	-	-	3.583.200
Penawaran Umum sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp272 per saham	15.825.800	845.097.720	-	-	-	860.923.520
Biaya-biaya emisi	-	(13.809.562)	-	-	-	(13.809.562)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Agustus 2023 setelah pemecahan nilai nominal, penerbitan saham baru, dan Penawaran Umum	79.129.000	923.067.902	(382.420)	457.970.945	5.218.366	1.465.003.793

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Berdasarkan sebagaimana termuat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk tertanggal 12 Desember 2023 Perseroan telah menyisihkan sejumlah Rp6.330.320.000 yang berasal dari laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan para pemegang saham menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 80% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024 serta penyisihan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan kebutuhan modal kerja (*Operational Expenditure*). Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada modifikasi dari kebijaksanaan Direksi dengan persetujuan pemegang saham pada RUPS.

Perseroan belum membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk menggunakan dana untuk pengembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Sekuritas Asia	2.941.176.000	799.999.872.000	92,92
PT Samuel Sekuritas Indonesia	223.984.000	60.923.648.000	7,08
Jumlah	3.165.160.000	860.923.520.000	100,00

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp268 (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp278 (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price to Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV);

Berikut merupakan data rasio Perseroan dibandingkan dengan 5 kompetitor di industri sejenis yang tercatat di BEI (diurutkan berdasarkan nilai kapitalisasi saham):

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten	Nilai Kapitalisasi Saham	PER (x)	PBV (x)
				2023	2023
1.	Perseroan*	ALII	4.305	17,57	7,01
2.	PT IMC Pelita Logistik Tbk	PSSI	2.736	3,93	1,09
3.	PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk	MBSS	2.118	4,74	0,68
4.	PT Trans Power Marine Tbk	TPMA	1.856	6,62	1,32
5.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS	729	10,11	1,34
6.	PT Hasnur International Shipping Tbk	HAIS	567	3,62	0,91

Berikut merupakan data rasio Perseroan dibandingkan dengan rata-rata industri:

	PER (x)	PBV (x)
Rata-rata Industri	5,31	1,04
Perseroan*	17,57	7,01

Sumber: IDX Statistik Bulan Desember 2023

*Menggunakan Harga Penawaran (Rp272 per saham), laba neto untuk periode dua belas bulan terakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, dan ekuitas per tanggal 31 Agustus 2023.

- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Y. Santosa dan Rekan Jl. Sisingamangaraja No. 26 Jakarta Selatan 12110, Indonesia Telepon : (+62) 21 723 0589 Faksimili : (+62) 21 7278 8954
STTD	STTD.AP-24/PM.223/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Julinar Natalina Rajagukguk
Asosiasi	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Keanggotaan: Reg. IAPI 3010
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	No. 0145/ALI-HHO/VIII/23 tanggal 25 Agustus 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	TnP Law Firm Satrio Tower, Lantai 15 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Jakarta Selatan 12950, Indonesia Telepon : (+62) 21 2251 3653, (+62) 21 2788 3403 Faksimili : (+62) 21 2251 3655
STTD	STTD.KH-277/PM.223.2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Rambun Tjajo, S.H.
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	No. 341/TnP-BJ/IX/2022 tanggal 7 September 2022

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Aulia Taufani, S.H. Menara Sudirman, Lantai 18 Lot ABD Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telepon : (+62) 21 520 4778 Faksimili : (+62) 21 520 4780
STTD	STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 09-02-2023 atas nama Aulia Taufani
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia nomor 0060219710719
Pedoman Kerja	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	0097/ALI-LGL/08/23 tanggal 7 Agustus 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom Hayam Wuruk No. 28 Kebon Kelapa, Gambir Jakarta 10120, Indonesia Telepon : (+62) 21 3508 077 Faksimili : (+62) 21 3508 078
Izin Usaha sebagai BAE	Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep.16/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Pedoman Kerja	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK 04/2020 tentang Perizinan BAE dan Nomor 10/POJK 04/2020 tentang Laporan BAE atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
Surat Penunjukan	0192/ALI-LGL/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, penjatahan saham dan laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam Akta Perseroan No. 5/2023. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Angkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum; dan
 - b. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp238.880.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), terbagi atas 47.776.000.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp5,00 (lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) atau sejumlah 12.660.640.000 (dua belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.303.200.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu Rupiah) oleh para pemegang saham sebagaimana disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), melalui penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") atau tanpa HMETD dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal dengan HMETD maupun tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
 6. Setiap penambahan modal oleh Perseroan melalui pengeluaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya (efek bersifat ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan ("**Efek Bersifat Ekuitas**"), maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut dapat dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama dan syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
5. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; dan
 2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;

- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Jika perlu diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris;
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
 7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
 8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham, surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 10. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
 12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
 13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.

Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ayat 19 Pasal ini telah terlampaui.
22. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf ayat 21 Pasal ini.
23. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

24. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar ini.

DIREKSI PASAL 16

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Ketentuan mengenai gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini;
 - b. adanya keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini;
 - c. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini;
 - d. hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan 12 Pasal ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 17

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; atau
 - c. membuka rekening koran;harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50,00% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan, transaksi material dan/atau transaksi tertentu yang memerlukan persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 16 Anggaran Dasar.
5.
 - a. 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar sampai dengan:
 1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 2. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 9 Anggaran Dasar.

8. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseoran sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia; atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 19

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini dan hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com dan investmentbanking@samuel.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar); dan
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 1 Februari 2024	09:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 2 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 5 Februari 2024	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Februari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) *mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah), termasuk dalam Penawaran Umum Golongan III, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yaitu sebesar Rp64.569.264.000 (enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah) atau sebanyak 237.387.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu) saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah)) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah)) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham yang digunakan oleh Perseroan menggunakan efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka a) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa Penawaran saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 2.927.773.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu) saham. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan, pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (+62) 21 2557 4800
Faksimili: (+62) 21 2557 4900
website: www.ciptadana.com
email: customerservice@ciptadana.com

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium 21/F
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telepon: (+62) 21 2854 8858
Faksimili: (+62) 21 8370 1618
website: www.samuel.co.id
email: investmentbanking@samuel.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Hayam Wuruk No. 28
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta 10120, Indonesia
Telepon: (+62) 21 3508 077
Faksimili: (+62) 21 3508 078

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 31 Januari 2024

Ref. No. 045/TnP-BJ/I/2024

Kepada Yang Terhormat,

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Gedung Bakrie Tower Lt. 15, Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940

U.p. : Direksi

**Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami, kantor konsultan hukum TnP Law Firm ("**TnP**"), dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-277/PM.223.2019 tanggal 11 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 98037, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat No. 132/L/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tanggal 8 Agustus 2022, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan LUT (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUPS**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS dinyatakan efektif oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Pendapat Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Hukum yang telah disampaikan ke OJK sebelumnya dalam surat kami No. 038/TnP-BJ/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

A. URAIAN TRANSAKSI

Saham yang akan ditawarkan dalam PUPS ini adalah sebanyak 3.165.160.000 saham biasa atas nama atau sebesar 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS, yang terdiri dari saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS dengan nilai nominal Rp5 setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp272 per lembar Saham Yang Ditawarkan sehingga jumlah dana yang diperoleh pada PUPS adalah sebesar Rp860.923.520.000.

PUPS telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tertanggal 1 November 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada

dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0136566 tanggal 2 November 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0219764.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 November 2023 (**"Akta Perseroan No. 5/2023"**).

Sesuai dengan Akta Perseroan No. 5/2023, Perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau ESA) (**"Program ESA"**) dengan mengalokasikan sebesar sebanyak 8.002.000 lembar saham atau sebanyak 0,25% dari Saham Yang Ditawarkan.

Partisipan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam Program ESA adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut (**"Partisipan Program ESA"**):

1. Karyawan peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan;
2. Karyawan Perseroan dalam status aktif bekerja selama 2 bulan penuh saat dilakukannya PUPS; atau
3. Karyawan Perseroan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham penjabatan pasti sehubungan dengan PUPS dan memiliki *lock-up period* meliputi (i) periode *lock-up* 1 tahun dan (ii) periode *lock-up* 2 tahun berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Perseroan. Apabila diatur dalam peraturan perpajakan bahwa terdapat kewajiban Partisipan Program ESA atas pajak yang timbul sehubungan dengan Program ESA, maka Partisipan Program ESA harus memenuhi kewajiban pajak sebelum Program ESA dilakukan. Dana dalam rangka pemberian saham untuk Program ESA berasal dari kas internal Perseroan. Partisipan Program ESA tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham untuk program ESA, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh Partisipan Program ESA. Khusus untuk pajak penghasilan dari pembelian saham Program ESA pertama kali, menjadi beban Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan PUPS, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-00096/BEI.PP1/01-2024 tanggal 4 Januari 2024.

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUPS sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 17, tertanggal 3 November 2023, antara Perseroan selaku emiten, PT Ciptadana Sekuritas Asia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 59 tanggal 30 November 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 12 tanggal 8 Januari 2024 dan terakhir diubah dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 59 tanggal 25 Januari 2024, yang seluruhnya

dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**);

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 18 tertanggal 3 November 2023, antara Perseroan selaku emiten dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 60 tanggal 30 November 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 13 tanggal 8 Januari 2024 dan terakhir diubah dengan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 60 tanggal 25 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Administrasi Efek"**); dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran SP-130/SHM/KSEI/1023 tanggal 29 November 2023, antara Perseroan dan KSEI (**"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas"**).

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUPS, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PUPS akan digunakan untuk (**"Rencana Penggunaan Dana"**):

1. Sekitar 75,00% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Anak Perusahaan, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited dengan rincian sebagai berikut (**"Rencana Penggunaan Dana 1"**):

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit USD62.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal tertanggal 14 Juni 2023 ("Perjanjian Fasilitas OCP").
Para Pihak	1. MCT sebagai penerima pinjaman. 2. Perusahaan-perusahaan sebagai berikut, Ancara Resources Limited, Perseroan, RWood Resources DMCC secara bersama-sama sebagai para penjamin awal. 3. Lembaga keuangan sebagai berikut, OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited, OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal. 4. The Bank Of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas. 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri. 6. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri. 7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank dimana rekening bank dalam negeri dibuka.

Rincian	Keterangan
	8. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai bank dimana rekening bank luar negeri dibuka.
Jumlah Fasilitas	USD62.000.000 (" Fasilitas ").
Jumlah Pokok Utang	USD61.000.000 pada tanggal 31 Oktober 2023.
Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan	Sebanyak-banyaknya hasil konversi dari Rupiah ke USD atas jumlah fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada MCT berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024.
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian atau Pelunasan Pokok Utang	Paling sedikit USD0.
Tingkat Bunga	20,00% per tahun.
Jatuh Tempo	19 November 2025.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	1. Pembayaran kembali atau pembayaran di muka (sebagaimana berlaku) fasilitas MCT yang ada hingga jumlah maksimum USD49.500.000 berdasarkan Perjanjian Kredit USD49.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal antara: (i) MCT sebagai penerima pinjaman (ii) Ancara Resources Limited, Perseroan, Rwood Resources DMCC, secara bersama-sama sebagai penjamin awal (iii) OL Master (Singapore Fund 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal ("Pemberi Pinjaman") (iv) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas (v) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri (vi) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri (vii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai rekening bank dalam negeri (viii) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai rekening bank luar negeri tanggal 18 Mei 2020 ("Perjanjian Fasilitas OCP Lama"); 2. Memfasilitasi pelunasan penuh pinjaman Perseroan kepada Vikasa Global Fund PCC ("Vikasa") hingga jumlah maksimum USD12.200.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan USD11.500.000

Rincian	Keterangan
	Fasilitas Pinjaman Berjangka antara Perseroan sebagai penerima pinjaman, Rwood Resources DMCC sebagai penjamin dan Vikasa Global Fund PCC sebagai pemberi pinjaman tanggal 11 April 2023 ("Perjanjian Vikasa"). Dana yang diterima MCT berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP, diberikan MCT kepada Perseroan melalui <i>Loan Agreement</i> tanggal 14 Juni 2023 antara MCT sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman ("Perjanjian Pinjaman ALI-MCT"), untuk kemudian Perseroan melakukan pelunasan atas Perjanjian Vikasa. Perjanjian Pinjaman ALI-MCT telah dilunasi oleh Perseroan kepada MCT pada tanggal 19 Juni 2023. 3. Pembayaran biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas.
Jaminan yang Dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Jaminan dalam Negeri	1. Hipotek atas 46 kapal milik Perseroan; 2. Gadai atas 70% saham di MCT oleh Perseroan; 3. Gadai atas 10% saham di MCT oleh PT Guruh Putra Bersama; 4. Gadai atas 10% saham di MCT oleh PT Ade Putra Tanrajeng; 5. Gadai atas seluruh kepemilikan saham Perseroan oleh GAN; 6. Gadai atas seluruh kepemilikan saham Perseroan oleh SC; 7. Gadai atas 16% saham di PT Leap Coal Indonesia oleh Leap Forward Resources Limited; 8. Gadai atas 16% saham di PT Bara Milenia Energi oleh PT Leap Coal Indonesia; 9. Gadai atas 16% saham di PT Kutai Bara Nusantara oleh PT Bara Milenia Energi; 10. Gadai atas 16% saham di PT Tribara Daya Global oleh PT Kutai Bara Nusantara; 11. Gadai atas 16% saham di PT Guruh Putra Bersama oleh PT Kutai Bara Nusantara; 12. Gadai atas 16% saham di PT Ade Putra Tanrajeng oleh PT Tribara Daya Global; 13. Gadai rekening oleh Perseroan; 14. Gadai rekening oleh MCT; 15. Fidusia atas hasil asuransi oleh Perseroan; 16. Fidusia atas pendapatan oleh Perseroan; 17. Fidusia atas peralatan berat dan infrastruktur jetty oleh MCT; dan 18. Fidusia atas pendapatan oleh MCT.

Rincian	Keterangan
Status Benda Jaminan Setelah Pembayaran Sebagian atau Pelunasan Pokok Utang	Atas pembayaran sebagian pokok utang dari Perjanjian Fasilitas OCP, status benda jaminan untuk Perjanjian Fasilitas OCP, masih diikat sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP, namun dalam hal akan dilunasi seluruh pokok utang dan sudah tidak terdapat kewajiban terutang dari MCT atas Perjanjian Fasilitas OCP, maka status jaminan dari seluruh benda yang dijaminkan untuk Perjanjian Fasilitas OCP akan dilepaskan, sehingga benda jaminan tersebut tidak lagi dibebani sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP.
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Lebih Awal Sukarela	MCT memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tidak kurang dari 3 hari kerja kepada The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura selaku agen fasilitas.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.

Dana hasil PUPS untuk Rencana Penggunaan Dana 1 akan disalurkan ke MCT dalam bentuk pinjaman dalam mata uang Rupiah, kemudian akan dikonversi oleh MCT menjadi mata uang USD sesuai kurs yang berlaku pada saat pembayaran utang.

Berikut adalah perincian terkait perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan MCT:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024
Para Pihak	1. Perseroan selaku pemberi pinjaman; 2. MCT selaku penerima pinjaman.
Jumlah Fasilitas	Sebesar Rp635.370.000.000 (" Pinjaman MCT ").
Tingkat Bunga	10,5% pertahun.
Jatuh Tempo	Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman MCT.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP.
Sifat Hubungan Afiliasi	MCT merupakan Anak Perusahaan dari Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MCT kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain pembelian tongkang laut.

2. Sekitar 21,44% akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Sekitar 46,60% akan digunakan untuk pelunasan seluruh angsuran pembayaran atas pembelian 8 buah tongkang sungai dan biaya pengiriman atau penarikan (*towing*) tongkang sungai tersebut.

Berikut merupakan rincian perjanjian pembelian 8 buah tongkang sungai tersebut ("**Rencana Penggunaan Dana 2a**"):

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal untuk konstruksi 8 Unit 180'x60'x12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 31 Agustus 2023.
Pihak Penjual	PT Bandar Abadi.
Jumlah	8 tongkang sungai.
Nilai Perjanjian	USD6.584.000.
Sisa Nilai Perjanjian yang Belum Dibayarkan	USD4.938.000.
Waktu Penerimaan Tongkang oleh Perseroan	<i>Batch</i> 1: 4 buah tongkang sungai akan diterima 6 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama. <i>Batch</i> 2: 4 buah tongkang sungai akan diterima 8 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama. Angsuran pertama telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2023 sebesar USD 1.646.000. Sumber dana angsuran pertama yang telah dibayarkan Perseroan pada tanggal 1 November 2023 berasal dari dana kas internal Perseroan. Pembayaran untuk angsuran selanjutnya dilakukan untuk tahapan pencapaian sebagai berikut: 1. Angsuran Kedua: pada tahap peletakan lunas kapal; 2. Angsuran Ketiga: pada tahap ereksi sekat kapal; dan

Rincian	Keterangan
	3. Angsuran Keempat: pada tahap pengiriman di galangan kapal, yang akan dilunasi oleh Perseroan secara mengangsur sesuai dengan tahapan pencapaian di atas, dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUPS.
Spesifikasi	Panjang: 180 kaki Dimensi (P x L x D): 54,9 meter x 18,29 meter x 3,66 meter Gross Tonnage (GT): 918 Ton Kapasitas: 2.363 MT
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.

* Asumsi Konversi Nilai Kurs USD terhadap Rupiah setara dengan Rp15.767 berdasarkan kurs JISDOR pada tanggal 25 Januari 2024. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pelunasan angsuran.

Dalam hal terjadi penguatan nilai kurs Rupiah terhadap USD yang menyebabkan adanya kelebihan atas dana yang Perseroan miliki untuk pelunasan angsuran, maka sisa penggunaan dana akan dialokasikan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) Perseroan.

Adapun, dalam hal terjadi pelemahan nilai kurs Rupiah terhadap USD yang menyebabkan adanya kekurangan atas dana yang Perseroan miliki untuk pelunasan angsuran, maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut, antara lain melalui kas internal Perseroan.

- (b) Sekitar 53,40% akan digunakan untuk pembayaran atas seluruh nilai pembelian 7 buah tongkang sungai yang akan dibeli dari pihak ketiga dan biaya pengiriman atau penarikan (*towing*) tongkang sungai tersebut, yang ditargetkan akan diterima oleh Perseroan pada semester 2 tahun 2024 dengan spesifikasi sebagai berikut ("**Rencana Penggunaan Dana 2b**"):

Rincian	Keterangan
Spesifikasi	Panjang: 180 kaki Dimensi (P x L x D): 54,9 meter x 18,29 meter x 3,66 meter Gross Tonnage (GT): 918 Ton Kapasitas: 2.363 MT

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang dalam tahap negosiasi dengan beberapa calon penjual pihak ketiga dan belum menandatangani kontrak dengan penjual.

Apabila Rencana Penggunaan Dana 2b tidak mencukupi nilai pembayaran atas pembelian 7 buah tongkang sungai tersebut, maka Perseroan akan menggunakan porsi dana hasil PUPS pada Rencana Penggunaan Dana 3 untuk menutupi kekurangan tersebut.

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya (**"Rencana Penggunaan Dana 3"**).

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam LUT:

"Anak Perusahaan" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah MCT;

"Anggaran Dasar" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;

"Bapepam-LK" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana digantikan oleh OJK yang pendirian dan penyelenggaraannya diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK;

"BLI" berarti PT Borneo Logistik Indonesia;

"BPJS" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

"Dewan Komisaris" berarti dewan komisaris dari suatu PT;

"Direksi" berarti direksi dari suatu PT;

"GAN" berarti PT Graha Adika Niaga;

"HKI" berarti Hak Kekayaan Intelektual;

"HKHPM" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

"Hukum Indonesia" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

"KBLI" berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

"LUT" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas;

"MCT" berarti PT Mahakam Coal Terminal;

"Menkumham" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

"OJK" berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

"Pengendali" berarti, untuk keperluan Pendapat Hukum, pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (a) memiliki lebih dari 50% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan;

"Peraturan No. IX.A.7" berarti Peraturan Bapepam LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham;

"Peraturan No.IX.J.1" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik;

"Perpres No. 13/2018" berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi, sebagaimana diimplementasikan oleh Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi;

"Perjanjian Fasilitas OCP" Perjanjian Kredit USD62.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal tertanggal 14 Juni 2023 antara MCT sebagai penerima pinjaman, Perusahaan-perusahaan sebagai berikut, Ancara Resources Limited, Perseroan, RWood Resources DMCC secara bersama-sama sebagai para penjamin awal, Lembaga keuangan sebagai berikut, OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited, OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal, The Bank Of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri, The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank dimana rekening bank dalam negeri dibuka, The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai bank dimana rekening bank luar negeri dibuka;

"Perjanjian Kredit" berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

"Perjanjian Material" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan, dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha

utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“Perizinan Lingkungan Hidup” berarti perizinan dari Perseroan di bidang lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan;

“Perizinan Operasional” berarti perizinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan;

“Perizinan Umum” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;

“Periode Uji Tuntas” berarti periode terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal LUT, kecuali yang terkait dengan pemeriksaan terhadap perubahan Anggaran Dasar hanya merujuk ke perubahan terakhir, serta pemeriksaan saham dan permodalan hanya terhitung 3 tahun terakhir;

“Permenhub No. 39/2017” berarti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal;

“Pihak Terafiliasi” berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam UUPM;

“POJK” berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

“POJK No. 33/2014” berarti POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

“POJK No. 34/2014” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

“POJK No. 35/2014” berarti POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

“POJK No. 30/2015” berarti POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

“POJK No. 55/2015” berarti POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

“POJK No. 56/2015” berarti POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

“POJK No. 25/2017” berarti POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum;

“POJK No. 15/2020” berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;

“POJK No. 16/2020” berarti POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

“POJK No. 17/2020” berarti POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

“POJK No. 41/2020” berarti POJK No. 41/POJK.94/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik;

“POJK No. 42/2020” berarti POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;

“POJK No. 3/2021” berarti POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

“Prospektus” berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS;

“PT” berarti Perseroan Terbatas;

“RUPS” berarti Rapat Umum Pemegang Saham;

“SC” berarti Solomed Capital Pte. Ltd.;

“SEOJK No. 15/2020” berarti Surat Edaran OJK No. 15/POJK.04.2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik;

“Standar HKHPM” berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

“Surat Pernyataan Perseroan” berarti surat yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 4 Januari 2024;

“Tanggal LUT” berarti tanggal dikeluarkannya LUT, yaitu tanggal 31 Januari 2024;

“Tanggal Pendapat Hukum” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 31 Januari 2024;

“TBNRI” berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

“Uji Tuntas” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi dari LUT sebagaimana dimuat dalam Bab I.C LUT;

“UU” berarti Undang-Undang;

“UU Cipta Kerja” berarti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

“UUP2SK” berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

“UUPM” berarti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana sebagian diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan

“UUPT” berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATAAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan
4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang (kecuali Perseroan dan Anak Perusahaan yang terhadapnya kami lakukan Uji Tuntas), semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dan material dengan pelaksanaan Uji Tuntas (“**Informasi Uji Tuntas**”) dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan dan bersifat material yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami untuk diperiksa oleh kami sampai dengan Tanggal LUT, dimana seandainya dokumen dan informasi yang tidak diberikan tersebut diketahui oleh kami, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap isi dan kesimpulan dari Pendapat Hukum ini;
3. seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;

5. dokumen-dokumen yang mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut serta perubahan-perubahan, pengalihan, penunjukan pihak lainnya oleh pihak tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak tersebut;
7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (a.l., persetujuan pasangan) untuk menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan dokumen tersebut;
8. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan, atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. bahwa untuk setiap dokumen di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 437, tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 2 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037867.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 2 Agustus 2019, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127898.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 2 Agustus 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2020 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 034727 Tahun 2020 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan PUPS berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan pemeriksaan kami, Menkumham belum mengumumkan Akta Perseroan No. 5/2023 yang merupakan akta perubahan anggaran dasar Perseroan dalam TBNRI, Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPT, kewajiban mengumumkan dalam TBNRI ini merupakan kewajiban dari Menkumham dan bukan merupakan kewajiban dari Perseroan.

Akta Pendirian Perseroan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan UUPT. Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, POJK No. 33/2014 dan POJK No. 32/2015.

Akta pendirian Anak Perusahaan dan perubahan terakhir Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah dibuat secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk MCT yang tidak mempunyai dokumentasi yang menunjukkan bahwa Akta pendirian MCT telah diumumkan dalam suatu BNRI. Sehubungan dengan ketiadaan dokumen MCT tersebut, maka berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Direksi MCT secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

2. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian dan selama 3 tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp238.880.000.000

Modal Ditempatkan : Rp63.303.200.000

Modal Disetor : Rp63.303.200.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 47.776.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp5 per lembar saham.

Susunan permodalan Anak Perusahaan tidak mengalami perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCT selama 3 tahun terakhir.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp5		(%)
		Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
1.	GAN	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09
2.	SC	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48
3.	BLI	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77
4.	Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63
5.	Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03
Jumlah		12.660.640.000	63.303.200.000	100,00
Saham dalam Portepel		35.115.360.000	175.576.800.000	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama Periode Uji Tuntas Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

4. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 31 Oktober 2023, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod, yang mana keduanya adalah pihak yang menerima manfaat dari perseroan terbatas sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

Sebagaimana yang juga telah diungkapkan dalam Prospektus, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Pengendali Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod sesuai yang diwajibkan Pasal 85 POJK No. 3/2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, tidak ada rencana perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PUPS.

5. BLI, Nalinkant Amratlal Rathod, dan Aninditha Anestya Bakrie memperoleh saham pada Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi di bawah harga PUPS dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Oleh karena itu, BLI, Nalinkant Amratlal Rathod, dan Aninditha Anestya Bakrie merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.
6. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk tertanggal 12 Desember 2023 Perseroan telah menyisihkan sejumlah Rp6.330.320.000 atau sejumlah 10% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, yang berasal dari laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai cadangan wajib yang mana merupakan tindak lanjut atas kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUPU.

7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179146 tertanggal 30 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0216506.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 ("**Akta Perseroan No. 65/2023**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Faisal Mohamad Nur
Direktur	: Rahul Nalin Rathod
Direktur	: Vishal Manharlal Parekh
Direktur	: Munawir
Direktur	: Aulia

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nalinkant Amratlal Rathod
Komisaris	: Aninditha Anestya Bakrie
Komisaris Independen	: Agus Suharyono

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing dan Hukum Indonesia.

Pengangkatan Agus Suharyono sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta Perseroan No. 65/2023 telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 dan jumlah Komisaris Independen Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014.

8. Perseroan:
- (a) telah memiliki Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 55/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015;
 - (b) telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 35/2014;
 - (c) telah memiliki Kepala Unit Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 56/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015; dan
 - (d) saat ini tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan fungsi nominasi dan remunerasi saat ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.
9. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami, Surat Pernyataan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132) dan Anak Perusahaan, yakni (i) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (KBLI 52222) dan (ii) (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya) (KBLI 09900). Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami, Surat

Pernyataan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan adalah kegiatan Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri (KBLI 50132) dan kegiatan usaha yang telah dijalankan Anak Perusahaan adalah kegiatan (i) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (KBLI 52222) dan (ii) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya (KBLI 09900).

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan kami, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan dan Anak Perusahaan juga telah menyesuaikan Anggaran Dasar mereka masing-masing untuk mengikuti ketentuan KBLI 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan Uji Tuntas kami, kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan UUPT.

10. Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari PUPS adalah sebagaimana diuraikan di bagian Uraian Transaksi di atas.

Rencana Penggunaan Dana 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 setelah penyelesaian PUPS. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana 1 juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 setelah penyelesaian PUPS.

Rencana Penggunaan Dana 2a bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020. Dalam hal Rencana Penggunaan Dana 2a merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 setelah penyelesaian PUPS.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana 2b dan Rencana Penggunaan Dana 3 di atas merupakan suatu transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020 setelah penyelesaian PUPS (sebagaimana berlaku).

11. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil PUPS kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUPS telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015, apabila terdapat dana hasil PUPS yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Sementara itu, apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, maka

Perseroan wajib terlebih dahulu: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUPS bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 30/2015.

12. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang telah dijalankan secara komersial sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah secara material melakukan ketaatan yang disyaratkan sesuai dengan seluruh izin yang dimilikinya dan pelaporan berkala lainnya kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan secara operasional/komersial oleh Perseroan, yakni KBLI 50132 (Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri), dan Anak Perusahaan, yakni (i) KBLI 52222 (Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau) (ii) KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya).

13. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Lingkungan Hidup yang material yang diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Lingkungan Hidup tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
14. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali terhadap aset-aset Perseroan dan MCT (termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham tertentu atas sahamnya yang dimiliki pada Perseroan) yang dibebani jaminan tertentu untuk menjamin pelunasan utang Perseroan dan MCT kepada beberapa kreditur sebagaimana yang diungkapkan di dalam LUT.

Apabila terjadi eksekusi jaminan atas aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT yang dijamin, maka proses eksekusi akan dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan secara privat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan dapat kehilangan kepemilikan atas aset tersebut yang sedang dijamin dan hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk menjaga aset tersebut dari eksekusi.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dan MCT memiliki kemampuan untuk membayar utangnya masing-masing kepada kreditur sehingga Perseroan berkeyakinan kemungkinan eksekusi terhadap aset yang dijamin milik Perseroan dan MCT tersebut adalah kecil. Penjaminan atas aset Perseroan dan MCT tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar MCT yang berlaku pada saat penjaminan dilakukan dan Hukum Indonesia.

15. Perseroan memiliki harta kekayaan dalam bentuk penyertaan saham dalam Anak Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas	Lembar Saham	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan oleh Perseroan	Kegiatan Usaha
Penyertaan Saham Perseroan Secara Langsung				
MCT	35.000	70,00	2019	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Penyertaan saham dalam Anak Perusahaan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan catatan berdasarkan konfirmasi Perseroan, pengalihan atas hak atas saham MCT milik PT Fajar Bumi Shipping sebanyak 17.500 lembar saham kepada Perseroan telah terjadi dengan nilai transaksi sejumlah Rp31.386.638.889. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak dapat menemukan dokumentasi sehubungan dengan akta pengambilalihan yang mendasari pengalihan atas saham MCT milik PT Fajar Bumi Shipping sebanyak 17.500 lembar saham tersebut kepada Perseroan beserta dokumen terkait pengumuman sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 dan Pasal 133 (2) UUPT. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dengan tanggal jawaban ini, Perseroan tidak pernah menerima keberatan atau gugatan dari pihak ketiga manapun termasuk diantaranya PT Fajar Bumi Shipping sehubungan dengan kepemilikan 17.500 lembar saham Perseroan pada MCT.

Bahwa sehubungan dengan tidak ditemukannya akta pengambilalihan tersebut, hal ini dapat berdampak atau terbuka untuk, pemegang saham penjual yakni PT Fajar Bumi Shipping, mempertanyakan keabsahan dari kepemilikan saham sejumlah 17.500 lembar saham yang dimiliki Perseroan pada MCT. Namun demikian, sehubungan dengan ketiadaan dokumen tersebut di atas, Perseroan dan PT Fajar Bumi Shipping selaku penjual telah menandatangani suatu Akta Pengakuan No. 8 tertanggal 6 November 2023 dibuat dihadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, ("**Akta Pengakuan**") yang pada intinya menyatakan bahwa (i) PT Fajar Bumi Shipping telah melakukan pengalihan atas saham MCT dan telah menerima hak sehubungan dengan pengalihan saham MCT dari Perseroan dan (ii) Perseroan telah menerima pengalihan atas saham MCT dan telah melaksanakan kewajiban sehubungan dengan pembelian saham MCT kepada PT Fajar Bumi Shipping, serta PT Fajar Bumi Shipping telah menyatakan bahwa PT Fajar Bumi Shipping tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Perseroan sehubungan dengan saham MCT yang sudah dialihkan kepada Perseroan. Berdasarkan Akta Pengakuan, para pihak sepakat bahwa Akta Pengakuan membebaskan Perseroan dari kewajiban untuk menunjukkan tanda atas hak yang asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1891 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") serta para pihak sepakat bahwa (a) Akta Pengakuan juga berlaku untuk menetapkan atau menguatkan perikatan sehubungan dengan pengalihan saham tersebut, yang mana dapat diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, (b) Akta Pengakuan memiliki kekuatan hukum karena memuat isi pokok perikatan sehubungan dengan pengalihan saham tersebut serta alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalan atas pengalihan saham tersebut serta (c) dimaksudkan untuk memperbaiki cacat-cacat yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1892 KUHPerdata.

Lebih lanjut, pengalihan saham tersebut telah didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Data Perseroan oleh Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341449 tanggal 4 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186711.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019.

Bahwa sehubungan dengan ketiadaannya pengumuman sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 dan Pasal 133 (2) UUPT, dapat berdampak atau terbuka untuk situasi adanya kreditur yang mengajukan keberatan serta karyawan dalam melaksanakan haknya yang diberikan undang-undang atas adanya pengambilalihan atas MCT tersebut dengan mana keberatan yang diajukan kreditur atau hak karyawan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi penyelesaian pengambilalihan tersebut sepanjang MCT dapat menyelesaikan keberatan dari kreditur. Namun demikian, berdasarkan konfirmasi Perseroan, MCT tidak memiliki kreditur pada saat itu sehingga tidak ada kreditur yang mengajukan keberatan atas pengambilalihan tersebut dan tidak ada karyawan yang melaksanakan haknya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pengambilalihan tersebut.

Saham MCT yang dimiliki Perseroan pada MCT sedang dibebani jaminan untuk menjamin pelunasan utang MCT berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP sebagaimana yang diungkapkan di dalam LUT ("**Saham MCT Yang Dijaminkan**").

Apabila terjadi eksekusi jaminan atas Saham MCT Yang Dijaminkan, melalui pelelangan umum atau penjualan secara privat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perseroan dapat kehilangan kepemilikan atas Saham MCT Yang Dijaminkan dan hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak pernah mendapatkan tuntutan maupun gugatan dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan perubahan dalam permodalan Perseroan dan Anak Perusahaan. Proses jual beli saham yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan yang terjadi sejak pendirian sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perseroan dan Anak Perusahaan tidak pernah digugat atau dituntut oleh para pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan (selain dari Perseroan) maupun pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan jual beli saham yang dilakukan antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan maupun dengan pihak ketiga manapun.

16. Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki harta kekayaan dalam bentuk HKI berupa merek yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT.
17. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki:
 - (a) Perjanjian Material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan; dan
 - (b) Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan,

sebagaimana diungkapkan di dalam LUT. Seluruh Perjanjian Material dan Perjanjian Kredit yang diungkapkan dalam LUT tersebut tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan transaksi PUPS, dan tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil PUPS, serta tidak memuat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, kecuali untuk pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Fasilitas OCP, dimana Perseroan tidak diperbolehkan untuk membagikan dividen dan menerbitkan saham baru yang mana Perseroan dan Anak Perusahaan ini telah memperoleh persetujuan untuk dikecualikan berdasarkan Surat persetujuan dan pengesampingan tertanggal 26 Oktober 2023.

18. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan material sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan yang berlaku umum termasuk telah mengikutsertakan dan mendaftarkan secara patut seluruh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
19. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum Program ESA efektif diberlakukan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk Program ESA adalah sebanyak 8.002.000 lembar saham.
20. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas aset-aset Perseroan dan Anak Perusahaan yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
21. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan surat pernyataan dari Perseroan dan MCT, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan sedang tidak menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan atau rencana PUPS secara negatif dan material.
22. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam perkara hukum serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan atau rencana PUPS secara negatif dan material.
23. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Perizinan Umum, Perizinan Operasional, Perjanjian Material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.

24. Sesuai ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUPS, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- (a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - (b) Perjanjian Administrasi Efek; dan
 - (c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal, khususnya dimana Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020.

25. Setelah PUPS efektif dilaksanakan, Perseroan yang telah menjadi Perusahaan terbuka untuk memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Permenhub No. 39/2017, sehubungan dengan kriteria kepemilikan saham di Perseroan untuk melakukan pendaftaran kapal, yakni kapal milik badan hukum Indonesia yang bersifat terbuka dengan ketentuan:
- (a) kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung tidak boleh melebihi dari 49%; dan
 - (b) kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing melalui pasar modal dalam bentuk portofolio tidak boleh melebihi dari 49%,

dengan dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan di atas setelah PUPS efektif dilaksanakan, maka pelanggaran tersebut dapat menghalangi pendaftaran kapal Perseroan di instansi berwenang.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
TnP Law Firm



Rambun Tjajo, S.H.
STTD.KH-277/PM.223/2019

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini audit wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. 1792).

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Keuangan Konsolidasian
Beserta Laporan Auditor Independen
31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021
dan 2020 (Diaudit), serta
Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal 31 Agustus 2023
(Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan
2020 (Diaudit)

**PT ANCARA LOGISTICS
INDONESIA Tbk DAN
ENTITAS ANAK**

*Consolidated Financial Statements
With Independent Auditor's Report
August 31, 2023, December 31, 2022, 2021
and 2020 (Audited), and
For the Eight-Month Periods Ended
August 31, 2023 (Audited) and
2022 (Unaudited) and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and
2020 (Audited)*

***PT ANCARA LOGISTICS
INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARY***

Daftar Isi**Table of Contents**

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditor's report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of changes in equity</i>
Laporan arus kas konsolidasian	8	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	9	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 AGUSTUS 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama	: Faisal Mohamad Nur
Alamat kantor	: Bakrie Tower Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
Alamat rumah	: Jl. H. Abdul Majid Dalam III No. 3 Komp. Deplu, Cilandak, Jakarta Selatan
Telepon	: 021-29941122
Jabatan	: Direktur Utama
2. Nama	: Vishal Parekh
Alamat kantor	: Bakrie Tower Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
Alamat rumah	: Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan Taman Rasuna APT Tower 10-12 FL 12H
Telepon	: 021-29941122
Jabatan	: Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anak.

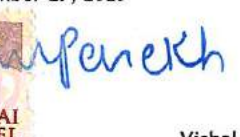
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 27 Desember 2023 / December 27, 2023


Faisal Mohamad Nur
Direktur Utama / President Director




Vishal Parekh
Direktur Keuangan / Finance Director

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
AS OF AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020 AND FOR THE EIGHT-MONTH
PERIODS ENDED AUGUST 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**

We, the undersigned:

1. Name	: Faisal Mohamad Nur
Office address	: Bakrie Tower Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
Residential address	: Jl. H. Abdul Majid Dalam III No. 3 Komp. Deplu, Cilandak, Jakarta Selatan
Telephone	: 021-29941122
Title	: President Director
2. Name	: Vishal Parekh
Office address	: Bakrie Tower Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
Residential address	: Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan Taman Rasuna APT Tower 10-12 FL 12H:
Telephone	: 021-29941122
Title	: Finance Director

declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and Subsidiary;
- PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and Subsidiary' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information contained in PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and Subsidiary' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and Subsidiary' consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts, nor omit any material information or facts;
- We are responsible for PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and Subsidiary' internal control system.

This statement is made in all truth.

Laporan Auditor Independen

Laporan No.

00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No.

00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023

The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and its Subsidiary ("the Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as at August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the eight-month period ended August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, and notes to the consolidated financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at August 31, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the three-month period ended August 31, 2023 and the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan di bawah ini.

Pengakuan Pendapatan (Lihat Catatan 3m dan 24 atas laporan keuangan konsolidasian)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, pendapatan Grup adalah sebesar Rp662,88 miliar yang berasal dari jasa angkutan laut menggunakan kapal tongkang, kapal tunda dan fasilitas muatan apung, jasa *transshipment* serta jasa bongkar muat untuk tambang batu bara.

Kami mengidentifikasi pengakuan pendapatan sebagai hal audit utama karena memiliki nilai yang signifikan dan merupakan salah satu indikator kinerja utama dari Grup.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami memperoleh pemahaman tentang proses dan pengendalian yang relevan melibatkan penilaian dan pembukuan pendapatan Perusahaan dan Entitas Anak.

Prosedur audit kami terkait penilaian pengakuan pendapatan, adalah sebagai berikut:

- Menguji desain, implementasi, dan efektivitas operasional dari pengendalian internal terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan;
- Menilai kesesuaian kebijakan akuntansi dan mempertimbangkan kepatuhannya terhadap standar akuntansi yang berlaku;
- Membaca kontrak dengan pelanggan agar memahami ketentuan yang berlaku dalam kontrak untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dan menilai kesesuaian pengakuan pendapatan, berdasarkan uji petik;
- Melakukan uji petik atas transaksi pendapatan dengan melakukan inspeksi ke dokumen pendukung untuk menentukan apakah pendapatan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi;

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Revenue Recognition (Refer to Notes 3m and 24 to the consolidated financial statements)

For the eight-month period ended August 31, 2023, the Group's revenues amounted to Rp662.88 billion which is derived from sea transportation services of barge, tugboat, floating loading facilities, transshipment services and loading unloading services for coal mining.

We identified revenue recognition as a key audit matter because of the significant of amounts involved and one of the key performance indicators of the Group.

How our audit addressed the key audit matter

We obtained an understanding of the process and relevant controls involving the valuation and accounting for revenue of the Company and Subsidiary.

Our audit procedures related to the valuation of revenue recognition, are as follows:

- *Tested the design, implementation and operating effectiveness of the internal controls related to the recognition and measurement of revenue;*
- *Assessed the appropriateness of accounting policies and considered the compliance to applicable accounting standards;*
- *Read the customer's contract to understand the applicable terms in the contract in order to identify the performance obligations and to assess the appropriateness of revenue recognition, based on sample basis;*
- *Tested the revenue transactions based on sample basis by inspecting to supporting documents to determine whether the revenue had been recognized in accordance with applicable accounting standards;*

Y. SANTOSA DAN REKAN

- Melakukan uji pisah batas atas transaksi pendapatan untuk memeriksa apakah transaksi tersebut diakui pada periode yang tepat; dan
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan di dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Hal Lain

Sebelumnya, kami menerbitkan laporan auditor independen No. 00155/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan Entitas Anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk dan seperti diungkapkan pada Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Entitas Anak menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 tidak diaudit atau direviu dan disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan keuangan konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

- *Performed cut-off test of revenue transactions to examine whether those transactions were recorded in proper period; and*
- *Evaluated the adequacy of disclosures in the consolidated financial statements in accordance with applicable accounting standards.*

Other Matter

Previously, we have issued the independent auditor's report No. 00155/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XI/2023 dated November 30, 2023 on the consolidated financial statements of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and Subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as at August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the eight-month period ended August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020. In connection with the proposed Initial Public Offering Shares of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk and as disclosed in Note 39 to the consolidated financial statements, the Company and Subsidiary have reissued its consolidated financial statements as mentioned above with changes and additional disclosures in the consolidated financial statements.

The Group's consolidated financial statements for the eight-month period ended August 31, 2022 are not audited nor reviewed and presented as comparative figures to the consolidated financial statements for the eight-month period ended August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020. We have not audited nor reviewed the consolidated financial statements for the eight-month period ended August 31, 2022 and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering Shares of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Y. SANTOSA DAN REKAN

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Y. SANTOSA DAN REKAN

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Y. Santosa dan Rekan



Julinar Natalina Rajagukguk
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration
No. AP.1792



27 Desember 2023 / December 27, 2023

NOTICE TO READERS

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

Y. Santosa dan Rekan
Registered Public Accountants
Licence Number: 430/KM.1/2012



**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 202220212020			
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas	3d,3f,3r,5,33,34	5.903.390	36.428.128	14.096.598	1.044.720	Cash
Piutang usaha - neto	3f,3g,3r,6,29c,33,34					Trade receivables - net
Pihak ketiga		34.266.142	27.961.076	29.619.743	-	Third parties
Pihak berelasi		199.099.234	140.899.691	112.089.007	11.767.968	Related parties
Piutang lain-lain - neto	3f,3r,7a,33,34					Other receivables - net
Pihak ketiga		35.609	39.958	-	-	Third parties
Persediaan	3h,8	1.797.478	4.621.196	-	-	Inventory
Pajak dibayar dimuka	3p,28a	11.019.225	1.459.093	12.073	2.795.429	Prepaid taxes
Uang muka	9,29i	2.162.930	9.463.853	10.047.722	12.590.076	Advances
Beban dibayar dimuka	3i,10	3.586.537	1.120.098	1.716.897	226.950	Prepaid expenses
Dana yang dibatasi penggunaannya	3e,3f,3r,11,33,34	6.503.484	-	-	-	Restricted fund
Total Aset Lancar		264.374.029	221.993.093	167.582.040	28.425.143	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - neto	3f,3g,3r,7b,29d,33,34					Other receivables - net
Pihak berelasi		78.147	716.545	-	-	Related parties
Piutang pihak berelasi - neto	3f,3g,3r,29e,33,34	808.770.448	752.872.142	649.133.827	575.294.684	Due from related parties - net
Aset pajak tangguhan	3p,28e	2.765.665	10.123.827	5.448.717	7.924.094	Deferred tax assets
Aset hak-guna - neto	3l,12	38.569.465	9.844.673	18.716.129	9.677.873	Right-of-use assets - net
Aset tetap - neto	3j,13	659.296.656	381.475.356	362.202.043	334.624.358	Fixed assets - net
Uang muka pembelian aset tetap	14	73.596.890	19.918.200	5.599.859	14.753.320	Advances for purchase of fixed assets
Goodwill	3c,3k,3t,15	7.706.340	7.706.340	7.706.340	7.706.340	Goodwill
Total Aset Tidak Lancar		1.590.783.611	1.182.657.083	1.048.806.915	949.980.669	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
			2022	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	3f,3g,3r,16,29f,33,34					Trade payables
Pihak ketiga		44.365.021	22.104.102	16.462.547	23.187.189	Third parties
Pihak berelasi		30.687.832	5.114.162	4.851.577	1.178.560	Related parties
Beban akrual	3f,3r,17,33,34	4.779.011	8.911.426	7.069.728	10.086.817	Accrued expenses
Utang pajak	3p,28b	48.664.349	32.674.382	20.797.784	2.596.096	Taxes payable
Utang lain-lain	3f,3g,3r,18,29g,33,34					Other payables
Pihak ketiga		2.000.636	3.362.557	2.981.649	66.712	Third parties
Pihak berelasi		-	20.745	80.574	7.303.810	Related parties
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Current maturities of long-term debts:
Pinjaman jangka panjang	3f,3r,19,33,34	174.107.263	902.140.545	248.039.768	104.142.433	Loan-term loans
Liabilitas sewa	3f,3l,3r,20,29j,33,34	7.740.804	6.370.477	13.923.272	6.443.878	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		312.344.916	980.698.396	314.206.899	155.005.495	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pihak berelasi	3f,3g,3r,29h,33,34	82.429.828	61.086.000	79.485.812	92.961.365	Due to related parties
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term debts - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang	3f,3r,19,33,34	811.111.989	9.351.172	619.222.879	719.363.993	Loan-term loans
Liabilitas sewa	3f,3l,3r,20,29j,33,34	33.067.938	4.678.709	6.905.111	3.471.490	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	3o,21	1.896.334	1.161.800	327.726	-	Post-employment benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		928.506.089	76.277.681	705.941.528	815.796.848	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		1.240.851.005	1.056.976.077	1.020.148.427	970.802.343	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 202220212020			
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to owners of the parent
Modal saham						
Modal dasar - 238.880 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020						Share capital Authorized - 238,880 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share as of August 31, 2023 and 100,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share as of December 31, 2022, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 59.720 saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 51.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	22	59.720.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	Issued and fully paid - 59,720 shares as of August 31, 2023 and 51,000 shares as of December 31, 2022, 2021 and 2020
Tambahan modal disetor - neto	23	91.779.744	-	-	-	Additional paid-in capital - net
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	3o	(382.420)	(393.603)	(11.186)	-	Remeasurement on post-employment benefits liability - net
Saldo laba (defisit)		457.970.945	294.241.755	130.662.550	(58.446.679)	Retained earnings (deficit)
Subtotal		609.088.269	344.848.152	181.651.364	(7.446.679)	Subtotal
Kepentingan nonpengendali	3b	5.218.366	2.825.947	14.589.164	15.050.148	Non-controlling interest
Ekuitas - Neto		614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469	Equity - Net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT) DAN 2022 (TIDAK
DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND
2022 (UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),			
		2023	2022	2022	2021	2020	
PENDAPATAN	3g,3m,24,29a,31	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3g,3m,25,29b,31	(368.015.696)	(235.128.083)	(368.903.994)	(324.762.816)	(88.852.404)	COST OF REVENUES
LABA (RUGI) BRUTO		294.865.041	145.915.815	301.216.389	302.954.115	(5.253.481)	GROSS PROFIT (LOSS)
BEBAN USAHA	3m,26,31	(50.329.312)	(21.400.877)	(37.390.193)	(26.589.153)	(20.398.087)	OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) USAHA		244.535.729	124.514.938	263.826.196	276.364.962	(25.651.568)	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	3n						OTHER INCOME (CHARGES)
Penghasilan bunga	3n,27a,31	81.938.988	91.506.105	136.307.706	106.436.938	66.641.897	Interest income
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	3q	8.095.668	(9.757.470)	(40.178.408)	1.167.972	4.583.558	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	3n,31	(940.938)	(3.158.381)	(4.295.162)	(1.671.402)	(4.583.110)	Provision for impairment losses - net
Pajak final	3p,27b,28c,31	(5.722.391)	(3.477.596)	(6.063.889)	(5.350.402)	(429.200)	Final tax
Beban pajak	3p,27c,31	(21.256.151)	(11.720.283)	(24.430.942)	(15.693.590)	(2.187.252)	Tax expense
Beban keuangan	3f,3n,27d,31	(126.318.429)	(116.944.791)	(178.491.631)	(169.084.886)	(94.762.126)	Finance charges
Lain-lain - neto	3n	(3.345.994)	(1.420.622)	525.000	(1.042.929)	(1.996.462)	Others - net
Beban Lain-Lain - Neto		(67.549.247)	(54.973.038)	(116.627.326)	(85.238.299)	(32.732.695)	Other Charges - Net
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		176.986.482	69.541.900	147.198.870	191.126.663	(58.384.263)	PROFIT (LOSS) BEFORE ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	3p,28d	(3.503.976)	-	-	-	-	Current
Tangguhan	3p,28e	(7.360.897)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	Deferred
Taksiran Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto		(10.864.873)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	Estimated Income Tax (Expense) - Net
LABA (RUGI) NETO		166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)	NET PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	3o,21	8.448	(293.606)	(440.409)	(14.227)	-	Remeasurement of post - employment benefits liability
Pajak penghasilan terkait	3p,28e	2.735	38.662	57.992	3.041	-	Related income tax
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Neto - Setelah Dikurangi Pajak		11.183	(254.944)	(382.417)	(11.186)	-	Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO		166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)	NET COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT) DAN 2022 (TIDAK
DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND
2022 (UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),				
	2023	2022	2022	2021	2020		
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						NET PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:	
Pemilik entitas induk		163.729.190	79.511.977	163.579.205	189.109.229	(48.072.919)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	3b	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)	Non-controlling interests
Neto		166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)	Net
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						NET COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:	
Pemilik entitas induk		163.740.373	79.257.033	163.196.788	189.098.043	(48.072.919)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	3b	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)	Non-controlling interest
Neto		166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)	Net
						BASIC/DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT	
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka Penuh)	3u,30	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)	(Full Amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT) DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT),
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022 (UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity Attributable to Owners of the Parent</i>							
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ <i>Issued and Paid-up Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pascakerja - Neto/ <i>Remeasurement on Post-employment Benefits Liability - Net</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>	Subtotal/ <i>Subtotal</i>	Kepentingan Nonpengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Ekuitas - Neto/ <i>Equity - Net</i>	
Saldo 1 Januari 2022	51.000.000	-	(11.186)	130.662.550	181.651.364	14.589.164	196.240.528	<i>Balance as of January 1, 2022</i>
Penghasilan (rugi) komprehensif neto periode berjalan	-	-	(254.944)	79.511.977	79.257.033	(6.608.704)	72.648.329	<i>Net comprehensive income (loss) for the period</i>
Saldo 31 Agustus 2022	51.000.000	-	(266.130)	210.174.527	260.908.397	7.980.460	268.888.857	<i>Balance as of August 31, 2022</i>
Saldo 1 Januari 2023	51.000.000	-	(393.603)	294.241.755	344.848.152	2.825.947	347.674.099	<i>Balance as of January 1, 2023</i>
Penghasilan komprehensif neto periode berjalan	-	-	11.183	163.729.190	163.740.373	2.392.419	166.132.792	<i>Net comprehensive income for the period</i>
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh (Catatan 22 dan 23)	8.720.000	91.779.744	-	-	100.499.744	-	100.499.744	<i>Additional Paid-in Capital (Notes 22 and 23)</i>
Saldo 31 Agustus 2023	59.720.000	91.779.744	(382.420)	457.970.945	609.088.269	5.218.366	614.306.635	<i>Balance as of August 31, 2023</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT) DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT),
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022 (UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent							
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pascakerja - Neto/ Remeasurement on Post-employment Benefits Liability - Net	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)	Subtotal/ Subtotal	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Ekuitas - Neto/ Equity - Net
Saldo 1 Januari 2020	51.000.000	-	-	(10.373.760)	40.626.240	20.681.054	61.307.294
Rugi komprehensif neto tahun berjalan	-	-	-	(48.072.919)	(48.072.919)	(5.630.906)	(53.703.825)
Saldo 31 Desember 2020	51.000.000	-	-	(58.446.679)	(7.446.679)	15.050.148	7.603.469
Penghasilan (rugi) komprehensif neto tahun berjalan	-	-	(11.186)	189.109.229	189.098.043	(460.984)	188.637.059
Saldo 31 Desember 2021	51.000.000	-	(11.186)	130.662.550	181.651.364	14.589.164	196.240.528
Penghasilan (rugi) komprehensif neto tahun berjalan	-	-	(382.417)	163.579.205	163.196.788	(11.763.217)	151.433.571
Saldo 31 Desember 2022	51.000.000	-	(393.603)	294.241.755	344.848.152	2.825.947	347.674.099

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT) DAN 2022 (TIDAK
DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND
2022 (UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

		31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),			
	Catatan/ Notes	2023	2022	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI							
AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan kas dari pelanggan	6	597.966.630	349.399.047	642.664.953	496.675.836	71.721.571	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran kas kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya		(299.043.229)	(164.204.813)	(287.222.316)	(291.437.618)	(94.044.665)	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada karyawan		(13.052.737)	(8.443.818)	(12.052.978)	(4.710.923)	(2.696.609)	Cash payments to suppliers and other operating activities
Kas neto yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		285.870.664	176.750.416	343.389.659	200.527.295	(25.019.703)	Cash payments to employees
Penerimaan bunga bank		210.838	314.083	468.318	153.639	158.165	Net cash generated from (used in) operating activities
Pembayaran bunga liabilitas sewa		(2.283.731)	(1.050.897)	(1.438.736)	(1.124.022)	(585.287)	Receipts of bank interest
Pembayaran pajak		(47.547.996)	(48.782.549)	(71.947.156)	(45.573.013)	(2.361.868)	Payments of interest on lease liabilities
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang		(172.955.854)	(118.923.914)	(196.770.794)	(89.428.792)	(4.440.941)	Payments of taxes
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		63.293.921	8.307.139	73.701.291	64.555.107	(32.249.634)	Payments of interest on long-term loans
Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities							
ARUS KAS DARI							
AKTIVITAS INVESTASI							
Kenaikan neto							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
piutang pihak berelasi		(3.700.000)	-	-	-	(520.966.766)	Net increase in due from related parties
Kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya		(6.503.484)	-	-	-	-	Increase in restricted fund
Perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(199.805.324)	(31.996.922)	(62.997.376)	(17.468.622)	(149.128.976)	Acquisition of fixed assets and payment of advances for purchases of fixed assets
Penurunan neto							Net decrease in due from related parties
piutang pihak berelasi		-	66.513.530	65.581.321	-	-	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(210.008.808)	34.516.608	2.583.945	(17.468.622)	(670.095.742)	
ARUS KAS DARI							
AKTIVITAS PENDANAAN							
Penerimaan pinjaman jangka panjang	35	1.094.274.533	-	-	-	711.841.654	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	35	(3.561.938)	(8.966.641)	(9.779.197)	(6.023.479)	(2.988.463)	Receipts from long-term loans
Pembayaran pinjaman jangka panjang	35	(974.522.446)	(15.598.309)	(20.710.259)	(12.861.128)	-	Payments of lease liabilities
Penurunan neto							Payment of long-term bank loans
utang pihak berelasi	35	-	(11.100.000)	(23.464.250)	(15.150.000)	(6.051.747)	Net decrease in due to related parties
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		116.190.149	(35.664.950)	(53.953.706)	(34.034.607)	702.801.444	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH							
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS		(30.524.738)	7.158.797	22.331.530	13.051.878	456.068	
KAS AWAL TAHUN		36.428.128	14.096.598	14.096.598	1.044.720	588.652	CASH AT BEGINNING OF YEAR
KAS AKHIR TAHUN		5.903.390	21.255.395	36.428.128	14.096.598	1.044.720	CASH AT END OF YEAR

Lihat Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 35 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Ancara Logistics Indonesia ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2019 dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 25 Tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH., No. 437, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-0037867.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74, Tambahan No. 034727 Tahun 2020.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., tanggal 29 Agustus 2023 mengenai penerbitan saham baru dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0051500.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 30 Agustus 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan dan Entitas Anak, Perusahaan berusaha di bidang angkutan dengan kegiatan usaha utama angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, sedangkan Entitas Anak bergerak di bidang perdagangan, pengangkutan dan pertambangan. Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan izin No. AL.010/109/DA-2022 tanggal 5 Februari 2022.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Bakrie Tower lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sedangkan dermaga berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan telah beroperasi secara komersial pada Juli 2020.

1. GENERAL

a. Company's Establishment

PT Ancara Logistics Indonesia (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on July 30, 2019 within the framework of the Foreign Direct Investment Law No. 25 Year 2007 based on Notarial Deed No. 437, of Netty Maria Machdar, SH., notary, which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Submission of Application for Legalization of Corporate Legal Entity No. AHU-0037867.AH.01.01.Tahun 2019 dated August 2, 2019, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74, Supplement No. 034727 Year 2020.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest Amendment to the Company's Articles of Association are contained in the Deed of Circular Resolution of Shareholders in lieu of Extraordinary Shareholders General Meeting No. 32 by Notary Maria Gunarti, S.H., M.Kn., dated August 29, 2023 regarding the issuance of new shares and changes to Article 4 of the Company's Articles of Association regarding capital. The amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter No. AHU-0051500.AH.01.02 Tahun 2023 dated August 30, 2023.

According to Article 3 of the Company and the Subsidiary's Articles of Association, the Company trades in transportation with main trade in sea transportation in domestic port waters for goods, while the Subsidiary is engaged in the business of trading, transportation and mining. The Company has obtained its Business License as a Sea Transportation Company ("SIUPAL") from Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation with permit No. AL.010/109/DA-2022 dated February 5, 2022.

The Company's head office is located at Bakrie Tower 15th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, while its jetty is located at Tenggarong Seberang Subdistrict, Kutai Kartanegara District, East Kalimantan Province. The Company started its commercial operations in July 2020.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

PT Graha Adika Niaga merupakan entitas induk Perusahaan. Pihak yang menjadi Pengendali Perusahaan dan Pemilik Manfaat Utama dari Perusahaan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod.

b. Struktur Entitas Anak

Struktur Entitas Anak (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Grup") pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Lokasi/ Location	Kegiatan Usaha Utama/ Principal Activities	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership				Total Aset Sebelum Eliminasi (dalam ribuan)/ Total Assets Before Eliminations (in thousand)					
				31 Agustus/ August 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Agustus/ August 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,		
				2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020		
				%	%	%	%						
PT Fajar Bumi Shipping (FB Shipping) (langsung/direct)	Indonesia	Jasa pengiriman/ Shipping services	Perusahaan tidak beroperasi/ Non operating company	-	*)	99,99	99,99	99,99	-	*)	90.433	201.226	201.873
PT Mahakam Coal Terminal (MCT) (langsung/direct)	Indonesia	Jasa bongkar muat batu bara/ Loading unloading service of coal	2020	70,00	70,00	70,00	70,00	1.068.273.668	991.434.260	919.387.338	859.470.738		

PT Fajar Bumi Shipping

PT Fajar Bumi Shipping didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 36 oleh Firdhonal, S.H. tanggal 27 Juni 2008 dan mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-53271.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 14 oleh Firdhonal, S.H. tanggal 31 Agustus 2023, mengenai pengalihan pemegang saham. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.09-0158002 tanggal 31 Agustus 2023.

Jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 60.000 lembar saham.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

PT Graha Adika Niaga is the parent company of the Company. The controller of the Company and the Ultimate Beneficial Owners of the Company are Aburizal Bakrie and Nalinkant Amratlal Rathod.

b. Structure of Subsidiaries

The structure of Subsidiaries (together with the Company hereinafter referred to as the "Group") as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

PT Fajar Bumi Shipping

PT Fajar Bumi Shipping was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 36 of Firdhonal, S.H. dated June 27, 2008 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Decision Letter No. AHU-53271.AH.01.01. Year 2008 dated August 21, 2008. The Company's Articles of Association have been amended several times, the most recent being based on Notarial Deed No. 14 of Firdhonal, S.H. dated August 31, 2023 regarding the transfer of the Company's share capital. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0158002 dated August 31, 2023.

Total issued and fully paid shares is amounted to 60,000 shares.

1. UMUM (Lanjutan)

PT Mahakam Coal Terminal

PT Mahakam Coal Terminal didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 21 dari Sri Intansih, S.H., tanggal 8 Maret 2007. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03867 HT.01.01-Th.2007 tanggal 10 April 2007. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari Firdhonal, S.H., tanggal 27 Maret 2023, tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0019247.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 50.000 lembar saham.

*) Pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 16, Perusahaan menjual saham di PT Fajar Bumi Shipping sebanyak 59.999 lembar atau sebesar Rp5,99 juta kepada PT Bara Milenia Energi (Catatan 7b dan 29d).

Kerugian yang diakui Perusahaan pada saat pelepasan PT Fajar Bumi Shipping sebesar Rp40,26 juta.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 31 2023
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Nalinkant Amratlal Rathod
Komisaris	Aninditha Anestya Bakrie
Direksi	
Direktur Utama	Faisal Mohamad Nur
Direktur	Rahul Nalin Rathod
Direktur	Vishal Manharlal Parekh
Direktur	Munawir

1. GENERAL (Continued)

PT Mahakam Coal Terminal

PT Mahakam Coal Terminal was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 21 of Sri Intansih, S.H., dated March 8, 2007. The Notarial Deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Decision Letter No. W7-03867-HT.01.01-Th.2007 on April 10, 2007. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest based on Notarial Deed No. 7 of Firdhonal, S.H., dated March 27, 2023, regarding changes to Articles 3 of the Company's Articles of Association concerning purpose and objective as well as business activities of the Company. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Decision Letter No. AHU-0019247.AH.01.02.TAHUN 2023 dated March 30, 2023.

Total issued and fully paid shares is amounted to 50,000 shares.

*) On August 31, 2023, based on the Sale and Purchase of Shares Deed No. 16, the Company sold 59,999 shares in PT Fajar Bumi Shipping or equivalent of Rp5.99 million to PT Bara Milenia Energi (Notes 7b and 29d).

Loss recognized by the Company at the time of disposal of PT Fajar Bumi Shipping amounted to Rp40.26 million.

c. Boards of Commissioners, Directors and Employees

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

	31 Desember/December 31, 2022, 2021 dan/and 2020	
Board of Commissioners		
	Nalinkant Amratlal Rathod	President Commissioner
	-	Commissioner
Board of Directors		
	Debby Wahyuni	President Director
	Rahul Nalin Rathod	Director
	Vishal Manharlal Parekh	Director
	-	Director

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 0190/ALI-LGL/X/23 tanggal 30 Oktober 2023, Perusahaan telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota

Agus Suharyono
Mardiannus Pramudya
Pradeep Kilpady

Chairman
Member
Member

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. 0194/ALI-LGL/X/23 tanggal 1 November 2023, Perusahaan telah mengangkat Aulia sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Perusahaan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 1 November 2023. Perusahaan telah menunjuk Abid Hafizh Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0193/ALI-LGL/X/23 tanggal 1 November 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 0200/ALI-LGL/XI/23 tanggal 1 November 2023.

Karyawan Grup masing-masing adalah 113, 74, 43 dan 18 karyawan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2023.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (Continued)

Based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 0190/ALI-LGL/X/23 dated October 30, 2023, the Company has established Audit Committee, as follows:

Based on the Appointment Letter of Corporate Secretary No. 0194/ALI-LGL/X/23 dated November 1, 2023, the Company appointed Aulia as the Company's Secretary (*Corporate Secretary*).

The Company has prepared an Internal Audit Charter as stipulated in OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding the Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter which was determined by the Company's Board of Directors and was approved by the Company's Board of Commissioners on November 1, 2023. The Company appointed Abid Hafizh Muhammad as Head of the Internal Audit Unit based on the Board of Directors' Decision Letter No. 0193/ALI-LGL/X/23 dated November 1, 2023 and the Board of Commissioners Decision Letter No. 0200/ALI-LGL/XI/23 dated November 1, 2023.

The Group's employees were 113, 74, 43 and 18 employees as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively (unaudited).

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements, which have been authorized for issue by the Board of Directors on December 27, 2023.

2. STATEMENT OF COMPLIANCE

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kecuali untuk penerapan amendemen standar akuntansi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Efektif tanggal 1 Januari 2023, Grup telah menerapkan Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi, yang mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan "informasi kebijakan akuntansi material" yang sebelumnya "Kebijakan akuntansi signifikan" dan mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian atau kondisi material lainnya adalah material terhadap laporan keuangan.

Amendemen PSAK 1 juga memberikan contoh-contoh keadaan di mana entitas mungkin mempertimbangkan kebijakan akuntansi menjadi material terhadap laporan keuangan entitas tersebut.

Grup juga telah menerapkan Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang dan menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- (a) hak entitas untuk menanggulkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan;
- (b) klasifikasi tidak terpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menanggulkan penyelesaian liabilitas;
- (c) bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi; dan
- (d) persyaratan untuk entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri (hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022, except for the adoption of amended accounting standards effective January 1, 2023 as described in the related accounting policies.

Effective January 1, 2023, the Group adopted Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies, which requires entities to disclose "material accounting policy information" previously referred to as "Significant accounting policies" and clarifies that not all accounting policy information related to transactions, events, or other material conditions is material to the financial statements.

Amendment to PSAK 1 also provides examples of situations in which an entity may consider accounting policies to be material to its financial statements.

The Group also adopted Amendment to PSAK No. 1 "Presentation of Financial Statements" regarding Classification of a Liability as Current or Non-current, which specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarifies:

- (a) *entity's right to defer settlement of liabilities must exist at the end of the reporting period;*
- (b) *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its right to defer settlement of liabilities;*
- (c) *how loan conditions affect classification; and*
- (d) *requirements for entities to classify liabilities based on its ability to settle liabilities by issuing its own equity instruments (only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification).*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Grup telah menerapkan amendemen Standar Akuntansi Keuangan (PSAK):

- (a) Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- (b) Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal".

Penerapan amendemen ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengungkapan tambahan disajikan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Efektif tanggal 1 Januari 2023, Grup telah menerapkan Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"; yang memperkenalkan definisi estimasi akuntansi dan mengklarifikasi:

- (a) teknik estimasi dan teknik penilaian merupakan contoh dari teknik pengukuran yang digunakan dalam mengembangkan estimasi akuntansi;
- (b) perubahan dalam estimasi akuntansi sebagai hasil informasi baru atau perkembangan baru yang bukan merupakan koreksi kesalahan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai atau investor tersebut mengendalikan *investee*.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The Group has also applied the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK):

- (a) Amendment to PSAK No. 16, "Fixed Assets" regarding Proceeds before Intended Use;
- (b) Amendment to PSAK No. 46, "Income Taxes" regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The adoption of these amendments have no significant impact on the Group's consolidated financial statements.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities. Additional disclosure is presented to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including the changes arising from cash flows or non-cash changes.

Effective January 1, 2023, the Group has adopted Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors," which introduces the definition of accounting estimates and clarifies:

- (a) estimation techniques and valuation techniques are examples of measurement techniques used in developing accounting estimates;
- (b) changes in accounting estimates are the result of new information or new developments that are not corrections of errors.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah (Rp), which is also the functional currency of the Group.

b. Principles of Consolidation

An entity (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) present consolidated financial statements. Investors, apart from the nature of their involvement with an entity (*investee*), determine whether they are a parent by assessing if they control the *investee*.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Therefore, the investor controls the investee if, and only if, it has all of the following:

- (a) power over the investee;
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee; and
- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns.

An investor reassesses whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.

An investee is consolidated from the date the investor obtains control of the investee and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

A parent determines whether it is an investment entity. An investment entity is an entity that:

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;
- (b) commits to its investors that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- (c) measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.

A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Total penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Perubahan bagian kepemilikan

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dimana jumlah tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat menggunakan metode akuisisi. Biaya suatu akuisisi diakui sebagai penjumlahan atas imbalan yang dialihkan, yang diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah atas kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi. Biaya akuisisi yang terjadi dibiayakan dan dicatat sebagai beban pada tahun berjalan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Total other comprehensive income is attributed to the owners of the parent and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

Changes in the ownership interests

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions, in which the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. The difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If a parent loses control of a subsidiary, the parent:

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.
- recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, if appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.
- recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.

c. Business Combination

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as an aggregate of the consideration transferred, measured on acquisition date at fair value, and the amount of any non-controlling interest in the acquiree. The acquisition costs incurred are expensed in the current year.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Selisih lebih antara penjumlahan imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk kepentingan nonpengendali dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih (aset neto) dicatat sebagai *goodwill*. Dalam kondisi sebaliknya, Perusahaan mengakui selisih kurang tersebut sebagai keuntungan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Untuk tujuan penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan ke setiap unit penghasil kas yang diharapkan mendapatkan manfaat dari kombinasi bisnis tersebut terlepas apakah aset dan liabilitas lainnya dari entitas yang diakuisisi ditetapkan ke unit tersebut.

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi Entitas Anak, entitas asosiasi atau bisnis dan nilai wajar bagian Grup atas aset neto Entitas Anak, entitas asosiasi atau bisnis yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

d. Kas

Kas terdiri dari saldo kas dan bank dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Kas di bank, yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" yang akan digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dalam satu (1) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interest over the net identified assets and liabilities assumed are recorded as goodwill. In contrary, the Company recognizes the lower amount as gain in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on the date of acquisition.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in the business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition of a subsidiary, associate or business over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets of the acquired Subsidiary, associate or business on the acquisition date.

Goodwill is derecognized upon disposal or when no future benefits are expected from its use or disposal.

d. Cash

Cash consists of cash on hand and in banks that is not pledged as collateral or restricted in use.

e. Restricted Fund

Cash in banks, which are restricted in use, is presented as "Restricted Fund" to be used to pay currently maturing obligations due within one (1) year is presented under current assets.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL *(Lanjutan)*

f. Instrumen Keuangan

(1) Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Grup mengklasifikasikan aset keuangan menjadi (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi; dan (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

f. Financial Instruments

(1) Financial Assets

Initial Recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs. The Group classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at amortized cost; and (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI). Classification and measurement of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and does not change the classification already made.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial assets measured at amortized cost

Financial assets measured at amortized cost are held within the business model whose objective is to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Untuk piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan risiko kredit, tetapi sebaliknya mengakui penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis, disesuaikan untuk informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur dengan biaya diamortisasi, kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, diperlukan penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian selama sisa masa eksposur, terlepas dari waktu gagal bayar (kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition, considering reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

For trade receivables, the Group applies a simplified approach to measure expected credit loss. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit loss at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking information specific to the debtors and the economic environment.

For other financial assets measured at amortized cost, expected credit losses are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, expected credit losses are provided for credit losses that result from default events that are possible within the 12 months after the reporting date (12-month expected credit loss). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime expected credit loss).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Grup mengalihkan aset keuangan, maka Grup mengevaluasi sejauh mana Grup tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan tersebut diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam beban keuangan dalam laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika; kewajiban Grup dihentikan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Group transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

(2) Financial Liabilities

Initial Recognition

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. All financial liabilities of the Group are classified as financial liabilities measured at amortized cost. These financial liabilities are recognized initially at fair value and inclusive of directly attributable transaction costs.

Subsequent Measurement

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortization of the effective interest rate is included in finance charges in the profit or loss.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities if, and only if, the Group's obligations are discharged, cancelled or expire.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

(3) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

(4) Instrumen Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - (iii) Personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
- b) Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - (i) Entitas dan Grup adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

(3) Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

(4) Financial Instruments Measured at Amortized Cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on the acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

g. Transaction with Related Parties

Related parties are persons or entities that are related to the Group:

- a) A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - (i) Has control or joint control over the Group;
 - (ii) Has significant influence over the Group; or
 - (iii) Is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.
- b) A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - (i) The entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas atau kepada entitas induk dari entitas.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

h. Persediaan

Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan termasuk semua biaya pembelian dan biaya angkut yang terjadi untuk membawa persediaan ke tempat dan kondisi saat ini.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
- (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the entity or to the parent of the entity.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and material balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

h. Inventory

Cost is determined based on the weighted average method and comprises of all costs including entry fee and transport fee incurred in bringing the inventory to its present location and condition.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

j. Fixed Assets

The Group had chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL *(Lanjutan)*

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun / Year	
Bangunan	10	Building
Jalan <i>hauling</i>	20	Hauling road
Dermaga dan penyimpanan	20	Jetty and stockpile
Alat berat	8 - 20	Heavy equipment
Kapal tongkang	20	Barge
Kapal tunda	10	Tugboat
Kapal terapung	16	Floating transhipper vessel
Kendaraan	8	Transportation
Perlengkapan dan peralatan	4	Tools and equipment

Masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of fixed assets are as follows:

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted, if appropriate, at the end of each reporting period.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is included in profit or loss in the period in which the asset is derecognized.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkannya, jumlah tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

l. Sewa

Grup sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak guna atau masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Impairment of Non-financial Assets

The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill is recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses is immediately recognized in profit or loss, except for assets presented using the revaluation model in accordance with another PSAK. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

l. Leases

The Group as a Lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for a consideration.

The Group leases certain fixed assets by recognizing the right-of-use asset and lease liabilities. The right-of-use assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment. Right-of-use assets are depreciated over the shorter of the useful life of the assets or the lease term.

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments that are not yet paid. Each lease payment is allocated between the liability portion and finance cost. Lease liabilities are classified as long-term liabilities, except for those with maturities of twelve (12) months or less which are included in current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- (a) sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- (b) sewa yang asetnya bernilai rendah.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan (yaitu, pada tanggal di mana aset pendasar telah tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan aset hak guna meliputi jumlah pengukuran liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak guna atau masa sewa.

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan eksekusi opsi beli, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat aset.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima (5) langkah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
- (c) Menetapkan harga transaksi.
- (d) Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan.
- (e) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The Group does not recognize right-of-use assets and lease liabilities for:

- (a) short-term leases that have a lease term of twelve (12) months or less; or
- (b) leases with low-value assets.

Payments made under those leases are charged to profit or loss on a straight line basis over the period of the lease.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a shorter of the lease term and the estimated.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost of the right-of-use asset reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

m. Revenues and Expenses Recognition

Revenues

Revenue recognition has to fulfill five (5) steps as follows:

- (a) Identify the contract with a customer.
- (b) Identify the performance obligations in the contract.
- (c) Determine the transaction price.
- (d) Allocate the transaction price to each performance obligation.
- (e) Recognize revenue when the performance obligation is satisfied by transferring promised goods or services to a customer, when the customer obtains control of that goods or services.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Model lima langkah untuk pengakuan pendapatan dari standar baru ini selaras dengan model dan praktik bisnis yang Grup lakukan. Sehingga, penerapan standar baru ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pendapatan dari aktivitas jasa diakui pada periode di mana jasa diberikan, dengan mengacu pada penyelesaian transaksi tertentu dengan pengukuran berdasarkan jasa yang sebenarnya telah diberikan sebagai proporsi terhadap jumlah jasa yang akan diselesaikan.

Penghasilan Keuangan atau Biaya

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau biaya keuangan dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa mendatang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan basis akrual.

n. Pengakuan Penghasilan dan Beban Lain-lain

Penghasilan dan beban lain-lain diakui pada saat diperoleh dan terjadinya (*accrual basis*).

o. Imbalan Pascakerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan oleh Grup seperti gaji, tunjangan, bonus dan pembayaran manfaat pensiun, yang diakui pada saat terutang kepada karyawan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The five-step model for revenue recognition of the new standard is aligned with the Group's current business model and practices. Thus, the adoption of this new standard had no impact on the Group's consolidated financial statements.

Revenues from service activities are recognized in the period in which the services are rendered, with reference to the completion of specific transactions, assessed on the basis of the actual services provided as a proportion of the total services to be provided.

Finance Income or Cost

For all financial instruments measured at amortized cost, finance income or cost are recorded using the effective interest method, which uses the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

n. Other Income and Expenses Recognition

*Other income and expenses are recognized when earned and incurred (*accrual basis*).*

o. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits represent compensation provided by the Group such as salaries, allowance, bonus and pension contribution paid, which are recognized when they accrue to the employees.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Imbalan Pascakerja

Grup menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185(b) Undang-Undang No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Post-employment Benefits

The Group determines its post-employment benefits liability based on Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) which implements the provisions of Article 81 and Article 185(b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja). PSAK No. 24 requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

When an entity has a surplus in a defined benefit plan, it measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of the defined benefit plan and the upper limit on assets determined using a discount rate.

An entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAK requires or permits such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

- (a) service cost in profit or loss;
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefits in profit or loss; and
- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefit recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement of on net liability (asset) of defined benefits consists of:

- (a) actuarial gains and losses;
- (b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and
- (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

The entity recognizes past service cost as an expense at the earlier of when the amendments or curtailment of the program occurs and when the entity recognizes related restructuring costs or severances.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi.

Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi atau terminasi atau penghentian program. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Grup mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

p. Perpajakan

Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The Group recognizes gains or losses on the settlement of a defined benefit plan when such occur. A curtailment occurs when an entity makes a material reduction in the number of employees covered by a plan, or amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan. Before determining the past service cost, or gains and losses on the settlement, the Group shall remeasure the net liability (asset) of defined benefit using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) that reflects the rewards offered in the program prior to the amendment, curtailment or settlement program.

p. Taxation

Income Taxes

Current tax expense is provided based on the estimated taxable profit for the period.

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intended either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Grup mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi, tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut entitas pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, beban pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities that intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.

Final Tax

Tax regulations in Indonesia stipulate that certain type of income are subject to final tax. The final tax imposed on the gross value of the transaction is still imposed even though the transaction entity suffers losses.

Referring to PSAK No. 46 mentioned above, the final tax expense is not included in the scope regulated by PSAK No. 46.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam angka penuh):

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
Euro Eropa	16.544	16.713	16.127	17.330	European Euro
Dolar AS	15.239	15.731	14.269	14.105	US Dollar
Dolar Singapura	11.265	11.659	10.534	10.644	Singapore Dollar

r. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to the functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. Gains or losses resulting from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.

The closing exchange rates used as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, are as follows (in full amount):

r. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments that are traded on active markets is determined at each reporting date by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and price demand for short position), excluding any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

s. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi tersebut dihapuskan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

t. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, selain biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan menguji penurunan nilai apabila terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

t. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as of the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi terjadi pada aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Grup terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi dari Entitas Anak, entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas pada tanggal akuisisi. *Non Controlling Interest* ("NCI") diukur pada proporsi kepemilikan NCI atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang diperoleh, perbedaan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. *Goodwill* atas akuisisi entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas disajikan di dalam investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas. *Goodwill* dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Goodwill atas akuisisi Entitas Anak diuji penurunan nilainya setiap tahun. *Goodwill* dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas (CGU) atau kelompok CGU untuk tujuan uji penurunan nilai.

Keuntungan atau kerugian atas pelepasan Entitas Anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas termasuk nilai tercatat dari *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

The amortization period and the amortization method for an intangible asset is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group's share of the net identifiable assets of the acquired Subsidiary, associate or jointly controlled entity at the effective date of acquisition. *Non Controlling Interest* ("NCI") are measured at their proportionate share of the net identifiable assets at the acquisition date. If the cost of acquisition is less than the fair value of the net assets acquired, the difference is recognized directly in the consolidated profit and loss and other comprehensive income. *Goodwill* on acquisitions of associates and jointly controlled entity is included in investment in associates and jointly controlled entities. *Goodwill* is carried at cost less accumulated impairment loss.

Goodwill upon acquisition of Subsidiaries is tested for impairment annually. *Goodwill* is allocated to Cash Generating Unit (CGU) or groups of CGU for the purpose of impairment testing.

The profit or loss on disposal of Subsidiaries, associates and jointly controlled entities includes the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

u. Laba atau Rugi per Saham

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

Laba atau rugi per saham dilusian dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasanya yang bersifat dilutif.

v. Dividen

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

w. Informasi Segmen

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan "pendekatan manajemen" dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

u. Earning or Loss per Share

Basic earnings or losses per share are calculated by dividing profits or losses attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number or ordinary shares outstanding, during the period.

Diluted earnings or losses per share are calculated by dividing profits or losses attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of shares outstanding, for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

v. Dividends

Final dividend distributions are recognized as a liability when the dividends are approved in the General Meeting of the Company's Shareholders. Dividend distributions are recognized as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors' resolution in accordance with the Company's Articles of Association.

w. Segment Information

Entities disclose information that enables users of the financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities and use "management approach" under which segment information is presented on the same basis as that used for internal reporting purposes. The operating segment is reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker has been identified as the Board of Directors that makes strategic decisions.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make estimations and judgments that affect the amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Grup mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba rugi Grup.

Menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha dan piutang pihak berelasi

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada piutang usaha yang telah jatuh tempo dengan pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola yang sama (seperti: letak geografis, jenis dan peringkat pelanggan).

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

The Group based its estimations and judgments on parameters available when the financial statements are prepared. Existing circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the judgments as they occur.

The following estimations and judgments made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies.

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization are determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodologies or assumptions. Such changes would directly affect the Group's profit or loss.

Determining provision for expected credit losses of trade receivables and due from related parties

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The level of provision rates is based on trade receivables that are past due with the grouping of various customer segments that have the same pattern (such as: geographic location, type and customer rating).

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis yang diobservasi oleh Grup. Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi masa depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi diperkirakan akan memburuk selama setahun ke depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar, pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis yang diobservasi diperbarui dan perubahan perkiraan masa depan dianalisis oleh Grup.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga tidak dapat mewakili gagal bayar aktual pelanggan di masa depan.

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- yang paling memengaruhi jasa, dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas;
- yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja dan biaya lain dari pengadaan jasa;
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan; dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak, mata uang fungsional telah ditentukan menjadi Rupiah (Rp) karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Grup beroperasi dalam mata uang Rp.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keuangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

The provision matrix is initially based on historical default rates observed by the Group. The Group adjusts its historical credit losses experience with future information. For example, if the forecast for economic conditions is expected to deteriorate over the next year, which could lead to an increase in the amount of default, at each reporting date, the observed historical default rates are updated and changes in future forecasts are analyzed by the Group.

The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Determining functional currency

The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiaries include, among others, the currency:

- *that mainly influence services; of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of services;*
- *that mainly influences labour and other costs of providing services;*
- *in which funds from financing activities are generated; and*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Company and each of its Subsidiaries, the functional currency has been determined to be the Rupiah (Rp), as this reflects the fact that the majority of the Company and each of its Subsidiary's businesses is influenced by the primary economic environment in which they operates in Rp currency.

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

Allowance for impairment in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provision is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the estimated amount.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Jumlah terpulihkan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam estimasi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang tingkat diskonto atau asumsi tingkat pertumbuhan dalam proyeksi arus kas dan pemilihan data pasar yang dapat diperbandingkan. Perubahan estimasi dan asumsi tersebut dapat secara material memengaruhi perhitungan nilai pakai dan nilai wajar. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; oleh karena itu ada kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mengubah proyeksi ini, yang mungkin berdampak pada jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset dapat mengalami penurunan nilai lebih lanjut, yang dampaknya dicatat pada laba rugi.

Penurunan nilai aset nonkeuangan yang memiliki masa manfaat tidak terbatas termasuk *goodwill*, diuji penurunan nilainya setiap akhir tahun.

Nilai terpulihkan *goodwill* dan aset takberwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas ditentukan berdasarkan perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (pendekatan pendapatan dan/atau pendekatan pasar) atau nilai pakai (model arus kas terdiskonto).

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap antara empat (4) sampai dua puluh (20) tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan oleh sebab itu biaya penyusutan masa depan dapat direvisi.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

The recoverable amounts of fixed assets and other non-current asset are based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these estimations may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the allowance of impairment already booked.

Impairment of non-financial assets

The determination of fair value less cost to sell and value-in-use requires management to make estimates and assumptions about the discount rates or the growth rate assumptions in the cash flow projections and selection of comparable market data. Changes in such estimates and assumptions could materially affect the value-in use and fair value calculations. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, with the impact recorded in profit or loss.

Impairment of non-financial assets that have an indefinite useful life, including goodwill, are tested annually at year-end.

The recoverable amount of goodwill and intangible assets with indefinite useful life were determined based on fair value less cost of disposal (income approach and/or market approach) or value-in-use calculations (discounted cash flow model).

Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within four (4) up to twenty (20) years. These are common life expectancies applied in the industries in which the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Estimasi biaya dan liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas dan beban imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk, antara lain: tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo.

Grup menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi jumlah tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Grup juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pembalikan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai.

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian, serta tingkat diskonto ketika Grup sebagai penyewa

Grup menentukan masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilaksanakan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar cukup yakin bahwa opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa akan dilaksanakan.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Estimate of post-employment benefits expense and liability

The determination of the Group's liability and expense for post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include, among others: discount rates, annual salary, retirement age and mortality rate. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its post-employment liability and expense.

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due.

The Group reviews its deferred tax assets at each reporting date and reduces the carrying amount to the extent it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. The Group also reviews the expected timing and tax rates upon reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options, and discount rate when the Group is a lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has lease contract that include extension and termination options. The Group applies judgment in evaluating whether or not it is reasonably certain that the option to renew or terminate the lease will be exercised.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Grup tidak dapat menentukan suku bunga implisit. Oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar untuk mengakui liabilitas sewa. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama, antara lain: suku bunga pinjaman Grup, jangka waktu sewa, pembayaran sewa, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Grup saat ini sedang terlibat dalam proses hukum. Manajemen melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Grup yang menangani proses hukum tersebut. Grup mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

The Group is unable to determine the implicit rate. Therefore, the Group uses the incremental borrowing rate as a discount rate to calculate the present value of the unpaid lease payments in order to recognize lease liabilities. In determining the incremental borrowing rate, the Group considers these main factors, among others: the Group's loan interest rates, lease term, lease payments and the currency in which the lease payments are determined.

Evaluating provisions and contingencies

The Group is currently involved in legal proceedings. The management exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies mainly through consultation with the Group's legal counsel handling those proceedings. The Group sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and takes the relevant risks and uncertainty into account.

5. KAS

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,		
		2022	2021	2020
Kas (Rupiah)	42.951	101.689	719.667	367.671
Kas di bank				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.615.331	19.235.281	12.632.179	550.698
Indonesia Eximbank	13.033	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	17.075.742	727.269	99.518
Subtotal	5.628.364	36.311.023	13.359.448	650.216
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	232.075	-	3.496	12.886
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	15.416	13.987	13.947
Subtotal	232.075	15.416	17.483	26.833
Total kas di bank	5.860.439	36.326.439	13.376.931	677.049
Total	5.903.390	36.428.128	14.096.598	1.044.720

5. CASH

Cash on hand (Rupiah)
Cash in banks
<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Indonesia Eximbank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal
<u>US Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal
Total cash in banks
Total

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

5. KAS (Lanjutan)

Rincian kas berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
Rupiah Indonesia	5.671.315	36.412.712	14.079.115	1.017.887	Indonesian Rupiah
Dolar AS	232.075	15.416	17.483	26.833	US Dollar
Total	5.903.390	36.428.128	14.096.598	1.044.720	Total

Seluruh kas ditempatkan pada pihak ketiga.

5. CASH (Continued)

The details of cash based on currencies is as follows:

All placement in cash are with third parties.

6. PIUTANG USAHA

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Rwood Resources Indonesia	33.219.380	28.076.215	29.782.734	-	PT Rwood Resources Indonesia
PT WHS Maritime Investments	1.188.270	-	-	-	PT WHS Maritime Investments
Subtotal	34.407.650	28.076.215	29.782.734	-	Subtotal
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(141.508)	(115.139)	(162.991)	-	Less allowance for impairment losses
Pihak ketiga - neto	34.266.142	27.961.076	29.619.743	-	Third parties - net
Pihak Berelasi (Catatan 29c)					Related Parties (Note 29c)
PT Ade Putra Tanrajang	102.934.930	63.520.163	46.263.492	11.684.211	PT Ade Putra Tanrajang
PT Guruh Putra Bersama	97.945.404	78.777.499	66.872.221	193.141	PT Guruh Putra Bersama
Subtotal	200.880.334	142.297.662	113.135.713	11.877.352	Subtotal
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.781.100)	(1.397.971)	(1.046.706)	(109.384)	Less allowance for impairment losses
Pihak berelasi - neto	199.099.234	140.899.691	112.089.007	11.767.968	Related parties - net
Neto	233.365.376	168.860.767	141.708.750	11.767.968	Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables is as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
Saldo awal	1.513.110	1.209.697	109.384	-	Beginning balance
Pemulihan	(217.792)	(47.853)	(55.430)	-	Reversal
Penyisihan	627.290	351.266	1.155.743	109.384	Provision
Saldo Akhir	1.922.608	1.513.110	1.209.697	109.384	Ending balance

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian umur piutang usaha berdasarkan jangka waktu kredit pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
Belum jatuh tempo	168.111.138	146.277.298	136.100.466	11.877.352	Not yet past due
1 bulan - 3 bulan	49.031.530	24.096.579	6.817.981	-	1 month - 3 months
3 bulan - 6 bulan	18.145.316	-	-	-	3 months - 6 months
6 bulan - 1 tahun	-	-	-	-	6 months - 1 year
Lebih dari 1 tahun	-	-	-	-	Over 1 year
Total	235.287.984	170.373.877	142.918.447	11.877.352	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.922.608)	(1.513.110)	(1.209.697)	(109.384)	Less allowance for impairment losses
Neto	233.365.376	168.860.767	141.708.750	11.767.968	Net

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah Indonesia.

All trade receivables are in Indonesian Rupiah.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

The management of the Group believes that the allowance for impairment loss on trade receivables is adequate to cover any possible losses on uncollectible trade receivables.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 19).

Trade receivables are used as collateral for long-term loans (Note 19).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

a. Aset lancar

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Buana Laksa Abadi	35.609	37.017	-	-	PT Buana Laksa Abadi
PT Swakarya Kencana Service	-	2.941	-	-	PT Swakarya Kencana Service
Total	35.609	39.958	-	-	Total

b. Aset tidak lancar

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
Pihak Berelasi (Catatan 29d)					Related Parties (Note 29d)
PT Cakrawala Langit Sejahtera	72.793	722.988	-	-	PT Cakrawala Langit Sejahtera
PT Bara Milenia Energi	5.999	-	-	-	PT Bara Milenia Energi
Subtotal	78.792	722.988	-	-	Subtotal
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(645)	(6.443)	-	-	Less allowance for impairment loss
Neto	78.147	716.545	-	-	Net

7. OTHER RECEIVABLES

a. Current assets

b. Non-current assets

7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Piutang lain-lain merupakan *reimbursement* atas pembelian *sparepart* yang dibayarkan oleh Perusahaan atas alat berat yang disewa oleh Perusahaan dari pemasok. Selain itu, piutang lain-lain berasal dari penjualan entitas anak kepada pihak lain.

Untuk transaksi atas *reimbursement sparepart* adalah dengan PT Cakrawala Langit Sejahtera, PT Buana Laksa Abadi dan PT Swakarya Kencana Service. Sedangkan untuk transaksi atas penjualan entitas anak adalah dengan PT Bara Milenia Energi.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Saldo awal	6.443	-	-	-	Beginning balance
Pemulihan	(5.798)	-	-	-	Reversal
Penyisihan	-	6.443	-	-	Provision
Saldo Akhir	645	6.443	-	-	Ending balance

Seluruh piutang lain-lain dalam mata uang Rupiah Indonesia.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

7. OTHER RECEIVABLES (Continued)

Other receivables represent reimbursement for sparepart purchases paid by the Company for heavy equipment leased by the Company from the supplier. Additionally, other receivables also from selling the subsidiary to other party.

For the transaction involving sparepart reimbursement represent with PT Cakrawala Langit Sejahtera, PT Buana Laksa Abadi and PT Swakarya Kencana Service. Meanwhile, transaction related to selling the subsidiary represent with PT Bara Milenia Energi.

Movements in the allowance for impairment loss of other receivables is as follows:

All other receivables are in Indonesian Rupiah.

The management of the Group believes that the allowance for impairment loss on other receivables is adequate to cover any possible losses on uncollectible other receivables.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORY

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Bahan bakar	1.797.478	4.621.196	-	-	Fuel

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak ada penyisihan persediaan usang yang diakui karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian yang timbul dari persediaan usang.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen berkeyakinan bahwa risiko yang akan timbul tidak signifikan.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, allowance for inventory obsolescence is not recognized since management believes there is no possible loss arising from the obsolete inventory.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, inventory were not insured because management believes the risks which will arise is not significant.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

8. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat persediaan yang dijadikan sebagai jaminan.

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok pendapatan adalah masing-masing sebesar Rp60,45 miliar dan Rp46,79 miliar untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022, dan Rp79,46 miliar, Rp32,11 miliar dan Rp13,75 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

9. UANG MUKA

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pihak Ketiga					Third Parties
Karyawan	1.683.145	636.406	-	-	Employee
PT Prager Kencana Servis	-	-	2.671.059	1.034.999	PT Prager Kencana Servis
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	479.785	309.733	3.719.431	737.411	Others (each below Rp1 billion)
Subtotal	2.162.930	946.139	6.390.490	1.772.410	Subtotal
Pihak Berelasi (Catatan 29i)					Related Parties (Note 29i)
PT Borneo Petrol Servis	-	8.517.714	3.657.232	3.930.666	PT Borneo Petrol Servis
PT Borneo Logistik Indonesia	-	-	-	6.887.000	PT Borneo Logistik Indonesia
Subtotal	-	8.517.714	3.657.232	10.817.666	Subtotal
Total	2.162.930	9.463.853	10.047.722	12.590.076	Total

Uang muka merupakan uang muka dari Grup terkait pembayaran kepada pihak kontraktor sebagai uang muka kas pada saat operasi dan pembayaran uang muka untuk biaya umum dan jasa kontraktor.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

8. INVENTORY (Continued)

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there was no inventory pledged as collateral.

The cost of inventory recognized as expense and included in cost of revenues amounted to Rp60.45 billion and Rp46.79 billion for the eight-month periods ended August 31, 2023 and 2022, and Rp79.46 billion, Rp32.11 billion and Rp13.75 billion for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

9. ADVANCES

Advances pertains to the advance made by the Group in relation to cash advance paid to contractor during operations and advance payments for general expenses and contractor services.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Asuransi	2.486.646	1.087.865	1.675.775	226.950	Insurance
Security agent	1.003.234	-	-	-	Security agent
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	96.657	32.233	41.122	-	Others (each below Rp1 billion)
Total	3.586.537	1.120.098	1.716.897	226.950	Total

10. PREPAID EXPENSES

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

11. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,		
		2022	2021	2020
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	534.988	-	-	-
Dolar AS				
The Bank of New York Mellon Corporation	5.954.172	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.324	-	-	-
Total	6.503.484	-	-	-

Dana di bank yang dibatasi penggunaannya digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 19).

11. RESTRICTED FUND

Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
US Dollar	
The Bank of New York Mellon Corporation	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Total	

Restricted fund in banks used as collateral for long-term loans (Note 19).

12. ASET HAK-GUNA

Grup menyewa beberapa alat berat yang memiliki masa sewa lebih dari dua (2) tahun sampai dengan tiga (3) tahun.

Pada tahun 2023, MCT, Entitas Anak, menyewa tanah seluas 23.264 meter persegi dengan jangka waktu dua puluh (20) tahun (Catatan 32c).

Aset hak-guna pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

12. RIGHT-OF-USE ASSETS

The Group leases several heavy equipment with the lease terms ranging from more than two (2) years up to three (3) years.

In 2023, MCT, the Subsidiary, leased land covering 23,264 square meters with term of twenty (20) years (Note 32c).

Right-of-use assets as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	31 Agustus/ August 31, 2023	
Biaya Perolehan				Acquisition Costs
Alat berat	29.840.325	-	29.840.325	Heavy equipment
Tanah	-	33.321.494	33.321.494	Land
Subtotal	29.840.325	33.321.494	63.161.819	Subtotal
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Alat berat	19.995.652	3.763.665	23.759.317	Heavy equipment
Tanah	-	833.037	833.037	Land
Subtotal	19.995.652	4.596.702	24.592.354	Subtotal
Jumlah Tercatat	9.844.673		38.569.465	Carrying Amounts

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET HAK-GUNA (Lanjutan)

12. RIGHT-OF-USE ASSETS (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Alat berat	29.840.325	-	29.840.325	Heavy equipment
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Alat berat	11.124.196	8.871.456	19.995.652	Heavy equipment
Jumlah Tercatat	18.716.129		9.844.673	Carrying Amounts

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Alat berat	12.903.831	16.936.494	29.840.325	Heavy equipment
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Alat berat	3.225.958	7.898.238	11.124.196	Heavy equipment
Jumlah Tercatat	9.677.873		18.716.129	Carrying Amounts

	1 Januari/ January 1, 2020	Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK No. 73/ Adjustment upon Application of PSAK No. 73	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2020	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Alat berat	-	12.903.831	-	12.903.831	Heavy equipment
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Alat berat	-	-	3.225.958	3.225.958	Heavy equipment
Jumlah Tercatat	-			9.677.873	Carrying Amount

Beban penyusutan atas aset hak-guna dibebankan
pada beban pokok pendapatan (Catatan 25).

Depreciation expense of right-of-use assets is
charged to cost of revenues (Note 25).

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Agustus/ August 31, 2023
Biaya Perolehan				
Tanah	46.092.397	-	-	46.092.397
Bangunan	2.899.099	-	-	2.899.099
Jalan <i>hauling</i>	9.318.600	-	-	9.318.600
Dermaga dan penyimpanan	93.936.228	-	583.490	94.519.718
Alat berat	171.029.117	294.059	-	171.323.176
Kapal tongkang	138.106.667	108.470.218	-	246.576.885
Kapal tunda	17.905.000	2.106.579	-	20.011.579
Kapal terapung	-	182.488.250	-	182.488.250
Kendaraan	36.566	-	-	36.566
Perlengkapan dan peralatan	896.630	557.034	-	1.453.664
Subtotal	480.220.304	293.916.140	583.490	774.719.934
Aset dalam Pengerjaan				
Alat berat, dermaga dan penyimpanan	354.005	7.714.256	(583.490)	7.484.771
Total Biaya Perolehan	480.574.309	301.630.396	-	782.204.705
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	385.001	193.273	-	578.274
Jalan <i>hauling</i>	6.173.467	310.620	-	6.484.087
Dermaga dan penyimpanan	28.026.552	3.147.284	-	31.173.836
Alat berat	40.686.002	11.125.056	-	51.811.058
Kapal tongkang	20.551.044	4.798.844	-	25.349.888
Kapal tunda	2.986.668	1.193.667	-	4.180.335
Kapal terapung	-	2.851.379	-	2.851.379
Kendaraan	5.333	3.047	-	8.380
Perlengkapan dan peralatan	284.886	185.926	-	470.812
Total Akumulasi Penyusutan	99.098.953	23.809.096	-	122.908.049
Jumlah Tercatat	381.475.356			659.296.656

13. FIXED ASSETS

Acquisition Costs
Land
Building
Hauling road
Jetty and stockpile
Heavy equipment
Barge
Tugboat
Floating transhipper vessel
Transportation
Tools and equipment
Subtotal

Asset under Construction
Heavy equipment, jetty and
stockpile
Total Acquisition Costs

Accumulated Depreciation
Building
Hauling road
Jetty and stockpile
Heavy equipment
Barge
Tugboat
Floating transhipper vessel
Transportation
Tools and equipment
Total Accumulated
Depreciation
Carrying Amounts

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ Desember 31, 2022	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	34.592.397	11.500.000	-	46.092.397	Land
Bangunan	1.590.000	1.309.099	-	2.899.099	Building
Jalan <i>hauling</i>	9.318.600	-	-	9.318.600	Hauling road
Dermaga dan penyimpanan	65.537.862	19.665.855	8.732.511	93.936.228	Jetty and stockpile
Alat berat	159.346.977	5.266.979	6.415.161	171.029.117	Heavy equipment
Kapal tongkang	138.106.667	-	-	138.106.667	Barge
Kapal tunda	14.105.000	3.800.000	-	17.905.000	Tugboat
Kendaraan	36.566	-	-	36.566	Transportation
Perlengkapan dan peralatan	528.695	367.935	-	896.630	Tools and equipment
Subtotal	423.162.764	41.909.868	15.147.672	480.220.304	Subtotal
Aset dalam Pengerjaan					Asset under Construction
Alat berat, dermaga dan penyimpanan	8.732.510	6.769.167	(15.147.672)	354.005	Heavy equipment, jetty and stockpile
Total Biaya Perolehan	431.895.274	48.679.035	-	480.574.309	Total Acquisition Costs
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	106.000	279.001	-	385.001	Building
Jalan <i>hauling</i>	5.707.537	465.930	-	6.173.467	Hauling road
Dermaga dan penyimpanan	24.308.284	3.718.268	-	28.026.552	Jetty and stockpile
Alat berat	24.549.505	16.136.497	-	40.686.002	Heavy equipment
Kapal tongkang	13.645.711	6.905.333	-	20.551.044	Barge
Kapal tunda	1.269.500	1.717.168	-	2.986.668	Tugboat
Kendaraan	762	4.571	-	5.333	Transportation
Perlengkapan dan peralatan	105.932	178.954	-	284.886	Tools and equipment
Total Akumulasi Penyusutan	69.693.231	29.405.722	-	99.098.953	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	362.202.043			381.475.356	Carrying Amounts
	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ Desember 31, 2021	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	34.592.397	-	-	34.592.397	Land
Bangunan	-	1.590.000	-	1.590.000	Building
Jalan <i>hauling</i>	9.318.600	-	-	9.318.600	Hauling road
Dermaga dan penyimpanan	62.250.255	3.287.607	-	65.537.862	Jetty and stockpile
Alat berat	77.470.506	26.487.800	55.388.671	159.346.977	Heavy equipment
Kapal tongkang	138.106.667	-	-	138.106.667	Barge
Kapal tunda	5.105.000	9.000.000	-	14.105.000	Tugboat
Kendaraan	-	36.566	-	36.566	Transportation
Perlengkapan dan peralatan	205.473	323.222	-	528.695	Tools and equipment
Subtotal	327.048.898	40.725.195	55.388.671	423.162.764	Subtotal
Aset dalam Pengerjaan					Asset under Construction
Alat berat, dermaga dan penyimpanan	51.736.493	12.384.688	(55.388.671)	8.732.510	Heavy equipment, jetty and stockpile
Total Biaya Perolehan	378.785.391	53.109.883	-	431.895.274	Total Acquisition Costs

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ Desember 31, 2021	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	-	106.000	-	106.000	Building
Jalan <i>hauling</i>	5.241.607	465.930	-	5.707.537	Hauling road
Dermaga dan penyimpanan	21.195.771	3.112.513	-	24.308.284	Jetty and stockpile
Alat berat	10.639.615	13.909.890	-	24.549.505	Heavy equipment
Kapal tongkang	6.740.378	6.905.333	-	13.645.711	Barge
Kapal tunda	319.000	950.500	-	1.269.500	Tugboat
Kendaraan	-	762	-	762	Transportation
Perlengkapan dan peralatan	24.662	81.270	-	105.932	Tools and equipment
Total Akumulasi Penyusutan	44.161.033	25.532.198	-	69.693.231	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	334.624.358			362.202.043	Carrying Amounts
	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ Desember 31, 2020	
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Tanah	34.592.397	-	-	34.592.397	Land
Jalan <i>hauling</i>	9.318.600	-	-	9.318.600	Hauling road
Dermaga dan penyimpanan	62.250.255	-	-	62.250.255	Jetty and stockpile
Alat berat	21.837.513	55.632.993	-	77.470.506	Heavy equipment
Kapal tongkang	37.489.164	100.617.503	-	138.106.667	Barge
Kapal tunda	1.705.000	3.400.000	-	5.105.000	Tugboat
Perlengkapan dan peralatan	-	205.473	-	205.473	Tools and equipment
Subtotal	167.192.929	159.855.969	-	327.048.898	Subtotal
Aset dalam Pengerjaan					Asset under Construction
Alat berat, dermaga dan penyimpanan	12.339.313	39.397.180	-	51.736.493	Heavy equipment, jetty and stockpile
Total Biaya Perolehan	179.532.242	199.253.149	-	378.785.391	Total Acquisition Costs
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Jalan <i>hauling</i>	4.775.677	465.930	-	5.241.607	Hauling road
Dermaga dan penyimpanan	18.083.258	3.112.513	-	21.195.771	Jetty and stockpile
Alat berat	8.139.709	2.499.906	-	10.639.615	Heavy equipment
Kapal tongkang	312.410	6.427.968	-	6.740.378	Barge
Kapal tunda	41.833	277.167	-	319.000	Tugboat
Perlengkapan dan peralatan	-	24.662	-	24.662	Tools and equipment
Total Akumulasi Penyusutan	31.352.887	12.808.146	-	44.161.033	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	148.179.355			334.624.358	Carrying Amounts

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

The depreciation expense is charged as follows:

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Beban pokok pendapatan (Catatan 25)	23.620.123	19.268.589	29.222.197	25.450.166	12.783.484	Cost of revenues (Note 25)
Beban usaha (Catatan 26)	188.973	111.647	183.525	82.032	24.662	Operating expenses (Note 26)
Total	23.809.096	19.380.236	29.405.722	25.532.198	12.808.146	Total

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Rincian aset dalam pengerjaan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian (%)	31 Agustus/August 31, 2023			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Percentage of Completion (%)
	Dermaga dan penyimpanan/ Jetty and stockpile	Alat berat/ Heavy equipment	Total		
0 - 50	-	-	-	-	0 - 50
51 - 75	-	-	-	-	51 - 75
76 - 100	7.239.171	245.600	7.484.771	2023	76 - 100
Total	7.239.171	245.600	7.484.771		Total

Persentase Penyelesaian (%)	31 Desember/December 31, 2022			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Percentage of Completion (%)
	Dermaga dan penyimpanan/ Jetty and stockpile	Alat berat/ Heavy equipment	Total		
0 - 50	354.005	-	354.005	2023	0 - 50
51 - 75	-	-	-	-	51 - 75
76 - 100	-	-	-	-	76 - 100
Total	354.005	-	354.005		Total

Persentase Penyelesaian (%)	31 Desember/December 31, 2021			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Percentage of Completion (%)
	Dermaga dan penyimpanan/ Jetty and stockpile	Alat berat/ Heavy equipment	Total		
0 - 50	-	-	-	-	0 - 50
51 - 75	8.732.510	-	8.732.510	2022	51 - 75
76 - 100	-	-	-	-	76 - 100
Total	8.732.510	-	8.732.510		Total

Persentase Penyelesaian (%)	31 Desember/December 31, 2020			Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Percentage of Completion (%)
	Dermaga dan penyimpanan/ Jetty and stockpile	Alat berat/ Heavy equipment	Total		
0 - 50	-	1.560.515	1.560.515	2021	0 - 50
51 - 75	-	-	-	-	51 - 75
76 - 100	-	50.175.978	50.175.978	2021	76 - 100
Total	-	51.736.493	51.736.493		Total

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada hambatan yang dapat mengganggu penyelesaian atas aset dalam pengerjaan tersebut.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

The management believes that there are no obstacles that could interfere with the completion of assets under construction.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no temporarily idle fixed assets and fixed assets retired from active use.

Management has reviewed the estimated economic lives, methods of depreciation and residual values at the end of the reporting period.

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, jumlah tercatat aset tetap bruto yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp7,52 miliar.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap.

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dari produk asuransi dari PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah, PT Asuransi Etiqa International, Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Tri Pakarta dan PT Lippo General Insurance Tbk dengan fasilitas broker asuransi dari PT Talisman Insurance Brokers, dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp606,53 miliar, Rp381,04 miliar, Rp236,95 miliar dan Rp162,19 miliar masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Berdasarkan Akta Jual Beli Kapal No. 20 oleh notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., tanggal 9 Juni 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Pasifik Lestari Bersaudara ("PLB") untuk membeli satu (1) unit kapal terapung dan bagian-bagiannya seharga USD12,25 juta (setara dengan Rp182,49 miliar).

Perusahaan melakukan pinjaman dengan Vikasa Global Fund PCC dan PT Ancara Transshipment Services selaku pihak berelasi untuk membayar PLB atas satu (1) unit kapal terapung (Catatan 29h dan 32b).

Pada tanggal 28 Agustus 2023, Perusahaan mengeluarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Sirkuler") yang menyetujui transaksi atas pembelian lima belas (15) kapal dari PT Borneo Logistik Indonesia ("BLI") dengan rincian sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS (Continued)

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the gross carrying amount of fully depreciated fixed assets that are being used amounted to Rp7.52 billion.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the management believes that there is no indication of impairment on the fixed assets.

Fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies the insurance products of PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah, PT Asuransi Etiqa International, Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Tri Pakarta and PT Lippo General Insurance Tbk with insurance broker facilities provided by PT Talisman Insurance Brokers, with total sum insured being Rp606.53 billion, Rp381.04 billion, Rp236.95 billion and Rp162.19 billion as of August 31 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

Based on Sale and Purchase Deed No. 20 by notary Darmawan Tjoa, S.H., S.E., dated June 9, 2023, the Company entered into an agreement with PT Pasifik Lestari Bersaudara ("PLB") to buy one (1) unit of floating transhipper vessel and its parts amounted to USD12.25 million (equivalent to Rp182.49 billion).

The Company entered into a borrowing agreement with Vikasa Global Fund PCC and PT Ancara Transshipment Services as a related party to pay PLB for one (1) unit of floating transhipper vessel (Notes 29h and 32b).

On August 28, 2023, the Company issued Circular Resolution In Lieu of the Extraordinary General meeting of Shareholders ("Circular") approving transaction of purchase of fifteen (15) vessels from PT Borneo Logistik Indonesia ("BLI") with the details as follow:

13. ASET TETAP (Lanjutan)

13. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo/ Amount	
<u>Kapal tongkang</u>		<u>Barges</u>
BLI 1801	6.000.000.000	BLI 1801
BLI 1802	6.000.000.000	BLI 1802
BLI 1803	6.000.000.000	BLI 1803
BLI 1804	6.000.000.000	BLI 1804
BLI 1805	6.000.000.000	BLI 1805
BLI 1806	6.000.000.000	BLI 1806
BLI 1807	6.000.000.000	BLI 1807
BLI 1808	6.000.000.000	BLI 1808
BLI 1809	6.000.000.000	BLI 1809
BLI 1810	6.000.000.000	BLI 1810
BLI 1811	12.517.804.500	BLI 1811
BLI 1812	12.517.804.500	BLI 1812
BLI 1813	8.564.062.500	BLI 1813
BLI 1814	5.793.750.000	BLI 1814
<u>Kapal tunda</u>		<u>Tugboat</u>
BLI 01	2.106.578.500	BLI 01

Pada tanggal 28 Agustus 2023, berdasarkan akta Jual Beli Kapal No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 serta Perjanjian Induk Jual Beli Kapal, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan BLI untuk membeli lima belas (15) kapal sebesar Rp101,50 miliar yang terdiri dari satu (1) unit kapal tunda, dua belas (12) unit kapal tongkang dan dua (2) unit kapal tongkang yang masih dalam proses pengerjaan dari BLI pada saat laporan ini diterbitkan.

On August 28, 2023, based on deeds for Vessel Sale and Purchase No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30 and Master Agreement for Vessel Sale and Purchase, the Company entered into agreement with BLI to buy in total of fifteen (15) vessels amounting to Rp101.50 billion consisted of one (1) unit of tugboat, twelve (12) units of barge and two (2) units of barge which are still under construction from BLI up until this report issued.

Pada tanggal 28 Agustus 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian novasi dengan PT Bandar Abadi ("Builder") dan BLI untuk pengerjaan empat (4) kapal tongkang senilai Rp39,39 miliar yang disebutkan dalam Perjanjian Induk Jual Beli Kapal yang mana, pada tanggal novasi dibuat, dua (2) dari empat (4) kapal tongkang sudah selesai dikerjakan. Novasi ini menggantikan Kontrak Pembuatan Kapal antara Builder dengan BLI pada tanggal 22 November 2022.

On August 28, 2023, the Company entered into a novation agreement with PT Bandar Abadi ("Builder") and BLI for construction of four (4) barges amounted to Rp39.39 billion as mentioned in Master Agreement for Vessels Sale and Purchase which on the novation date, two (2) out of four (4) barges had already been completed. This novation superseded the Shipbuilding Contract between Builder and BLI dated November 22, 2022.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Perusahaan melegalisasi keputusan yang disebutkan dalam Sirkuler melalui Akta No. 32 yang berkaitan dengan penerbitan saham baru sebesar Rp8,72 miliar atau 8.720 lembar saham sebagai kompensasi utang Perusahaan atas pembelian lima belas (15) unit kapal. Dengan ini, BLI dicatat sebagai salah satu pemegang saham dari Perusahaan (Catatan 22).

On August 29, 2023, the Company legalized the decision mentioned in the Circular through Deed No. 32 pertaining to issuance of new shares amounted to Rp8.72 billion or 8,720 shares as compensation of the Company payable for purchasing of fifteen (15) units of vessel. Hence, BLI recorded as one of the shareholders of the Company (Note 22).

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, aset tetap Perusahaan berupa dua puluh lima (25) kapal tunda, dua puluh (20) kapal tongkang dan satu (1) kapal derek digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dengan OCP Asia (Singapore) Pte. Limited (Catatan 19).

Pada tanggal 31 Agustus 2023, aset tetap PT Mahakam Coal Terminal, Entitas Anak, berupa tanah seluas 31,041 Ha, bangunan, alat berat dan dermaga digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dengan Indonesia Eximbank (Catatan 19).

14. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Akun ini merupakan uang muka atas pembelian aset tetap berupa kapal tongkang, kapal tunda dan alat berat kepada pihak ketiga. Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, uang muka pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp73,60 miliar, Rp19,92 miliar, Rp5,60 miliar dan Rp14,75 miliar.

15. GOODWILL

Berdasarkan Akta No.7 tanggal 19 September 2019, Perusahaan melakukan akuisisi saham PT Mahakam Coal Terminal (MCT) dari pemegang saham sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herly, Ariawan & Rekan tanggal 4 Oktober 2019, nilai wajar atas aset dan liabilitas MCT yang teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

**Nilai Wajar Diakui
pada Akuisisi/
Fair Value Recognized
on Acquisition**

Aset

Kas dan setara kas	231.435
Pajak dibayar dimuka	705.325
Biaya dibayar dimuka	2.761.931
Aset tetap - neto	86.830.532
Aset tidak lancar lainnya	2.667.500
Total Asset	93.196.723

Assets

Cash and cash equivalent
Prepaid tax
Prepaid expenses
Fixed assets - net
Other non-current assets
Total Assets

13. FIXED ASSETS (Continued)

As of August 31, 2023, the Company's fixed assets consisting of twenty five (25) tugboats, twenty (20) barges and one (1) floating crane are pledged as collateral for loans with OCP Asia (Singapore) Pte. Limited (Notes 19).

As of August 31, 2023, PT Mahakam Coal Terminal, the Subsidiary's fixed assets consisting of 31.041 Ha of land, building, heavy equipment and jetty are pledged as collateral for loans with Indonesia Eximbank (Note 19).

14. ADVANCES FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS

This account pertains to advances payments for purchase of fixed assets in the form of barge, tugboat and heavy equipment to third parties. As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, advances for purchase of fixed assets amounted to Rp73.60 billion, Rp19.92 billion, Rp5.60 billion and Rp14.75 billion, respectively.

15. GOODWILL

Based on Deed No.7 dated September 19, 2019, the Company acquired the shares of PT Mahakam Coal Terminal (MCT) from the previous shareholder.

Based on the result of the independent appraisal by Public Appraisal Service Office (KJPP) Herly, Ariawan & Rekan dated October 4, 2019, the fair values of the identified assets and liabilities of MCT at the acquisition date are as follows:

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)

15. GOODWILL (Lanjutan)

15. GOODWILL (Continued)

	Nilai Wajar Diakui pada Akuisisi/ Fair Value Recognized on Acquisition	
Liabilitas		Liabilities
Utang usaha	10.760.305	Trade payables
Utang pajak	738.376	Tax payable
Utang lain-lain	106.699	Other payable
Pinjaman	2.924.289	Loans
Total Liabilitas	14.529.669	Total Liabilities
Total nilai wajar aset neto teridentifikasi	78.667.054	Total identifiable net assets at fair values
Nilai wajar kepentingan nonpengendali	23.600.116	Fair value of non-controlling interest
Goodwill	7.706.340	Goodwill
Nilai wajar imbalan yang dibayarkan	62.773.278	Fair value of consideration paid

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas goodwill karena jumlah terpulihkan atas goodwill lebih tinggi dari sisa jumlah tercatatnya.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the management of the Group believes there has been no indication of decline in value of goodwill since the recoverable amount of goodwill is higher than the remaining carrying amount.

16. UTANG USAHA

16. TRADE PAYABLES

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Citra Belayan	9.945.487	9.945.487	-	-	PT Citra Belayan
Allen & Overy LLP	7.944.075	-	-	-	Allen & Overy LLP
PT Bandar Abadi	6.483.393	-	-	-	PT Bandar Abadi
Mishcon de Reya LLP	5.206.018	-	-	-	Mishcon de Reya LLP
PT Seratah Borneo Abadi	3.106.655	3.745.714	6.271.266	6.287.306	PT Seratah Borneo Abadi
PT Mitra Seratah Abadi	1.991.359	-	-	-	PT Mitra Seratah Abadi
CV Sevia	1.810.915	1.810.915	-	-	CV Sevia
PT Karya Bersama Abadi jaya	1.256.000	-	-	-	PT Karya Bersama Abadi jaya
The Bank of New York Mellon Corporation	1.203.881	-	-	-	The Bank of New York Mellon Corporation
PT Buana Laksa Abadi	987.287	1.398.435	533.645	801.706	PT Buana Laksa Abadi
PT Swakarya Kencana Services	388.146	392.683	1.571.358	1.578.571	PT Swakarya Kencana Services
Gimbal Pte Ltd	120.022	121.066	119.657	1.992.423	Gimbal Pte Ltd
PT Pelayaran Segara Niaga Utama	8.478	1.006.737	1.763.800	-	PT Pelayaran Segara Niaga Utama
PT Permata Lintas Abadi	-	138.726	149.226	2.805.181	PT Permata Lintas Abadi
PT Prager Kencana Servis	-	81.615	187.972	1.110.605	PT Prager Kencana Servis
Pelita Samudera Shipping	-	-	1.125.315	3.044.405	Pelita Samudera Shipping
PT ASL Shipyard	-	-	-	3.646.251	PT ASL Shipyard
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	3.913.305	3.462.724	4.740.308	1.920.741	Others (each below Rp1 billion)
Subtotal	44.365.021	22.104.102	16.462.547	23.187.189	Subtotal

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

16. UTANG USAHA (Lanjutan)

16. TRADE PAYABLES (Continued)

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pihak Berelasi (Catatan 29f)					Related Parties (Note 29f)
PT Borneo Logistik Indonesia	20.101.104	5.079.537	4.593.034	-	PT Borneo Logistik Indonesia
PT Borneo Petrol Servis	10.253.061	-	258.543	1.178.560	PT Borneo Petrol Servis
PT Cakrawala Langit Sejahtera	333.667	34.625	-	-	PT Cakrawala Langit Sejahtera
Subtotal	30.687.832	5.114.162	4.851.577	1.178.560	Subtotal
Total	75.052.853	27.218.264	21.314.124	24.365.749	Total

Seluruh utang usaha tidak dikenakan bunga.

All trade payables are not bearing interest.

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of aging schedule of trade payables is as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo	46.173.229	8.905.761	14.279.880	14.251.779	Not yet past due
1 bulan - 3 bulan	12.207.163	2.941.614	1.095.421	3.536.959	1 month - 3 months
3 bulan - 6 bulan	1.404.801	102.228	527.127	867.224	3 months - 6 months
6 bulan - 1 tahun	118.858	13.064.274	534.531	4.229.670	6 months - 1 year
Lebih dari 1 tahun	15.148.802	2.204.387	4.877.165	1.480.117	Over 1 year
Total	75.052.853	27.218.264	21.314.124	24.365.749	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies is as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Rupiah Indonesia	59.900.839	27.097.198	21.191.742	22.370.634	Indonesian Rupiah
Dolar AS	15.152.014	121.066	122.382	1.995.115	US Dollar
Total	75.052.853	27.218.264	21.314.124	24.365.749	Total

Pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang usaha.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no guarantee provided by the Group for the trade payables.

17. BEBAN AKRUAL

17. ACCRUED EXPENSES

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Operasional	1.638.232	3.638.356	553.565	205.900	Operations
Jasa bongkar muat	1.335.139	1.362.965	1.556.480	1.074.559	Loading unloading service
Biaya pengiriman	1.084.399	2.593.646	3.911.454	8.431.358	Freight cost
Jasa profesional	721.241	1.316.459	1.048.229	375.000	Professional fee
Total	4.779.011	8.911.426	7.069.728	10.086.817	Total

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

18. UTANG LAIN-LAIN

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,		
		2022	2021	2020
Pihak Ketiga				
Kas Negara	1.926.057	122.654	-	-
Rwood Resources DMCC	-	3.184.694	2.912.422	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	74.579	55.209	69.227	66.712
Subtotal	2.000.636	3.362.557	2.981.649	66.712
Pihak Berelasi (Catatan 29g)				
PT Cakrawala Langit Sejahtera	-	20.745	80.574	93.982
PT Guruh Putra Bersama	-	-	-	7.209.828
Subtotal	-	20.745	80.574	7.303.810
Total	2.000.636	3.383.302	3.062.223	7.370.522

Third Parties
Kas Negara
Rwood Resources DMCC
Others (each below Rp1 billion)
Subtotal

Related Parties (Note 29g)
PT Cakrawala Langit Sejahtera
PT Guruh Putra Bersama
Subtotal

Total

Utang lain-lain merupakan utang atas pinjaman, sewa kantor, Surat Tagihan Pajak (STP) dan uang muka dari pelanggan.

Kas negara adalah utang pajak atas STP yang diterima oleh Perusahaan.

Seluruh utang lain-lain tidak dikenakan bunga.

Tidak terdapat utang lain-lain dari lembaga keuangan konvensional.

Other payables represents payable of loan, office rental, Tax Collection Letter (STP) and advance from customer.

Kas negara represents tax payable of STP that received by the Company.

All other payables are not bearing interest.

There is no other payables from conventional financial institutions.

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,		
		2022	2021	2020
Pihak Ketiga				
OCP Asia (Singapore) Pte. Limited	935.302.589	879.099.889	814.764.386	776.639.530
Indonesia Eximbank	30.623.549	-	-	-
Liebherr - Export AG	17.778.052	26.371.316	41.133.391	28.945.641
PT Multicrane Perkasa	1.515.062	6.020.512	11.364.870	17.921.255
Total	985.219.252	911.491.717	867.262.647	823.506.426
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(174.107.263)	(902.140.545)	(248.039.768)	(104.142.433)
Bagian Jangka Panjang	811.111.989	9.351.172	619.222.879	719.363.993

Third Parties
OCP Asia (Singapore) Pte.
Limited
Indonesia Eximbank
Liebherr - Export AG
PT Multicrane Perkasa

Total

Current maturities

Long-term Portion

Rincian pinjaman jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of long-term loans based on currencies is as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,		
		2022	2021	2020
Dolar AS	935.302.589	879.099.889	814.764.386	776.639.530
Rupiah Indonesia	30.623.549	-	-	-
Euro Eropa	19.293.114	32.391.828	52.498.261	46.866.896
Total	985.219.252	911.491.717	867.262.647	823.506.426

US Dollar
Indonesian Rupiah
European Euro

Total

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

OCP Asia (Singapore) Pte. Limited

Pada tanggal 18 Mei 2020, PT Mahakam Coal Terminal ("MCT"), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Kredit dengan OCP Asia (Singapore) Pte. Limited ("OCP") dengan fasilitas pinjaman sebesar USD49,00 juta. Fasilitas tersebut (*The Loan*) wajib dibayar penuh hingga bulan ke 36 dimulai dari tanggal Penggunaan Pertama fasilitas ini sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit. Pinjaman ini memiliki bunga tahunan sebesar 20% yang akan bertambah dari hari ke hari selama pinjaman masih terutang dan dibayarkan secara tunggakan pada setiap tanggal bunga. Fasilitas kredit ini telah dilunasi oleh MCT.

Pada tanggal 14 Juni 2023, MCT memiliki fasilitas kredit dari OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited sebesar USD30,38 juta dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebesar USD31,62 juta dengan total keseluruhan sebesar USD62,00 juta. Fasilitas ini dijamin dengan aset-aset berupa kapal-kapal milik Perusahaan, surat kuasa memasang hipotek atas kapal-kapal milik Perusahaan, surat kuasa memasang hipotek atas *transhipper* milik Perusahaan, gadai saham (Ancara Resources Limited, PT Ancara Logistics Indonesia, PT Leap Forward Resources Ltd, PT Leap Coal Indonesia, PT Bara Milenia Energi, PT Kutai Bara Nusantara, PT Tribara Daya Global, PT Guruh Putra Bersama, PT Ade Putra Tanrajeng), gadai rekening bank, jaminan fidusia atas piutang Perusahaan dan tanah serta jaminan korporasi dari Ancara Resources Limited dan RWood Resources DMCC (Catatan 6, 11, 13 dan 22).

Klausal ikrar negatif dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap perubahan saham (penerbitan, pembelian kembali, pembayaran kembali, pembatalan, penukaran dan penerbitan hak suara), subordinasi atas saham, pembayaran dividen, hipotek atas kapal-kapal dan kepemilikan saham atas PT Graha Adika Niaga and Solomed Capital Pte. Ltd.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman dari OCP masing-masing sebesar Rp935,30 miliar, Rp879,10 miliar, Rp814,76 miliar dan Rp776,64 miliar.

19. LONG-TERM LOANS (Continued)

OCP Asia (Singapore) Pte. Limited

On May 18, 2020, PT Mahakam Coal Terminal ("MCT"), the Subsidiary, entered into Credit Agreement with OCP Asia (Singapore) Pte. Limited ("OCP") for loan facility amounting to USD49.00 million. The facility (*The Loan*) is repayable in full on the date falling 36 months from the First Utilisation Date of the facility as defined in the Credit Agreement. The Loan bears an annual interest rate of 20% which will accrue from day to day while the Loan is still outstanding and is payable in arrears on each interest date. This credit facility has been fully paid by MCT.

On June 14, 2023, MCT has a credit from OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited to USD30.38 million and OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited to USD31.62 million with all the total amounting to USD62.00 million. These facilities are guaranteed by assets in the form of vessels belonging to the Company, power of attorney to conclude hypothec over vessels owned by the Company, power of attorney to conclude hypothec over transhipper owned by the Company, pledges of shares (Ancara Resources Limited, PT Ancara Logistics Indonesia, PT Leap Forward Resources Ltd, PT Leap Coal Indonesia, PT Bara Milenia Energi, PT Kutai Bara Nusantara, PT Tribara Daya Global, PT Guruh Putra Bersama, PT Ade Putra Tanrajeng), pledges of bank account, fiducia security over the Company's receivables and land and corporate guarantees from Ancara Resources Limited and RWood Resources DMCC (Notes 6, 11, 13 and 22).

Negative pledge in these facilities contains limitation on changes of shares (issuance, repurchase, repayment, cancellation, redemption and issuance of any voting capital), subordination of shares, payment of dividend, hypothecs over vessels and ownership of PT Graha Adika Niaga and Solomed Capital Pte. Ltd.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the outstanding balances of loans from OCP amounted to Rp935.30 billion, Rp879.10 billion, Rp814.76 billion and Rp776.64 billion, respectively.

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Indonesia Eximbank

Berdasarkan Akta Pembaharuan Utang (Novasi) No. 17 tanggal 9 Februari 2023 ("Akta Novasi 17/23"), diatur bahwa adanya pergantian debitur dari PT Palaran Jasa Utama sebagai Debitur Lama (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Novasi 17/23), menjadi Perusahaan sebagai Debitur Baru (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Novasi 17/23). Akta Novasi 17/23 ini ditandatangani oleh Perusahaan berkaitan dengan transaksi Perusahaan dengan Hoenardy Boentario.

Sebagai kelanjutan dari Akta Novasi 17/23, Perusahaan masuk dan menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Aplofend No. 18 tanggal 9 Februari 2023, yang mengatur perjanjian dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Aplofend tanpa pencairan dana sebesar Rp34,67 miliar yang berlaku selama enam puluh (60) bulan dengan tingkat bunga 7% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, dermaga dan alat berat (Catatan 13) serta jaminan perusahaan dan perseorangan dari PT Harapan Borneo International dan Honardy Boentario.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada Indonesia Eximbank atau dibiayai oleh Indonesia Eximbank kepada pihak lain dan membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman dari Eximbank masing-masing sebesar Rp30,62 miliar, nihil, nihil dan nihil.

Liebherr - Export AG

Berdasarkan Offer Letter No. PR734-708173/20 tanggal 4 April 2020, No. LH60-748102/20 tanggal 4 April 2020, No. R920-806656/20 tanggal 20 November 2020 dan No. R930-806635/20 tanggal 20 November 2020, MCT, Entitas Anak, memiliki pinjaman untuk pembelian alat berat.

Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran per kuartal selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 4,5%.

19. LONG-TERM LOANS (Continued)

Indonesia Eximbank

Based on the Deeds of Renewal Loan (Novation) No. 17 dated February 9, 2023, ("Novation Deed 17/23"), it was regulated about the change of debtor from PT Palaran Jasa Utama as Old Debtor (as defined in Novation Deed 17/23), which make the Company as New Debtor (as defined in Novation Deed 17/23). This Novation Deed 17/23 is signed by the Company in which related to the Company's transaction with Honardy Boentario.

As continuation of Novation Deed 17/23, the Company entered and signed Deed of Credit Working Capital Aplofend No. 18 dated February 9, 2023, which regulated the agreement with Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") regarding Credit Working Capital Export Aplofend Facility without liquidation of fund amounting to Rp34.67 billion for sixty (60) months with interest of 7% per annum. This facility is secured by certain assets in the form of land, building, jetty and heavy equipment (Note 13) and corporate and personal guarantee from PT Harapan Borneo International and Honardy Boentario.

The terms of this facility contain restrictions on the Company which include, among others, selling, renting or pledging the Company's assets which have been pledged to the Indonesia Eximbank or financed by the Indonesia Eximbank to other parties and dissolved the Company and asked to be declared bankrupt.

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the outstanding balances of loans from Eximbank amounted to Rp30.62 billion, nil, nil, and nil, respectively.

Liebherr - Export AG

Based on Offer Letter No. PR734-708173/20 dated April 4, 2020, No. LH60-748102/20 dated April 4, 2020, No. R920-806656/20 dated November 20, 2022 and No. R930-806635/20 dated November 20, 2020, MCT, the Subsidiary, has loan for the purchase of heavy equipment.

The loan is expected to be paid in quarterly installments over a period of 36 months. The loan bears an interest rate of 4.5% per annum.

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman dari Liebherr - Export AG masing-masing sebesar Rp17,78 miliar, Rp26,37 miliar, Rp41,13 miliar dan Rp28,95 miliar.

PT Multicrane Perkasa

Berdasarkan *Offer Letter* No. 047/MCP-KP/MKT/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, No. 048/MCP-KP/MKT/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan No. 051/MCP-KP/MKT/IV/2020 tanggal 4 April 2020, MCT, Entitas Anak, memiliki pinjaman untuk pembelian alat berat.

Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran per kuartal selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 4,5%.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman dari PT Multicrane Perkasa masing-masing sebesar Rp1,52 miliar, Rp6,02 miliar, Rp11,36 miliar dan Rp17,92 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka panjang Grup telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

20. LIABILITAS SEWA

Grup menandatangani perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa peralatan untuk digunakan di *site*. Perjanjian sewa memiliki periode tetap 2 - 3 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan yang disetujui oleh Grup.

Pada tahun 2023, MCT, Entitas Anak, menandatangani perjanjian sewa tanah dengan durasi 20 tahun (Catatan 32c).

Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

19. LONG-TERM LOANS (Continued)

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the outstanding balances of loans from Liebherr - Export AG amounted to Rp17.78 billion, Rp26.37 billion, Rp41.13 billion, and Rp28.95 billion, respectively.

PT Multicrane Perkasa

Based on *Offer Letter* No. 047/MCP-KP/MKT/III/2020 dated March 27, 2020, No. 048/MCP-KP/MKT/III/2020 dated March 27, 2020 and No. 051/MCP-KP/MKT/IV/2020 dated April 4, 2020, MCT, the Subsidiary, has loan for the purchase of heavy equipment.

The loan is expected to be paid in quarterly installments over a period of 36 months. The loan bears an interest rate of 4.5% per annum.

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the outstanding balances of loans from PT Multicrane Perkasa amounted to Rp1.52 billion, Rp6.02 billion, Rp11.36 billion, and Rp17.92 billion, respectively.

The management believes that all long-term loans of the Group has complied with the terms and conditions stipulated in the agreements.

20. LEASE LIABILITIES

The Group entered into lease agreements relating to the rental of equipment for use at the site. The lease agreements have a fixed period of 2 - 3 years, but may have extension options approved by the Group.

In 2023, MCT, the Subsidiary, signed land lease agreement with duration of 20 years (Note 32c).

Future minimum lease payments, together with the present value of the minimum lease payments as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

20. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

20. LEASE LIABILITIES (Continued)

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Kurang dari satu tahun	8.978.008	7.158.183	11.815.338	7.147.500	Less than one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	18.555.740	4.879.970	11.440.749	3.573.750	More than one year up to five years
Lebih dari lima tahun	55.744.444	-	-	-	More than five years
Subtotal	83.278.192	12.038.153	23.256.087	10.721.250	Subtotal
Dikurangi bagian bunga	(42.469.450)	(988.967)	(2.427.704)	(805.882)	Less interest portion
Jumlah tercatat	40.808.742	11.049.186	20.828.383	9.915.368	Carrying amount
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)	(6.370.477)	(13.923.272)	(6.443.878)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	33.067.938	4.678.709	6.905.111	3.471.490	Long-term Portion

Rekonsiliasi atas liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The reconciliation of lease liabilities are as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Total liabilitas sewa pada awal periode	11.049.186	20.828.383	9.915.368	12.903.831	Total lease liabilities at beginning of the period
Bunga liabilitas sewa	2.283.731	1.438.736	1.124.022	585.287	Interest on lease liabilities
Pembayaran	(5.845.669)	(11.217.933)	(7.147.501)	(3.573.750)	Payment
Penambahan aset hak-guna	33.321.494	-	16.936.494	-	Additional right-of-use assets
Subtotal	40.808.742	11.049.186	20.828.383	9.915.368	Subtotal
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)	(6.370.477)	(13.923.272)	(6.443.878)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	33.067.938	4.678.709	6.905.111	3.471.490	Long-term Portion

Grup memiliki liabilitas sewa kepada:

The Group has lease liabilities as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Pihak Ketiga					Third Parties
Saidi	28.494.561	-	-	-	Saidi
Hasipah	4.559.129	-	-	-	Hasipah
PT Prager Kencana Servis	-	-	3.478.751	9.915.368	PT Prager Kencana Servis
Subtotal	33.053.690	-	3.478.751	9.915.368	Subtotal
Pihak Berelasi (Catatan 29)					Related Parties (Note 29)
PT Cakrawala Langit Sejahtera	7.755.052	11.049.186	17.349.632	-	PT Cakrawala Langit
Total	40.808.742	11.049.186	20.828.383	9.915.368	Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)	(6.370.477)	(13.923.272)	(6.443.878)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	33.067.938	4.678.709	6.905.111	3.471.490	Long-term Portion

20. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/August 31,	
	2023	2022
Bunga atas liabilitas sewa (Catatan 27d)	2.283.731	1.050.897
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 12 dan 25)	4.596.702	6.949.049
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek dan bernilai rendah	236.472	259.785

21. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup memiliki program pensiun imbalan pasti yang tidak didanai mencakup seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung oleh aktuaris independen, sebagai berikut:

	Nama Aktuaris/ Actuary Name
31 Agustus 2023	
Perusahaan dan MCT	KKA Indra Catarya Situmeang
31 Desember 2022	
Perusahaan dan MCT	PT Ricky Leonard Jasatama
31 Desember 2021	
Perusahaan dan MCT	PT Ricky Leonard Jasatama

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup belum membuat penyisihan atas liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena manajemen berpendapat bahwa Grup tidak memiliki karyawan yang memenuhi syarat, dimana Grup tidak memiliki karyawan tetap.

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

20. LEASE LIABILITIES (Continued)

Amounts recognized in statements of profit or loss are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	2020
Interest on lease liabilities (Note 27d)	1.438.736	1.124.022	585.287
Depreciation of right-of-use assets (Notes 12 and 25)	8.871.456	7.898.238	3.225.958
Expense relating to short-term leases and low-value assets	366.359	75.434	75.980

21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

The Group has an unfunded defined benefit pension plan covering substantially all of its eligible permanent employees. Post-employment benefits liability as of August 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are calculated by an independent actuary as follows:

	Tanggal Laporan/ Date of Report	
August 31, 2023		
Company and MCT	4 Oktober 2023/ October 4, 2023	
December 31, 2022		
Company and MCT	15 Februari 2023/ February 15, 2023	
December 31, 2021		
Company and MCT	29 Juli 2022/ July 29, 2022	

As of December 31, 2020, the Group has not established a provision for post-employment benefit liabilities in accordance with the applicable regulatory requirements because management believes that the Group does not have eligible employees, where the Group did not have any permanent employees.

Post-employment benefits liability are calculated using the "Projected Unit Credit" method with consideration of the following assumptions:

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

21. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

**21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(Continued)**

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022	2021	
Tingkat diskonto	6,70%	7,20%	7,12% - 7,15%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	4,90%	6,00%	Salary increment rate
Tingkat kematian	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV Tahun 2019/ Indonesia Mortality Table (TMI) IV Year 2019	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV Tahun 2019/ Indonesia Mortality Table (TMI) IV Year 2019		Mortality rate
Usia pensiun normal	55 tahun/55 years	55 tahun/55 years		Normal pension age
Tingkat cacat	5% dari Tabel Mortalitas/ 5% from Mortality Table	5% dari Tabel Mortalitas/ 5% from Mortality Table		Disability rate
Tingkat pengunduran dipercepat	7% (sampai dengan usia 40 tahun) dan menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ 7% (until age 40 years) and decreasing linear until 0% on age 55 years	7% (sampai dengan usia 40 tahun) dan menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ 7% (until age 40 years) and decreasing linear until 0% on age 55 years	5% (sampai dengan usia 40 tahun) dan menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun/ 5% (until age 40 years) and decreasing linear until 0% on age 55 years	Accelerated resignation rate

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan adalah
sebagai berikut:

Post-employment benefits liability is as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	1.896.334	1.161.800	327.726	-	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar atas aset program	-	-	-	-	Fair value of plan asset
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.896.334	1.161.800	327.726	-	Post-employment Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai
berikut:

Movements of post-employment benefits liability are
as follows:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022	2021	2020	
Saldo awal	1.161.800	327.726	-	-	Beginning balance
Beban yang diakui ke laba rugi:					Expense recognized in profit or loss:
Biaya jasa lalu	253.800	(22.586)	227.525	-	Past service cost
Biaya jasa kini	459.874	380.759	84.961	-	Current service cost
Biaya bunga	29.308	35.492	1.013	-	Interest cost
Subtotal	742.982	393.665	313.499	-	Subtotal
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:					Remeasurements recognized in other comprehensive income:
Asumsi keuangan	-	(102.736)	-	-	Financial assumptions
Penyesuaian asumsi	(8.448)	543.145	14.227	-	Assumptions adjustments
Subtotal	(8.448)	440.409	14.227	-	Subtotal
Saldo Akhir	1.896.334	1.161.800	327.726	-	Ending Balance

21. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan terkait program imbalan pasti, sebagai berikut:

- (a) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- (b) Tingkat kenaikan gaji
Kewajiban imbalan pasti berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dimana semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (Continued)

The Group is exposed to a number of significant risks related to its defined benefit plans, as follows:

- (a) Changes in discount rate
A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- (b) Salary growth rate
Defined benefits obligation is linked to salary increment rate, whereby the higher salary increment rate will lead to higher liabilities.

The quantitative sensitivity analysis of the defined benefits obligation to the changes in the weighted principal assumptions as of August 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 are as follows:

31 Agustus/August 31, 2023				
Asumsi Keuangan	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Dampak pada liabilitas imbalan pasti pascakerja/ Impact on defined benefit obligation		Financial Assumptions
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(47.343)	55.516	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	54.252	(47.236)	Salary increment rate
31 Desember/December 31, 2022				
Asumsi Keuangan	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Dampak pada liabilitas imbalan pasti pascakerja/ Impact on defined benefit obligation		Financial Assumptions
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(75.975)	58.377	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	87.013	(78.249)	Salary increment rate
31 Desember/December 31, 2021				
Asumsi Keuangan	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Dampak pada liabilitas imbalan pasti pascakerja/ Impact on defined benefit obligation		Financial Assumptions
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(9.271)	10.661	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	10.674	(9.441)	Salary increment rate

21. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan kerja terdiskonto adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021		
Kurang dari 1 tahun	506.412	233.312	209.125	Less than a year
1 sampai 2 tahun	120.297	147.650	18.400	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	-	39.932	24.315	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1.269.625	740.906	75.886	More than 5 years
Total	1.896.334	1.161.800	327.726	Total

21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (Continued)

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefits obligation to principal assumptions, the same method (present value of the defined benefits obligation calculated with the *Projected Unit Credit* method at the end of the reporting period) has been applied.

Methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis has not changed from the previous period.

Expected maturity analysis of discounted employee benefits is as follows:

22. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan saham pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

22. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders and their shareholdings as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 dan 2020 is as follows:

	31 Agustus/August 31, 2023			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Angka Penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Shareholders
Pemegang Saham				
PT Graha Adika Niaga	26.010	43,55	26.010.000	PT Graha Adika Niaga
Solomed Capital Pte. Ltd	24.990	41,85	24.990.000	Solomed Capital Pte. Ltd
PT Borneo Logistik Indonesia	8.720	14,60	8.720.000	PT Borneo Logistik Indonesia
Total	59.720	100,00	59.720.000	Total

22. MODAL SAHAM (Lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (Continued)

31 Desember 2022, 2021 dan/and 2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Angka Penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Shareholders
PT Graha Adika Niaga	26.010	51,00	26.010.000	PT Graha Adika Niaga
Solomed Capital Pte. Ltd	24.990	49,00	24.990.000	Solomed Capital Pte. Ltd
Total	51.000	100,00	51.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 32 Maria Gunarti, S.H., M.Kn., tanggal 29 Agustus 2023 mengenai pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ancara Logistics Indonesia, pemegang saham menyetujui, antara lain, peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp238,88 miliar yang terdiri dari 238.880 lembar saham dengan nilai nominal Rp1,00 juta dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 59.720 lembar saham setara dengan Rp59,72 miliar.

Sebagian dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp8,72 miliar atau 8.720 lembar saham dengan nilai nominal Rp1,00 juta merupakan kompensasi utang Perusahaan sebesar Rp100,50 miliar kepada PT Borneo Logistik Indonesia atas pembelian lima belas (15) unit kapal (Catatan 13).

Selisih antara utang Perusahaan sebesar Rp100,50 miliar dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp8,72 miliar dicatat Perusahaan sebagai tambahan modal disetor (Catatan 23).

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dari OCP Asia (Singapore) Pte. Limited tanggal 14 Juni 2023, MCT, Entitas Anak, menjaminkan saham Perusahaan yang dimiliki oleh PT Graha Adika Niaga (GAN) dan Solomed Capital Pte. Ltd (Solomed) (Catatan 19).

Based on Notarial Deed No. 32 of Maria Gunarti, S.H., M.Kn., dated August 29, 2023, regarding the statement of Circular Resolution in lieu of Extraordinary Shareholders General Meeting of PT Ancara Logistics Indonesia, the shareholders agreed to, among others, increase the authorized capital of the Company to Rp238.88 billion consisting of 238,880 shares with a nominal value of Rp1.00 million and increase the issued and fully paid capital to 59,720 shares equivalent to Rp59.72 billion.

A portion of the issued and fully paid capital having an amount of Rp8.72 billion or 8,720 shares with a nominal value of Rp1,00 million were compensation of the Company payable amounted to Rp100.50 billion to PT Borneo Logistik Indonesia for purchase of fifteen (15) units of vessel (Note 13).

The difference of payable by the Company amounting to Rp100.50 billion against issued and fully paid capital of Rp8.72 billion was recorded as additional paid-in capital (Note 23).

Based on credit agreement with OCP Asia (Singapore) Pte. Limited dated June 14, 2023, MCT, the Subsidiary, pledge the Company's owned by PT Graha Adika Niaga (GAN) and Solomed Capital Pte. Ltd (Solomed) (Note 19).

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor sebesar Rp91,78 miliar merupakan selisih antara utang Perusahaan sebesar Rp100,50 miliar atas pembelian lima belas (15) unit kapal dari PT Borneo Logistik Indonesia (BLI) dengan kompensasi utang Perusahaan yang diterima BLI berupa 8,720 lembar saham atau sebesar Rp8,72 miliar (Catatan 13 dan 22).

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo tambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp91,78 miliar, nihil, nihil dan nihil.

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital amounted to Rp91.78 billion was the difference between the Company payable amounting to Rp100.50 billion for purchase of fifteen (15) units of vessel from PT Borneo Logistik Indonesia (BLI) with the compensation of the Company payable received by BLI in a form of 8.720 shares with value of Rp8.72 billion (Notes 13 and 22).

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, the balances of additional paid-in capital amounted to Rp91.78 billion, nil, nil, and nil, respectively.

24. PENDAPATAN

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pihak Ketiga					
Tongkang batubara	67.093.651	46.679.061	73.368.109	77.051.619	1.858.444
Muatan apung	3.469.807	-	-	-	-
Subtotal	70.563.458	46.679.061	73.368.109	77.051.619	1.858.444
Pihak Berelasi (Catatan 29a)					
Tongkang batubara	410.237.223	244.105.587	433.456.009	389.523.052	33.908.221
Bongkar muat	157.256.105	90.259.250	163.296.265	161.142.260	47.832.258
Muatan apung	24.823.951	-	-	-	-
Subtotal	592.317.279	334.364.837	596.752.274	550.665.312	81.740.479
Total	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923

Third Parties
Coal barging
Floating loading
Subtotal

Related Parties (Note 29a)
Coal barging
Loading unloading
Floating loading
Subtotal

Total

Grup memiliki pendapatan dari:

The Group has revenues from:

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pihak Ketiga					
PT Rwood Resources Indonesia	67.093.651	38.755.694	65.444.742	76.590.935	1.858.444
PT WHS Maritime	3.469.807	-	-	-	-
PT Pelayaran Bahtera Adiguna	-	7.511.896	7.511.896	-	-
PT Prima Trans Jaya	-	411.471	411.471	-	-
PT Sumber Global Energy	-	-	-	460.684	-
Subtotal	70.563.458	46.679.061	73.368.109	77.051.619	1.858.444
Pihak Berelasi					
PT Ade Putra Tanrajeng	430.802.117	209.414.811	369.343.877	361.538.414	63.483.849
PT Guruh Putra Bersama	161.515.162	124.950.026	227.408.397	189.126.898	18.256.630
Subtotal	592.317.279	334.364.837	596.752.274	550.665.312	81.740.479
Total	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923

Third Parties
PT Rwood Resources Indonesia
PT WHS Maritime
PT Pelayaran Bahtera Adiguna
PT Prima Trans Jaya
PT Sumber Global Energy
Subtotal

Related Parties
PT Ade Putra Tanrajeng
PT Guruh Putra Bersama
Subtotal

Total

Pendapatan Grup kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Group's revenues to customers that exceeded 10% of total revenues for the eight-month periods ended August 31, 2023 and 2022, and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

24. PENDAPATAN (Lanjutan)

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
PT Ade Putra Tanrajeng	430.802.117	209.414.811
PT Guruh Putra Bersama	161.515.162	124.950.026

24. REVENUES (Continued)

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
	369.343.877	361.538.414	63.483.849
	227.408.397	189.126.898	18.256.630

PT Ade Putra Tanrajeng
PT Guruh Putra Bersama

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
Biaya pengiriman	161.431.675	87.713.165
Sewa	82.689.335	41.612.506
Bahan bakar	60.445.923	46.788.687
Penyusutan (Catatan 12 dan 13)	28.216.825	26.258.212
Jasa bongkar muat	19.185.897	16.161.296
Pemeliharaan peralatan	14.174.229	16.447.127
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.871.812	147.090
Total	368.015.696	235.128.083

25. COST OF REVENUES

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
	139.611.634	186.382.005	37.600.604
	63.441.662	35.366.200	3.450.700
	79.459.014	32.111.277	13.753.631
	38.093.653	33.348.404	16.009.442
	25.526.022	22.957.504	16.518.165
	22.103.343	12.420.147	1.519.862
	668.666	2.177.279	-
Total	368.903.994	324.762.816	88.852.404

Freight cost
Rental
Fuel
Depreciation (Notes 12 and 13)
Loading/unloading service
Equipment maintenance
Others (each below Rp1 billion)

Pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Purchase to supplier that exceeded 10% of total revenues for the eight-month periods ended August 31, 2023 and 2022, and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
PT Borneo Petrol Servis	58.779.265	46.788.687

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
	79.459.014	32.111.277	13.753.631

PT Borneo Petrol Servis

26. BEBAN USAHA

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
Jasa profesional	20.129.815	1.266.882
Gaji dan tunjangan lainnya	15.141.479	9.113.248
Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi	3.786.234	3.272.447
Asuransi	3.177.066	2.050.805
Sewa dan utilitas	2.538.682	1.468.445
Listrik, air dan komunikasi	1.787.540	1.813.582
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	3.768.496	2.415.468
Total	50.329.312	21.400.877

26. OPERATING EXPENSES

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
	2.755.943	1.821.307	6.944.431
	14.682.864	6.743.603	3.065.248
	5.451.466	4.697.282	1.452.555
	4.636.187	3.628.095	751.266
	3.183.291	630.678	387.492
	3.280.359	1.481.435	192.721
	3.400.083	7.586.753	7.604.374
Total	37.390.193	26.589.153	20.398.087

Professional fees
Salary and other benefits
Corporate Social Responsibility (CSR) and donation
Insurance
Rent and utilities
Electricity, water and communication
Others (each below Rp1 billion)

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

27. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

a. Penghasilan Bunga

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
Penghasilan bunga		
piutang pihak berelasi	81.728.150	91.192.022
Penghasilan bunga bank	210.838	314.083
Total	81.938.988	91.506.105

b. Pajak Final

Pajak final Grup merupakan pajak final atas jasa pelayaran. Pajak final Grup untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5,72 miliar dan Rp3,48 miliar serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6,06 miliar, Rp5,35 miliar dan Rp429,20 juta (Catatan 28c).

c. Beban Pajak

Beban pajak merupakan pembebanan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22, 23 dan 26. Beban pajak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 sebesar Rp21,26 miliar dan Rp11,72 miliar serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp24,43 miliar, Rp15,69 miliar dan Rp2,19 miliar.

d. Beban Keuangan

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
Bunga pinjaman jangka panjang	122.907.702	114.778.377
Bunga liabilitas sewa	2.283.731	1.050.897
Bunga utang pihak berelasi	1.126.996	1.115.517
Total	126.318.429	116.944.791

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

27. OTHER INCOME (CHARGES)

a. Interest Income

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
Interest income on due from related parties	135.839.388	106.283.299	66.483.732
Interest income on banks	468.318	153.639	158.165
Total	136.307.706	106.436.938	66.641.897

b. Final Tax

Final tax of the Group pertains to final tax from freight service. The final tax of the Group for the eight-month periods ended August 31, 2023 and 2022 amounted to Rp5.72 billion and Rp3.48 billion and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp6.06 billion, Rp5.35 billion and Rp429.20 million, respectively (Note 28c).

c. Tax Expense

Tax expense pertains to tax charges from Value-Added Tax and Income Taxes Article 22, 23 and 26. Tax expense for the eight-month periods ended August 31, 2023 and 2022 amounted to Rp21.26 billion and Rp11.72 billion and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to Rp24.43 billion, Rp15.69 billion and Rp2.19 billion, respectively.

d. Finance Charges

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
Interest expense on long-term loans	175.375.099	166.348.082	92.531.498
Interest on lease liabilities	1.438.736	1.124.022	585.287
Interest expenses on due to related parties	1.677.796	1.612.782	1.645.341
Total	178.491.631	169.084.886	94.762.126

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020		
Perusahaan				
Pajak Pertambahan Nilai	8.249.263	1.367.275	12.073	325.323
Entitas Anak				
Pajak penghasilan:				
Pasal 23	2.769.962	-	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	-	91.818	-	2.470.106
Total	11.019.225	1.459.093	12.073	2.795.429

Company
Value-Added Tax
Subsidiary
Income tax:
Article 23
Value-Added Tax
Total

b. Utang Pajak

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020		
Perusahaan				
Pajak penghasilan:				
Pasal 21	119.275	104.697	4.705	16.076
Pasal 23	79.569	56.852	175.567	159.363
Pasal 15	1.469.940	1.694.971	1.510.536	196.689
Pasal 4 (2)	816	4.126	3.764	3.706
Pasal 29	2.558.818	-	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	1.000	-	7.500.897	1.554.770
Entitas Anak				
Pajak penghasilan:				
Pasal 21	109.506	834.504	161.036	126.468
Pasal 23	80.023	124.910	276.444	220.941
Pasal 26	40.430.862	29.799.915	9.028.154	-
Pasal 4 (2)	35.119	54.407	321.031	318.083
Pajak Pertambahan Nilai	3.779.421	-	1.815.650	-
Total	48.664.349	32.674.382	20.797.784	2.596.096

Company
Income taxes:
Article 21
Article 23
Article 15
Article 4 (2)
Article 29
Value-Added Tax
Subsidiary
Income taxes:
Article 21
Article 23
Article 26
Article 4 (2)
Value-Added Tax
Total

c. Pajak Final

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months), 2023 2022		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year), 2022 2021 2020		
Tarif final	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Pendapatan yang berhubungan dengan jasa pelayaran	476.865.876	289.799.647	505.324.112	445.866.830	35.766.665
Pajak final	5.722.391	3.477.596	6.063.889	5.350.402	429.200

Final rate
Revenue related to
freight service
Final tax

Pajak final merupakan pajak atas jasa pelayaran
Perusahaan.

Final tax represents tax on freight services of the
Company.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

28. PERPAJAKAN (Lanjutan)

28. TAXATION (Continued)

d. Beban Pajak Penghasilan

d. Income Tax Expense

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Kini						Current
Perusahaan	(3.124.693)	-	-	-	-	Company
Entitas Anak	(379.283)	-	-	-	-	Subsidiary
Subtotal	(3.503.976)	-	-	-	-	Subtotal
Tangguhan						Deferred Tax
Perusahaan	-	-	-	-	-	Company
Entitas Anak	(7.360.897)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	Subsidiary
Subtotal	(7.360.897)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	Subtotal
Neto	(10.864.873)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	Net

Rekonsiliasi laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Reconciliation profit before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable profit for the eight-month periods ended August 31, 2023 and 2022, and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba (rugi) sebelum taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian	176.986.482	69.541.900	147.198.870	191.126.663	(58.384.263)	Profit (loss) before estimated income tax benefit (expense) consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(15.714.907)	25.390.386	43.894.112	(911.160)	23.515.274	Loss (profit) from Subsidiary before income tax
Transaksi eliminasi	13.230.964	(15.272.002)	(27.158.020)	14.686	(13.261.110)	Elimination transaction
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	174.502.539	79.660.284	163.934.962	190.230.189	(48.130.099)	Profit (loss) before income tax expense - Company
Beda tetap						Permanent difference
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(476.865.876)	(289.799.647)	(505.324.112)	(445.866.830)	(35.766.665)	Revenue already subjected to final tax
Beban terkait penghasilan yang dikenakan pajak final	316.566.488	210.139.363	341.389.150	255.636.641	83.896.764	Expenses related to income already subjected to final tax
Taksiran laba kena pajak Perusahaan	14.203.151	-	-	-	-	Estimated taxable profit Company

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

28. PERPAJAKAN (Lanjutan)

28. TAXATION (Continued)

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Beban pajak penghasilan - kini Perusahaan	3.124.693	-	-	-	-	Income tax expense - current Company
Dikurangi pajak dibayar dimuka	(565.875)	-	-	-	-	Less prepaid tax
Taksiran Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29	2.558.818	-	-	-	-	Estimated Income Tax Payable - Art 29

Taksiran laba kena pajak Perusahaan untuk tanggal 31 Agustus 2023 dihitung berdasarkan perhitungan sementara karena Perusahaan belum jatuh tempo menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan untuk tahun tersebut.

Estimated taxable profit of the Company as of August 31, 2023 is calculated based on a preliminary calculation as the Company has not yet to date submitted its annual corporate income tax report ("SPT") for that year.

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2020, 2021 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2020, 2021 dan 2022.

Estimated taxable profit resulting from the reconciliation for the years 2020, 2021 and 2022 is the basis for the Annual Corporate Income Tax Return for the years 2020, 2021 and 2022.

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Taxes

Mutasi aset pajak tangguhan dan manfaat (beban) pajak yang terkait adalah sebagai berikut:

Movements of deferred tax assets and the related tax benefit (expense) are as follows:

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2023	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Agustus/ Balance as of August 31, 2023	
Entitas Anak					Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Akumulasi rugi fiskal	7.838.474	(7.838.474)	-	-	Accumulated fiscal loss
Penyisihan kerugian penurunan nilai	2.004.358	212.499	-	2.216.857	Allowance for impairment losses
Liabilitas imbalan pascakerja	148.924	124.637	2.735	276.296	Post-employment benefits liability
Aset hak-guna	132.071	140.441	-	272.512	Right-of-use assets
Total Aset Pajak Tangguhan	10.123.827	(7.360.897)	2.735	2.765.665	Total Deferred Tax Assets

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
 DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
 DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
 DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
 (Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
 AND SUBSIDIARY
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS
 AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
 AND 2020 (AUDITED), AND
 FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
 AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
 (UNAUDITED), AND
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
 (Amounts in tables are expressed in thousands of
 Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (Lanjutan)

28. TAXATION (Continued)

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Entitas Anak					Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Akumulasi rugi fiskal	3.809.415	4.029.059	-	7.838.474	Accumulated fiscal loss
Penyisihan kerugian penurunan nilai	1.196.283	808.075	-	2.004.358	Allowance for impairment losses
Liabilitas imbalan pascakerja	23.086	67.846	57.992	148.924	Post-employment benefits liability
Aset hak-guna	419.933	(287.862)	-	132.071	Right-of-use asset
Total Aset Pajak Tangguhan	5.448.717	4.617.118	57.992	10.123.827	Total Deferred Tax Assets
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2021	
Entitas Anak					Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Akumulasi rugi fiskal	6.715.591	(2.906.176)	-	3.809.415	Accumulated fiscal loss
Penyisihan kerugian penurunan nilai	1.156.254	40.029	-	1.196.283	Allowance for impairment losses
Liabilitas imbalan pascakerja	-	20.045	3.041	23.086	Post-employment benefits liability
Aset hak-guna	52.249	367.684	-	419.933	Right-of-use asset
Total Aset Pajak Tangguhan	7.924.094	(2.478.418)	3.041	5.448.717	Total Deferred Tax Assets
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2020	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2020	
Entitas Anak					Subsidiary
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Akumulasi rugi fiskal	3.243.656	3.471.935	-	6.715.591	Accumulated fiscal loss
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	1.156.254	-	1.156.254	Allowance for impairment losses
Aset hak-guna	-	52.249	-	52.249	Right-of-use asset
Total aset pajak tangguhan	3.243.656	4.680.438	-	7.924.094	Total Deferred Tax Assets

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

Deferred tax assets as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 have been calculated taking into account tax rate expected to be prevailing at the time they are realized.

28. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease ("COVID-19") yang di antara lain, merubah tarif pajak penghasilan dari Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2018 dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 - 2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengatur, antara lain, perubahan tarif pajak penghasilan dari Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2018 menjadi 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

28. TAXATION (Continued)

f. Tax Rate Changes

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 relating to state financial policies and financial system stability in response to Coronavirus Disease ("COVID-19") outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate in Article 17 paragraph (1) letter b of the Law No. 36 of Year 2018 from 25% to 22% for fiscal year 2020 - 2021 and 20% for fiscal year 2022 onwards.

Furthermore, on October 29, 2021, the Government enacted Law Number 7 Year 2021 (Law No. 7 Year 2021) regarding Harmonization of Tax Regulations. This Law set, among others, change of corporate income tax rate in Article 17 paragraph (1) letter b of the Law No. 36 of Year 2018 to 22% effective from the fiscal year 2022.

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
PT Ade Putra Tanjareng	430.802.117	209.414.811
PT Guruh Putra Bersama	161.515.162	124.950.026
Total	592.317.279	334.364.837
Persentase terhadap total pendapatan	89,36%	87,75%

Grup memiliki pendapatan atas jasa tongkang batubara, muatan apung dan bongkar muat dari pihak berelasi. Piutang yang timbul dari transaksi pendapatan ini disajikan sebagai "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 6 dan 29c).

b. Beban Pokok Pendapatan

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),	
	2023	2022
PT Borneo Petrol Servis	58.779.265	46.788.687
PT Borneo Logistik Indonesia	20.400.000	20.400.000
Total	79.179.265	67.188.687
Persentase terhadap total pendapatan	11,94%	17,63%

29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group, in its regular conduct of business, engaged in transactions with certain related parties. These transactions are as follows:

a. Revenues

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
PT Ade Putra Tanjareng	369.343.877	361.538.414	63.483.849
PT Guruh Putra Bersama	227.408.397	189.126.898	18.256.630
Total	596.752.274	550.665.312	81.740.479
Persentase terhadap total pendapatan	89,05%	87,73%	97,78%

The Group has revenue from services of coal barging, floating loading and loading unloading from related parties. The receivables arising from these sales transactions are presented under "Trade Receivables - Related Parties" in the consolidated statements of financial position (Notes 6 and 29c).

b. Cost of Revenues

	31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),		
	2022	2021	2020
PT Borneo Petrol Servis	79.459.014	32.111.277	13.753.631
PT Borneo Logistik Indonesia	30.600.000	36.791.907	-
Total	110.059.014	68.903.184	13.753.631
Persentase terhadap total pendapatan	16,42%	10,98%	16,45%

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

Grup melakukan pembelian bahan bakar dan sewa kapal tongkang kepada pihak berelasi. Saldo sehubungan dengan transaksi ini disajikan dalam "Utang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 16 dan 29f).

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

The Group made purchase of fuel and rental of barge to related parties. The balance related to these transactions are presented in "Trade Payables - Related Parties" in the consolidated statements of financial position (Notes 16 and 29f).

c. Piutang Usaha

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
PT Ade Putra Tanrajeng	102.934.930	63.520.163	46.263.492	11.684.211	PT Ade Putra Tanrajeng
PT Guruh Putra Bersama	97.945.404	78.777.499	66.872.221	193.141	PT Guruh Putra Bersama
Subtotal	200.880.334	142.297.662	113.135.713	11.877.352	Subtotal
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.781.100)	(1.397.971)	(1.046.706)	(109.384)	Less allowance for impairment losses
Pihak berelasi - neto	199.099.234	140.899.691	112.089.007	11.767.968	Related parties - net
Persentase terhadap total aset	10,73%	10,03%	9,21%	1,20%	Percentage to total assets

c. Trade Receivables

d. Piutang Lain-Lain

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
PT Cakrawala Langit Sejahtera	72.793	722.988	-	-	PT Cakrawala Langit Sejahtera
PT Bara Milenia Energi	5.999	-	-	-	PT Bara Milenia Energi
Subtotal	78.792	722.988	-	-	Subtotal
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(645)	(6.443)	-	-	Less allowance for impairment losses
Pihak berelasi - neto	78.147	716.545	-	-	Related parties - net
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	Percentage to total assets

d. Other Receivables

e. Piutang Pihak Berelasi

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31,			
		2022	2021	2020	
Ancara Resources Limited	600.247.083	557.097.665	420.129.473	579.768.410	Ancara Resources Limited
PT Kutai Bara Nusantara	212.900.222	190.979.598	154.642.848	-	PT Kutai Bara Nusantara
Honardy Boentario	5.600.000	1.900.000	-	-	Honardy Boentario
PT Ancara Transshipment Services	-	11.925.000	-	-	PT Ancara Transshipment Services
PT Guruh Putra Bersama	-	-	79.406.321	-	PT Guruh Putra Bersama
Subtotal	818.747.305	761.902.263	654.178.642	579.768.410	Subtotal
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(9.976.857)	(9.030.121)	(5.044.815)	(4.473.726)	Less allowance for impairment loss
Total	808.770.448	752.872.142	649.133.827	575.294.684	Total
Persentase terhadap total aset	43,60%	53,60%	53,37%	58,80%	Percentage to total assets

e. Due From Related Parties

**29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

Ancara Resources Limited (ARL)

Pada tanggal 18 Mei 2020, PT Mahakam Coal Terminal ("MCT"), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Kredit dengan ARL sebesar USD36,54 juta (setara dengan Rp540,20 miliar).

Fasilitas "Pinjaman" tersebut wajib dibayar penuh hingga bulan ke 60 dimulai dari tanggal Penggunaan Pertama fasilitas ini sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit. Pinjaman ini memiliki bunga tahunan sebesar 20% yang akan bertambah dari hari ke hari selama pinjaman masih terutang dan dibayarkan secara tunggakan pada setiap tanggal bunga.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, piutang pihak berelasi kepada ARL, masing-masing sebesar Rp600,25 miliar, Rp557,10 miliar, Rp420,13 miliar dan Rp579,77 miliar.

PT Kutai Bara Nusantara (KBN) dan PT Guruh Putra Bersama (GPB)

Pada tanggal 22 Desember 2021, MCT, Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Novasi Utang dengan KBN, GPB dan ARL dengan maksud utang ARL kepada MCT akan diambil alih oleh KBN dan GPB masing-masing sebesar USD10,83 juta (setara dengan Rp154,64 miliar) dan USD5,56 juta (setara dengan Rp79,41 miliar).

Piutang ini dikenakan bunga 21% per tahun dan tidak memiliki tanggal pembayaran tetap.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, piutang pihak berelasi kepada KBN, masing-masing sebesar Rp212,90 miliar, Rp190,98 miliar, Rp154,64 miliar dan nihil.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 31, 2023	2022	31 Desember/December 31, 2021	2020	
Saldo awal	9.030.121	5.044.815	4.473.726	-	Beginning balance
Pemulihan	(88.207)	(612.356)	(1.233.823)	-	Reversal
Penyisihan	1.034.943	4.597.662	1.804.912	4.473.726	Provision
Saldo Akhir	9.976.857	9.030.121	5.044.815	4.473.726	Ending Balance

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Ancara Resources Limited (ARL)

On May 18, 2020, PT Mahakam Coal Terminal ("MCT"), the Subsidiary, entered into a Credit Agreement with ARL amounting to USD36.54 million (equivalent to Rp540.20 billion).

The facility "the Loan" is repayable in full on the date falling 60 months from the First Utilisation Date of the facility as defined in the Credit Agreement. The Loan bears an annual interest rate of 20% which will accrue from day to day while the loan is outstanding and is payable in arrears on each interest date.

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, due from related party to ARL, amounted to Rp600.25 billion, Rp557.10 billion, Rp420.13 billion and Rp579.77 billion, respectively.

PT Kutai Bara Nusantara (KBN) and PT Guruh Putra Bersama (GPB)

On December 22, 2021, MCT, the Subsidiary, entered into a Loan Novation Agreement with KBN, GPB and ARL where in MCT's receivable from ARL was transferred to KBN and GPB amounting to USD10.83 million (equivalent to Rp154.64 billion) and USD5.56 million (equivalent to Rp79.41 billion), respectively.

This due from is subject to 21% interest per annum and has no fixed repayment date.

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, due from related party to KBN, amounted to Rp212.90 billion, Rp190.98 billion, Rp154.64 billion and nil, respectively.

Movements in the allowance for impairment loss of due from related parties is as follows:

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pihak berelasi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pihak berelasi.

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

The management of the Group believes that the allowance for impairment loss on due from related parties is adequate to cover any possible losses on uncollectible due from related parties.

f. Utang Usaha

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
PT Borneo Logistik Indonesia	20.101.104	5.079.537	4.593.034	-	PT Borneo Logistik Indonesia
PT Borneo Petrol Servis	10.253.061	-	258.543	1.178.560	PT Borneo Petrol Servis
PT Cakrawala Langit Sejahtera	333.667	34.625	-	-	PT Cakrawala Langit Sejahtera
Total	30.687.832	5.114.162	4.851.577	1.178.560	Total
Persentase terhadap total liabilitas	2,47%	0,48%	0,48%	0,12%	Percentage to total liabilities

f. Trade Payables

g. Utang Lain-Lain

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
PT Cakrawala Langit Sejahtera	-	20.745	80.574	93.982	PT Cakrawala Langit Sejahtera
PT Guruh Putra Bersama	-	-	-	7.209.828	PT Guruh Putra Bersama
Total	-	20.745	80.574	7.303.810	Total
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%	0,00%	0,01%	0,75%	Percentage to total liabilities

g. Other Payables

h. Utang Pihak Berelasi

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020			
PT Ancara Transshipment Services	37.201.534	-	-	-	PT Ancara Transshipment Services
E-Harbour Ventures Limited	29.496.989	29.269.492	24.959.729	23.070.491	E-Harbour Ventures Limited
PT Graha Adika Niaga	9.262.300	9.262.300	9.262.300	9.262.300	PT Graha Adika Niaga
Solomed Capital Pte. Ltd	6.469.005	6.695.180	5.940.505	6.155.296	Solomed Capital Pte. Ltd
Honardy Boentario	-	15.859.028	39.323.278	54.473.278	Honardy Boentario
Total	82.429.828	61.086.000	79.485.812	92.961.365	Total
Persentase terhadap total liabilitas	6,64%	5,78%	7,79%	9,58%	Percentage to total liabilities

h. Due To Related Parties

PT Ancara Transshipment Services

Berdasarkan Akta Novasi tanggal 7 April 2023, terkait Nota Perjanjian ("MOA") dan Addendum No. 1 atas MOA terkait Kapal "PLB 1", Perusahaan menyetujui untuk mengambil alih hak dan kewajiban dari PT Ancara Transshipment Services ("ATS") terkait kapal PLB 1 yang dibeli dari PT Pasifik Lestari Bersaudara. Atas transaksi tersebut Perusahaan memiliki utang kepada ATS sebesar Rp37,20 miliar (Catatan 13).

PT Ancara Transshipment Services

Based on Deed of Novation dated April 7, 2023, in respect of the Memorandum of Agreement ("MOA") and Addendum No. 1 to the MOA relating to the Vessel "PLB 1", the Company agreed to take over the rights and obligation of PT Ancara Transshipment Services ("ATS") related to vessel "PLB 1" bought from PT Pasifik Lestari Bersaudara. Due to this transaction, the Company has a debt to ATS amounting to Rp37.20 billion (Note 13).

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, utang pihak berelasi kepada ATS, masing-masing sebesar Rp37,20 miliar, nihil, nihil dan nihil.

E-Harbour Ventures Limited

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman ("Perjanjian") No. 011/ALI-LEG/X/19 tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana telah diubah berdasarkan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/ALI-LGL/1/2020 tanggal 16 Januari 2020, Perusahaan memperoleh pinjaman dari E-Harbour Ventures Limited ("EVL") sebagai sumber pembiayaan keperluan umum perusahaan dengan jumlah sebesar USD1,5 juta dengan tingkat bunga tahunan sebesar 7,5% (secara kolektif disebut sebagai "Pinjaman"), dan tenor pinjaman selama enam puluh (60) bulan ("Periode Pinjaman") terhitung sejak tanggal Perjanjian. Pembayaran kembali Pinjaman harus dilakukan secara penuh kepada EVL pada akhir Periode Pinjaman atau dengan cara mencicil dibayar kepada pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh EVL. Periode Pinjaman dapat diperpanjang atau diperbarui.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, utang pihak berelasi kepada EVL, masing-masing sebesar Rp29,50 miliar, Rp29,27 miliar, Rp24,96 miliar dan Rp23,07 miliar.

PT Graha Adika Niaga dan Solomed Capital Pte. Ltd

Utang kepada PT Graha Adika Niaga (GAN) berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Perusahaan dan GAN pada tanggal 12 Desember 2020, utang tersebut dikhususkan untuk modal kerja Perusahaan sebesar Rp9,26 miliar. Berdasarkan perjanjian ini, pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Jumlah pokok pinjaman akan dibayarkan secara penuh pada tahun ke lima (5) sejak tanggal efektif perjanjian.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, utang pihak berelasi kepada GAN sebesar Rp9,26 miliar.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, due to related party to ATS, amounted to Rp37.20 billion, nil, nil and nil, respectively.

E-Harbour Ventures Limited

Based on the Loan Agreement ("Agreement") No. 011/ALI-LEG/X/19 dated October 16, 2019, as amended by First Amendment of Loan Agreement No. 001/ALI-LGL/1/2020 dated January 16, 2020, the Company obtained a loan from E-Harbour Ventures Limited ("EVL") for financing source of general corporate purposes with the aggregate amount of USD1.5 million and annual interest rate of 7.5% (collectively referred as "Loan") and tenor of sixty (60) months ("Loan Period") commencing on the date of the Agreement. The repayment of Loan shall be made to EVL in full at the end of Loan Period or to a third party to be designated by EVL in installments. The Loan Period can be extended or amended.

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, due to related party to EVL, amounted to Rp29.50 billion, Rp29.27 billion, Rp24.96 billion and Rp23.07 billion, respectively.

PT Graha Adika Niaga and Solomed Capital Pte. Ltd

Due to PT Graha Adika Niaga (GAN) was based on the loan agreement entered into by the Company and GAN on December 12, 2020, this payable is specifically used as working capital for the Company amounted to Rp9.26 billion. Based on the agreement, the loan has no bears interest rate. The principal amount will be paid in full on the fifth (5) years from the effective date.

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, due to related party to GAN amounted to Rp9.26 billion.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

Utang kepada Solomed Capital Pte. Ltd (Solomed) berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Perusahaan dan Solomed pada tanggal 28 Desember 2020, utang tersebut dikhususkan untuk modal kerja Perusahaan sebesar SGD574,25 ribu. Berdasarkan perjanjian ini, pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Jumlah pokok pinjaman akan dibayarkan secara penuh pada tahun ke lima (5) sejak tanggal efektif perjanjian.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, utang pihak berelasi kepada Solomed, masing-masing sebesar Rp6,47 miliar, Rp6,70 miliar, Rp5,94 miliar dan Rp6,16 miliar.

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Due to Solomed Capital Pte. Ltd (Solomed) was based on the loan agreement entered into by the Company and Solomed on December 28, 2020, this payable is specifically used as working capital for the Company amounted to SGD574.25 thousand. Based on the agreement, the loan has no bears interest rate. The principal amount will be paid in full on the fifth (5) years from the effective date.

As of August 31, 2023, 31 December 2022, 2021 and 2020, due to related party to Solomed, amounted to Rp6.47 billion, Rp6.70 billion, Rp5.94 billion and Rp6.16 billion, respectively.

i. Uang Muka

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020		
PT Borneo Petrol Servis	-	8.517.714	3.657.232	3.930.666
PT Borneo Logistik Indonesia	-	-	-	6.887.000
Total	-	8.517.714	3.657.232	10.817.666
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,61%	0,30%	1,11%

PT Borneo Petrol Servis
PT Borneo Logistik Indonesia
Total

Percentage to total assets

j. Liabilitas Sewa

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022 2021 2020		
PT Cakrawala Langit Sejahtera	7.755.052	11.049.186	17.349.632	-
Persentase terhadap total liabilitas	0,62%	1,05%	1,70%	0,00%

PT Cakrawala Langit

Percentage to
total liabilities

k. Kompensasi Manajemen Kunci Grup

Informasi mengenai seluruh kompensasi manajemen kunci Grup untuk masing-masing kategori dibawah ini:

k. The Group's Key Management Compensation

Information regarding all of the Group's key management compensation for each of the following categories:

	31 Agustus/August 31, 2023					
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main Shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci Lainnya/ Other Key Management Personnel	Total/ Total	
Imbalan kerja jangka pendek	-	745.585	-	1.114.020	1.859.605	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	Other long-term employment benefits
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	-	-	Termination benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	Share-based payments
Total	-	745.585	-	1.114.020	1.859.605	Total

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

31 Desember/December 31, 2022						
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main Shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci Lainnya/ Other Key Management Personnel	Total/ Total		
Imbalan kerja jangka pendek	-	900.000	-	1.422.420	2.322.420	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	Other long-term employment benefits
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	-	-	Termination benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	Share-based payments
Total	-	900.000	-	1.422.420	2.322.420	Total
31 Desember/December 31, 2021						
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main Shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci Lainnya/ Other Key Management Personnel	Total/ Total		
Imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	1.406.344	1.406.344	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	Other long-term employment benefits
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	-	-	Termination benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	Share-based payments
Total	-	-	-	1.406.344	1.406.344	Total
31 Desember/December 31, 2020						
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Dewan Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main Shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci Lainnya/ Other Key Management Personnel	Total/ Total		
Imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	1.267.500	1.267.500	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	Other long-term employment benefits
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	-	-	Termination benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	Share-based payments
Total	-	-	-	1.267.500	1.267.500	Total

I. Sifat Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

I. Nature of Relationship with Related Parties

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Graha Adika Niaga (GAN)	Pemegang saham/Shareholder	Utang pihak berelasi/ Due to related parties
Solomed Capital Pte. Ltd (Solomed)	Pemegang saham/Shareholder	Utang pihak berelasi/ Due to related parties
PT Borneo Logistik Indonesia (BLI)	Pemegang saham/Shareholder	Beban pokok pendapatan/Cost of revenues
		Uang muka/ Advances
		Utang usaha/ Trade payables
PT Ade Putra Tanrajeng (APT)	Afiliasi/Affiliate	Pendapatan/ Revenues
		Piutang usaha/ Trade receivables

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

**29. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT Guruh Putra Bersama (GPB)	Afiliasi/Affiliate	Pendapatan/ Revenues Piutang usaha/ Trade receivables Piutang pihak berelasi/ Due from related parties Utang lain-lain/ Other payables
PT Cakrawala Langit Sejahtera (CLS)	Afiliasi/Affiliate	Piutang lain-lain/ Other receivables Utang usaha/ Trade payables Utang lain-lain/ Other payables Liabilitas sewa/ Lease liabilities
PT Kutai Bara Nusantara (KBN)	Afiliasi/Affiliate	Piutang pihak berelasi/ Due from related parties
PT Bara Milenia Energi (BME)	Afiliasi/Affiliate	Piutang lain-lain/ Other receivables
PT Borneo Petrol Servis (BPS)	Afiliasi/Affiliate	Beban pokok pendapatan/Cost of revenues Uang muka/ Advances Utang usaha/ Trade payables
PT Ancara Transshipment Services (ATS)	Afiliasi/Affiliate	Piutang pihak berelasi/ Due from related parties Utang pihak berelasi/ Due to related parties
Ancara Resources Limited (ARL)	Afiliasi/Affiliate	Piutang pihak berelasi/ Due from related parties
E-Harbour Ventures Limited	Afiliasi/Affiliate	Utang pihak berelasi/ Due to related parties
Honardy Boentario	Afiliasi/Affiliate	Piutang pihak berelasi/ Due from related parties Utang pihak berelasi/ Due to related parties

Karena memiliki sifat berelasi, hal ini memungkinkan syarat dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi tidak sama jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.

Due to these relationships, it is possible that the terms and conditions of these transactions are not the same as those that would result from transactions between third parties.

30. LABA (RUGI) PER SAHAM/DILUSIAN

30. BASIC/DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE

	31 Agustus (Delapan bulan)/ August 31 (Eight months),		31 Desember (Satu tahun)/ December 31 (One year),			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba (rugi) neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk	163.729.190	79.511.977	163.579.205	189.109.229	(48.072.919)	Profit (loss) attributable to owners of parent
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar	51.747	51.000	51.000	51.000	51.000	Total weighted average number of shares for basic earnings (loss) per shares calculation
Laba (Rugi) Neto per Saham Dasar/Dilusi Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Angka Penuh)	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)	Basic/Diluted Earnings (Loss) per Share Attributable to Owners of Parent (Full Amount)

Perusahaan tidak menghitung laba (rugi) per saham dilusi karena Perusahaan tidak memiliki saham yang mempunyai efek dilutif potensial.

The Company did not calculate diluted earnings (loss) per share since the Company had no shares that had a potential dilutive effect.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

31. SEGMENT OPERASI

Informasi tentang segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

31. OPERATING SEGMENT

Information concerning the Group business segments is as follows:

	31 Agustus/August 31, 2023				
	Tongkang Batubara dan Muatan Apung/ Coal Barging and Floating Loading	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN	505.624.632	157.256.105	-	662.880.737	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(305.804.478)	(61.861.562)	(349.656)	(368.015.696)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	199.820.154	95.394.543	(349.656)	294.865.041	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(19.743.814)	(30.681.877)	96.379	(50.329.312)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	180.076.340	64.712.666	(253.277)	244.535.729	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (CHARGES)
Penghasilan bunga	152.670	81.786.318	-	81.938.988	Interest income
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	(1.281.965)	9.377.633	-	8.095.668	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	102.314	(1.029.145)	(14.107)	(940.938)	Provision for impairment losses - net
Pajak final	(5.722.391)	-	-	(5.722.391)	Final tax
Beban pajak	(199.588)	(21.056.563)	-	(21.256.151)	Tax expense
Beban keuangan	(8.810.045)	(117.508.384)	-	(126.318.429)	Finance charges
Lain-lain - neto	10.185.204	(567.618)	(12.963.580)	(3.345.994)	Others - net
Beban Lain-Lain - Neto	(5.573.801)	(48.997.759)	(12.977.687)	(67.549.247)	Other Charges - Net
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN BEBAN					PROFIT (LOSS) BEFORE ESTIMATED INCOME TAX EXPENSE
PAJAK PENGHASILAN	174.502.539	15.714.907	(13.230.964)	176.986.482	ESTIMATED INCOME TAX EXPENSE
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN					ESTIMATED INCOME TAX EXPENSE
Kini	(3.124.693)	(379.283)	-	(3.503.976)	Current
Tangguhan	-	(7.360.897)	-	(7.360.897)	Deferred
Taksiran Beban Pajak Penghasilan - Neto	(3.124.693)	(7.740.180)	-	(10.864.873)	Estimated Income Tax Expense - net
LABA NETO	171.377.846	7.974.727	(13.230.964)	166.121.609	NET PROFIT
ASET SEGMENT	788.273.443	1.068.273.668	(1.389.471)	1.855.157.640	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	176.646.301	1.090.209.655	(26.004.951)	1.240.851.005	SEGMENT LIABILITIES

	31 Agustus/August 31, 2022					
	Tongkang Batubara dan Muatan Apung/ Coal Barging and Floating Loading	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Pengiriman/ Shipping	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN	290.784.648	90.259.250	-	-	381.043.898	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(179.737.230)	(54.975.948)	-	(414.905)	(235.128.083)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	111.047.418	35.283.302	-	(414.905)	145.915.815	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(9.731.035)	(11.669.842)	-	-	(21.400.877)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	101.316.383	23.613.460	-	(414.905)	124.514.938	OPERATING PROFIT

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

31. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

31. OPERATING SEGMENT (Continued)

31 Agustus/August 31, 2022						
	Tongkang Batubara dan Muatan Apung/ Coal Barging and Floating Loading	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Pengiriman/ Shipping	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENGHASILAN (BEBAN)						OTHER INCOME
LAIN-LAIN						(CHARGES)
Penghasilan bunga	198.431	91.307.674	-	-	91.506.105	Interest income
Keuntungan (kerugian)						Gain (loss) on
selisih kurs - neto	(1.261.473)	(8.495.997)	-	-	(9.757.470)	foreign exchange - net
Penyisihan untuk kerugian						Provision for impairment
penurunan nilai - neto	(409.021)	(3.015.959)	-	266.599	(3.158.381)	losses - net
Pajak final	(3.477.596)	-	-	-	(3.477.596)	Final tax
Beban pajak	(73.830)	(11.646.453)	-	-	(11.720.283)	Tax expense
Beban keuangan	(1.124.519)	(115.820.272)	-	-	(116.944.791)	Finance charges
Lain-lain - neto	(15.508.091)	(1.332.839)	-	15.420.308	(1.420.622)	Others - net
Beban Lain-Lain - Neto	(21.656.099)	(49.003.846)	-	15.686.907	(54.973.038)	Other Charges - Net
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT	79.660.284	(25.390.386)	-	15.272.002	69.541.900	PROFIT (LOSS) BEFORE ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT
TAKSIRAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN						ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT
Kini	-	-	-	-	-	Current
Tangguhan	-	3.361.373	-	-	3.361.373	Deferred
Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan - Neto	-	3.361.373	-	-	3.361.373	Estimated Income Tax Benefit - net
LABA (RUGI) NETO	79.660.284	(22.029.013)	-	15.272.002	72.903.273	NET PROFIT (LOSS)
ASET SEGMENT	382.071.322	930.789.886	90.433	14.451.812	1.327.403.453	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	126.558.391	943.440.657	100.640	(11.585.093)	1.058.514.595	SEGMENT LIABILITIES

31 Desember/December 31, 2022						
	Tongkang Batubara dan Muatan Apung/ Coal Barging and Floating Loading	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Pengiriman/ Shipping	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN	506.824.118	163.296.265	-	-	670.120.383	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(285.766.651)	(82.514.985)	-	(622.358)	(368.903.994)	COST OF REVENUES
LABA (RUGI) BRUTO	221.057.467	80.781.280	-	(622.358)	301.216.389	GROSS PROFIT (LOSS)
BEBAN USAHA	(17.443.285)	(19.916.908)	(30.000)	-	(37.390.193)	OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) USAHA	203.614.182	60.864.372	(30.000)	(622.358)	263.826.196	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN)						OTHER INCOME
LAIN-LAIN						(CHARGES)
Penghasilan bunga	308.075	135.999.631	-	-	136.307.706	Interest income
Keuntungan (kerugian)						Gain (loss) on
selisih kurs - neto	(3.535.968)	(36.642.440)	-	-	(40.178.408)	foreign exchange - net
Penyisihan untuk kerugian						Provision for impairment
penurunan nilai - neto	(888.695)	(3.673.068)	-	266.601	(4.295.162)	losses - net
Pajak final	(6.063.889)	-	-	-	(6.063.889)	Final tax
Beban pajak	(213.223)	(24.217.719)	-	-	(24.430.942)	Tax expense
Beban keuangan	(1.691.299)	(176.800.332)	-	-	(178.491.631)	Finance charges
Lain-lain - neto	(27.594.221)	641.717	(36.273)	27.513.777	525.000	Others - net
Beban Lain-Lain - Neto	(39.679.220)	(104.692.211)	(36.273)	27.780.378	(116.627.326)	Other Charges - Net
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT	163.934.962	(43.827.839)	(66.273)	27.158.020	147.198.870	PROFIT (LOSS) BEFORE ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT
TAKSIRAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN						ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT
Kini	-	-	-	-	-	Current
Tangguhan	-	4.617.118	-	-	4.617.118	Deferred
Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan - Neto	-	4.617.118	-	-	4.617.118	Estimated Income Tax Benefit - net
LABA (RUGI) NETO	163.934.962	(39.210.721)	(66.273)	27.158.020	151.815.988	NET PROFIT (LOSS)
ASET SEGMENT	430.916.793	991.434.260	90.433	(17.791.310)	1.404.650.176	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	91.188.118	1.021.335.278	130.640	(55.677.959)	1.056.976.077	SEGMENT LIABILITIES

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

31. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

31. OPERATING SEGMENT (Continued)

31 Desember/December 31, 2021						
	Tongkang Batubara dan Muatan Apung/ Coal Barging and Floating Loading	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Pengiriman/ Shipping	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN	466.574.672	161.142.259	-	-	627.716.931	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(255.005.908)	(69.134.550)	-	(622.358)	(324.762.816)	COST OF REVENUES
LABA (RUGI) BRUTO	211.568.764	92.007.709	-	(622.358)	302.954.115	GROSS PROFIT (LOSS)
BEBAN USAHA	(12.108.328)	(14.450.825)	(30.000)	-	(26.589.153)	OPERATING EXPENSES
LABA (RUGI) USAHA	199.460.436	77.556.884	(30.000)	(622.358)	276.364.962	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						OTHER INCOME (CHARGES)
Penghasilan bunga	96.579	106.340.359	-	-	106.436.938	Interest income
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	259.166	908.806	-	-	1.167.972	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	(990.199)	(181.952)	(647)	(498.604)	(1.671.402)	Provision for impairment losses - net
Pajak final	(5.350.402)	-	-	-	(5.350.402)	Final tax
Beban pajak	15.102	(15.708.692)	-	-	(15.693.590)	Tax expense
Beban keuangan	(1.620.043)	(167.464.843)	-	-	(169.084.886)	Finance charges
Lain-lain - neto	(1.640.450)	(508.755)	-	1.106.276	(1.042.929)	Others - net
Beban Lain-Lain - Neto	(9.230.247)	(76.615.077)	(647)	607.672	(85.238.299)	Other Charges - Net
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN BEBAN						PROFIT (LOSS) BEFORE ESTIMATED INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	190.230.189	941.807	(30.647)	(14.686)	191.126.663	EXPENSE
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN						ESTIMATED INCOME TAX
Kini	-	-	-	-	-	EXPENSE
Tangguhan	-	(2.478.418)	-	-	(2.478.418)	Current Deferred
Taksiran Beban Pajak Penghasilan - Neto	-	(2.478.418)	-	-	(2.478.418)	Estimated Income Tax Expense - net
LABA (RUGI) NETO	190.230.189	(1.536.611)	(30.647)	(14.686)	188.648.245	NET PROFIT (LOSS)
ASET SEGMENT	309.598.539	919.387.338	201.226	(12.798.148)	1.216.388.955	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	133.628.018	909.872.026	175.160	(23.526.777)	1.020.148.427	SEGMENT LIABILITIES

31 Desember/December 31, 2020						
	Tongkang Batubara dan Muatan Apung/ Coal Barging and Floating Loading	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Pengiriman/ Shipping	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
PENDAPATAN	35.766.665	47.832.258	-	-	83.598.923	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(57.326.353)	(30.903.693)	-	(622.358)	(88.852.404)	COST OF REVENUES
LABA (RUGI) BRUTO	(21.559.688)	16.928.565	-	(622.358)	(5.253.481)	GROSS PROFIT (LOSS)
BEBAN USAHA	(8.367.208)	(11.965.879)	(65.000)	-	(20.398.087)	OPERATING EXPENSES
RUGI USAHA	(29.926.896)	4.962.686	(65.000)	(622.358)	(25.651.568)	OPERATING LOSS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						OTHER INCOME (CHARGES)
Penghasilan bunga	117.752	66.524.145	-	-	66.641.897	Interest income
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	(2.667.778)	7.251.336	-	-	4.583.558	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	(6.795)	(5.255.698)	(155)	679.538	(4.583.110)	Provision for impairment losses - net
Pajak final	(429.200)	-	-	-	(429.200)	Final tax
Beban pajak	(295.099)	(1.892.153)	-	-	(2.187.252)	Tax expense
Beban keuangan	(1.645.341)	(93.116.785)	-	-	(94.762.126)	Finance charges
Lain-lain - neto	(13.276.742)	(1.923.650)	-	13.203.930	(1.996.462)	Others - net
Beban Lain-Lain - Neto	(18.203.203)	(28.412.805)	(155)	13.883.468	(32.732.695)	Other Charges - Net
RUGI SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(48.130.099)	(23.450.119)	(65.155)	13.261.110	(58.384.263)	LOSS BEFORE ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

31. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

31. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember/December 31, 2020					
	Tongkang Batubara dan Muatan Apung/ Coal Barging and Floating Loading	Bongkar Muat/ Loading Unloading	Pengiriman/ Shipping	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
TAKSIRAN MANFAAT						ESTIMATED INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN						BENEFIT
Kini	-	-	-	-	-	Current
Tangguhan	-	4.680.438	-	-	4.680.438	Deferred
Taksiran Manfaat						Estimated Income Tax
Pajak Penghasilan - Neto	-	4.680.438	-	-	4.680.438	Benefit - net
RUGI NETO	(48.130.099)	(18.769.681)	(65.155)	13.261.110	(53.703.825)	NET LOSS
ASET SEGMENT	196.202.137	859.470.738	201.873	(77.468.936)	978.405.812	SEGMENT ASSETS
LIABILITAS SEGMENT	210.461.401	848.408.032	145.160	(88.212.250)	970.802.343	SEGMENT LIABILITIES

32. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Perjanjian Penjualan

Grup menandatangani sejumlah Perjanjian Penjualan dengan beberapa pelanggan untuk melaksanakan jasa tongkang batubara, muatan apung dan bongkar muat.

a. Sales Agreements

The Group has sign into a number of Sales Agreement with several customer for performing coal barging, floating loading and loading unloading services.

Pelanggan/ Customer	Tipe Aset/ Type of Asset	Tanggal Perjanjian/ Agreement Date	Akhir Periode Perjanjian/ Ending Agreement Period
<u>Perusahaan</u>			
PT Ade Putra Tanrajeng	Kapal tongkang 180 kaki/ Barge 180 feet	1 Juli/July 1, 2020	Berakhirnya izin usaha pertambangan masing-masing Penyewa dan sampai dengan izin usaha masing-masing Penyewa diperbaharui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir/ <i>the expiry of each of Charterer's mining business license and until each of the Charterer's mining business license is renewed from time to time, whichever is later</i>
	Kapal tongkang 300 kaki/ Barge 300 feet	1 Agustus/August 1, 2020	
	Kapal terapung/ Floating transhipper	12 Juni/June 12, 2023	
PT Guruh Putra Bersama	Kapal tongkang 180 kaki/ Barge 180 feet	1 Juli/July 1, 2020	
	Kapal tongkang 300 kaki/ Barge 300 feet	1 Agustus/August 1, 2020	
	Kapal terapung/ Floating transhipper	12 Juni/June 12, 2023	
<u>Entitas Anak</u>			
PT Ade Putra Tanrajeng	Bongkar muat/ Loading unloading	1 Mei/May 1, 2020	
PT Guruh Putra Bersama	Bongkar muat/ Loading unloading	1 Mei/May 1, 2020	

32. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

b. Perjanjian Pembelian Aset Tetap

Vikasa Global Fund PCC

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan memiliki perjanjian fasilitas dari Vikasa Global Fund PCC berupa fasilitas pinjaman sebesar USD11,5 juta. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa gadai saham sebesar 70% dari kepemilikan saham Perusahaan di MCT, hipotek atas 16 kapal tunda dan 20 kapal tongkang, gadai rekening bank BRI, jaminan fidusia atas piutang Perusahaan serta jaminan perusahaan dari Rwood Resources DMCC. Pada tanggal 19 Juni 2023, Perusahaan telah melunasi kewajibannya (Catatan 13).

c. Perjanjian Liabilitas Sewa

Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan perjanjian No. 027/MCT-SAIDI/LAND-LEASE/II/2023, MCT, Entitas Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan Saidi (pihak yang menyewakan) atas tanah seluas 19.947 m² terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan Surat Hibah. Nilai sewa lahan yang disepakati adalah sebesar Rp250,00 juta per bulan dan jangka waktu perjanjian sewa ini adalah selama dua puluh (20) tahun (Catatan 12 dan 20).

Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan perjanjian No. 028/MCT-HASIPAH/LAND-LEASE/II/2023, MCT, Entitas Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan Hasipah (pihak yang menyewakan) atas tanah seluas 3.317 m² terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan SKPT No. 702/64.02.16/593.82/SKPT/XI/2020 atas nama Hasipah disahkan oleh Camat Tenggarong Seberang Sugiarto, S.H., M.Si. Nilai sewa lahan yang disepakati adalah sebesar Rp40,00 juta per bulan dan jangka waktu perjanjian sewa ini adalah selama dua puluh (20) tahun (Catatan 12 dan 20).

**32. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (Continued)**

b. Purchase of Fixed Assets Agreement

Vikasa Global Fund PCC

On April 11, 2023, the Company has agreement facility from Vikasa Global Fund PCC in the form of loan facility amounting to USD11.5 million. This facility is secured by certain assets in the form of share pledge over 70% from ownership of the Company in MCT, hypothec over 16 tugboat and 20 barges, pledge of BRI bank account, fiducia security over the Company receivables and corporate guarantee from Rwood Resources DMCC. On June 19, 2023, the Company paid off its obligations (Note 13).

c. Lease Liabilities Agreements

On February 15, 2023, based on agreement No. 027/MCT-SAIDI/LAND-LEASE/II/2023, MCT, the Subsidiary, entered into land lease agreement with Saidi (lessor) for land covering an area of 19.947 m² located in Yupa Island Hamlet, Embalut Village, Tenggarong Seberang District, Kutai Kartanegara Regency with ownership evidence by Grant Deed. The agreed value of leased land is amounted to Rp250.00 million per month and the term of this agreement is twenty (20) years (Notes 12 and 20).

On February 15, 2023, based on agreement No. 028/MCT-HASIPAH/LAND-LEASE/II/2023, MCT, the Subsidiary, entered into land lease agreement with Hasipah (lessor) for a land covering an area of 3.317 m² located at Yupa Island Hamlet, Embalut Village, Tenggarong Seberang District, Kutai Kartanegara Regency with ownership evidence by SKPT No. 702/64.02.16/593.82/SKPT/XI/2020 in the name of Hasipah authorized by the Sub-District Head of Tenggarong Seberang Sugiarto, S.H., M.Si. The agreed value of leased land is amounted to Rp40.00 million and the term of this agreement is twenty (20) years (Notes 12 and 20).

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

33. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan taksiran nilai wajar:

	31 Agustus/ August 31, 2023		2022		31 Desember/December 31, 2021		2020		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Aset Keuangan									Financial Assets
<u>Diukur pada biaya</u>									<u>Measured at</u>
<u>perolehan diamortisasi</u>									<u>amortized cost</u>
Kas	42.951	42.951	101.689	101.689	719.667	719.667	367.671	367.671	Cash
Kas di bank	5.860.439	5.860.439	36.326.439	36.326.439	13.376.931	13.376.931	677.049	677.049	Cash in banks
Piutang usaha - neto	233.365.376	233.365.376	168.860.767	168.860.767	141.708.750	141.708.750	11.767.968	11.767.968	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	78.147	78.147	719.486	719.486	-	-	-	-	Other receivables - net
Dana yang dibatasi penggunaannya	6.503.484	6.503.484	-	-	-	-	-	-	Restricted fund
Piutang pihak berelasi - neto	808.770.448	808.770.448	752.872.142	752.872.142	649.133.827	649.133.827	575.294.684	575.294.684	Due from related parties - net
Total	1.054.620.845	1.054.620.845	958.880.523	958.880.523	804.939.175	804.939.175	588.107.372	588.107.372	Total
Liabilitas Keuangan									Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya</u>									<u>Measured at amortized</u>
<u>perolehan diamortisasi</u>									<u>cost</u>
Utang usaha	75.052.853	75.052.853	27.218.264	27.218.264	21.314.124	21.314.124	24.365.749	24.365.749	Trade payables
Beban akrual	4.779.011	4.779.011	8.911.426	8.911.426	7.069.728	7.069.728	10.086.817	10.086.817	Accrued expenses
Utang lain-lain	2.000.636	2.000.636	3.383.302	3.383.302	3.062.223	3.062.223	7.370.522	7.370.522	Other payables
Pinjaman jangka panjang	985.219.252	985.219.252	911.491.717	911.491.717	867.262.647	867.262.647	823.506.426	823.506.426	Long-term loans
Liabilitas sewa	40.808.742	40.808.742	11.049.186	11.049.186	20.828.383	20.828.383	9.915.368	9.915.368	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	82.429.828	82.429.828	61.086.000	61.086.000	79.485.812	79.485.812	92.961.365	92.961.365	Due to related parties
Total	1.190.290.322	1.190.290.322	1.023.139.895	1.023.139.895	999.022.917	999.022.917	968.206.247	968.206.247	Total

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

Instrumen keuangan jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Instrumen keuangan ini mendekati jumlah tercatatnya sebagian besar karena jatuh temponya dalam jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

Instrumen keuangan jangka panjang yang tidak dikuotasikan dalam pasar aktif (piutang pihak berelasi, utang pihak berelasi, pinjaman jangka panjang dan liabilitas sewa).

Instrumen keuangan ini dicatat berdasarkan nilai nominal karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari instrumen keuangan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran meskipun tidak diharapkan dapat ditagih dalam waktu dua belas (12) bulan setelah akhir periode pelaporan.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities

Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash, trade receivables, other receivables, restricted fund, trade payables, other payables and accrued expenses).

The fair values of these financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.

Long-term financial assets and liabilities

Long-term financial instruments not quoted on an active market (due from related parties, due to related parties, long-term loans and lease liabilities).

These financial instruments are carried at their nominal amounts since their fair value cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair value of these financial instruments because there is no repayment schedule although they are not expected to be collected within twelve (12) months from the end of the reporting period.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko Keuangan

Grup dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Tujuan pengelolaan risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

Rincian lebih lanjut mengenai kebijakan risiko manajemen Grup ini ditetapkan di bawah ini:

a. Risiko kredit

Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

	31 Agustus/ August 31, 2023	31 Desember/December 31, 2022	2021	2020	
Kas di bank	5.860.439	36.326.439	13.376.931	677.049	Cash in banks
Piutang usaha - neto	233.365.376	168.860.767	141.708.750	11.767.968	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	78.147	719.486	-	-	Other receivables - net
Dana yang dibatasi penggunaannya	6.503.484	-	-	-	Restricted fund
Piutang pihak berelasi - neto	808.770.448	752.872.142	649.133.827	575.294.684	Due from related parties - net
Total	1.054.577.894	958.778.834	804.219.508	587.739.701	Total

Grup mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif, membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Agustus/August 31, 2023					
	Belum Jatuh Tempo ataupun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Past Due But Not Impaired			Total/ Total	
		Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Months	6 Bulan - 1 Tahun/ 6 Months - 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ Over 1 year		
Kas di bank	5.860.439	-	-	-	5.860.439	Cash in banks
Piutang usaha - neto	168.111.138	49.031.530	16.222.708	-	233.365.376	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	78.147	-	-	-	78.147	Other receivables - net
Dana yang dibatasi penggunaannya	6.503.484	-	-	-	6.503.484	Restricted fund
Piutang pihak berelasi - neto	808.770.448	-	-	-	808.770.448	Due from related parties - net
Total	989.323.656	49.031.530	16.222.708	-	1.054.577.894	Total

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Financial Risks

The Group is affected by various financial risks, which include credit risk, liquidity risk and market risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its financial performance.

Further details regarding the Group's financial risk management policies are set out below:

a. Credit risk

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal to the carrying amounts of its financial assets, as follows:

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring, limiting the aggregate risk to any individual trade receivables due to its diverse customer base.

The analysis of the age of financial assets that are neither past due nor impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired is as follows:

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

31 Desember/December 31, 2022						
	Belum Jatuh Tempo ataupun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Past Due But Not Impaired			Total/ Total	
		Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Months	6 Bulan - 1 Tahun/ 6 Months - 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ Over 1 year		
Kas di bank	36.326.439	-	-	-	36.326.439	Cash in banks
Piutang usaha - neto	146.277.298	22.583.469	-	-	168.860.767	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto	719.486	-	-	-	719.486	Other receivables - net
Piutang pihak berelasi - neto	752.872.142	-	-	-	752.872.142	Due from related parties - net
Total	936.195.365	22.583.469	-	-	958.778.834	Total
31 Desember/December 31, 2021						
	Belum Jatuh Tempo ataupun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Past Due But Not Impaired			Total/ Total	
		Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Months	6 Bulan - 1 Tahun/ 6 Months - 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ Over 1 year		
Kas di bank	13.376.931	-	-	-	13.376.931	Cash in banks
Piutang usaha - neto	136.100.466	5.608.284	-	-	141.708.750	Trade receivables - net
Piutang pihak berelasi - neto	649.133.827	-	-	-	649.133.827	Due from related parties - net
Total	798.611.224	5.608.284	-	-	804.219.508	Total
31 Desember/December 31, 2020						
	Belum Jatuh Tempo ataupun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai/Past Due But Not Impaired			Total/ Total	
		Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Months	6 Bulan - 1 Tahun/ 6 Months - 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ Over 1 year		
Kas di bank	677.049	-	-	-	677.049	Cash in banks
Piutang usaha - neto	11.767.968	-	-	-	11.767.968	Trade receivables - net
Piutang pihak berelasi - neto	575.294.684	-	-	-	575.294.684	Due from related parties - net
Total	587.739.701	-	-	-	587.739.701	Total

b. Risiko likuiditas

Grup mengawasi proyeksi kebutuhan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sambil tetap menjaga ruang batas yang memadai sehingga tidak melanggar batas pinjaman atau persyaratan pinjaman (jika berlaku) pada setiap fasilitas pinjaman. Proyeksi semacam itu dipertimbangkan, namun tidak terbatas pada, pemenuhan target internal dan, jika ada, regulasi eksternal dan persyaratan hukum.

Tabel di bawah ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Grup kedalam kelompok jatuh tempo yang sesuai berdasarkan jatuh tempo kontraktual, yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel juga termasuk arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (yang terdiri dari saldo pokok terutang ditambah pembayaran bunga yang akan datang, jika ada) yang mungkin berbeda dengan jumlah tercatat liabilitas keuangan pada tanggal pelaporan.

b. Liquidity risk

The Group monitors rolling forecasts of its liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom so that it does not breach borrowing limits or covenants (where applicable) on any of its borrowing facilities. Such forecasting takes into consideration, but is not limited to, compliance with internal targets and, where applicable, external regulatory and legal requirements.

The following tables analyze the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities, which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table also include contractual undiscounted cash flows (consisting of outstanding principal balance plus future interest payments, if any) which may differ to the carrying amounts of the financial liabilities at the reporting date.

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (Continued)**

31 Agustus/August 31, 2023					
Nilai Arus Kas Tidak Terdiskonto Kontraktual/ Contractual Undiscounted Cash Flows					
		Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts				
Utang usaha	75.052.853	75.052.853	-	-	Trade payables
Beban akrual	4.779.011	4.779.011	-	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	2.000.636	2.000.636	-	-	Other payables
Pinjaman jangka panjang	985.219.252	174.107.263	811.111.989	-	Long-term loans
Liabilitas sewa	40.808.742	8.978.008	18.555.740	55.744.444	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	82.429.828	-	82.429.828	-	Due to related parties
Total	1.190.290.322	264.917.771	912.097.557	55.744.444	Total
31 Desember/December 31, 2022					
Nilai Arus Kas Tidak Terdiskonto Kontraktual/ Contractual Undiscounted Cash Flows					
		Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts				
Utang usaha	27.218.264	27.218.264	-	-	Trade payables
Beban akrual	8.911.426	8.911.426	-	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	3.383.302	3.383.302	-	-	Other payables
Pinjaman jangka panjang	911.491.717	902.140.545	9.351.172	-	Long-term loans
Liabilitas sewa	11.049.186	7.158.183	4.879.970	-	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	61.086.000	-	61.086.000	-	Due to related parties
Total	1.023.139.895	948.811.720	75.317.142	-	Total
31 Desember/December 31, 2021					
Nilai Arus Kas Tidak Terdiskonto Kontraktual/ Contractual Undiscounted Cash Flows					
		Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts				
Utang usaha	21.314.124	21.314.124	-	-	Trade payables
Beban akrual	7.069.728	7.069.728	-	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	3.062.223	3.062.223	-	-	Other payables
Pinjaman jangka panjang	867.262.647	248.039.768	619.222.879	-	Long-term loans
Liabilitas sewa	20.828.383	11.815.338	11.440.749	-	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	79.485.812	-	79.485.812	-	Due to related parties
Total	999.022.917	291.301.181	710.149.440	-	Total

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (Continued)**

31 Desember/December 31, 2020					
Nilai Arus Kas Tidak Terdiskonto Kontraktual/ Contractual Undiscounted Cash Flows					
		Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year			
Utang usaha	24.365.749	24.365.749	-	-	Trade payables
Beban akrual	10.086.817	10.086.817	-	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	7.370.522	7.370.522	-	-	Other payables
Pinjaman jangka panjang	823.506.426	104.142.433	719.363.993	-	Long-term loans
Liabilitas sewa	9.915.368	7.147.500	3.573.750	-	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	92.961.365	-	92.961.365	-	Due to related parties
Total	968.206.247	153.113.021	815.899.108	-	Total

c. Risiko pasar

Risiko Kurs Mata Uang Asing

Grup terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS, Euro Eropa dan Dolar Singapura yang timbul dari, antara lain, kas, piutang pihak berelasi, utang usaha, utang lain-lain, pinjaman jangka panjang dan utang pihak berelasi. Grup secara teratur memantau transaksi dalam mata uang selain Rupiah dan mempertahankannya pada tingkat responsif terhadap nilai tukar saat ini untuk meminimalisir risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset dan liabilitas moneter Grup dalam Dolar AS, Euro Eropa dan Dolar Singapura adalah sebagai berikut:

c. Market risk

Foreign Exchange Risk

The Group is exposed to changes in foreign currency exchange rates primarily from certain transactions, assets and liabilities mainly in US Dollar, European Euro and Singapore Dollar that arise from, among others, cash, due from related parties, trade payables, other payables, long-term loans and due to related parties. The Group regularly monitors its transactions in currencies other than Rupiah and maintains them at a level responsive to current exchange rates to minimize such risk.

As of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's monetary assets and liabilities in US Dollar, European Euro and Singapore Dollar are as follows:

31 Agustus/August 31, 2023			
	Dalam Mata Uang Asing (Angka Penuh)/ In Foreign Currencies (Full Amount)	Setara dengan Ribuan Rupiah/ Equivalent in Thousands Rupiah	
Aset			Assets
Kas			Cash
Dolar AS	15.229	232.075	US Dollar
Dana yang dibatasi penggunaannya			Resticted Fund
Dolar AS	391.659	5.968.496	US Dollar

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (Continued)

31 Agustus/August 31, 2023			
	Dalam Mata Uang Asing (Angka Penuh)/ In Foreign Currencies (Full Amount)	Setara dengan Ribuan Rupiah/ Equivalent in Thousands Rupiah	
Piutang pihak berelasi - neto			Due from related parties - net
Dolar AS	39.098.669	595.824.625	US Dollar
Total Aset		602.025.196	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Dolar AS	994.291	15.152.014	US Dollar
Pinjaman jangka panjang			Long-term loans
Dolar AS	61.375.588	935.302.589	US Dollar
Euro Eropa	1.166.153	19.293.114	European Euro
Utang pihak berelasi			Due to related parties
Dolar AS	1.935.624	29.496.989	US Dollar
Dolar Singapura	574.246	6.469.005	Singapore Dollar
Total Liabilitas		1.005.713.711	Total Liabilities
Liabilitas - Neto		(403.688.515)	Liabilities - Net

31 Desember/December 31, 2022			
	Dalam Mata Uang Asing (Angka Penuh)/ In Foreign Currencies (Full Amount)	Setara dengan Ribuan Rupiah/ Equivalent in Thousands Rupiah	
Aset			Assets
Kas			Cash
Dolar AS	980	15.416	US Dollar
Piutang pihak berelasi - neto			Due from related parties - net
Dolar AS	35.156.472	553.046.468	US Dollar
Total Aset		553.061.884	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Dolar AS	7.696	121.066	US Dollar
Utang lain-lain			Other payable
Dolar AS	202.447	3.184.694	US Dollar

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (Continued)**

31 Desember/December 31, 2022			
	Dalam Mata Uang Asing (Angka Penuh)/ In Foreign Currencies (Full Amount)	Setara dengan Ribuan Rupiah/ Equivalent in Thousands Rupiah	
Pinjaman jangka panjang			Long-term loans
Dolar AS	55.883.280	879.099.889	US Dollar
Euro Eropa	1.938.121	32.391.828	European Euro
Utang pihak berelasi			Due to related parties
Dolar AS	1.860.624	29.269.492	US Dollar
Dolar Singapura	574.246	6.695.180	Singapore Dollar
Total Liabilitas		950.762.149	Total Liabilities
Liabilitas - Neto		(397.700.265)	Liabilities - Net

31 Desember/December 31, 2021			
	Dalam Mata Uang Asing (Angka Penuh)/ In Foreign Currencies (Full Amount)	Setara dengan Ribuan Rupiah/ Equivalent in Thousands Rupiah	
Aset			Assets
Kas			Cash
Dolar AS	1.225	17.483	US Dollar
Piutang pihak berelasi - neto			Due from related parties - net
Dolar AS	29.216.442	416.889.569	US Dollar
Total Aset		416.907.052	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Dolar AS	8.571	122.382	US Dollar
Utang lain-lain			Other payable
Dolar AS	204.108	2.912.422	US Dollar
Pinjaman jangka panjang			Long-term loans
Dolar AS	57.100.294	814.764.386	US Dollar
Euro Eropa	3.255.302	52.498.261	European Euro
Utang pihak berelasi			Due to related parties
Dolar AS	1.749.226	24.959.729	US Dollar
Dolar Singapura	574.246	5.940.505	Singapore Dollar
Total Liabilitas		901.197.685	Total Liabilities
Liabilitas - Neto		(484.290.633)	Liabilities - Net

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (Continued)**

		31 Desember/December 31, 2020		
		Dalam Mata Uang Asing (Angka Penuh)/ In Foreign Currencies (Full Amount)	Setara dengan Ribuan Rupiah/ Equivalent in Thousands Rupiah	
Aset				Assets
Kas				Cash
Dolar AS	1.902		26.833	US Dollar
Piutang pihak berelasi - neto				Due from related parties - net
Dolar AS	40.786.578		575.294.684	US Dollar
Total Aset			575.321.517	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha				Trade payables
Dolar AS	141.447		1.995.115	US Dollar
Pinjaman jangka panjang				Long-term loans
Dolar AS	55.061.292		776.639.530	US Dollar
Euro Eropa	2.704.360		46.866.896	European Euro
Utang pihak berelasi				Due to related parties
Dolar AS	1.635.625		23.070.491	US Dollar
Dolar Singapura	574.246		6.155.296	Singapore Dollar
Total Liabilitas			854.727.328	Total Liabilities
Liabilitas - Neto			(279.405.811)	Liabilities - Net

Berdasarkan estimasi manajemen, sampai dengan tanggal pelaporan Grup berikutnya, kurs Rupiah terhadap Dolar AS, Euro Eropa dan Dolar Singapura dapat melemah/menguat sebesar 5% dibandingkan kurs pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Jika, pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 and 2020, Rupiah melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS, Euro Eropa dan Dolar Singapura dengan seluruh variabel lain tetap, maka dampak terhadap laba rugi dan ekuitas, setelah pajak pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing akan berupa penurunan/peningkatan sekitar Rp20,18 miliar, Rp19,89 miliar, Rp24,21 miliar dan Rp13,97 miliar.

Based on management's estimate, until the Group's next reporting date, the exchange rate of Rupiah against US Dollar, European Euro and Singapore Dollar may weaken/strengthen by 5%, compared to the exchange rate as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

If, as of August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar, European Euro and Singapore Dollar with all other variables held constant, the effect on August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 profit or loss and equity, net of tax would have been a decrease/an increase of approximately Rp20.18 billion, Rp19.89 billion, Rp24.21 billion and Rp13.97 billion, respectively.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Kebijakan Grup adalah untuk memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan yang tersedia tanpa meningkatkan eksposur mata uang asing dengan mengelola biaya bunga menggunakan campuran utang dengan suku bunga tetap dan variabel dan pinjaman jangka panjang. Eksposur Grup untuk risiko tingkat suku bunga adalah rendah karena Grup tidak memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang. Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laba rugi atas kenaikan/penurunan tingkat suku bunga.

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Grup adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham.

Grup mengelola struktur modalnya dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Grup akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

35. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas signifikan yang tidak memengaruhi arus kas:

	31 Agustus/August 31,		31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Kenaikan pinjaman jangka panjang dari kapitalisasi beban bunga	122.907.702	114.778.377	175.375.099	166.348.082	92.531.498	Increase in long-term loans from capitalization interest expense
Penambahan modal disetor melalui kompensasi utang	91.779.744	-	-	-	-	Additional of paid-in capital through compensate payable
Penambahan aset tetap dari utang	86.141.932	-	-	-	-	Additional of fixed asset from payable
Kenaikan piutang pihak berelasi dari kapitalisasi pendapatan bunga	81.728.150	91.192.022	135.839.388	106.283.299	66.483.732	Increase in due from related parties from capitalization interest income

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

Interest Rate Risk

The Group's policy is to obtain the most favorable interest rates available without increasing its foreign currency exposure by managing its interest cost using a mixture of fixed and variable rate debts and long-term borrowings. The Group's exposure to interest rate risk is low since the Group does not have floating interest-bearing loans. There is no significant impact in profit or loss on the increase/decrease in interest rates.

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

35. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Significant activities not affecting cash flows:

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

35. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (Lanjutan)

**35. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION
(Continued)**

	31 Agustus/August 31,		31 Desember/December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Penambahan aset tetap dari utang pihak berelasi	37.201.534	-	-	-	-	Additional of fixed asset from due to related parties
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	33.321.494	-	-	16.936.494	12.903.831	Additional of right-of-use asset through lease liabilities
Penambahan aset tetap dari piutang pihak berelasi	17.802.484	-	-	-	-	Additional of fixed asset from due from related parties
Penambahan pinjaman jangka panjang dari utang pihak berelasi	15.859.029	-	-	-	-	Additional of loan-term loans from due to related parties
Penambahan uang muka pembelian aset tetap dari utang	14.357.812	-	-	-	-	Additional of advance for purchase of fixed asset from payable
Penambahan modal saham melalui kompensasi utang	8.720.000	-	-	-	-	Additional of share capital through compensate payable
Kenaikan utang pihak berelasi dari kapitalisasi beban bunga	1.126.996	1.115.517	1.677.796	1.612.782	1.645.341	Increase in due to related parties from capitalization interest expense
Penambahan aset tetap dari pinjaman jangka panjang	-	-	-	22.155.131	46.866.897	Additional of fixed asset from long-term loans

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

Changes in liabilities arising from financial activities:

31 Agustus/August 31, 2023						
Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1,	Arus kas-neto/ Cash flows-net	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Saldo 31 Agustus/ Balance as of August 31,		
Pinjaman jangka panjang	911.491.717	119.752.087	4.023.600	(50.048.152)	985.219.252	Long-term loans
Liabilitas sewa	11.049.186	(3.561.938)	-	33.321.494	40.808.742	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	61.086.000	-	(1.125.673)	22.469.501	82.429.828	Due to related parties
Total	983.626.903	116.190.149	2.897.927	5.742.843	1.108.457.822	Total

31 Agustus/August 31, 2022						
Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1,	Arus kas-neto/ Cash flows-net	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Saldo 31 Agustus/ Balance as of August 31,		
Pinjaman jangka panjang	867.262.647	(15.598.309)	28.738.938	(4.145.537)	876.257.739	Long-term loans
Liabilitas sewa	20.828.383	(8.966.641)	-	-	11.861.742	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	79.485.812	(11.100.000)	1.003.629	1.115.517	70.504.958	Due to related parties
Total	967.576.842	(35.664.950)	29.742.567	(3.030.020)	958.624.439	Total

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020 (DIAUDIT), SERTA UNTUK PERIODE
DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 (DIAUDIT)
DAN 2022 (TIDAK DIAUDIT), SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 (DIAUDIT)
(Saldo dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
AUGUST 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020 (AUDITED), AND
FOR THE EIGHT-MONTH PERIODS ENDED
AUGUST 31, 2023 (AUDITED) AND 2022
(UNAUDITED), AND
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 (AUDITED)
(Amounts in tables are expressed in thousands of
Rupiah, unless otherwise stated)**

35. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (Lanjutan)

**35. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION
(Continued)**

31 Desember/December 31, 2022						
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1,	Arus kas-neto/ Cash flows-net	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31,	
Pinjaman jangka panjang	867.262.647	(20.710.259)	86.335.024	(21.395.695)	911.491.717	Long-term loans
Liabilitas sewa	20.828.383	(9.779.197)	-	-	11.049.186	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	79.485.812	(23.464.250)	3.386.642	1.677.796	61.086.000	Due to related parties
Total	967.576.842	(53.953.706)	89.721.666	(19.717.899)	983.626.903	Total

31 Desember/December 31, 2021						
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1,	Arus kas-neto/ Cash flows-net	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31,	
Pinjaman jangka panjang	823.506.426	(12.861.128)	(42.457.072)	99.074.421	867.262.647	Long-term loans
Liabilitas sewa	9.915.368	(6.023.479)	-	16.936.494	20.828.383	Lease liabilities
Utang pihak berelasi	92.961.365	(15.150.000)	61.665	1.612.782	79.485.812	Due to related parties
Total	926.383.159	(34.034.607)	(42.395.407)	117.623.697	967.576.842	Total

31 Desember/December 31, 2020						
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1,	Arus kas-neto/ Cash flows-net	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31,	
Pinjaman jangka panjang	-	711.841.654	(23.292.682)	134.957.454	823.506.426	Long-term loans
Liabilitas sewa	-	(2.988.463)	-	12.903.831	9.915.368	Lease liability
Utang pihak berelasi	96.972.213	(6.051.747)	395.558	1.645.341	92.961.365	Due to related party
Total	96.972.213	702.801.444	(22.897.124)	149.506.626	926.383.159	Total

36. HAL LAIN

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus Corona ("COVID-19") telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini juga berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perusahaan di beberapa aspek.

Perusahaan telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perusahaan, termasuk proyeksi finansial dan rencana likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat berdampak buruk secara signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

36. OTHER MATTER

Since early 2020, the Coronavirus disease ("COVID-19") pandemic has spread across many countries, including Indonesia. In early March 2020, the Indonesia Government officially announced the confirmed case of COVID-19 in Indonesia. Subsequently, this pandemic has also affected the business and economic activities of the Company to some extent.

The Company has assessed the potential impact of COVID-19 to its business and operation, as well as its financial projection and liquidity plan. Based on this, the Company does not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Company's business and operation or may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. The Company will continuously monitor the development of the COVID-19 pandemic and evaluate the impact.

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 24 Oktober 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65, Notaris Aulia Taufani S.H., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179146 tanggal 30 Oktober 2023, PT Ancara Logistics Indonesia menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Nalinkant Amratlal Rathod
Aninditha Anestya Bakrie
Agus Suharyono

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Faisal Mohamad Nur
Rahul Nalin Rathod
Vishal Manharlal Parekh
Munawir
Aulia

- b. Pada tanggal 24 Oktober 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 66, Notaris Aulia Taufani S.H., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No AHU-0066247.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, PT Ancara Logistics Indonesia menyetujui:

1. Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perusahaan dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp5 (lima Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:200.000, dan dengan demikian, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perusahaan.
2. Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Perusahaan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.986.000.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta) saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal per saham sebesar Rp5 (lima Rupiah) dan mencatat seluruh saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On October 24, 2023, based on Deed of Shareholder Decision Making No. 65 by Notary Aulia Taufani S.H., which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Acceptance of Notice of Company Data Changes No. AHU-AH.01.09-0179146 dated October 30, 2023, PT Ancara Logistics Indonesia decided on appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners with the following composition:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director
Director

- b. On October 24, 2023, based on Deed of Shareholder Decision Making No. 66 by Notary Aulia Taufani S.H., which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Letter of Approval for the Amendment of the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0066247.AH.01.02 Tahun 2023 dated October 30, 2023, PT Ancara Logistics Indonesia decided on:

1. Conduct the split of the nominal value of shares (*stock split*) of the Company's shares from Rp1,000,000 (one million Rupiah) per share to Rp5 (five Rupiah) per share or with a ratio of 1:200,000, and thereby, amend the provision of Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company's articles of association.
2. The proposed Initial Public Offering (IPO) of the Company through issuance of shares in the maximum amount of 2,986,000,000 (two billion nine hundred eighty six million) new shares issued from the Company's portfolio or in the maximum amount of 20.00% (twenty percent) from all issued and paid-up capital after the IPO with a nominal value per share of Rp5 (five Rupiah) and list all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

3. Perubahan jenis Perusahaan yang semula Perusahaan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sejak tanggal Keputusan Sirkuler di atas.
 4. Memberikan program alokasi saham untuk karyawan Perusahaan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 29.860.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu) saham dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana.
 5. Pengeluaran saham baru dalam rangka Program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 716.640.000 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan terbatas tertutup (PT Ancara Logistics Indonesia) menjadi Perusahaan terbatas terbuka (PT Ancara Logistics Indonesia Tbk).
- c. Pada tanggal 26 Oktober 2023, MCT, Entitas Anak, menerima surat persetujuan dan pengecualian atas perjanjian kredit dengan OCP Asia (Singapore) Pte. Limited sehubungan dengan klausul ikrar negatif terkait perubahan saham (penerbitan, pembelian kembali, pembayaran kembali, pembatalan, penukaran dan penerbitan hak suara), subordinasi atas saham, pembayaran dividen baik sebelum dan sesudah pembiayaan ekuitas, hipotek atas kapal-kapal dan kepemilikan saham atas PT Graha Adika Niaga dan Solomed Capital Pte. Ltd (Catatan 19).
- d. Pada tanggal 1 November 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5, Notaris Aulia Taufani S.H., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0219764.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 2 November 2023, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk menyetujui:

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

3. The change of type of company from a Limited Liability Company with Foreign Investment (PMA) facilities to Domestic Investment (PMDN), as of the date of the above Circular Resolution.
 4. Provide a share allocation program for the Company's employee (*Employee Stock Allocation*) in the amount of up to 29,860,000 (twenty nine million eight hundred sixty thousand) shares of the number of shares offered by the Company through an Initial Public Offering.
 5. The issuance of new shares in relation to Management and Employee Stock Option Program (MESOP) Program in the amount of up to 716,640,000 (seven hundred sixteen million six hundred forty thousand) shares, with due respect to the IDX regulations and prevailing laws and regulations.
 6. The change of status of the Company from a private limited liability company (PT Ancara Logistics Indonesia) to become a public limited liability company (PT Ancara Logistics Indonesia Tbk).
- c. On October 26, 2023, MCT, the Subsidiary, received letter of consent and waiver to the credit agreement with OCP Asia (Singapore) Pte. Limited in connection with negative pledge clause regarding changes of shares (issuance, repurchase, repayment, cancellation, redemption and issuance of any voting capital), subordination of shares, payment of dividend pre- and post equity fundraising, hypothecs over vessels and ownership of PT Graha Adika Niaga and Solomed Capital Pte. Ltd (Note 19).
- d. On November 1, 2023, based on Deed of Shareholder Decision Making No. 5 by Notary Aulia Taufani S.H., which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Letter of Approval for the Amendment of the Articles of Association of a Limited Liability Company No. AHU-0219764.AH.01.11 Tahun 2023 dated November 2, 2023, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk decided on:

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

1. Pencabutan keputusan Para Pemegang Saham sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP), sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 66 tanggal 24 Oktober 2023, Notaris Aulia Taufani S.H.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp59.720.000.000 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) terbagi menjadi 11.944.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta) saham masing-masing bernilai nominal Rp5 (lima Rupiah) menjadi Rp63.303.200.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi menjadi 12.660.640.000 (dua belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu) saham yang masing-masing memiliki nominal Rp5 (lima Rupiah)
3. Penerbitan Saham Baru yang akan diambil bagian dan disetor penuh oleh:
 - a. Nalinkant Amratlal Rathod sejumlah 333.347.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu) saham dalam Perseroan dengan masing-masing memiliki nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) dengan total nilai nominal sebesar Rp1.666.735.000 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)
 - b. Aninditha Anestya Bakrie sejumlah 383.293.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan dengan masing-masing memiliki nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) dengan total nilai nominal sebesar Rp1.916.465.000 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

1. The revocation of the Shareholders' Resolutions related to the issuance of new shares in the context of the *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP), as stated in Deed of Shareholder Decision Making No. 66 dated October 24, 2023, executed by Notary Aulia Taufani, S.H.
2. The increase in the Company issued and fully paid capital of the Company amounted to Rp59,720,000,000 (fifty nine billion seven hundred twenty million Rupiah) divided into 11,944,000,000 (eleven billion nine hundred forty four million) shares, each with a nominal value of Rp5 (five Rupiah), to Rp63,303,200,000 (sixty three billion three hundred three million two hundred thousand Rupiah) divided into 12,660,640,000 (twelve billion six hundred sixty million six hundred forty thousand) shares, each with a nominal value of Rp5 (five Rupiah).
3. Issuance of New Shares to be taken and fully paid by:
 - a. Nalinkant Amratlal Rathod for a total of 333,347,000 (three hundred thirty three million three hundred forty seven thousand) shares in the Company each with a nominal value of Rp5 (five Rupiah) with a total nominal value of Rp1,666,735,000 (one billion six hundred sixty six million seven hundred thirty five thousand Rupiah)
 - b. Aninditha Anestya Bakrie for a total of 383,293,000 (three hundred eighty three million two hundred ninety three thousand) shares in the Company each with a nominal value of Rp5 (five Rupiah) with a total nominal value of Rp1,916,465,000 (one billion nine hundred sixteen million four hundred sixty five thousand Rupiah)

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

4. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar menjadi Modal dasar ditempatkan dan disetor sebanyak 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) atau sejumlah 12.660.640.000 (dua belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.303.200.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu Rupiah)
5. Susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Angka Penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (Full Amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount (Rp)	Shareholders
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	41,09	26.010.000	PT Graha Adika Niaga
Solomed Capital Pte. Ltd	4.998.000.000	39,48	24.990.000	Solomed Capital Pte. Ltd
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	13,77	8.720.000	PT Borneo Logistik Indonesia
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	3,03	1.916.465	Aninditha Anestya Bakrie
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	2,63	1.666.735	Nalinkant Amratlal Rathod
Total	12.660.640.000	100,00	63.303.200	Total

6. Perubahan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Perusahaan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya menjadi sebesar 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal per saham sebesar Rp5 (lima Rupiah) dan mencatat seluruh saham Perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI).

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

4. The amendment to Article 4, paragraph (2) of the articles of association changes the Authorized and Issued Capital to an amount equal to 26.5% (twenty six point five percent) or a total of 12,660,640,000 (twelve billion six hundred sixty million six hundred forty thousand) shares, or with a total nominal value of Rp63,303,200,000 (sixty three billion three hundred three million two hundred thousand Indonesian Rupiah).
5. The composition of the Company Shareholder is as follows:

6. Changes on the proposed Initial Public Offering (IPO) of the Company through issuance of shares in the maximum amount of 3,165,160,000 (three billion one hundred sixty five million one hundred sixty thousand) new shares issued from the Company's portfolio or in the maximum amount of 20,00% (twenty percent) from all issued and fully paid capital after the IPO with a nominal value per share of Rp5 (five rupiah) and list all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

- e. Pada tanggal 2 November 2023, berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ("ALI") dan PT Mahakam Coal Terminal ("MCT"), Entitas Anak, Perusahaan setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada MCT dari sebagian dana yang diterima dari hasil IPO sebesar Rp652,00 miliar. Jangka waktu pinjaman fasilitas ini adalah lima (5) tahun terhitung sejak tanggal pencairan. Pinjaman akan dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Pinjaman ini wajib digunakan oleh MCT untuk melunasi sebagian utang berdasarkan Pejanjian Kredit sebesar USD62,00 juta kepada OCP Asia (Singapore) Pte. Limited (Catatan 19).
- f. Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan mengeluarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan Sirkuler") yang menyetujui:
 1. Memutuskan, untuk menyetujui Pengambilan Keputusan Sirkuler, tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara fisik dan mengesampingkan segala prosedur lainnya yang berkaitan.
 2. Memutuskan, untuk menegaskan bahwa pengendali Perseroan adalah Aburizal Bakrie sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- g. Pada tanggal 4 Desember 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13, Notaris Aulia Taufani S.H., para pemegang saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk menyetujui:
 1. Memutuskan, untuk menyetujui Pengambilan Keputusan Pemegang Saham, tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara fisik dan mengesampingkan segala prosedur lainnya yang berkaitan.
 2. Memutuskan, untuk menegaskan bahwa pengendali Perseroan adalah Tuan Aburizal Bakrie sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

- e. On November 2, 2023, based on the Loan Agreement between PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ("ALI") and PT Mahakam Coal Terminal ("MCT"), the Subsidiary, the Company agrees to provide a loan facility to MCT from a portion of the funds received from the IPO amounting to Rp652.00 billion. The term of this loan facility is five (5) years from the disbursement date. The loan will bear an interest rate of 10.5% per annum. This loan must be used by MCT to partially repay the debt under the Credit Agreement of USD62.00 million to OCP Asia (Singapore) Pte. Limited (Note 19).
- f. On December 1, 2023, the Company issued Circular Resolution of The Shareholders In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Circular Resolution") approving:
 1. Resolved, to approve the Circular Resolution, without convening a physical Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and to waive any other procedures related thereto.
 2. Resolved, to affirm whereas the controller of the Company is Mr. Aburizal Bakrie as referred to in OJK Regulation No.3/POJK.04/2021 on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.
- g. On December 4, 2023, based on Deed of Shareholder Decision Making No. 13 by Notary Aula Taufani S.H., the shareholders of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk decided on:
 1. Resolved, to approve the Shareholders' Resolution, without convening a physical Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and to waive any other procedures related thereto.
 2. Resolved, to affirm whereas the controller of the Company is Mr. Aburizal Bakrie as referred to in OJK Regulation No.3/POJK.04/2021 on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

Dan oleh karenanya, menggantikan dan mencabut keputusan sehubungan dengan Pengendali Perseroan sebagaimana termuat pada Keputusan No. 10 Keputusan Sirkuler tanggal 1 November 2023 dan Keputusan No.10 Akta No. 5 tanggal 1 November 2023.

- h. Pada tanggal 11 Desember 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28, Notaris Aulia Taufani S.H., para pemegang saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk menyetujui:
1. Memutuskan, untuk menyetujui Pengambilan Keputusan Pemegang Saham, tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara fisik dan mengesampingkan segala prosedur lainnya yang berkaitan.
 2. Memutuskan, untuk menegaskan kembali bahwa pengendali Perseroan adalah Tuan Aburizal Bakrie dan Tuan Nalinkant Amratlal Rathod sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penetapan diatas, maka keputusan mengenai penegasan Pengendali Perseroan adalah Tuan Aburizal Bakrie sebagaimana termuat pada Keputusan No. 2 Keputusan Sirkuler tanggal 1 Desember 2023 dan Keputusan No. 2 Akta No.13 tanggal 4 Desember 2023 digantikan dan dicabut dengan Keputusan Pemegang Saham. Maka keputusan terkait dengan Pengendali Perseroan sebagaimana tercantum pada Keputusan No.10 pada Keputusan Sirkuler tanggal 1 November 2023 dan Keputusan No.10 Akta No. 5 tanggal 1 November 2023 dinyatakan berlaku kembali dan ditegaskan kembali melalui Keputusan Pemegang Saham.

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

Therefore, to replace and revoke the resolution in relation to the controller of the Company as contain in Resolution No. 10 of the Circular Resolution on November 1, 2023 and Resolution No. 10 of Deed No. 5 on November 1, 2023.

- h. On December 11, 2023, based on Deed of Shareholder Decision Making No. 28 by Notary Aula Taufani S.H., the shareholders of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk decided on:
1. Resolved, to approve the Shareholders' Resolution, without convening a physical Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and to waive any other procedures related thereto.
 2. Resolved, to reaffirmed whereas the controller of the Company are Mr. Aburizal Bakrie and Mr. Nalinkant Amratlal Rathod as referred to in OJK Regulation No.3/POJK.04/2021 on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.

In relation to the stated above, the decision regarding the affirmation of the Company Controller as Mr. Aburizal Bakrie as contain in Resolution No. 2 of the Circular Resolution on December 1, 2023 and Resolution No. 2 of Deed No. 13 on December 4, 2023 is replace and revoke by the Shareholder's Resolution. Therefore, the decision related to the Company Controller as stipulated in Resolution No. 10 of the Circular Resolution dated November 1, 2023 and Resolution No. 10 of Deed No. 5 dated November 1, 2023 is declared reinstated and reaffirmed through the Shareholders' Resolution..

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

- i. Pada tanggal 12 Desember 2023, Perusahaan mengeluarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan Sirkuler") yang menyetujui:
 1. Memutuskan, untuk menyetujui Pengambilan Keputusan Sirkuler, tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara fisik dan mengesampingkan segala prosedur lainnya yang berkaitan.
 2. Memutuskan, untuk menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:
 - a. Rp6.330.320.000 akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT.
 - b. Sisa laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba (*retained earnings*) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
 - c. Sehubungan dengan huruf b di atas, Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

Apabila untuk tahun buku Perseroan selanjutnya terdapat laba bersih, Perseroan akan menyisihkan sebagian dari laba bersih tersebut untuk memenuhi sisa cadangan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 70 UUPT.

38. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BELUM DITERAPKAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan amendemen standar akuntansi yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024. Namun, penerapan dini diperkenankan.

Amendemen PSAK yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan; dan
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik.

**37. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

- i. On December 12, 2023, the Company issued Circular Resolution of The Shareholders In Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Circular Resolution") approving:
 1. Resolved, to approve the adoption of the Circular Resolution, without convening a physical Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and to waive any other procedures related thereto.
 2. Resolved, to determine the use of net income for the financial year ending December 31, 2022, as follows:
 - a. Rp6,330,320,000 will be recorded as reserve fund to fulfill the provisions of Article 70 of the Company Law.
 - b. The remainder of the Company's net income will be recorded as retained earnings to strengthen the Company's capital structure.
 - c. In connection with letter b above, the Company does not distribute dividends to the Company's Shareholders.

If for the next financial year of the Company there is a net income, the Company will set aside a portion of the net income to fulfill the remaining of mandatory reserve as referred to Article 70 of the Company Law.

38. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NOT YET ADOPTED

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued amendments to accounting standards which are not yet effective for annual periods beginning on January 1, 2024. However, earlier application is permitted.

The amendments to PSAK issued and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2024 are as follows:

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants; and
- Amendment to PSAK No. 73, "Leases" related to Lease Liability in a Sale and Leaseback.

**38. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG
BELUM DITERAPKAN (Lanjutan)**

Pernyataan baru PSAK yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif.

Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan SAK tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, Perusahaan dan Entitas Anak menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan posisi keuangan direvisi untuk mereklasifikasi penyajian kas di bank menjadi dana yang dibatasi penggunaannya, mereklasifikasi penyajian piutang lain-lain pihak berelasi di aset tidak lancar dan mereklasifikasi penyajian utang lain-lain pihak ketiga menjadi utang usaha pihak ketiga.
- b. Penyajian laporan arus kas direvisi pada bagian aktivitas operasi dan investasi.
- c. Menambahkan Catatan 1a terkait pengungkapan kegiatan usaha entitas anak.
- d. Menambahkan Catatan 1b terkait informasi entitas anak yang terdiri dari tanggal pendirian, anggaran dasar perubahan terakhir dan jumlah lembar saham.
- e. Menambahkan Catatan 1c terkait nama dan jabatan terkait corporate sekretaris, komite audit dan internal audit.

**38. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NOT YET
ADOPTED (Continued)**

The new PSAK and amendment to PSAK issued and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2025 are as follows:

- PSAK No. 74, "Insurance Contracts"; and
- Amendment to PSAK No. 74, "Insurance Contracts" regarding the Initial Application of PSAK No. 74 and PSAK No. 71 - Comparative Information.

The Group is evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of such SAK.

**39. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

In connection with the proposed Initial Public Offering Shares of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, the Company and Subsidiary have reissued their consolidated financial statements which comprise the consolidated statements of financial position as at August 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the eight-month period ended August 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, with changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as follows:

- a. Presentation of statements of financial position is revised to reclassification presentation of cash in banks into restricted fund, reclassification presentation of other receivables related parties in non current asset and reclassification presentation of other payables third parties into trade payables third parties.
- b. Presentation of statements of cash flows is revised to on operating and investing activities.
- c. Added Note 1a related to disclosure for subsidiary's business activity.
- d. Added Note 1b related to information on subsidiary consists of establishment date, the last article of association and total shares.
- e. Added Note 1c related to name and position of corporate secretary, audit committee and internal audit.

**39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (*Lanjutan*)**

- f. Catatan 7 direvisi terkait pengungkapan piutang lain-lain.
- g. Catatan 8 direvisi terkait pengungkapan persediaan.
- h. Menambahkan Catatan 9 terkait pengungkapan mengenai uang muka.
- i. Menambahkan Catatan 11 terkait dengan pengungkapan dana yang dibatasi penggunaannya.
- j. Menambahkan Catatan 13 terkait pengungkapan aset tetap.
- k. Menambahkan Catatan 15 terkait pengungkapan *goodwill*.
- l. Menambahkan Catatan 16 terkait pengungkapan utang usaha.
- m. Menambahkan Catatan 18 terkait pengungkapan utang lain-lain.
- n. Menambahkan Catatan 20 terkait pengungkapan liabilitas sewa.
- o. Menambahkan Catatan 24 terkait pengungkapan pendapatan.
- p. Catatan 28 direvisi untuk menambahkan pengungkapan terkait perpajakan.
- q. Catatan 29 direvisi untuk menambahkan pengungkapan terkait jenis transaksi pihak berelasi.
- r. Catatan 32 direvisi untuk menambahkan pengungkapan terkait perjanjian dan komitmen signifikan.
- s. Catatan 33 direvisi untuk menambahkan pengungkapan terkait dana yang dibatasi penggunaannya.
- t. Catatan 34 direvisi untuk menambahkan pengungkapan terkait dana yang dibatasi penggunaannya.
- u. Menambahkan Catatan 37 terkait pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan.

**39. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (*Continued*)**

- f. Revised Note 7 related to disclosure on other receivables.
- g. Revised Note 8 related to disclosure on inventory.
- h. Added Note 9 related to disclosure on advances.
- i. Added Note 11 related to disclosure on restricted fund.
- j. Added Note 13 related to disclosure on fixed assets.
- k. Added Note 15 related to disclosure on goodwill.
- l. Added Note 16 related to disclosure on trade payables.
- m. Added Note 18 related to disclosure on other payables.
- n. Added Note 20 related to disclosure on lease liabilities.
- o. Added Note 24 related to disclosure on revenues.
- p. Revised Note 28 to include additional disclosure on taxation.
- q. Revised Note 29 to include additional disclosure related to nature of transaction of related parties.
- r. Revised Note 32 to include additional disclosure related to significant agreements and commitments.
- s. Revised Note 33 to include additional disclosure related to restricted fund.
- t. Revised Note 34 to include additional disclosure related to restricted fund.
- u. Added Note 37 related to disclose events after the reporting period.